



Pemerintah
Kota Pekalongan



RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025-2029

RANCANGAN TEKNOKRATIK
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr wb

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga Dokumen *rancangan teknokratik* RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 dapat kami selesaikan.

Dokumen *rancangan teknokratik* RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ini disusun sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Pekalongan berdasarkan pada analisis data statistik serta informasi terkait lainnya. Kemudian data dan informasi tersebut dikonstruksikan menjadi isu strategis yang diasumsikan akan dihadapi selama periode pembangunan tahun 2025 - 2029. Proses konstruksinya dilaksanakan dengan menerapkan cara-cara berpikir ilmiah, yaitu proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dilihat secara waktu, penyusunan dokumen *rancangan teknokratik* RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ini dilaksanakan sebelum proses Pemilihan Kepala Daerah, sehingga belum mengkolaborasikan pendekatan politis yang berupa visi dan misi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Penyusunan dokumen *rancangan teknokratik* RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ini dilandasi pemikiran bahwa RPJMD yang akan disusun ini merupakan periode awal dan disusun bersamaan dengan dokumen RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2045. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan yang disajikan dalam dokumen ini berpedoman pada Rancangan Akhir RPJPD tersebut.

Secara umum, dokumen *rancangan teknokratik* RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ini disusun dalam 6 bab. Bab I membahas tentang Pendahuluan, Bab II membahas tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III membahas tentang Gambaran Keuangan Daerah, Bab IV membahas Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, Bab V membahas Rekomendasi dan Bab VI Penutup.

Harapan kami, dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah Kota Pekalongan. Tak lupa kami mohon diberikan kritik dan saran yang membangun dan senantiasa kami terima dengan senang hati demi hasil yang lebih baik di masa depan .

Wassalamu'alaikum wr wb

Pekalongan, 25 Juli 2024

Kepala Bappeda Kota Pekalongan,



CAYEKTI WIDIGDO, AP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750729 199412 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	xvii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan.....	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Hubungan Antar Dokumen	5
1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045	6
1.3.2 RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029	7
1.3.3 RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.....	7
1.3.4 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025- 2029	9
1.3.5 RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)	9
1.3.6 RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ...	10
1.3.7 RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral	10
1.4 Maksud Dan Tujuan	10
1.4.1 Maksud.....	10
1.4.2 Tujuan	10
1.5 Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.....	10
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	15
2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif.....	15
2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah	17
2.1.3. Geologi	19
2.1.4. Hidrologi	20
2.1.5. Klimatologi	21
2.1.6. Penggunaan Lahan	22
2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah	24
2.1.8. Wilayah Rawan Bencana.....	30
2.1.9. Aspek Demografi	32
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	36
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi	36
2.2.2. Struktur Ekonomi	38
2.2.3. Pertumbuhan PDRB	42
2.2.4. Inflasi	43
2.2.5. PDRB per Kapita	46

2.2.6.	Indeks Gini.....	47
2.2.7.	Kemiskinan	48
2.2.8.	Angka Rasio Penduduk yang Bekerja.....	55
2.2.9.	Angka Kriminalitas yang Ditangani	56
2.2.10.	Indeks Pembangunan Manusia.....	57
2.2.11.	Angka Rata-Rata Lama Sekolah.....	58
2.2.12.	Harapan Lama Sekolah	58
2.2.13.	Usia Harapan Hidup	59
2.2.14.	Pengeluaran Per Kapita.....	60
2.2.15.	Angka Partisipasi Kasar	60
2.2.16.	Angka Pendidikan yang Ditamatkan	62
2.2.17.	Angka Partisipasi Murni (APM)	62
2.2.18.	Angka Kematian Bayi (AKB)	63
2.2.19.	Angka Kematian Balita (AKABA)	64
2.2.20.	Angka Kematian Ibu (AKI)	65
2.2.21.	Angka Kesakitan.....	65
2.2.22.	Prevalensi Balita Stunting	66
2.2.23.	Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	67
2.2.24.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).....	67
2.2.25.	Kebudayaan	68
2.2.26.	Pemuda dan Olahraga.....	69
2.3,	Aspek Daya Saing Daerah	70
2.3.1	Kemampuan Ekonomi Daerah	70
2.3.2.	Fokus Fasilitas Wilayah	71
2.3.3.	Fokus Iklim Investasi	75
2.3.4.	Fokus Sumber Daya Manusia.....	77
2.3.5.	Penguatan Sistem Inovasi Daerah.....	78
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	87
2.4.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	87
2.4.2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	118
2.4.3.	Urusan Pemerintahan Pilihan	166
2.4.4	Unsur Penunjang.....	177
2.4.5.	Unsur Pendukung	183
2.4.6.	Unsur Pengawasan	191
2.4.7.	Unsur Pemerintahan Umum	192
2.5	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Tahun 2023. 194	
2.5.1	Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2023	194
2.5.2	Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023	203
2.5.3	Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023	243

2.5.4	Hasil Evaluasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) Tahun 2023	252
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah	263
3.1.	Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir	265
3.1.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	266
3.1.2.	Neraca Daerah	270
3.1.3.	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2019-2023	271
3.2.	Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Ke Depan	275
3.3.1.	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan	275
3.3.2.	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	280
3.3.3.	Penghitungan Kerangka Pendanaan	281
BAB IV	Permasalahan Dan Isu Strategis	283
4.1.	Permasalahan	283
4.1.1.	Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	283
4.1.2.	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	290
4.2.	Isu Strategis Daerah	293
4.2.1.	Isu Global	293
4.2.2.	Isu Nasional	295
4.2.3.	Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah	297
4.2.4.	Hasil Telaahan RPJPD Kota Pekalongan	299
4.2.5.	Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan	321
4.2.6.	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah	338
BAB V	Rekomendasi Kebijakan	343
5.1	Rekomendasi Perumusan Visi, Misi, Program Unggulan atau Program Prioritas	343
5.2.	Lokasi Program Prioritas / Program Unggulan Daerah	353
BAB VI	Penutup	369
	Daftar Pustaka	370

DAFTAR TABEL

Tabel II-1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan -----	17
Tabel II-2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	22
Tabel II-3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	22
Tabel II-4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	32
Tabel II-5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023 -----	34
Tabel II-6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)-----	35
Tabel II-7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)-----	38
Tabel II-8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	43
Tabel II-9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 -----	45
Tabel II-10	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2023-----	46
Tabel II-11	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023 -----	46
Tabel II-12	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	47
Tabel II-13	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	49
Tabel II-14	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	56
Tabel II-15	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019–2023-----	58
Tabel II-16	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023-----	61
Tabel II-17	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	61
Tabel II-18	Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019-----	62
Tabel II-19	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023-----	62
Tabel II-20	Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023-----	63
Tabel II-21	Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2023-----	63
Tabel II-22	Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	64

Tabel II-23	Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	65
Tabel II-24	Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	66
Tabel II-25	Prevalensi Balita Stunting Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	66
Tabel II-26	Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	68
Tabel II-27	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	69
Tabel II-28	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	69
Tabel II-29	Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	70
Tabel II-30	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	71
Tabel II-31	Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	73
Tabel II-32	Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	74
Tabel II-33	Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	75
Tabel II-34	Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha -----	75
Tabel II-35	Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023-----	78
Tabel II-36	Inovasi Daerah Bidang Kesehatan-----	83
Tabel II-37	Inovasi Daerah Lainnya -----	85
Tabel II-38	Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan-----	86
Tabel II-39	Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan-----	86
Tabel II-40	Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	87
Tabel II-41	Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	88
Tabel II-42	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	88
Tabel II-43	Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	89
Tabel II-44	Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	89
Tabel II-45	Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	89
Tabel II-46	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	90
Tabel II-47	Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	90
Tabel II-48	Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	91
Tabel II-49	Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 – 2023-----	91

Tabel II-50	Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2019 – 2023 -----	92
Tabel II-51	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	92
Tabel II-52	Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022-----	92
Tabel II-53	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023-----	93
Tabel II-54	Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	93
Tabel II-55	Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	93
Tabel II-56	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	94
Tabel II-57	Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	94
Tabel II-58	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	95
Tabel II-59	Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2019 - 2024-----	95
Tabel II-60	Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	96
Tabel II-61	Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	96
Tabel II-62	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2023-----	97
Tabel II-63	Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2019 – 2023-----	98
Tabel II-64	Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	98
Tabel II-65	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	99
Tabel II-66	Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	99
Tabel II-67	Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2019 – 2023-----	100
Tabel II-68	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2019 - 2023-----	100
Tabel II-69	Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	101
Tabel II-70	Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	102
Tabel II-71	Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	102
Tabel II-72	Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019– 2023-----	103

Tabel II-73	Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	104
Tabel II-74	Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	104
Tabel II-75	Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	104
Tabel II-76	Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	104
Tabel II-77	Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	105
Tabel II-78	Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	105
Tabel II-79	Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	108
Tabel II-80	Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	109
Tabel II-81	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 -----	109
Tabel II-82	Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	110
Tabel II-83	Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	111
Tabel II-84	Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	111
Tabel II-85	Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	112
Tabel II-86	Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2023 -----	112
Tabel II-87	Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2019 – 2023 -----	114
Tabel II-88	Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	114
Tabel II-89	Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	115
Tabel II-90	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	115
Tabel II-91	Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	116
Tabel II-92	Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	116
Tabel II-93	Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	117
Tabel II-94	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	117
Tabel II-95	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2019– 2023 -----	118
Tabel II-96	Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	119
Tabel II-97	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2018 – 2022 -----	120

Tabel II-98	Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	121
Tabel II-99	Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	122
Tabel II-100	Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	125
Tabel II-101	Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022-----	125
Tabel II-102	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	126
Tabel II-103	Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	126
Tabel II-104	Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	128
Tabel II-105	Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	130
Tabel II-106	Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 -----	131
Tabel II-107	Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	132
Tabel II-108	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	134
Tabel II-109	Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	135
Tabel II-110	Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	136
Tabel II-111	Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 ----	137
Tabel II-112	Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	138
Tabel II-113	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	138
Tabel II-114	PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022-----	139
Tabel II-115	Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	139
Tabel II-116	Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	140
Tabel II-117	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021 -----	141
Tabel II-118	Kategori Tingkat Pelayanan Jalan -----	142
Tabel II-119	Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan-----	144
Tabel II-120	Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	146
Tabel II-121	Faktor Muat (<i>Load Factor</i>) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	147
Tabel II-122	Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	147
Tabel II-123	Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	148
Tabel II-124	Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	149

Tabel II-125	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2019 – 2023 -----	149
Tabel II-126	Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2019 – 2023 -----	149
Tabel II-127	Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	150
Tabel II-128	Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	151
Tabel II-129	Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	152
Tabel II-130	Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	152
Tabel II-131	Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	152
Tabel II-132	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2023 -----	153
Tabel II-133	Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2023-----	154
Tabel II-134	Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	155
Tabel II-135	Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2018-2022 -----	155
Tabel II-136	Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	155
Tabel II-137	Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2018-2022-----	156
Tabel II-138	Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2023 -----	156
Tabel II-139	Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022-----	157
Tabel II-140	Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022-----	157
Tabel II-141	Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	158
Tabel II-142	Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 ----	159
Tabel II-143	Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	160
Tabel II-144	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	160
Tabel II-145	Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 -----	162
Tabel II-146	Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ <i>Event</i> di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	162
Tabel II-147	Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	162
Tabel II-148	Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	163
Tabel II-149	Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	164

Tabel II-150	Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	164
Tabel II-151	Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2019-2023 -----	165
Tabel II-152	Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2019 - 2023 -----	166
Tabel II-153	Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (kg) -----	166
Tabel II-154	Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun) -----	167
Tabel II-155	Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	168
Tabel II-156	Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	168
Tabel II-157	Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	169
Tabel II-158	Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 -----	169
Tabel II-159	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	169
Tabel II-160	Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	170
Tabel II-161	Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	171
Tabel II-162	Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	171
Tabel II-163	Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	172
Tabel II-164	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	173
Tabel II-165	Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	173
Tabel II-166	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	174
Tabel II-167	Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	175
Tabel II-168	Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	176
Tabel II-169	Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	176
Tabel II-170	Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	176
Tabel II-171	Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	177
Tabel II-172	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	177
Tabel II-173	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	178
Tabel II-174	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2021 -----	178
Tabel II-175	Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 -----	179
Tabel II-176	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	179
Tabel II-177	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 -----	181

Tabel II-178	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022 -----	182
Tabel II-179	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2023-----	183
Tabel II-180	Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 -----	185
Tabel II-181	Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023 -----	185
Tabel II-182	Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 -----	187
Tabel II-183	Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	188
Tabel II-184	Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	188
Tabel II-185	Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	190
Tabel II-186	Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	192
Tabel II-187	Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	192
Tabel II-188	Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	193
Tabel II-189	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	193
Tabel II-190	Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	193
Tabel II-191	Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2019 – 2023-----	194
Tabel II-192	Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023-----	195
Tabel II-193	Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023---	203
Tabel II-194	Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023---	204
Tabel II-195	Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	205
Tabel II-196	Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	207
Tabel II-197	Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	209
Tabel II-198	Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	210
Tabel II-199	Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023-----	211
Tabel II-200	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023-----	212
Tabel II-201	Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023-----	213
Tabel II-202	Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	213
Tabel II-203	Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023-----	214

Tabel II-204	Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	215
Tabel II-205	Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	216
Tabel II-206	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	217
Tabel II-207	Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	218
Tabel II-208	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	219
Tabel II-209	Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	220
Tabel II-210	Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	220
Tabel II-211	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	222
Tabel II-212	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	222
Tabel II-213	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	223
Tabel II-214	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	223
Tabel II-215	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	224
Tabel II-216	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	224
Tabel II-217	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	226
Tabel II-218	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	227
Tabel II-219	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	228
Tabel II-220	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	230
Tabel II-221	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	231
Tabel II-222	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	232
Tabel II-223	Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	234
Tabel II-224	Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	234
Tabel II-225	Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	235
Tabel II-226	Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	236
Tabel II-227	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	237

Tabel II-228	Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	237
Tabel II-229	Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023-----	238
Tabel II-230	Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023-----	239
Tabel II-231	Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023-----	241
Tabel II-232	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 -----	245
Tabel II-233	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023-----	246
Tabel II-234	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 -----	247
Tabel II-235	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023-----	248
Tabel II-236	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023-----	249
Tabel II-237	Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023-----	251
Tabel II-238	Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023-----	252
Tabel II-239	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023-----	257
Tabel II-240	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023-----	259
Tabel II-241	Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023 -----	261
Tabel III-1	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	268
Tabel III-2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	269
Tabel III-3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	270
Tabel III-4	Neraca Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	270
Tabel III-5	Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 -----	272
Tabel III-6	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	273
Tabel III-7	Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	273
Tabel III-8	Defisit Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	274
Tabel III-9	Komposisi Penutup Riil Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	274
Tabel III-10	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2023-----	274
Tabel III-11	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 s.d 2029 -----	275
Tabel III-12	Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 s.d 2029 -----	279

Tabel III-13	Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 s.d 2029 -----	280
Tabel III-14	Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	281
Tabel III-15	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2025-2029 -----	281
Tabel III-16	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	282
Tabel IV-1	Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah -----	289
Tabel IV-2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah -----	290
Tabel IV-3	Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045 -----	296
Tabel IV-4	Perumusan Visi -----	301
Tabel IV-5	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Tahun 2029 -----	308
Tabel IV-6	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 -----	311
Tabel IV-7	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2025-2029 -----	312
Tabel IV-8	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	313
Tabel IV-9	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Pendidikan Karakter dan Pemajuan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	314
Tabel IV-10	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	314
Tabel IV-11	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	315
Tabel IV-12	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	316
Tabel IV-13	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	319
Tabel IV-14	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	320
Tabel IV-15	Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	321
Tabel IV-16	Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah -----	338
Tabel V-1	Rekomendasi Penyusunan Visi, Misi, Program Unggulan Atau Program Prioritas Tahapan 5 Tahunan Pertama (2025-2029) : Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik -----	344
Tabel V-2	Indikasi Program RTRW Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 -----	353

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan Antar Dokumen-----	6
Gambar I.2	Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang-----	9
Gambar II.1	Peta Orientasi Kota Pekalongan-----	16
Gambar II.2	Peta Administratif Kota Pekalongan -----	17
Gambar II.3	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan-----	18
Gambar II.4	Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan-----	19
Gambar II.5	Wilayah Sungai Pemali-Comal-----	20
Gambar II.6	Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan -----	24
Gambar II.7	Peta Rencana Struktur Ruang -----	25
Gambar II.8	Peta Rencana Pola Ruang-----	26
Gambar II.9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023--	33
Gambar II.10	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	34
Gambar II.11	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin -----	35
Gambar II.12	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023-----	36
Gambar II.13	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023-----	37
Gambar II.14	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023-----	44
Gambar II.15	Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023-----	44
Gambar II.16	Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	49
Gambar II.17	Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 (000 jiwa)-----	50
Gambar II.18	Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023-----	51
Gambar II.19	Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	51
Gambar II.20	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	52
Gambar II.21	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	52
Gambar II.22	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	53

Gambar II.23	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 -----	54
Gambar II.24	Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	55
Gambar II.25	Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	56
Gambar II.26	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023-----	57
Gambar II.27	Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 -----	58
Gambar II.28	Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 -----	59
Gambar II.29	Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 -----	59
Gambar II.30	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023 -----	60
Gambar II.31	Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023-----	64
Gambar II.32	Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 -----	67
Gambar II.33	Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 -----	68
Gambar II.34	Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023 -----	70
Gambar II.35	Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	71
Gambar II.36	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	72
Gambar II.37	Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023-----	73
Gambar II.38	Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	74
Gambar II.39	Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	76
Gambar II.40	Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023-----	77
Gambar II.41	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	78
Gambar II.42	Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi -----	79
Gambar II.43	Persentase Kunjungan di RSUD Benda Kota Pekalongan Periode Tahun 2019 - 2023-----	97
Gambar II.44	Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	119

Gambar II.45	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019- 2023----	121
Gambar II.46	Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 -----	123
Gambar II.47	Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022-	123
Gambar II.48	Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	124
Gambar II.49	Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 -----	129
Gambar II.50	Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2018 – 2022	129
Gambar II.51	Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 -----	132
Gambar II.52	Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2023-----	133
Gambar II.53	Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	136
Gambar II.54	Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023-----	137
Gambar II.55	Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 --	140
Gambar II.56	Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023---	142
Gambar II.57	Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan -----	143
Gambar II.58	Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 -----	165
Gambar II-59	Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 -----	175
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah) -----	266
Gambar IV.1	Tipologi Klassen Kondisi Perekonomian Kab/Kota di Jawa Tengah---	286
Gambar IV.2	Hasil Penjaringan Harapan Masyarakat -----	299
Gambar IV.3	Hasil FGD Tematik-----	300
Gambar IV.4	Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 -----	302
Gambar IV-5	Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045-----	308
Gambar IV.6	Sasaran Utama Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 ----	308
Gambar IV.7	Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 -----	309
Gambar IV-8	Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045 -----	310

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Tahapan penyusunan RPJMD meliputi persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan RPJMD. Tahap persiapan penyusunan RPJMD salah satu nya adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.

Diktum kelima, keenam dan ketujuh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 menjelaskan bahwa RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. Dalam hal RPJPD belum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dapat mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. Selanjutnya Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045 dan Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam penyusunan visi, misi, dan program pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

Saat ini, Kota Pekalongan sedang menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 dan sampai bulan Juli 2024 telah tersusun Rancangan Akhir RPJPD. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dilaksanakan secara simultan dengan penyusunan RPJPD, sehingga dinamika dan perubahan-perubahan yang terjadi selama penyusunan kedua dokumen ini akan saling melengkapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan dengan mempertimbangkan penjadwalan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu disusun dokumen rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai pijakan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunan daerah. Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 mengacu pada periode pertama Rancangan Akhir RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 .

1.2 DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

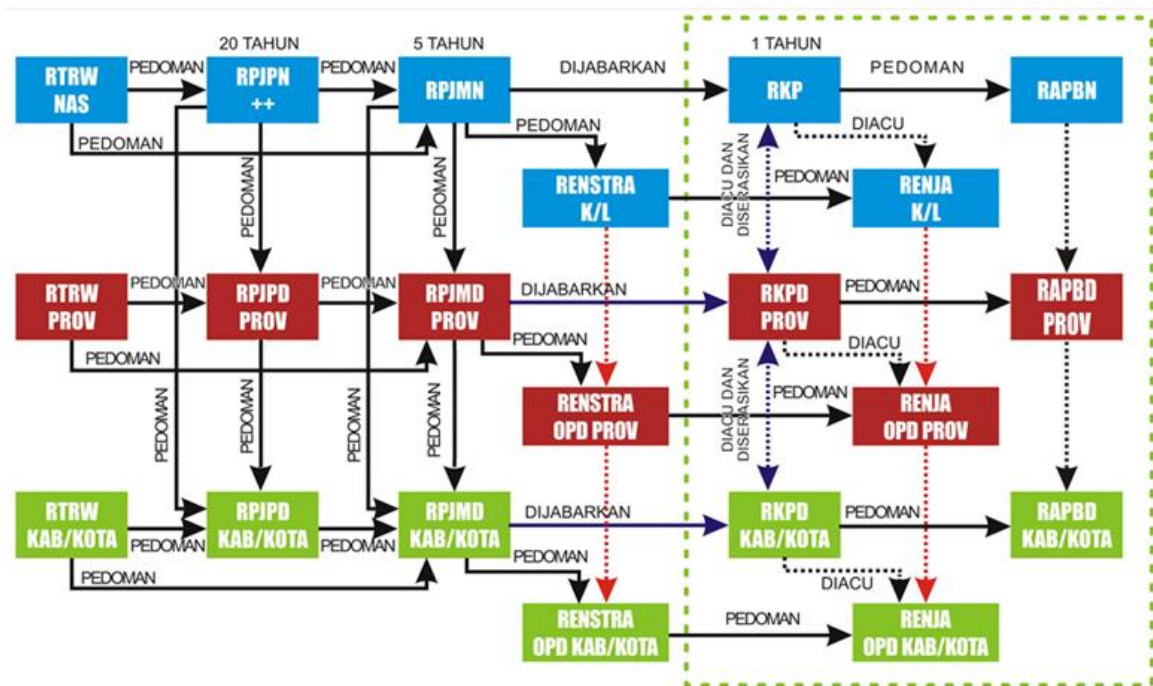
- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 15. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 16. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042, LL Setneg: 47 Halaman);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 665);
30. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
32. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045,
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 13);
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13);

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045. Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah, maka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disesuaikan dan berpedoman pada RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.



Gambar I.1
Hubungan Antar Dokumen

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.1 RPJMD dengan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Sesuai dengan Permendagri Pasal 12 ayat (2) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada Rancangan Akhir RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, khususnya periode pertama (Tahun 2025-2029). Arah kebijakan Periode pertama RPJPD Kota Pekalongan adalah “Penguatan Pondasi Perwujudan Mina Batik” yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.
2. Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras yang memadai.
3. Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan pondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A.
4. Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif dan merata diarahkan pada penguatan pondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi,

pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

5. Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

1.3.2 RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029. Tema dan arah kebijakan nasional tahun 2025-2029 adalah **“Penguatan Fondasi Transformasi”** yang tercermin dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu:

1. Transformasi Sosial difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar, kesehatan pendidikan, perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif;
2. Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi SDA unggulan, peningkatan kapasitas Riset Inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital, pembangunan perkotaan dan pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batubara; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); Pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, Hidrogen dan Amonia rendah karbon; Implementasi *carbon credit* secara luas; Pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; Peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industry; Peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan system jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*;
3. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal penguatan regulasi, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis informasi, penguatan kapasitas masyarakat sipil;
4. Supremasi Hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian keadilan, kemanfaatan dan kedamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan siber, lembaga demokrasi yang kuat dan lain-lain;
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat.

1.3.3 RPJMD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka

penyusunan rencana pembangunan daerah harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

Berdasarkan kebijakan penetapan kawasan strategis Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029), Kota Pekalongan merupakan **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)** Kawasan Perkotaan Pekalongan yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Pusat Kegiatan wilayah ini adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota, sehingga sarana prasarana dan fasilitas kota yang ada harus dapat melayani dalam skala regional. Kebijakan ini telah dipedomani dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029).

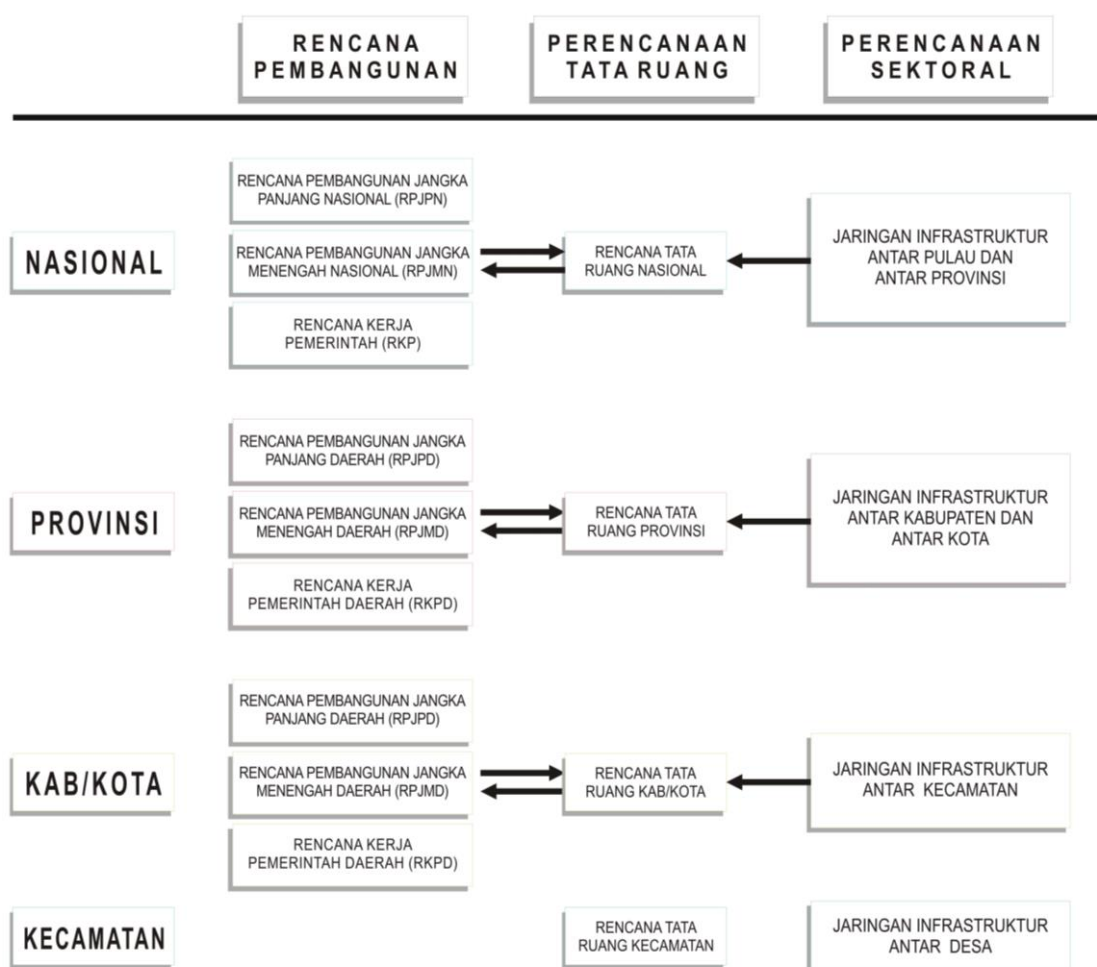
Selain Pusat Kegiatan Wilayah, sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah 2009-2029, Sistem Perwilayahan dilakukan dengan pembagian Wilayah Pengembangan dan penentuan arah pengembangan. Kota Pekalongan masuk dalam Wilayah Pengembangan Petanglong yang berpusat di Kawasan Perkotaan Pekalongan, dengan arah pengembangan meliputi: memadukan pembangunan Kota Pekalongan dan Wilayah sekitarnya, dan pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan (industri, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan).

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, telah ditetapkan 3 (tiga) pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK), yang meliputi: KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, KSK dari sudut kepentingan sosial budaya dan KSK dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan untuk struktur ruang wilayah kota meliputi Pusat Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Pusat Pelayanan Kota (PPK), 4 (empat) Sub Pusat Pelayanan Kota dan 6 (enam) Pusat Lingkungan; serta Sistem Jaringan Prasarana.

Pusat Pelayanan Kota / PPK yang merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional berada di kelurahan Kauman dan Bendan Kergon. Sedangkan Sub Pusat Pelayanan Kota / SPPK tersebar di 4 (empat) kecamatan yang berada di: 1) SPPK Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Tirto; 2) SPPK Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; 3) SPPK Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer dan Kalibaros; dan 4) SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip. Pelayanan Lingkungan / PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di: 1) PL di Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pringrejo; 2) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Kandang Panjang; 3) PL di Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; 4) PL di Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; 5) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan 6) PL di Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Sokoduwet.

Selanjutnya untuk pedoman penataan ruang yang mendukung pelaksanaan RTRW telah disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk Kawasan Strategis Kota (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya, yaitu Kawasan Jetayu, Kawasan Kali Loji, Kawasan Pasar Buah Pati Unus, Kawasan Pecinan, dan Kawasan Kampung Arab serta KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu: 1) Kawasan Tirto, Koridor Batas Barat s.d. Jl Gajah Mada, 2) Kawasan Koridor Jl. Hayam Wuruk-Jl. Dr. Cipto dan

Alun-alun, 3) Kawasan Koridor Jl. Urip Sumoharjo-Jl. Gatot Subroto dan Jl. Pelita II, 4) Kawasan Koridor Jl. W.R. Supratman-Jl. Pantai Sari-Jl. Samudra, Kawasan Teknopark Perikanan, 5) Kawasan Terpadu Kuripan dan Koridor Jl. H.O.S. Cokroaminoto, dan 6) Kawasan Batas Kota sebelah Timur dan Koridor Jl. Dr. Sutomo.



Gambar I.2
Hubungan Perencanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.4 RPJMD dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029. Sampai dengan disusunnya rancangan teknokratik ini, Provinsi Jawa Tengah belum menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.

1.3.5. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.3.6. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

1.3.7 RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW, Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 juga memperhatikan beberapa dokumen antara lain; 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's); 2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); 3) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral lainnya.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029, adalah untuk menyusun dokumen yang menggambarkan kondisi umum Kota Pekalongan, gambaran kemampuan fiskal daerah beserta analisis permasalahan dan isu strategis daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 adalah:

- 1) Sebagai kajian bahan penyusunan Rancangan RPJMD Kota Pekalongan 2025-2029;
- 2) Memberikan masukan kepada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berupa permasalahan dan isu strategis daerah sebagai dasar dalam menyusun Visi, Misi dan program sehingga tetap terjaga konsistensi dengan dokumen perencanaan jangka panjang daerah dan perencanaan jangka menengah tingkat Provinsi dan Nasional;
- 3) Menjaga terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Pusat;

1.5 SISTEMATIKA RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD TAHUN 2025-2029

Sistematika Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda, tanggal 12 Juni 2024, tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum,

aspek daya saing serta evaluasi indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah periode sebelumnya.

BAB III : Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini terdiri dari uraian tentang kinerja keuangan daerah yang meliputi kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi rasio kemandirian daerah, proporsi penggunaan anggaran, rasio belanja modal dan analisis pembiayaan; serta kerangka pendanaan yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja dan pembiayaan, serta penghitungan kerangka pendanaan.

BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan, dan Isu Strategis Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan isu global, nasional, provinsi dan rancangan akhir RPJPD periode pertama serta analisis lingkungan strategis.

BAB V : Rekomendasi Kebijakan

Bab ini berisi berbagai rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, antara lain rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga tahun 2029 dan rangkaian kerja yang dapat dikerjakan untuk mewujudkannya, yang dapat menjadi salah satu bahan dalam merumuskan visi, misi calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak Tahun 2024 serta lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW.

BAB VI : Penutup

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Jawa sejak Desember 2018, seluruh wilayah yang dilewati jalur jalan tol trans Jawa memiliki posisi yang relatif sama. Posisi strategis wilayah sangat ditentukan oleh seberapa besar daya tarik dan peran suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, masing-masing daerah berkompetisi, meningkatkan daya tarik dan perannya, agar tetap dan semakin menarik kunjungan dari wilayah lainnya. Kota Pekalongan, dengan segala potensi dan permasalahan yang dimilikinya, harus terus meningkatkan daya tarik dan perannya, sehingga dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonominya, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, masih mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35 - 40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan

terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir melaksanakan Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Sungai di Kota Pekalongan. Selain itu Desain atas sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga telah selesai disusun oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dari Amerika Serikat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan di antaranya adalah LSM Bintari melalui Kajian *Loss and Damage* Banjir Rob Pekalongan Raya (2016) serta pembuatan *pilot project* MCK adaptif (2020). *Mercy Corps* Indonesia turut membantu dalam berbagai kajian melalui program *flood resilience city* untuk Kota Pekalongan di antaranya dengan membuat kajian kerentanan (2020) dan saat ini masih berjalan dengan kajian-kajian terkait, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari akademisi hingga kementerian maupun pihak lain. LSM Kemitraan juga turut membantu Kota Pekalongan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping – Surviving – Sustaining* (Melindungi – Mempertahankan – Melestarikan). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteveen Bos* juga telah membuat kajian tentang *Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erosion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Selain gambaran di atas, Kota Pekalongan tetap menyimpan berbagai potensi yang relatif besar dengan sejarah perkembangan yang relatif panjang. Potensi tersebut adalah berupa kerajinan batik dan perikanan.

Seperti diketahui bersama, batik sudah sangat melekat dan identik dengan Kota Pekalongan. Bahkan UNESCO telah mengakuinya dengan memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia untuk kategori *Craft and Folk Art* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Kerajinan yang diakui tidak lain adalah kerajinan batik. Potensi yang besar ini telah mewarnai hampir sebagian besar dinamika ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Potensi kedua adalah perikanan yang saat ini masih sangat terpuruk sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian rob. Namun demikian, semangat untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan masih terus dijaga sampai dengan sekarang ini. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri masih terus berupaya untuk terus mengajukan permohonan demi terwujudnya Pelabuhan Perikanan *Onshore* di Kota Pekalongan.

Kedua potensi tersebut harus terus dikembangkan agar dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, yaitu dengan semakin memperkuat sektor sekunder dan sektor tersier Kota Pekalongan. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, ke depan harus dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km². Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Perubahan ini dikarenakan adanya:

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi: sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

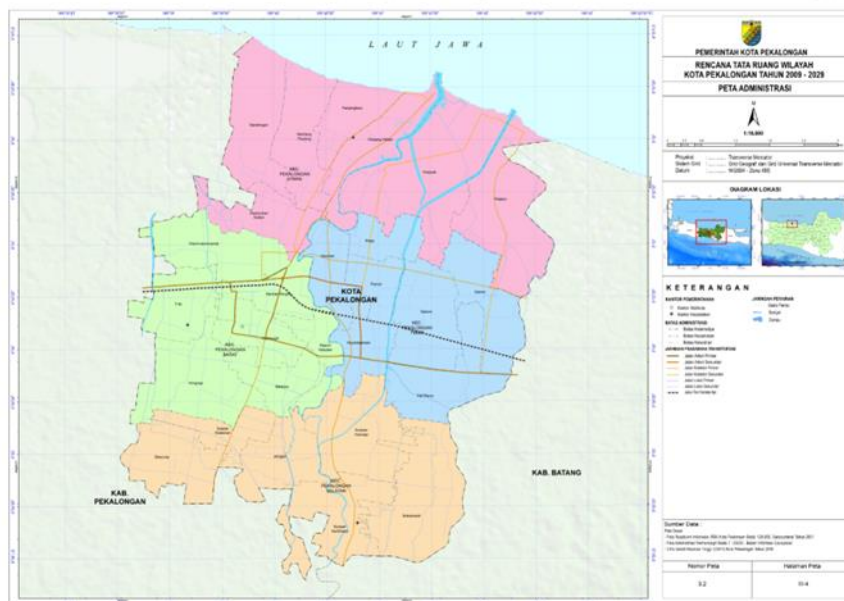
Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar II.1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar II.2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel II-1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

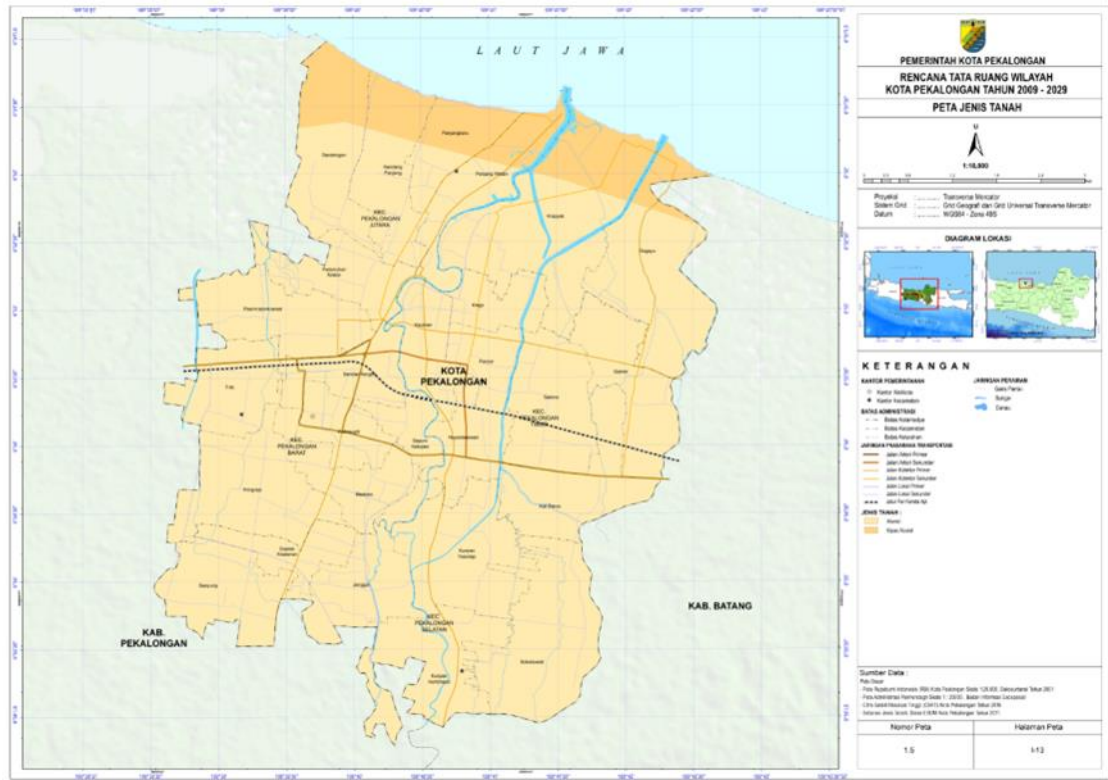
Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km² atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.2. Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan

Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.



Gambar II.3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri

yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambangan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.3. Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

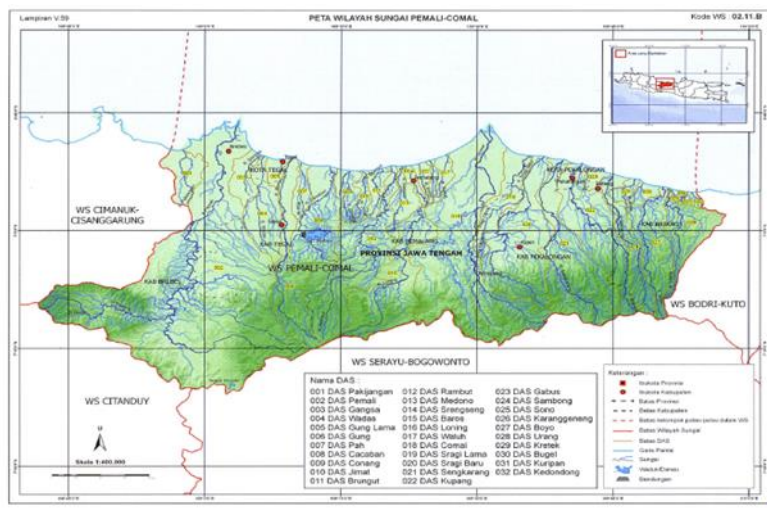


Gambar II.4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

2.1.4. Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Breml, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar II.5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber: Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan merupakan DI kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. DI kewenangan Pemerintah Pusat meliputi DI Kupang-Krompeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha, sedangkan DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri tidak mempunyai kewenangan Daerah Irigasi (DI) yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Daerah Irigasi.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18' 45,31" - 1090 51' 52,35" Bujur Timur dan 060 46' 33,52" - 070 13' 24,20" Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi: a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku

dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai $\pm$ 24 meter. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusutan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tanah di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirto, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.5. Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun

terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.831 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-2 berikut.

Tabel II-2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	20	452
2	Februari	22	535
3	Maret	10	222
4	April	8	220
5	Mei	7	99
6	Juni	6	91
7	Juli	-	-
8	Agustus	2	96
9	September	1	9
10	Oktober	2	12
11	Nopember	8	109
12	Desember	9	226
TOTAL		95	2.071
Tahun 2022		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2022 tanah sawah seluas 832 Ha, berkurang sekitar 6,09 persen dari luas 886 Ha pada tahun 2021. Begitu juga dengan tanah kering, meningkat menjadi 3.810 Ha, ada penambahan sekitar 1,44 persen dari luas 3.756 Ha pada tahun 2021.

Tabel II-3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	64,00	935,70	999,70
2	Pekalongan Timur	264,00	699,37	963,37
3	Pekalongan Selatan	414,00	733,38	1.147,38
4	Pekalongan Utara	90,00	1.441,50	1.531,50
TOTAL		832,00	3.810,00 (pembulatan)	4.642,00 (pembulatan)
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00
Tahun 2018		969,00	3.556,00	4.525,00

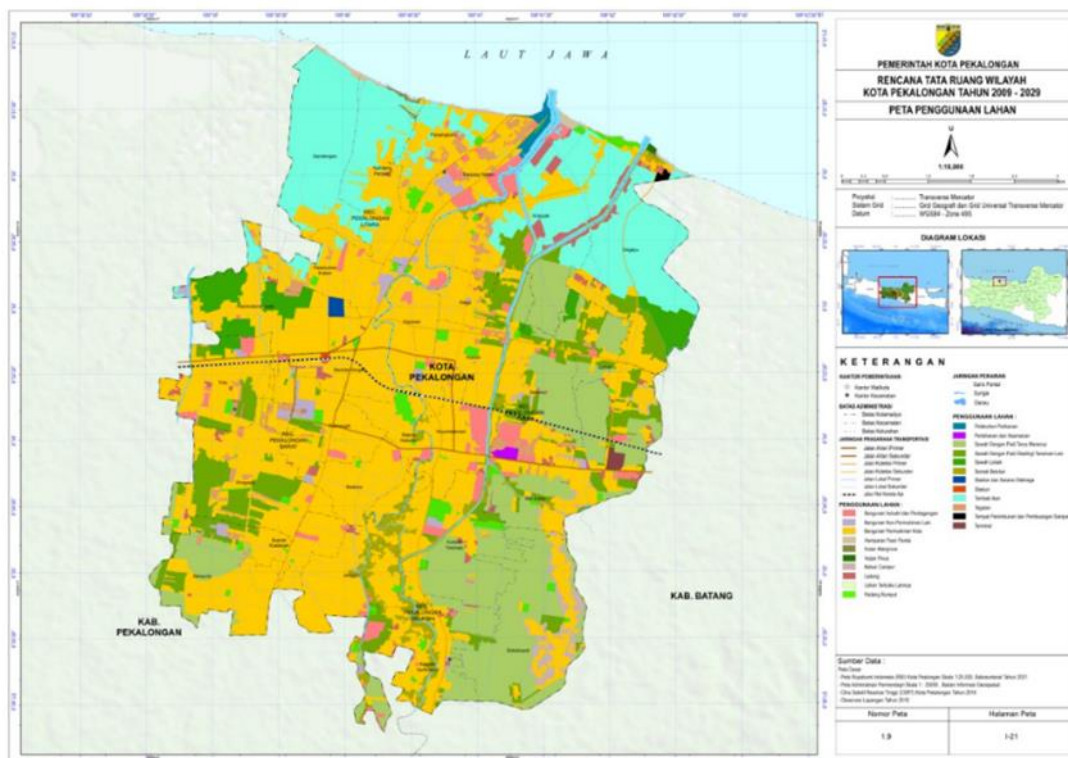
Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2022 adalah seluas 832 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 64 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 264 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 414 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 90 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2018 seluas 969 Ha, tahun 2019 seluas 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha, tahun 2021 tidak ada perubahan sementara pada tahun 2022 luasan tanah sawah mengalami penurunan menjadi 832 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009–2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar II.6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

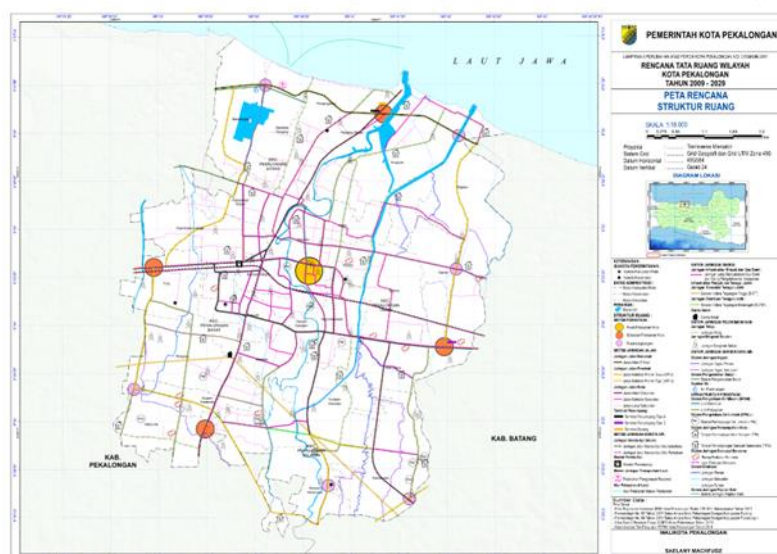
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan

simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

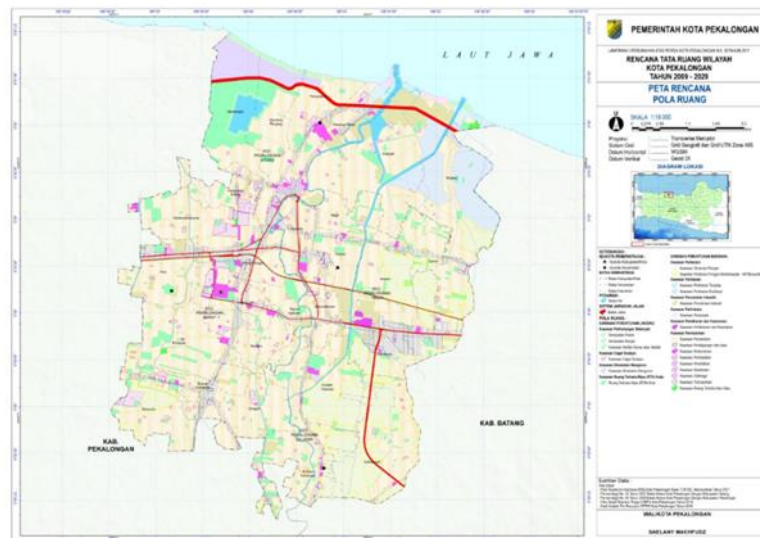
Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar II.7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2023

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar II.8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2023

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggung dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremsi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

- a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
- b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
- c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
- d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

- a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
- b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar.
- c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar.
- d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
- e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hektar.
- f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
- g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.

- h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
- i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.
- j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar berada di:

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:

1. Kelurahan Banyurip;
2. Kelurahan Buaran Kradenan;
3. Kelurahan Jenggot;
4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.

b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:

1. Kelurahan Bandengan;
2. Kelurahan Krapyak;
3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
4. Kelurahan Panjang Wetan;
5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
6. Kelurahan Panjangbaru.

c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:

1. Kelurahan Gamer;
2. Kelurahan Kali Baros;
3. Kelurahan Klego;
4. Kelurahan Noyontaansari;
5. Kelurahan Poncol; dan
6. Kelurahan Setono.

d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:

1. Kelurahan Bendan Kergon;
2. Kelurahan Medono;
3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
4. Kelurahan Pringrejo;
5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

a) Struktur Ruang

- 1) Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) – Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) – Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) – jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.
- 2) Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang – Kota Pekalongan – Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

b) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City dan Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

c) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah /

Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah

menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029, yaitu:

- 1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:
 - a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
 - b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
 - c. Pengaturan kegiatan industri;
 - d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
 - e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
 - f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
 - g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
 - h. Peningkatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
 - i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
 - j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
- 2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
 - b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
 - c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
 - d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
 - e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari:

- a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
- c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:
 - Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
 - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
 - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.
- d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain:

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

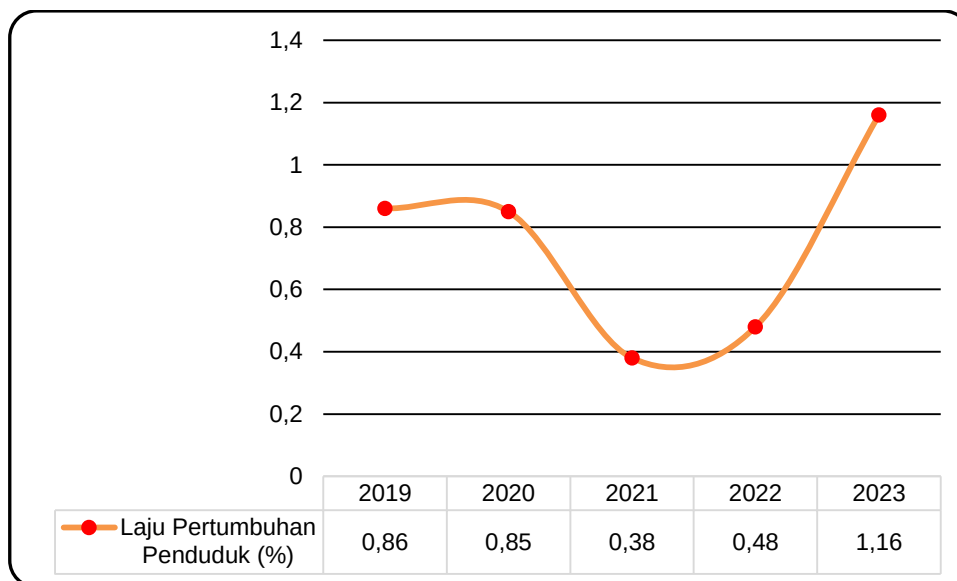
2.1.9. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Jawa Tengah sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa laki-laki dan 157.155 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex ratio sebesar 102,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 bertambah 7.782 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel II-4. berikut.

**Tabel II-4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 dan www.jateng.bps.go.id, 2024



Gambar II.9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

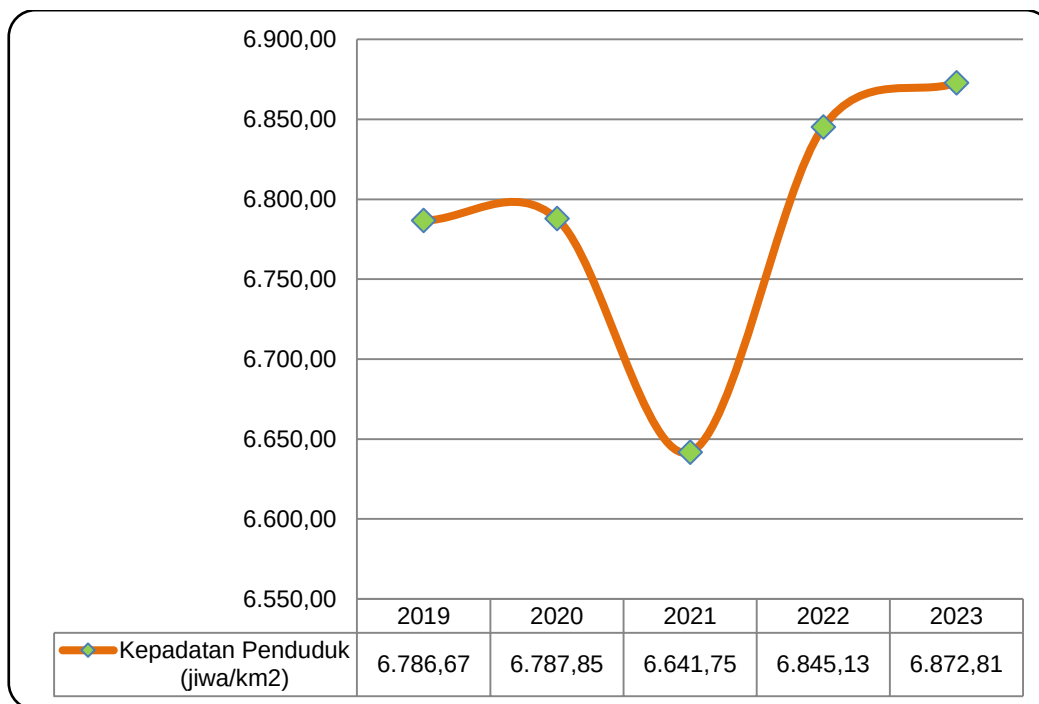
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Gambar II.9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan fluktuatif.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari pertambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi pertambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 27,68 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar II.10 berikut.



Gambar II.10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2023, pendidikan SD ke bawah sebanyak 50.065 jiwa (29,19 persen), diikuti SMP sebanyak 37.745 jiwa (22,00 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 83.712 jiwa (48,81 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2023 berjumlah 171.522 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2019, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namun tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-5 berikut.

Tabel II-5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						Jumlah
	≤SD		SLTP		≥SM		
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470
2023	50.065	29,19	37.745	22,00	83.712	48,81	171.522

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

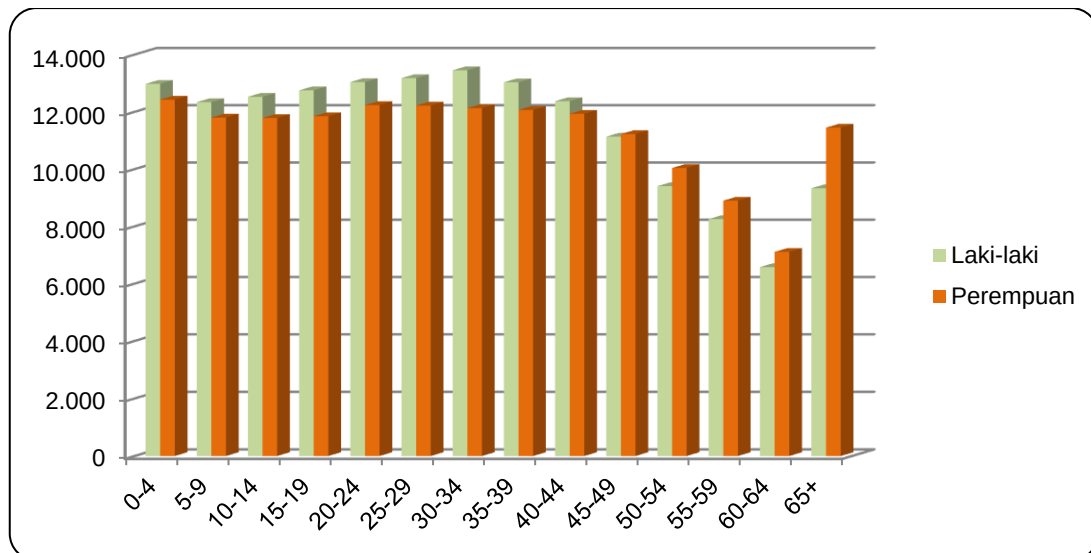
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 25.580 jiwa, diikuti rentang usia 0-4 tahun sebanyak 25.402 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 20.779 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel II-6 berikut.

Tabel II-6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.977	12.425	25.402
5-9	12.338	11.800	24.138
10-14	12.525	11.785	24.310
15-19	12.751	11.848	24.599
20-24	13.040	12.236	25.276
25-29	13.178	12.219	25.397
30-34	13.452	12.128	25.580
35-39	13.032	12.067	25.099
40-44	12.373	11.932	24.305
45-49	11.134	11.224	22.358
50-54	9.405	10.038	19.443
55-59	8.255	8.897	17.152
60-64	6.578	7.108	13.686
65+	9.331	11.448	20.779
Jumlah	160.369	157.155	317.524

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Gambar II.11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

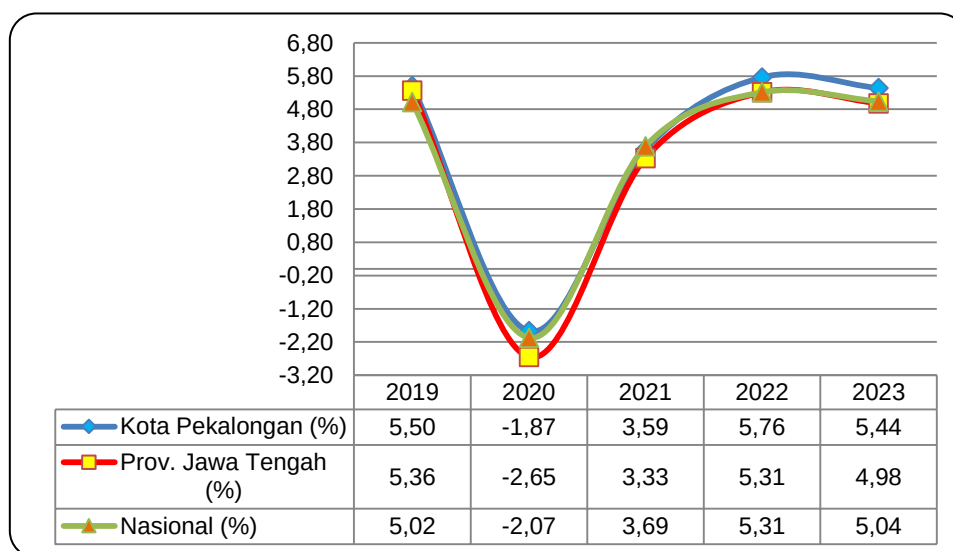
Dari data jumlah penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 222.895 jiwa atau sebesar 70,20% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Fenomena yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah. Tidak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka justru dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan upaya terintegrasi untuk memanfaatkan bonus demografi ini menjadi keuntungan bagi Kota Pekalongan. Salah satunya, fenomena ini menjadi peluang besar bagi Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor lainnya yang menjadi sektor unggulan di Kota Pekalongan.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu COVID-19 yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.

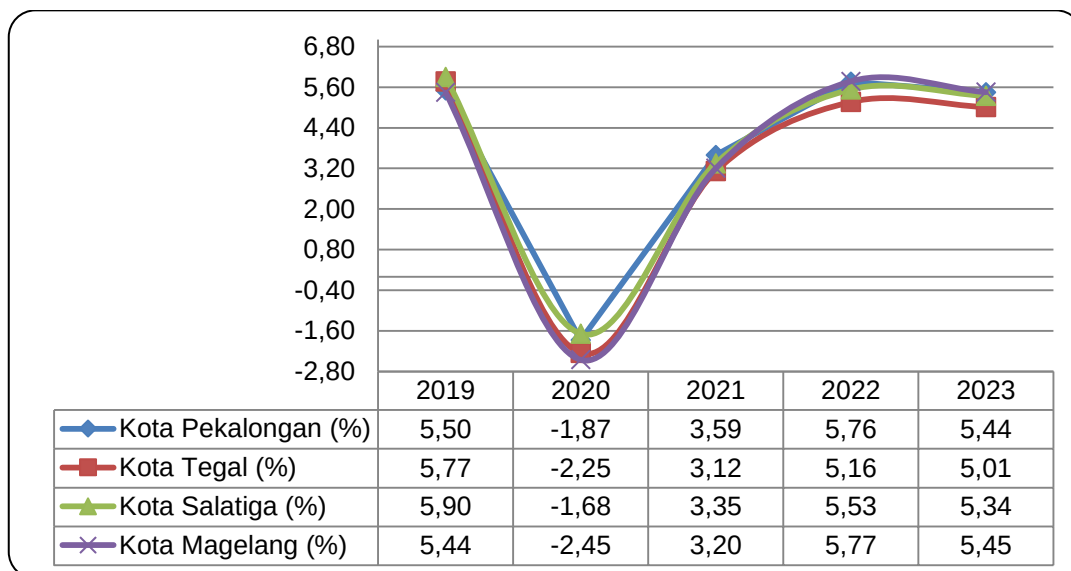


Gambar II.12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020

pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.13 berikut.



Gambar II.13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih berfluktuasi, belum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka pemulihan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak pandemi *COVID-19*, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi terdiri yang merupakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terdistribusi berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 67,89% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 38,69% merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 7,53% merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebesar 1,23% merupakan pengeluaran konsumsi LNPRT, sebesar 0,44% merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,78% merupakan net ekspor barang dan jasa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam

suatu perkonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi, berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berdasarkan data satu dekade ini, dengan menggunakan analisis korelasi, dapat diidentifikasi bahwa keempat aspek tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan (Indeks Gini), pengentasan kemiskinan (angka kemiskinan), dan kesempatan kerja (TPT, tingkat pengangguran terbuka), memiliki korelasi yang tidak signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini, tidak berkorelasi atau tidak mempengaruhi terhadap pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

2.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel II-7 berikut.

Tabel .II-7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,48 persen.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingkan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,44 persen pada tahun 2023.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 20,85 persen, kemudian menguat menjadi 21,34 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 melemah menjadi 21,15 persen dan melemah kembali menjadi 20,83 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 peranannya kembali melemah menjadi 20,44 persen.

Tahun 2019-2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kecenderungan yang menurun, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Bahkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini cukup tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19* di Kota Pekalongan. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha Industri Pengolahan kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,15 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2023, meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 0,14 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan cenderung stagnan selama 2019-2023 yaitu sebesar 0,10 persen pada tahun 2019 dan meningkat 0,12 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021, kemudian menurun 0,11 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuatif. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2019 sebesar 14,64 persen, tahun 2020 menurun menjadi sebesar 14,54 persen dan meningkat sebesar 15,46 persen di tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,10 persen, serta kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 15,64 persen.

Peranan lapangan usaha Konstruksi sangat tergantung dengan implementasi pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2021, peranan lapangan usaha ini meningkat cukup tajam, karena pada tahun 2021 pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Pekalongan jumlahnya sangat meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan konstruksi maka peranan lapangan usaha ini dapat semakin meningkat.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Secara umum peranan lapangan usaha ini selalu berfluktuasi. Pada tahun 2019 peranannya sebesar 21,80 persen, menurun menjadi 21,38 persen pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 21,59 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, peranan lapangan usaha ini melemah menjadi 21,10 persen dan 21,05 persen pada tahun 2023. Tahun 2019, lapangan usaha ini memiliki kecenderungan yang menurun, namun menguat kembali pada tahun 2020, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Hal ini menyiratkan tanda bahwa

lapangan usaha ini lebih tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19*. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha ini kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang berfluktuatif pada tahun 2019-2023 yaitu berturut-turut sebesar 6,40 persen di tahun 2019. Melemah menjadi 5,02 persen di tahun 2020 dan 5,06 persen di tahun 2021. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *COVID-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 peranan lapangan usaha ini meningkat tajam menjadi sebesar 7,28 persen dan 7,79 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen. Peranan tahun 2019 sebesar 5,44 persen dan tahun 2020 sebesar 5,31 persen. Peranan tahun 2019-2020 memiliki kecenderungan yang sedikit demi sedikit melemah. Namun pada tahun 2021 dan 2022 peranannya meningkat menjadi 5,36 persen dan 5,57 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 5,84 persen. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *COVID-19* pada tahun 2020, akibat sektor ini global sangat terpengaruh. Lapangan usaha ini kembali menguat pada tahun 2021 akibat sudah mulai berkembangnya perekonomian global, nasional dan lokal.

Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum berfluktuatif dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 peranan lapangan usaha ini sebesar 4,36 persen, tahun 2020 sebesar 5,13 persen dan tahun 2021 sebesar 5,07 persen. Selama tiga tahun tersebut menunjukkan perkembangan dan terjadi peningkatan yang tajam pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka peranannya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 menurun menjadi 4,75 persen dan 4,74 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2019 sebesar 6,13 persen, tahun 2020 meningkat sebesar 6,21 persen, dan tahun 2021-2023 berturut-turut melemah menjadi sebesar 6,22 persen, 6,15 persen dan 5,93 persen.

Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang cenderung menurun terhadap PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada

tahun 2019 sebesar 2,71 persen, meningkat menjadi 2,73 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021-2023 semakin melemah menjadi 2,66 persen, 2,58 persen dan 2,54 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan cenderung stagnan di kisaran 0,4 persen. Peranan lapangan usaha ini tahun 2019 sebesar 0,44 persen, tahun 2020 menurun sebesar 0,43 persen dan tahun 2021-2022 kembali turun menjadi 0,42 persen. Dan meningkat kembali sebesar 0,43 di tahun 2023. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2019-2023 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Peranan pada 2019 menurun menjadi sebesar 4,47 persen, dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 4,49 persen. Kemudian menurun tajam di tahun 2021-2023 masing-masing menjadi sebesar 4,17 persen, 3,94 persen dan 3,72 persen. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pandemi COVID-19. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,65 persen dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 4,72 persen. Tahun 2020 peranannya menurun menjadi sebesar 4,54 persen dan menurun kembali menjadi sebesar 4,16 persen pada tahun 2022 dan 4,06 persen di tahun 2023.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2019-2023 peranan lapangan usaha ini cenderung menurun. Pada tahun 2019 peranannya 1,29 persen. Meningkat di tahun 2020 sebesar 1,44 persen dan kembali menurun pada tahun 2021 – 2023 yaitu sebesar 1,40 persen, 1,33 persen dan 1,30 persen.

Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2019-2020 sebesar 1,90 persen, dan tahun 2021-2023 menurun sebesar 1,83 persen 1,82 persen dan 1,80 persen.

2.2.3. Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,50 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen, tumbuh sebesar 3,59 persen di tahun 2021 dan kembali tumbuh di tahun 2022 sebesar 5,76 persen, serta kembali mengalami perlambatan ditahun 2023 sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan tiga besar yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,08 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 11,08 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel II-8 berikut.

Tabel II-8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	6,36	-3,21	3,41	-0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,84	-0,48	2,38	4,26	2,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,72	-0,26	2,91	4,04	11,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	6,91	6,34	2,38	3,96
F	Konstruksi	4,71	-1,25	8,64	1,09	8,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	-4,68	5,46	3,29	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan	7,53	-24,25	3,00	48,53	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76	-3,78	4,78	12,43	13,08
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	17,20	4,23	2,52	8,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	0,93	1,35	0,55	2,98
L	Real Estat	5,62	-0,08	1,89	4,89	6,27
M,N	Jasa Perusahaan	8,31	-4,32	2,22	5,32	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,82	-1,00	-0,85	1,20	2,10
P	Jasa Pendidikan	2,63	-0,56	0,50	0,48	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,84	8,35	1,76	2,35	4,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,47	-1,19	0,87	5,75	4,32
Produk Domestik Regional Bruto		5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44

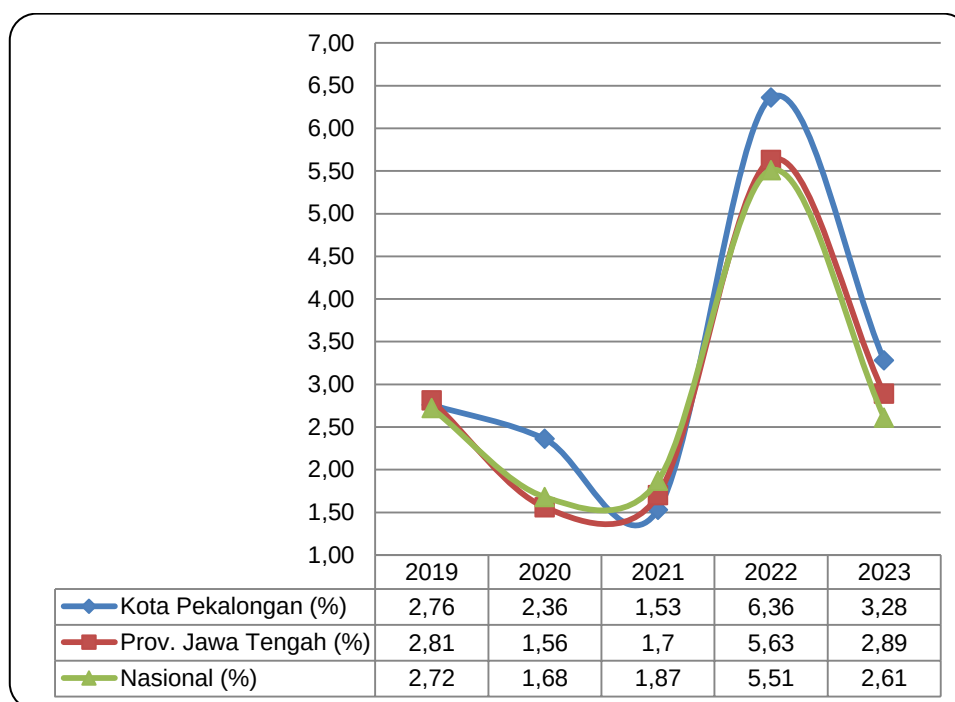
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019-2023 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2023 mayoritas adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

2.2.4. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 – 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

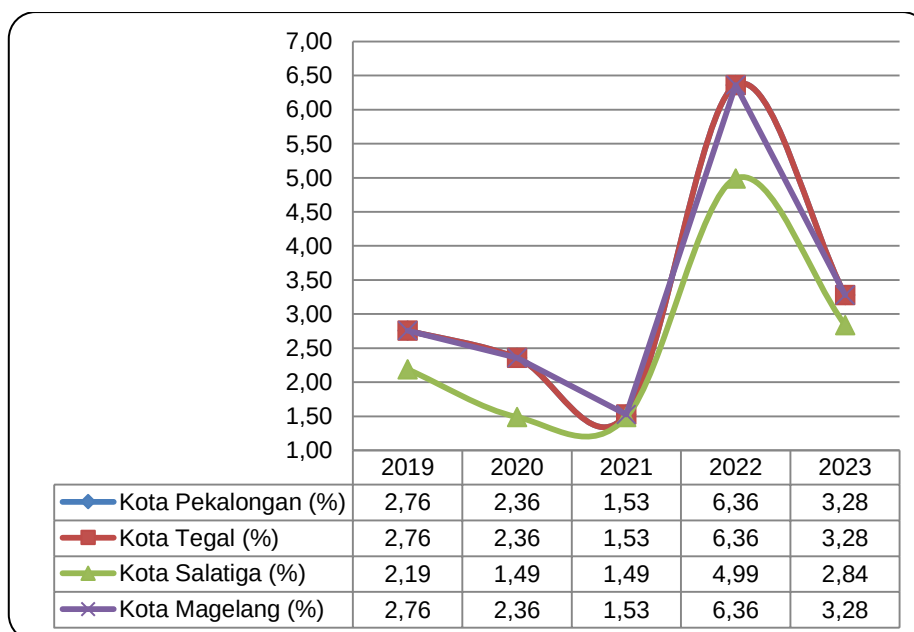
Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar II.14 berikut.



Gambar II.14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



Gambar II.15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Kenaikan inflasi yang sangat signifikan pada tahun 2023 tersebut, bukan merupakan permasalahan Kota Pekalongan saja, tetapi merupakan permasalahan dunia, permasalahan nasional, maupun Provinsi Jawa Tengah. Kondisi laju inflasi menunjukkan tren meningkat tajam disebabkan karena sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga-harga komoditas dunia dan juga ada gangguan pasokan di domestik. Dapat disimpulkan bahwa gangguan rantai pasok hingga kenaikan harga komoditas global menyebabkan tren inflasi merangkak naik tajam.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Pendidikan, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Makanan, Minuman dan Tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar dikarenakan adanya kenaikan harga kebutuhan pokok terutama komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah. Upaya yang dilakukan untuk menekan laju inflasi antara lain dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok secara berkala dan dipublikasikan melalui SIPOKMAS (Sistem Informasi Perkembangan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat), operasi pasar dan rapat koordinasi secara rutin oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II.9 dan Tabel II-10 berikut.

**Tabel II-9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019**

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2024

**Tabel II-10 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran
di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2023**

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kota Tegal Dalam Angka 2024, diolah, 2024

2.2.5. PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

**Tabel II-11 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan
PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

PDRB per kapita yang sempat sedikit melemah pada tahun 2020, disebabkan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pada tahun 2020 PDRB berkontraksi, yaitu tumbuh secara negatif. Hal ini menyebabkan PDRB per kapita sedikit melemah. Kondisi ini merupakan fenomena umum yang juga terjadi di daerah lain, termasuk Provinsi Jawa tengah maupun nasional. Dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi, maka perekonomian bertumbuh kembali sehingga pada tahun 2021 dan 2022, PDRB per kapita kembali meningkat.

Data PDRB per kapita ini merupakan data yang belum menggambarkan kondisi sesungguhnya pendapatan per kapita masyarakat. Dalam beberapa kasus, PDRB per kapita ini digunakan karena data pendapatan per kapita yang telah beberapa tahun ini tidak tersedia. Oleh karena itu, untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, seringkali digunakan data PDRB per kapita ini.

2.2.6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2019 sebesar 5,69 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Pada tahun 2021, perekonomian kembali berkembang yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen dan Indeks Gini pun juga meningkat sangat tajam menjadi 0,357. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi semakin menguat yaitu dengan angka 5,76 persen, tetapi Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,373. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-12 berikut.

**Tabel II-12 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Indeks Gini
2019	0,305
2020	0,314
2021	0,357
2022	0,373
2023	0,321

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kota Pekalongan masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkatkan kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan terdampak rob dan banjir. Upaya-upaya tersebut telah

diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

2.2.7. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, terdiri dari:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi:
 - a. Bantuan pangan;
 - b. Bantuan kesehatan;
 - c. Bantuan pendidikan; dan
 - d. Bantuan perumahan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
 - b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
 - c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
 - e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
 - f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, meliputi:
 - a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
 - b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
 - c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
 - d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
 - a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
 - b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
 - c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.2.7.1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket

komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

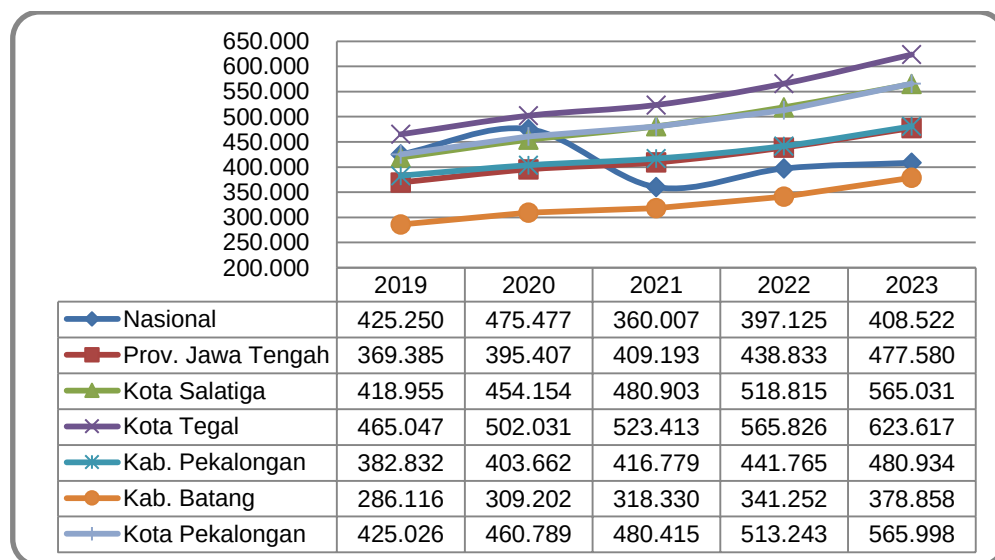
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2023, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp. 565.998/kapita/bulan. Angka ini diatas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 408.522 dan diatas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 477.580,00.

Tabel II-13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	454.652
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525
2022	513.243	341.252	441.765	565.826	518.815	438.833	513.517
2023	565.998	378.858	480.934	623.617	565.031	477.580	408.522

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2023

Untuk memberikan gambaran perbandingan garis kemiskinan antara Kota Pekalongan, daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, disajikan dalam grafik berikut.



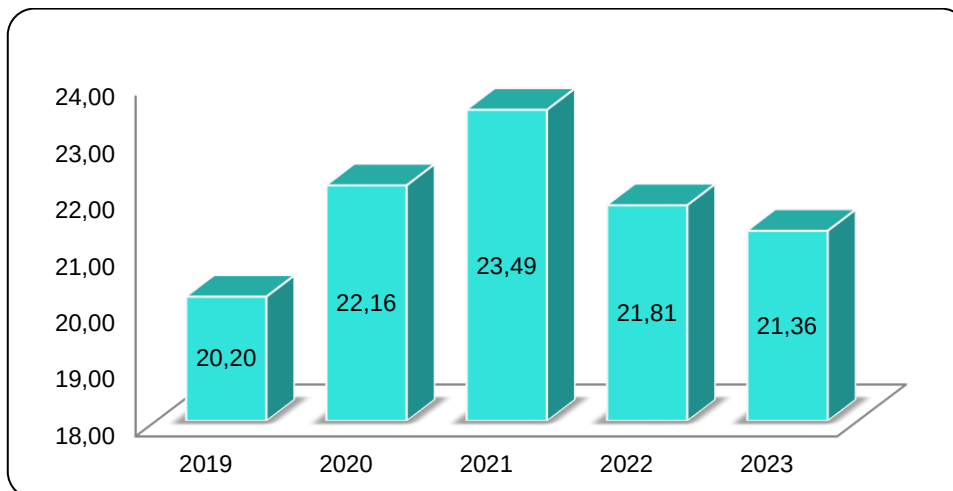
Gambar II.16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, dan <https://www.bps.go.id/> (diolah), 2023

2.2.7.2. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT. Di sektor kesehatan, juga disediakan jaminan kesehatan bagi sebagian masyarakat akan sangat membantu menekan pengeluaran masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja untuk industri dan mendorong lahirnya wirausaha baru.



Gambar II.17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 (000 jiwa)

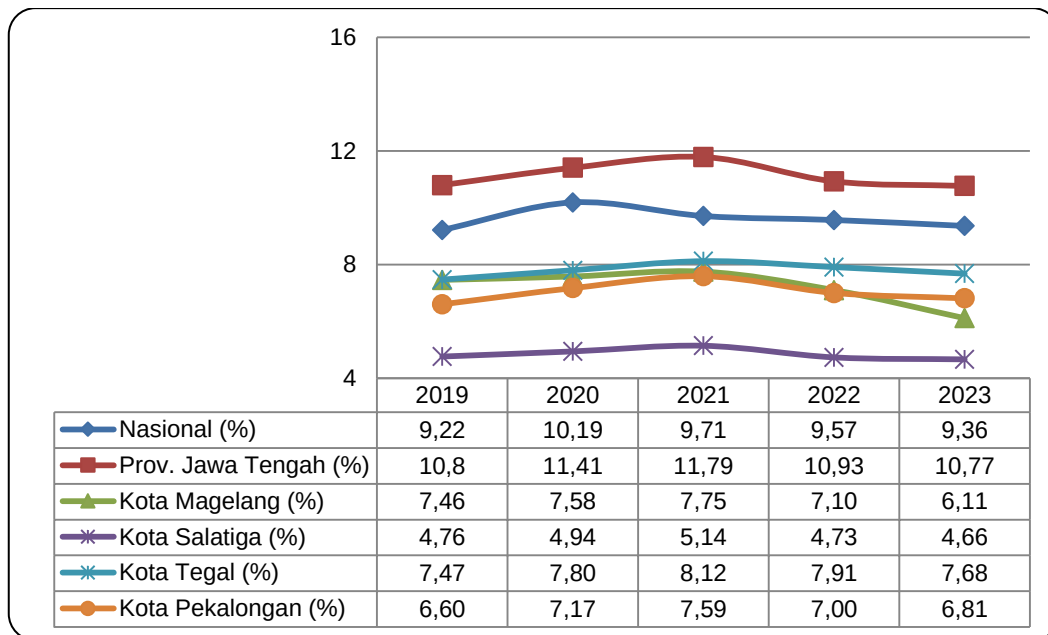
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin yaitu melalui pemberian bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai). Dalam hal meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, Pemerintah Kota melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dindagkop UKM, maupun kelurahan. Sedangkan dalam hal mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota mensinergikan kebijakan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT dengan mempersyaratkan penerima bantuan adalah warga miskin dari DTKS yang belum menerima bantuan apapun.

Selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada angka 6,60 persen atau sebanyak 20,20 ribu jiwa meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 7,17 persen dan 7,59 atau sebanyak 22,16 ribu jiwa dan 23,49 ribu jiwa. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi *COVID-19* berkepanjangan yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

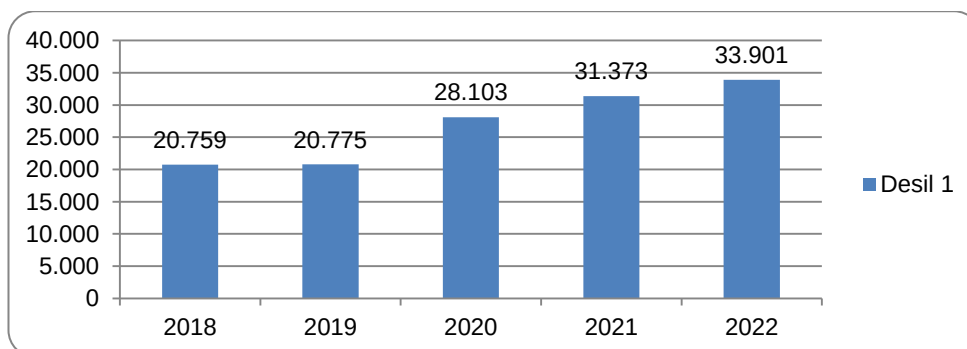
Kemudian tingkat kemiskinan mulai menurun di tahun 2022 menjadi 7,00 persen atau sebanyak 21,81 ribu jiwa sebagai dampak dilaksanakannya upaya percepatan Vaksinasi *COVID-19* dan upaya pemulihan ekonomi penduduk Kota Pekalongan pasca *COVID-19* dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 6,81 persen atau sebanyak 21,36 ribu jiwa. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut:



Gambar II.18 Perbandingan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2023

Mulai Tahun 2021, upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem saat ini sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya kini memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dari BKKBN beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasinya. Adapun jumlah individu yang tergolong ke dalam kategori penduduk sangat miskin berdasarkan data yang telah ditetapkan (desil 1) adalah sebagai berikut:



Gambar II.19 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

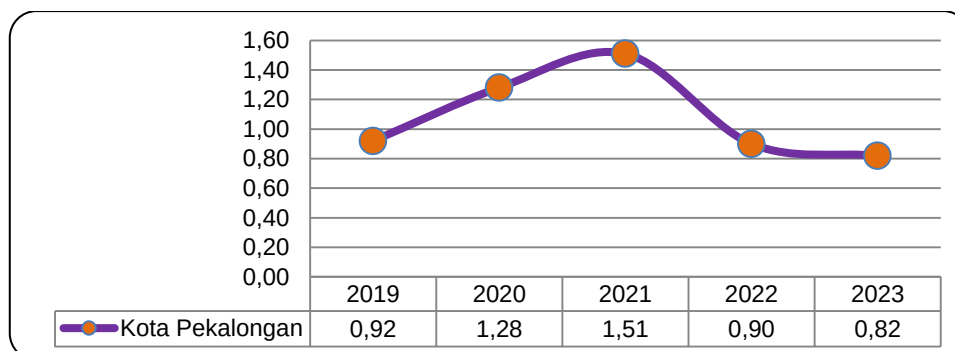
Sumber: DTKS 2018 – 2020 (diolah), Data P3KE 2021-2022

2.2.7.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index – P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis

kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

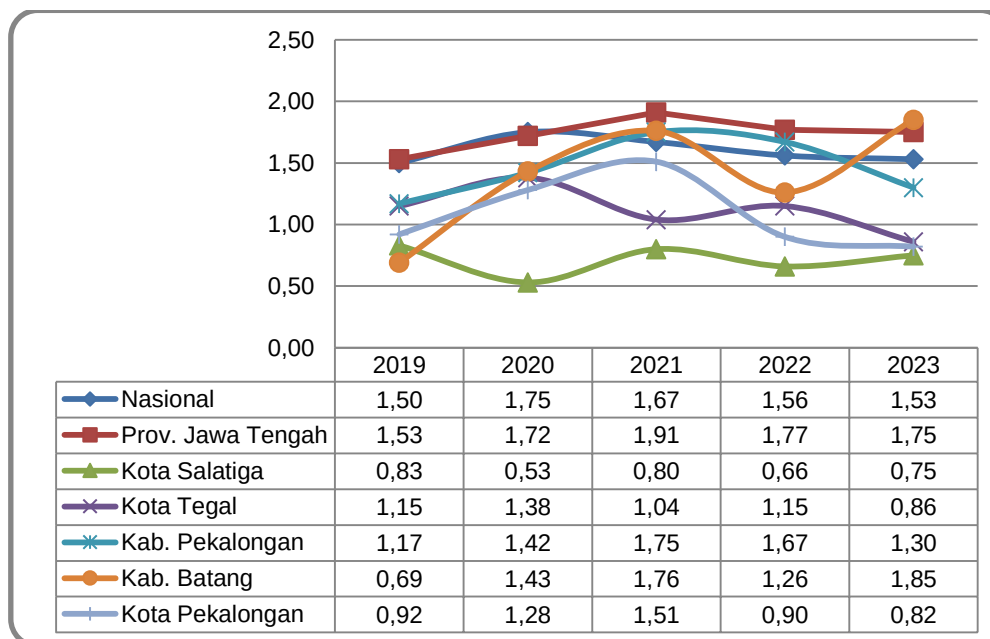
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,92, meningkat 0,36 menjadi 1,28 di tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat di angka 1,51. Pada tahun 2022 dan 2023 kembali menurun menjadi 0,90 dan 0,82. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar II.20 berikut.



Gambar II.20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/> dan <https://jateng.bps.go.id/> (diolah), 2023

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.21 berikut.



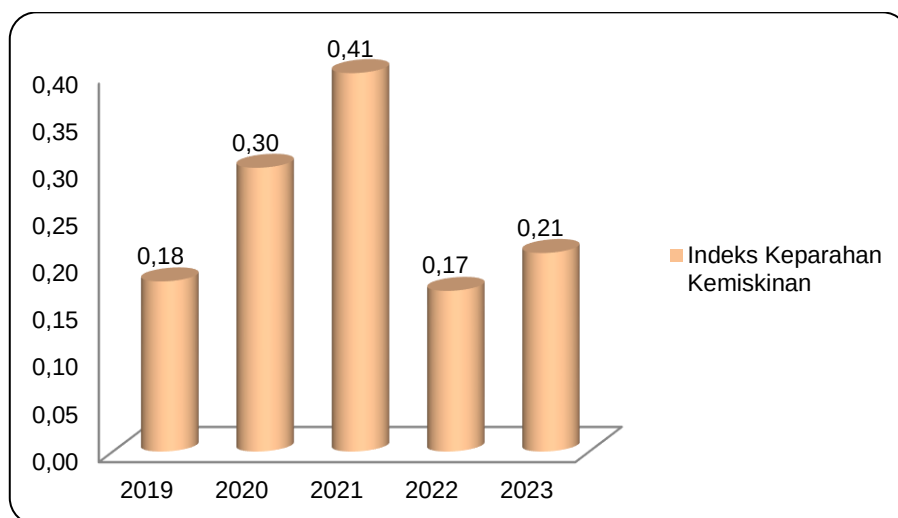
Gambar II.21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2023

2.2.7.4. Indeks Keparahahan Kemiskinan

Indeks Keparahahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*–P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 0,18 persen. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,30 dan 0,41, yang berarti ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 0,21 di tahun 2023.

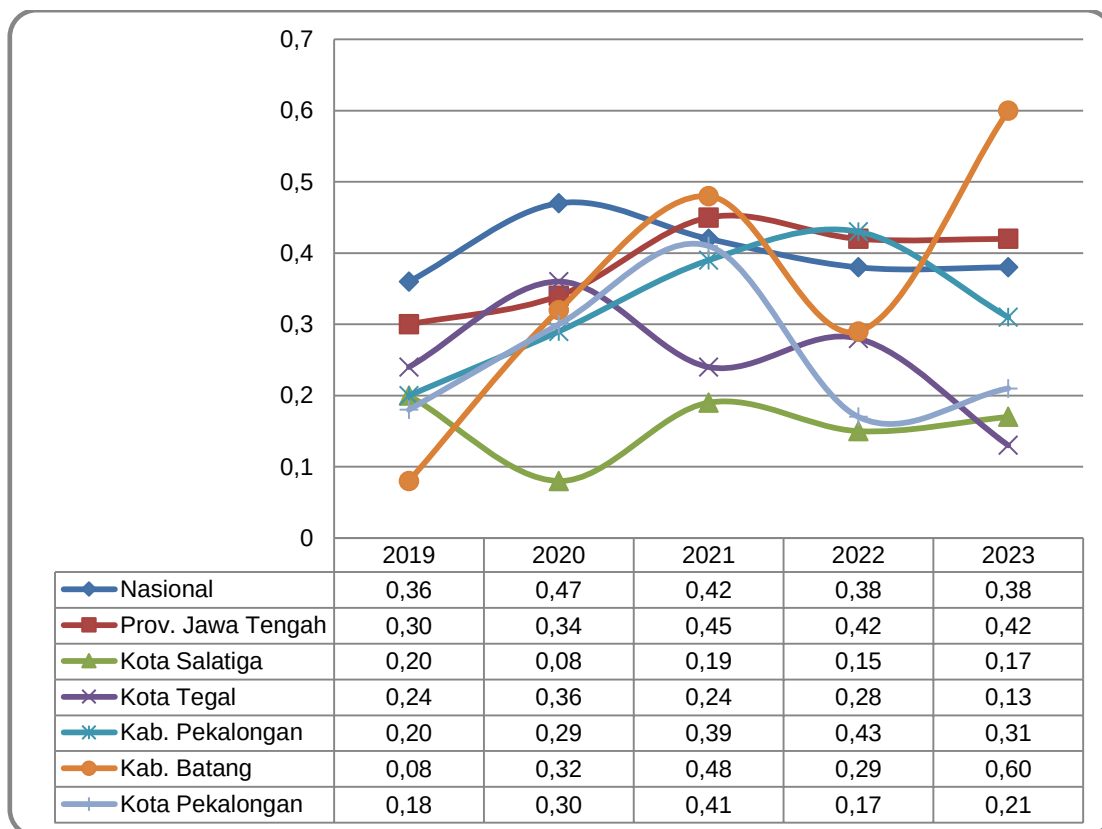


Gambar II.22 Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id dan jateng.bps.go.id (diolah), 2023

Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2023 Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga dan Kota Tegal, pada tahun 2023 Indeks Keparahahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi.

Indeks Keparahahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



Gambar II.23 Perbandingan Indeks Keparahaan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2023

Pasca pandemi *COVID-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan. Perkembangan menggembirakan bahwa pada tahun 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan kembali. Kondisi ini tentunya merupakan dampak dari perbaikan kinerja perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tentunya akan terus dilakukan terus-menerus, agar angka kemiskinan dapat semakin menurun.

Upaya terintegrasi telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, karena angka kemiskinan telah mencapai angka satu digit, maka penurunan angka kemiskinan telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang harus dientaskan adalah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lebih terintegrasi antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Pekalongan dan dilakukan secara kontinyu.

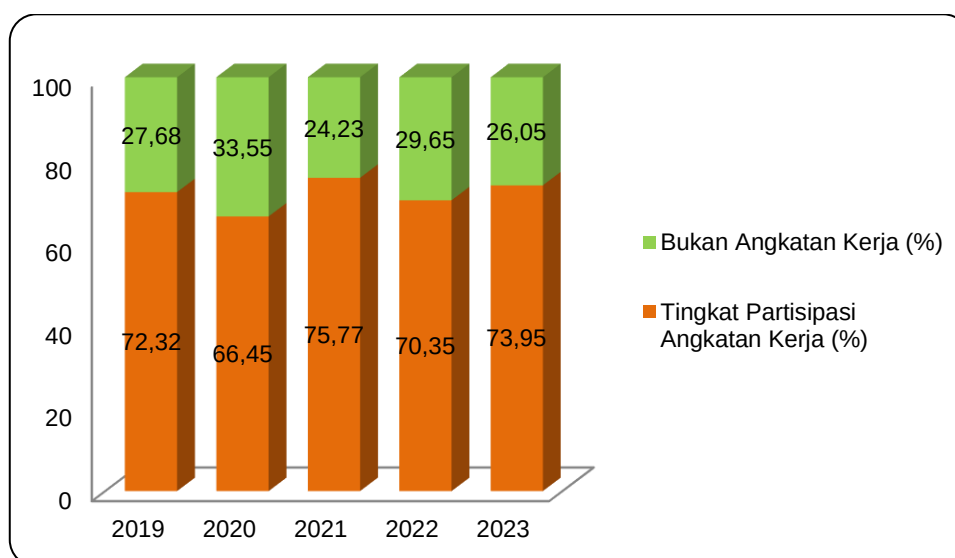
Salah satu cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah dengan mencermati data angka kemiskinan selama 1 (satu) dekade ini,

dengan dibandingkan indikator yang lain, terutama indikator kinerja makro kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berbagai perkembangan data berbagai indikator selama 1 (satu) dekade ini (tahun 2013-2022) bahwa angka kemiskinan memiliki korelasi kuat dan signifikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB Per Kapita. Angka kemiskinan memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Indeks Gini, dan Inflasi.

Korelasi angka kemiskinan dengan IPM dan PDRB per kapita adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dipadukan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan IPM maupun PDRB atau PDRB per kapita. Di sisi yang lain, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT belum memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kemiskinan. Upaya penurunan TPT harus dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan pun adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.2.8. Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

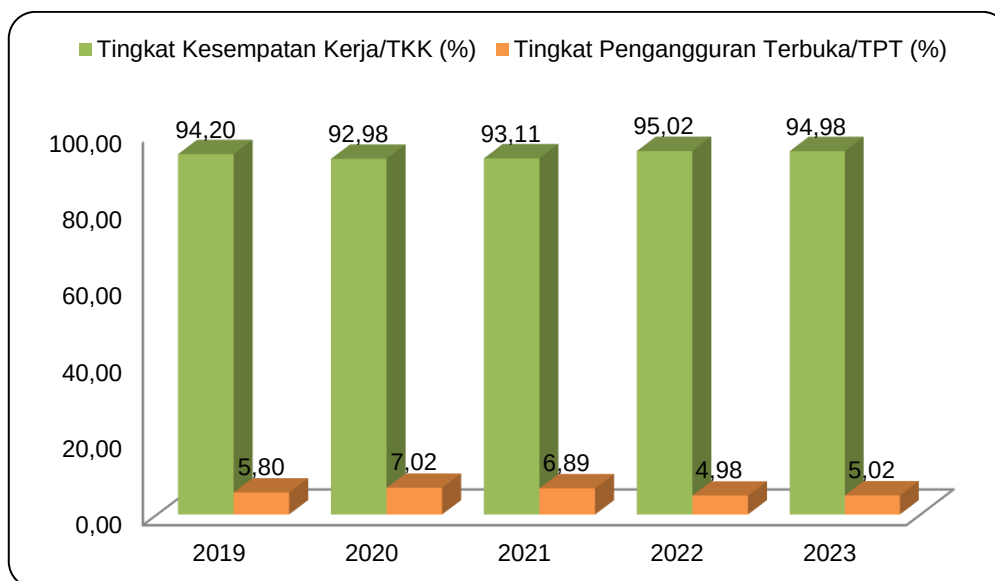
Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2023 tercatat sebanyak 171.522 orang. Dari jumlah tersebut, yang termasuk Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 73,95 persen pada tahun 2023, naik 3,60 persen dari tahun 2022. Sisanya, yaitu 26,05 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kenaikan TPAK pada tahun 2019-2023 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar II.24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: <https://pekalongankota.bps.go.id/>, <https://jateng.bps.go.id/>, 2023

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2023 mencapai 94,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,02 persen atau meningkat 0,04 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar II.25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2023

Nilai TPT secara persentase mengalami peningkatan dari 4,98 persen menjadi 5,02 persen, dan secara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dari 8.470 orang di tahun 2022 menjadi 9.065 orang pada tahun 2023. Semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi.

2.2.9. Angka Kriminalitas yang Ditangani

Angka kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2019 berada di angka 4,59. Di tahun-tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani selalu menurun, mulai dari 3,91 di tahun 2020, 2,60 di tahun 2021 dan 1,47 di tahun 2022 dan 4,29 di tahun 2023.

Tabel II-14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Angka Kriminalitas
2019	4,59
2020	3,91
2021	3,60
2022	1,47
2023	4,91

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas cenderung menurun, namun naik Kembali di tahun 2023. Angka ini belum secara langsung berdampak terhadap kondusivitas

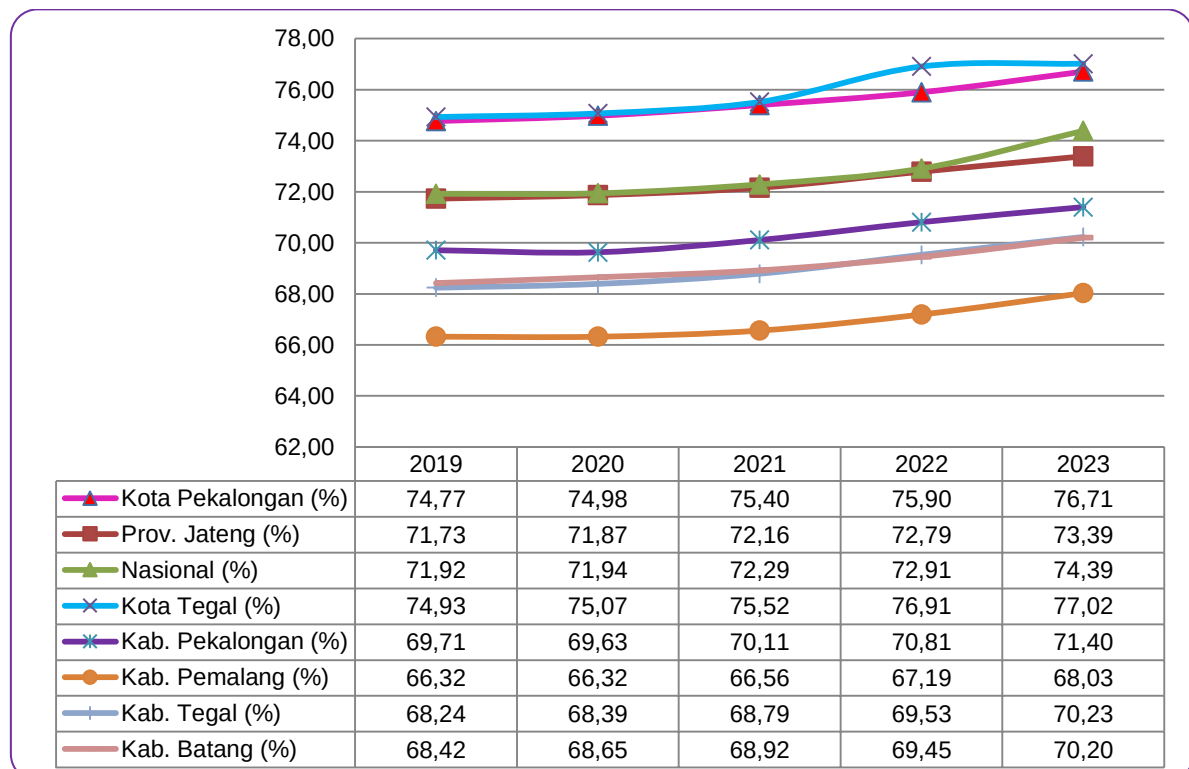
wilayah karena belum adanya laporan maupun penelitian terkait korelasi antara angka kriminalitas dan kondusivitas wilayah. Data angka kriminalitas dari Kesbangpol Kota Pekalongan bersumber dari Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Data dari dua sumber tersebut belum tentu memiliki metode pengambilan data yang sama.

Berdasarkan kecenderungan angka kriminalitas tersebut, salah satu tantangan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam rangka penciptaan kondusvitas wilayah dan menekan angka kriminalitas adalah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2.2.10. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2019 yaitu 74,77 menjadi 76,71 di tahun 2023. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2023, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di setelah Kota Tegal.



Gambar II.26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023 disajikan dalam Tabel II-15 berikut.

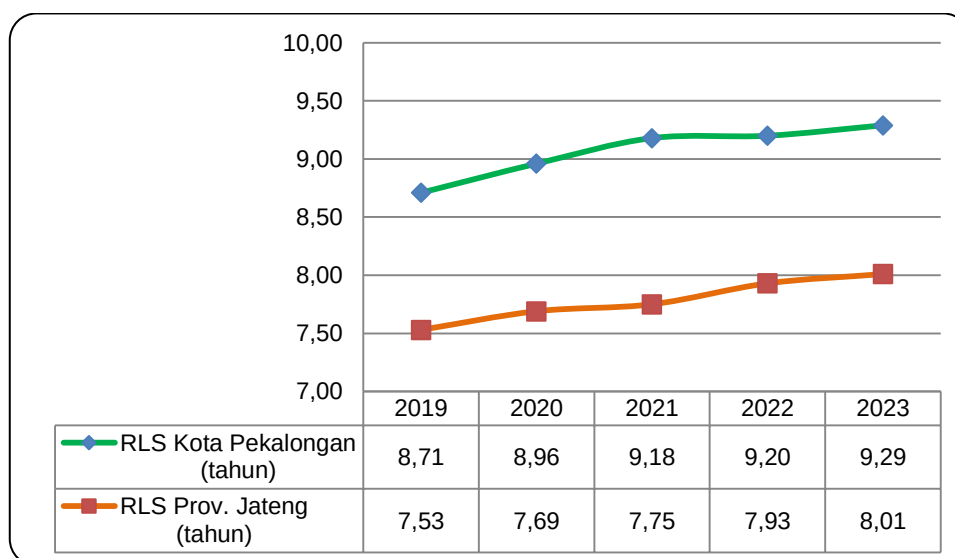
Tabel II-15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019–2023

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74,51	13.158,00	75,90
2023	9,29	12,87	74,60	14.056,00	76,71

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.2.11. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan secara moderat. RLS tahun 2019 sebesar 8,71 tahun, terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, menjadi 9,29 tahun pada tahun 2023. RLS Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.27 berikut.



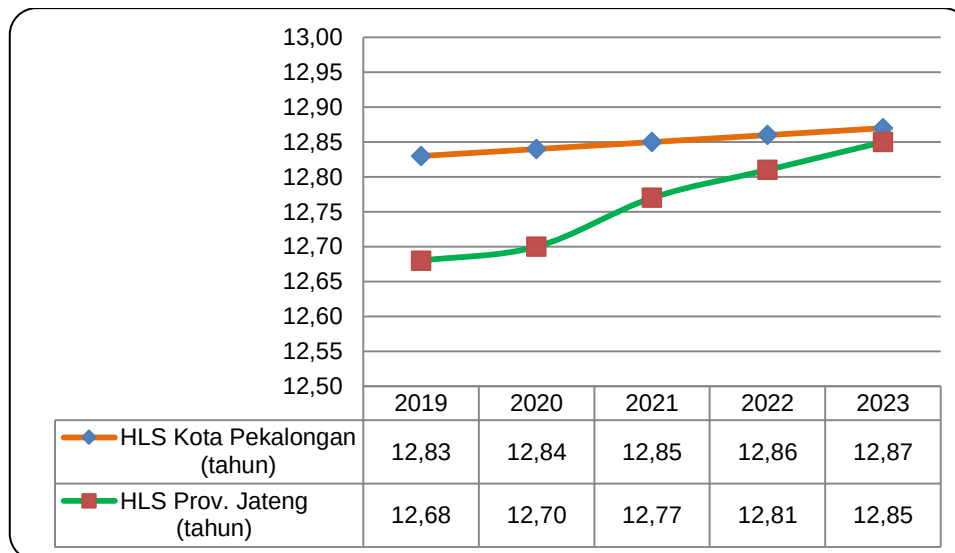
Gambar II.27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.2.12. Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seiring dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, HLS Kota Pekalongan berada di atas HLS Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.28 berikut.



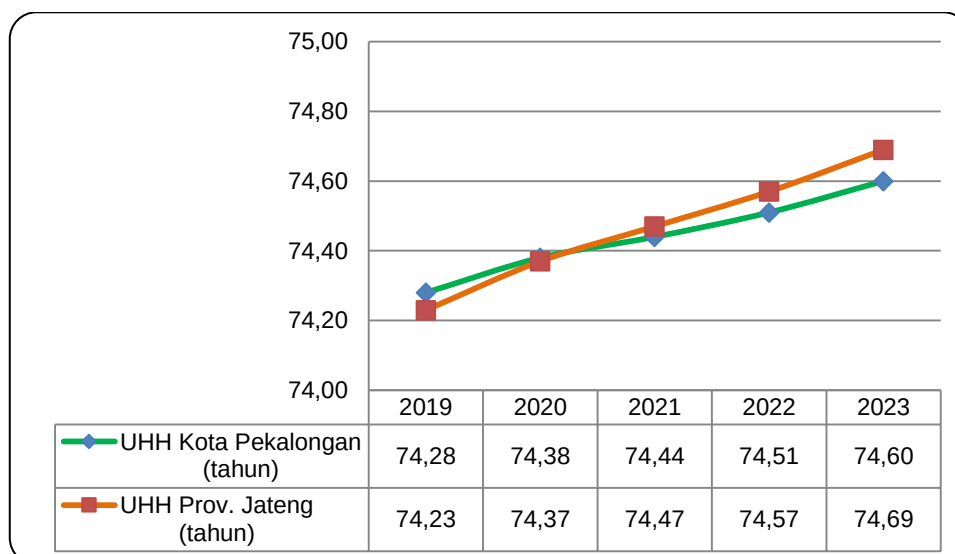
Gambar II.28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Pada tahun 2023 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,87 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.2.13. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2019 - 2023, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,28 pada tahun 2019 menjadi 74,60 di tahun 2023. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2022 dan 2023 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.29 berikut.



Gambar II.29 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

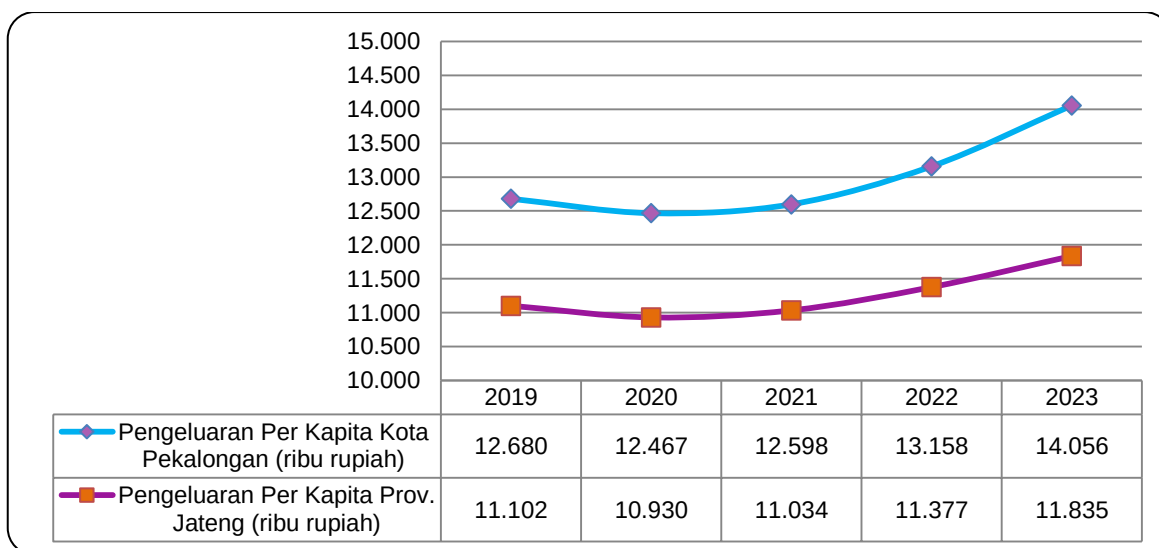
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.2.14. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2019-2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.680.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II.30 berikut.



Gambar II.30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

2.2.15. Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel II-16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83
2021	111,96	106,40	80,69	94,00	76,12	86,65
2022	111,33	106,19	80,07	94,05	77,40	86,83
2023	107,79	105,01	88,63	92,80	84,15	87,84

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Pada tahun 2019, APK jenjang SD/MI/ sederajat sebesar 112,45 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 110,98 persen, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 111,96 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 111,33 persen dan 107,79 persen. Tidak seperti APK di jenjang SD/MI yang mengalami fluktuasi, APK di jenjang SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2019 sebesar 75,91 persen, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 79,36 persen, meningkat kembali di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 80,69 persen dan 80,07 persen, kemudian menjadi 88,63 di tahun 2023. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK fluktuatif dari awal periode (tahun 2019) hingga di tahun 2023 berada di angka 84,15 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2019-2023, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2023, yaitu sebesar 105,01 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 91 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 86-87 persen. Secara umum, APK jenjang SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah, namun APK jenjang SMP/MTs dan APK jenjang SMA/MA/SMK Kota Pekalongan lebih rendah dibanding APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih didominasi laki-laki dengan nilai 108,22. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/ setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 107,36. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-17 berikut.

Tabel II-17 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2023

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	108,22	107,36
	SMP/Setara (persen)	81,54	95,72
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2.2.16. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/ sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/ sederajat lebih tinggi daripada SMP/ sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah, dimana pada jenjang SMP/ sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/ sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/ S1/ S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/ II/ III/ Sarjana Muda dalam kurun waktu 2018-2019. Untuk kategori Tidak/ Belum Tamat SD/ sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/ Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen.

Tabel II-18 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, 2022

Selanjutnya, mulai tahun 2020 BPS menghitung pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan usia 15 tahun keatas. Angka tertinggi berada pada jenjang SMA/ sederajat, yaitu diatas 30 persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel II-19 berikut.

Tabel II-19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
2020	0,98	9,04	27,19	24,36	30,28	8,15
2021	0,69	7,60	22,55	25,62	31,68	11,86
2022	n/a	n/a	31,21	21,30	34,68	12,80
2023	1,26	7,68	23,80	26,88	31,19	9,19

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

2.2.17. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 jenjang SD/ MI berada di kisaran 99 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/ MTs pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan APM pada jenjang SM/ MA/ SMK pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka APM SD/ MI/ Sederajat Kota Pekalongan mayoritas lebih tinggi. Tetapi APM SMP/ MTs/ Sederajat Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan APM SMA/ MA/ SMK/ Sederajat Kota Pekalongan jika dilihat dari tahun 2019-2023 hanya pada tahun 2023 saja Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 baik SD/ MI, SMP/ MTs dan SM/ MA disajikan dalam Tabel II-20 berikut.

Tabel II-20 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74
2021	99,11	98,22	75,97	80,99	55,04	60,46
2022	99,78	98,39	76,53	81,02	55,28	61,17
2023	99,56	98,46	82,33	81,56	64,39	61,46

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2023, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-21 berikut.

Tabel II-21 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2023

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	100,83	98,29
	SMP/Setara	77,39	87,27
	SMA/Setara	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2.2.18. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 sampai 2023 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 adalah 8,9 dengan jumlah kasus kematian sejumlah 52 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan menjadi 9,91 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sejumlah 56 kasus. Dan di tahun 2023 Angka Kematian Bayi sebesar 13,71 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 67 kasus.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari tahun 2018 sampai 2023 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka 986,29 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

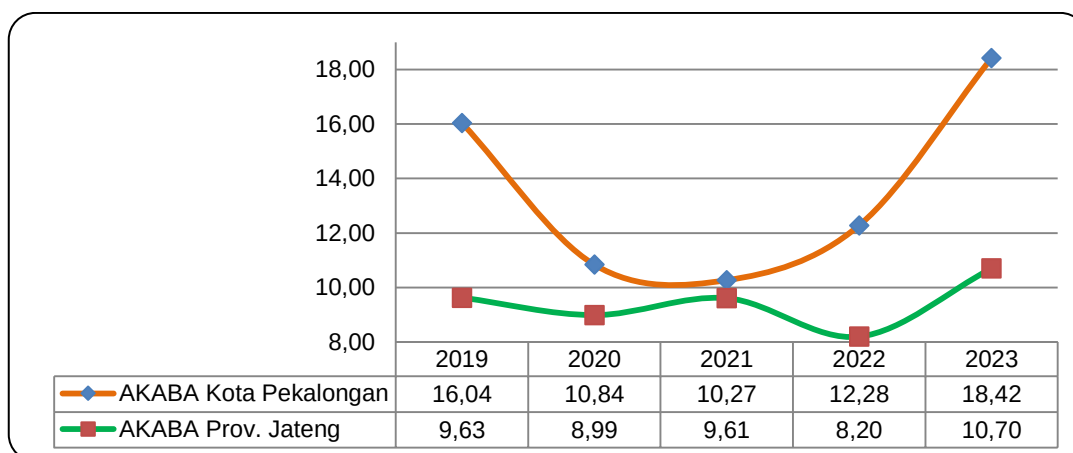
Tabel II-22 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10
2022	9,96	990,04
2023	13,71	986,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

2.2.19. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar II.31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2023 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2022 Dinkes Jawa Tengah, 2024

Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 – 2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 AKABA 9,63 per 1.000 KH, turun menjadi 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020, meningkat menjadi 9,61 per 1.000 KH di tahun 2021, kemudian kembali menurun 8,20 per 1.000 KH di tahun 2022, dan kembali meningkat 10,7 per 1.000 KH pada tahun 2023.

Capaian AKABA dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. AKABA dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat dari 10,27 per 1.000 KH pada tahun 2021 dengan 60 kasus kematian menjadi 12,21 per 1.000 KH pada tahun 2022 dengan 69 kasus kematian. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,42 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 90 kasus. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun

kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

2.2.20. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain, di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel II-23 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23
2022	7	5621	124,53
2023	6	4887	122,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2023, 2024

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 AKI sebesar 188,23 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 11 kasus menurun menjadi 123,87 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 7 kasus di tahun 2022. AKI tahun 2023 turun menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus perdarahan, infeksi, eklamsia dan penyebab lain.

2.2.21. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, angka kesakitan berada di angka 16,68 persen. Angka tersebut menurun di tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 12,89 persen dan 8,38 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 11,71 persen dan 12,20 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-24 berikut.

**Tabel II-24 Angka Kesakitan
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89
2021	8,38
2022	11,71
2023	12,20

Sumber: jateng.bps.go.id dan
pekalongankota.bps.go.id, 2024

2.2.22. Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibandingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2019 – 2023 disajikan dalam Tabel II-25 berikut.

**Tabel II-25 Prevalensi Balita Stunting
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2019	6,87
2020	9,42
2021	7,82
2022	6,80
2023	7,43

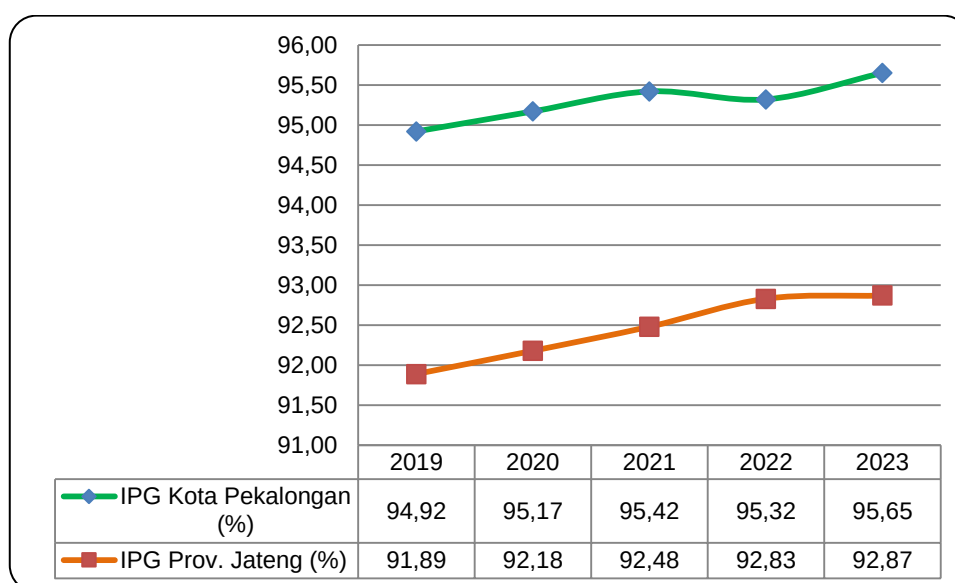
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Dari Tabel II-25 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari 6,87 persen di tahun 2019 menjadi 9,42 persen di tahun 2020 namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,82 persen dan kembali menurun di tahun 2022 sebesar 6,80 persen. Kemudian kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 7,43 persen.

2.2.23. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,65 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



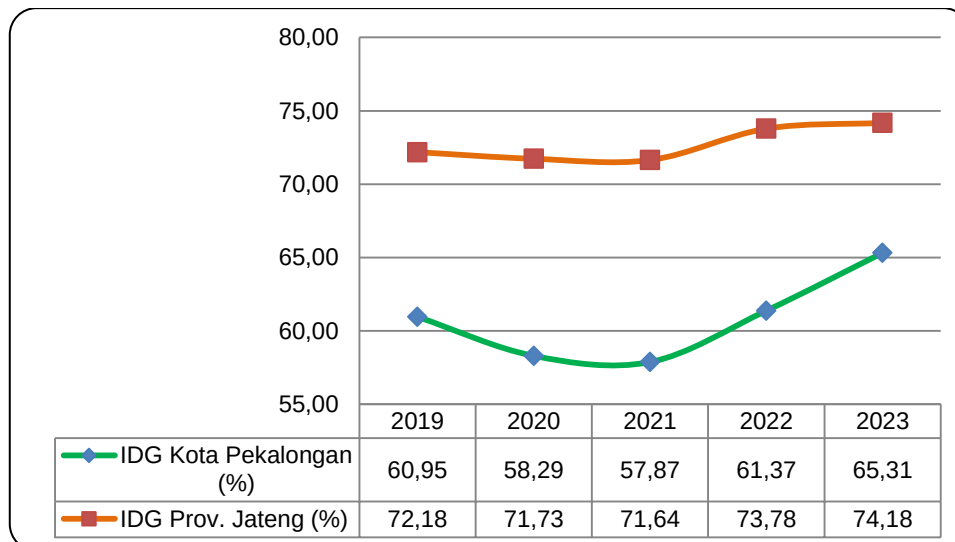
Gambar II.32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.2.24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 60,95, kemudian terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 65,31.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019-2023, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar II.33. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



Gambar II.33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.2.25. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-26 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 162 kelompok kesenian. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 144 kelompok dan kembali menurun pada tahun 2023 sejumlah 128 kelompok kesenian. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel II-26 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Kesenian	162	162	232	144	128
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	2,47	2,47	1,72	2,78	3,12

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang akan diberikan terbatas.

2.2.26. Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah organisasi pemuda yaitu 26 organisasi. Pada tahun 2020 - 2021 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022 dan 20 kegiatan di tahun 2023.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2019-2023 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-27 berikut.

Tabel II-27 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Pemuda	26	24	24	16	40
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	10	16	20

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Dari tahun 2019 jumlah klub olahraga 20 klub dan jumlah ini tidak berubah sampai tahun 2020. Di tahun 2021 bertambah 15 klub sehingga menjadi 35 klub dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 50 klub olahraga. Sementara itu gedung olahraga milik Pemerintah Kota Pekalongan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 2 gedung.

Tabel II-28 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Klub Olahraga	20	20	35	50	50
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2019 dan 2019 berjumlah 31 organisasi. Terdapat penambahan 3 (tiga) organisasi olahraga di tahun 2021 sehingga menjadi 34 organisasi olahraga, jumlah ini tidak bertambah sampai dengan tahun 2023.. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 10 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi,

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel II-29 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

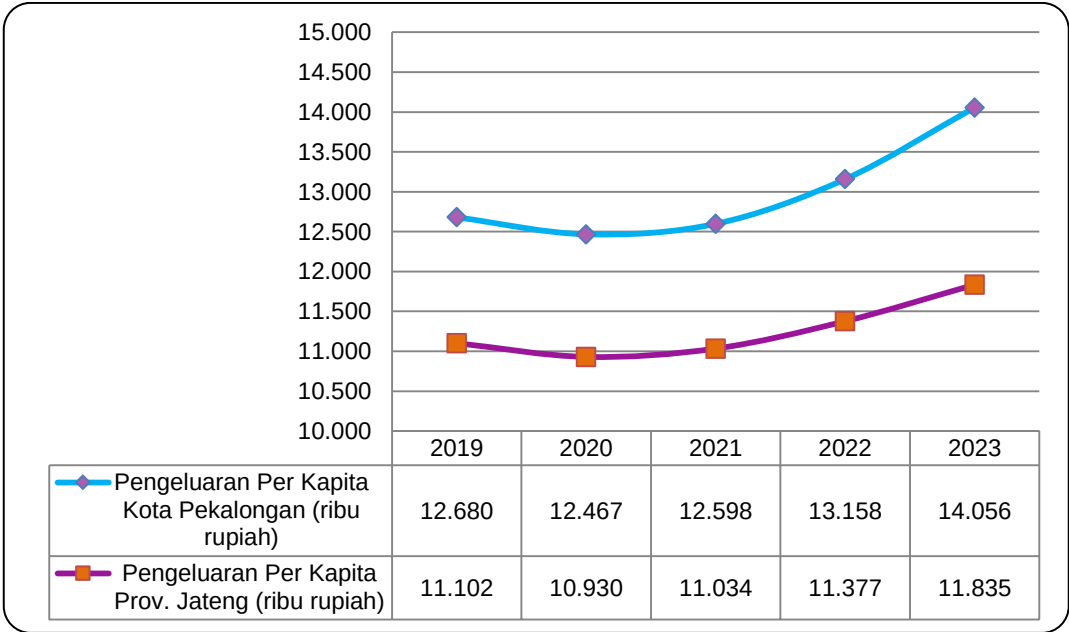
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	31	31	34	34	34
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	55	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	8	8	10	15	15

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

2.3, ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



Gambar II.34 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2019-2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.680.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat

menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000.

2.3.2. Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Kondisi transportasi di Kota Pekalongan menunjukkan jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2018 sampai 2021 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0,0002. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel II-30.

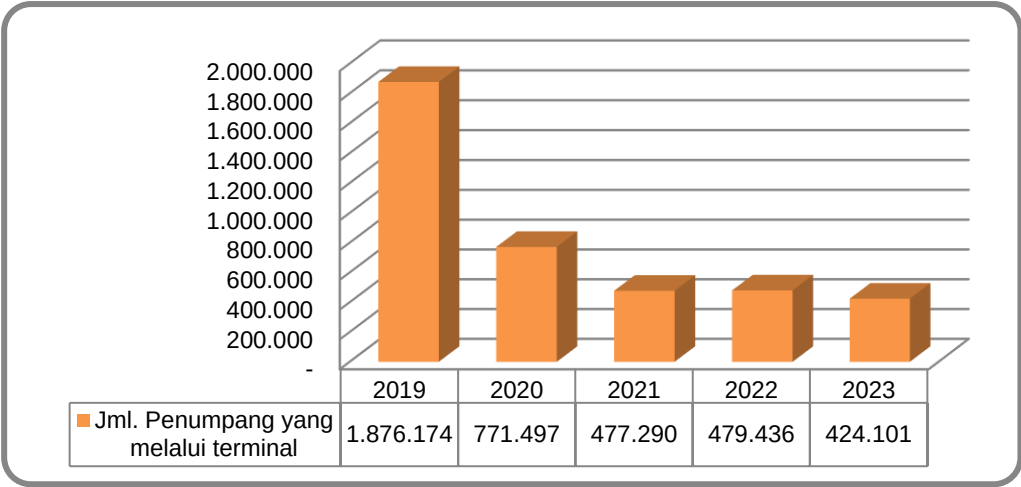
Tabel II-30 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009
2021	153,41	122.590	0,0013
2022	153,41	572.435	0,0003
2023	150,27	612.019	0,0002

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023 dan Dinas Perhubungan Kota pekalongan, 2024

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Terminal tipe A terdapat di Kota Pekalongan yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan drastis dari tahun 2019 1.876.174 penumpang menjadi 424.101 penumpang di tahun 2023. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar II.52 berikut.

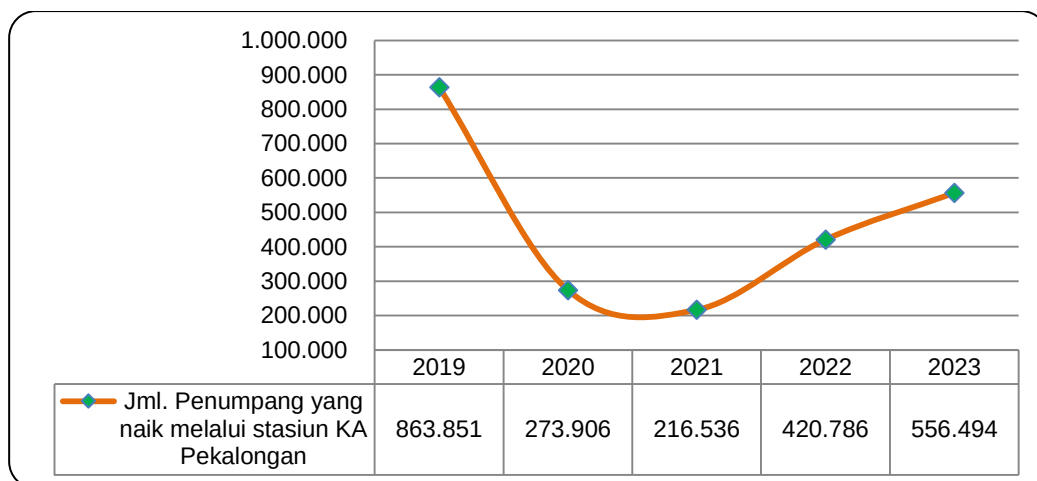


Gambar II.35 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Gambar II.36 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

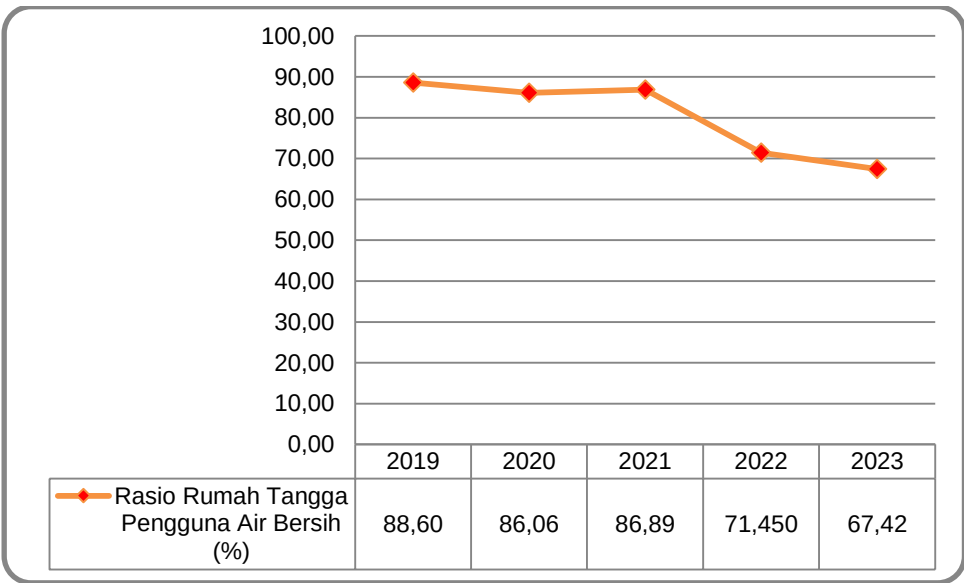
Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan sangat fluktuatif setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar II.53. Tahun 2019 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 273.906 dan 216.536 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi COVID-19. Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan meningkat kembali di tahun 2023 sebanyak 556.494.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang akan menuju maupun dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan dilayani melalui PDAM (oleh Perumda Tirtayasa) dan melalui PAMSIMAS (oleh masyarakat). Secara umum, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PDAM cenderung meningkat. Sebaliknya, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PAMSIMAS cenderung menurun / tetap. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menambah pasokan air minum yang bersumber dari air permukaan di banding dengan air bawah tanah. Meskipun demikian, secara keseluruhan (PDAM dan PAMSIMAS), jika dilihat secara persentase

capaian layanan air minum sejak 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sebagaimana Gambar 54.



Gambar II.37 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2024

Menurunnya rasio rumah tangga pengguna air bersih yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan cara menghitung dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, diasumsikan 1 SR melayani 4,03 jiwa sebagaimana hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023 (mengacu pada data BPS yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah Kartu Keluarga (KK)). Sementara itu, cara menghitung pada tahun-tahun sebelumnya diasumsikan 1 SR melayani 5 jiwa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-31 berikut.

Tabel II-31 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

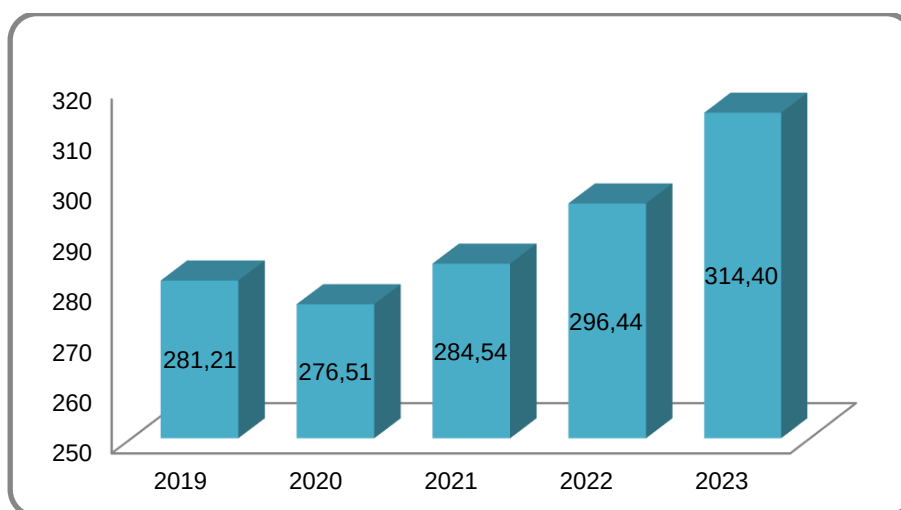
Tahun	PDAM					PAMSIMAS & DAK (Sumur)		TOTAL		Persentase	
	SR (Sambungan Rumah)		HU (Hidran Umum)								
	Jumlah	Jiwa	Jumlah HU	Jumlah Rumah Tangga	Jiwa	Jumlah	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
2019	27.017	135.085	240	4.800	24.000	21.712	108.560	53.529	267.645	88,26	88,26
2020	27.565	137.825	246	4.920	24.600	21.933	109.665	54.418	272.090	88,60	88,60
2021	26.923	134.615	214	4.280	21.400	21.663	108.315	52.866	264.330	86,06	86,06
2022	27.193	135.965	214	4.280	21.400	22.103	110.515	53.576	267.880	86,89	86,89
2023	28.035	112,981	251	6.228	25.100	21.150	85.235	62.100	317.524	67,42	67,42

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama tiga tahun terus meningkat. Pemakaian listrik tahun 2019 sebesar 281,21

MWh, maka pada akhir tahun 2023 sebesar 314,40 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023.



Gambar II.38 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2019-2023 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2019 sebesar 121,44 persen. Jumlah tersebut menurun 113,07 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 101,50 persen dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 113,25 dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2023 mencapai 130,94. Secara lengkap disajikan dalam Tabel II-32 berikut.

Tabel II-32 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	96.121	101,50
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024, 2024

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019-2023 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2, dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel pada tahun 2019 dan 25 (dua puluh lima) hotel pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) pada tahun 2023. Tersedianya berbagai pilihan hotel

maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Hal yang menjadi tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang memadai salah satunya yakni hotel.

**Tabel II-33 Jumlah dan Tipe Akomodasi
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Akomodasi	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel Berbintang	10	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	20	25	25	25	26

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024 dan Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

2.3.3. Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2023, telah dibuka layanan perizinan untuk Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/ atau Persetujuan Pemerintah, dan Pelayanan Non Perizinan. Dimana lama proses perizinan bervariasi antara rentang waktu 1-30 hari. Dengan adanya SOP lamanya proses perizinan, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perizinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 20 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-34 berikut.

Tabel II-34 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

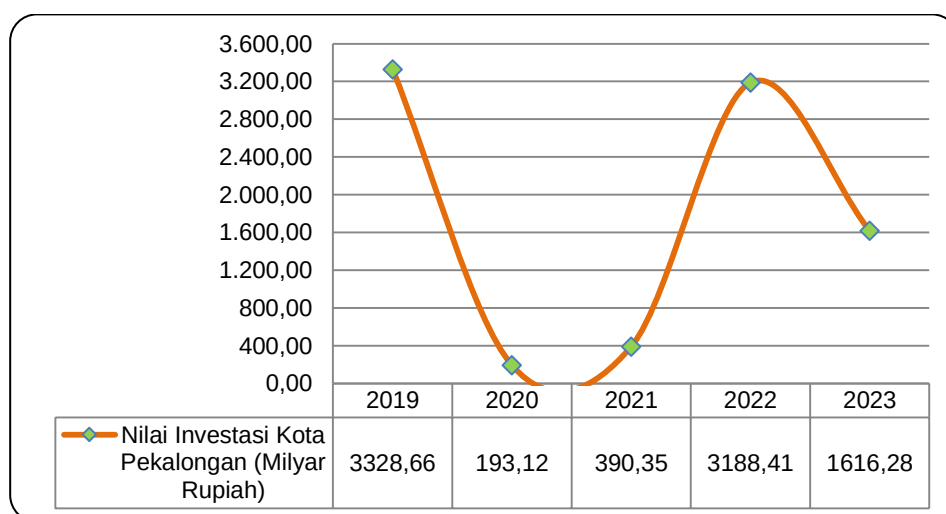
No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
17	1	2020	Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040
18	9	2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
19	9	2022	Penyelenggaraan Penanaman Modal
20	5	2023	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

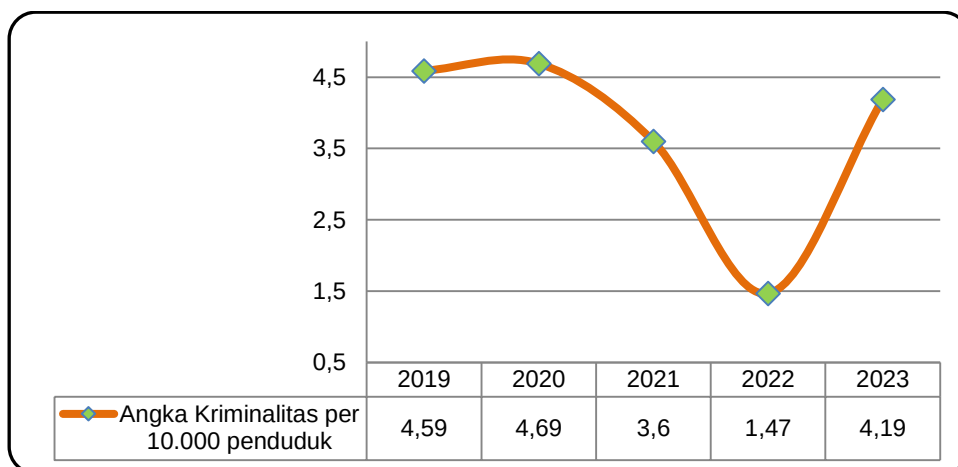


Gambar II.39 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar II.57 berikut.



Gambar II.40 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

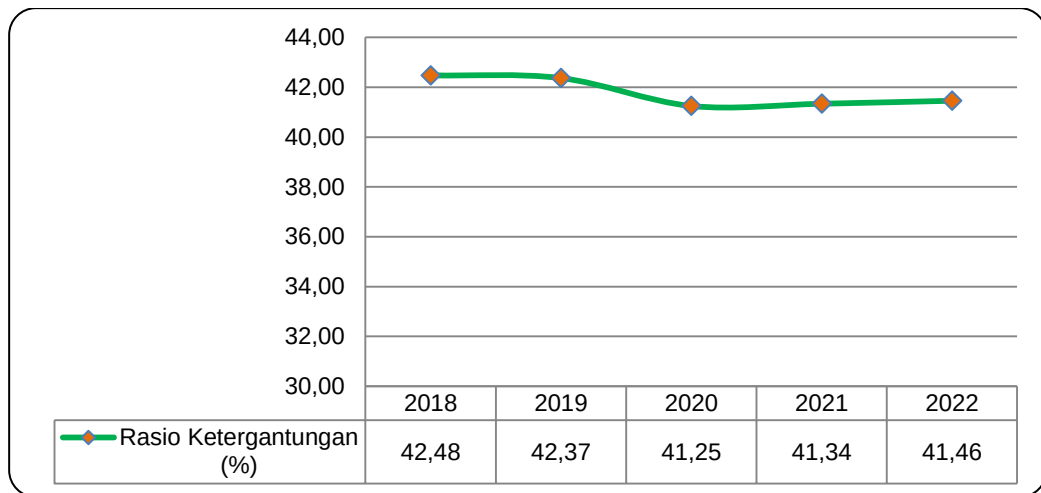
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.3.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2017 – 2020, rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,64 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25. Namun meningkat di tahun 2021 dan 2022 menjadi 41,34 dan 41,46.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar II.58 berikut.



Gambar II.41 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2023

2.3.5. Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Yang kemudian menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, berdasarkan pemetaan ekosistem inovasi melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) ini bertujuan menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Kota Pekalongan dengan nilai indeks sebesar 3,14 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan merupakan pembangkit daya saing bagi dari Kabupaten yang berbatasan, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Tabel II-35 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023

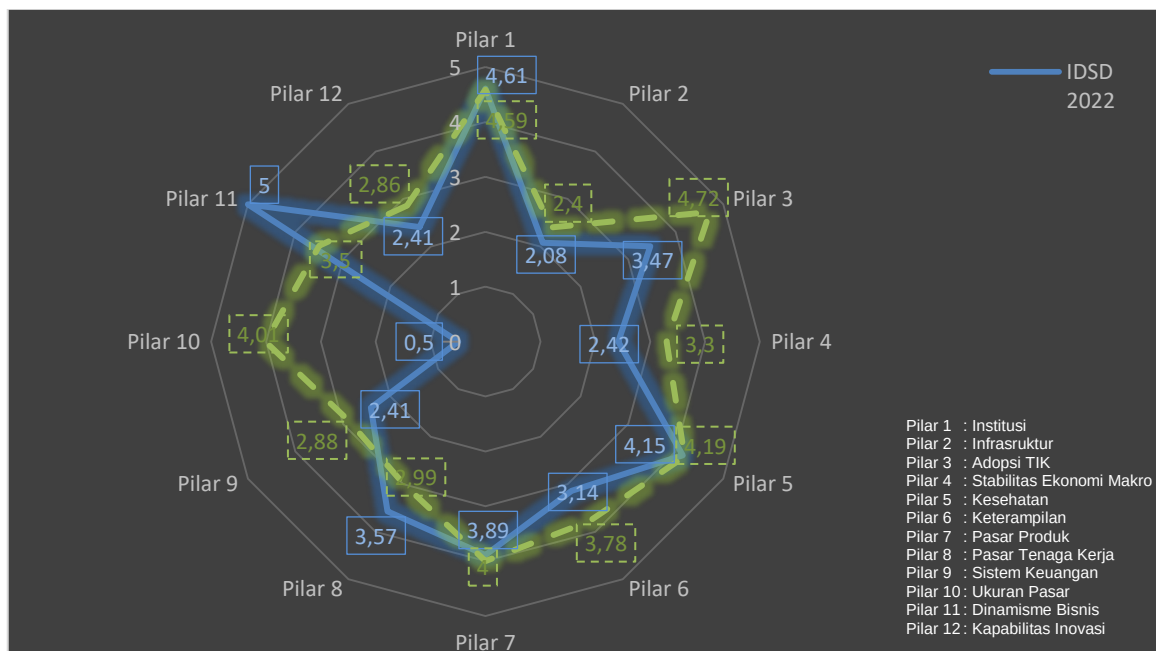
No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2019*	2020*	2021*	2022	2023
1	Kota Pekalongan	6,345	3,676	3,418	3,14	3,60
Persandingan dengan kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	5,821	3,613	3,395	2,91	3,36
3	Kab. Batang	6,091	3,368	3,403	2,97	3,32

No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2019*	2020*	2021*	2022	2023
4	Kab. Pemalang	4,642	3,063	2,848	2,93	3,20
Persandingan dengan kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	6,789	3,755	3,298	3,30	3,63
6	Kota Salatiga	6,448	3,568	3,430	3,40	3,77
7	Kota Magelang	4,833	3,259	3,130	3,50	3,81

*Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: idsd.jateng.id (diolah), 2024

Secara lebih rinci, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar II.42 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN

Berdasarkan capaian di atas, masih terdapat beberapa skor pilar yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah, yaitu pilar infrastruktur, pasar tenaga kerja, sistem keuangan dan kapabilitas inovasi. Hal ini disebabkan karena capaian pilar masih di bawah angka 3 (tiga). Pilar yang mengalami penurunan nilai dibandingkan tahun 2022 adalah pilar pasar tenaga kerja yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebijakan pasar tenaga kerja aktif, upah pekerja, dan kesetaraan upah perempuan dan laki-laki, serta pilar dinamisme bisnis yang dipengaruhi oleh kapasitas sektor swasta untuk menghasilkan dan mengadopsi teknologi baru dan cara baru di daerah

Pilar yang mengalami kenaikan signifikan yaitu pilar adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro dan ukuran pasar. Pilar adopsi TIK dipengaruhi oleh tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di daerah. Pilar stabilitas ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah yang meliputi tingkat inflasi, kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, indeks ketahanan pangan,

nilai investasi, dan PDRB per kapita. Sedangkan Pilar ukuran pasar dipengaruhi oleh PDRB, dan Rasio Nilai Impor terhadap PDRB.

Disamping itu, berdasarkan tolak ukur kondisi Inovasi Daerah melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri, Kota Pekalongan termasuk kategori Inovatif untuk kategori Kota (Peringkat 38 dari 93 Kota se Indonesia) dengan nilai 53,96 di Tahun 2022. Indeks inovasi tersebut meningkat cukup signifikan dibanding capaian tahun 2021 (44,72).

Dalam rangka mengembangkan inovasi lebih lanjut, Kota Pekalongan menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah yang menetapkan Inovasi Daerah Tahun 2022, menetapkan pemenang inovasi tahun 2022 dan inisiasi inovasi tahun 2023, serta inisiasi inovasi yang mendapatkan pembiayaan APBD tahun 2023. Berikut ini gambaran inovasi yang telah dilakukan Kota Pekalongan tahun 2020-2022, yang meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2022, telah disusun inovasi yang terkait tata kelola pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem Informasi Manajemen Tambahan Penghasilan Pegawai Berbasis E-Presensi dan E-Kinerja atau SIMANTAP BISA bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. SIMANTAP BISA adalah bentuk pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya percepatan Reformasi Birokrasi melalui implementasi transformasi SDM Aparatur dan transformasi digital, merupakan inovasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan yang diinisiasi sejak Bulan Januari 2020 dan diluncurkan pada tanggal 26 Juni 2021.

Pada Tahun 2022 dilakukan pembaharuan agar sesuai dengan regulasi terbaru sehingga aplikasi menjadi SIMANTAP BISA REBORN 23, dengan pembaharuan berupa Penyesuaian proses bisnis penyusunan SKP, Penerapan dialog kinerja, Pemberlakuan verifikasi dan evaluasi kinerja bulanan, dan Penilaian perilaku kerja.

- b. Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) di Sekolah Negeri Melalui Aplikasi Kepegawaian Pendidik Tenaga Kependidikan (ASIK-PTK) pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. ASIK-PTK merupakan aplikasi yang dapat menggabungkan data kepegawaian di satuan pendidikan baik yang berstatus PNS, PPPK maupun PTK Pengganti sehingga pendataan dan penataan Pegawai di satuan pendidikan dapat terintegrasi.
- c. Aplikasi e-UMK (e-Uang Muka Kegiatan) (2022) adalah sebuah inisiatif Bappeda Kota Pekalongan dalam upaya untuk melakukan kontrol dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing – masing rekening belanja. Aplikasi ini memudahkan bendahara dan bendahara pembantu dalam hal pengadministrasian kegiatan, dan memudahkan PPTK dan PA dalam monitoring capaian anggaran kegiatan.
- d. Tools Cascading Kinerja (2022) , merupakan aplikasi yang disusun Bappeda untuk membantu merumuskan hierarki kinerja, dari visi, misi, program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja dilakukan dengan menginput data ke dalam aplikasi. Tools ini digunakan oleh Bappeda dan OPD dalam penyusunan Renstra

OPD dengan mengkaitkan dengan struktur kinerja dalam RPMD Kota Pekalongan 2021-2026.

- e. Klinik SPIP (2022) adalah layanan konsultasi dari Inspektorat kepada OPD di Kota Pekalongan yang membutuhkan informasi terkait Sistem Pengendalian Internal

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

- a. SINOREG, saat ini penomoran produk hukum menggunakan database excel, data diinput ke excel, kemudian ditulis pada surat kendali. Dengan dibuatnya aplikasi SINOREG data yang diinput dapat langsung dicetak sehingga mempercepat pelayanan serta pengolahan data dan laporan lebih mudah.
- b. SIMANTAN (Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan) Sistem Informasi tata ruang menampilkan peta administrasi, peta tematik, peta dasar, peta struktur ruang, peta pola ruang. Selain peta, terdapat menu layanan untuk permohonan pengurusan KRK, Siteplan dan Dokumen Kajian KKPR Berusaha. Serta dilengkapi menu Pengaduan, sehingga masyarakat yang mengetahui ada pelanggaran pemanfaatan ruang bisa dapat memberikan informasi dengan cepat dan mudah.
- c. iPekalongankota adalah perpustakaan digital berbasis media sosial untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam mengakses perpustakaan dan koleksi bahan bacaan karena dapat diakses 24 jam dimana saja dan kapan saja serta gratis.
- d. Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (SIM-PBJ) merupakan inovasi aplikasi pengadaan yang mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar sesuai dengan regulasi/peraturan/ketentuan yang berlaku dimana dokumen pengadaan barang/jasa (kontrak) yang masuk akan diverifikasi dan divalidasi sehingga dapat meminimalisir kesalahan data/dokumen
- e. Pengembangan RA KESEL M'LAKE. Ra Kesel M'lake (ApaRAt KEcamatan SELatan Memberikan LAYanan Antar DoKumen) (sejak 2021), merupakan layanan dari kecamatan Pekalongan Selatan dalam mengantar jemput dokumen administrasi bagi masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan. Pada tahun 2022 dikembangkan dengan menggunakan call center yang dapat dicakup seluruh elemen masyarakat
- f. PUSDALU (Puskesmas Buka Sampai Dalu) Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan telah membuka beberapa Puskesmas sampai jam 21.00 atau jam 9 malam, diantaranya Puskesmas Tirto, Puskesmas Noyontaan, Puskesmas Jenggut dan Puskesmas Dukuh. Layanan ini sudah dimulai tahun 2017 dan masih berlangsung hingga sekarang. Hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari. Pada Tahun 2022 ada Penambahan pelayanan PUSDALU yaitu Pelayanan KIA/KB, Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.
- g. New Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas & Ekonomis (NEW SAKPORE). SAKPORE yang dibangun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Pekalongan sejak tahun 2019 merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah kota untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada warganya dan juga untuk mendukung penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Pekalongan, DPMPSTP Kota Pekalongan

mengembangkan inovasi SAKPORE menjadi NEW SAKPORE dengan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti: Peta Tata Ruang, Peta Reklame, Survey Online, Notifikasi Whatsapp gateway, terintegrasi dengan SisDMK Kementerian Kesehatan RI, Pengaduan Online dan Tanda Tangan Elektronik.

- h. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi) (2022), inovasi pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dimana proses *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle* dilakukan dengan mesin pemilah sampah untuk memilah sampah yang berasal dari masyarakat, dimana sampah plastik bisa terpisah sendiri untuk dihancurkan menjadi bubur sampah.
- i. Pengembangan e-Rekam Medis. Pada tahun 2021 RSUD Bendan mulai mengembangkan Rekam Medik Elektronik yang dimulai dari pelayanan Rawat Jalan dan terus berkembang untuk semua pelayanan seperti IGD/PONEK, Hemodialisa, Rawat Inap dan Bedah Sentral. Penerapan e-Rekam Medis untuk mempercepat pelayanan, keakuratan data, efisiensi waktu dan kemudahan pelaporan administrasi.
- j. Aplikasi Siulan Mas (Sistem Informasi Usulan dan Pengaduan Masyarakat) merupakan aplikasi pengaduan dan usulan bantuan sosial, yang mempermudah masyarakat untuk mengadu terkait penerimaan atau tidak diterimanya bantuan sosial dari tingkat kelurahan. Dengan system ini, akan meringkas birokrasi penanganan pengaduan sehingga masyarakat tidak perlu datang ke Dinas Sosial
- k. E-SENDOK CEPAT (Setwan Dokumen Cepat) merupakan Sistem informasi (aplikasi) untuk mendokumentasikan surat Permohonan Kunjungan Kerja Luar Daerah dan Permohonan audiensi (rapat dengar pendapat/dialog dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama) ke DPRD Kota Pekalongan.
- l. Aplikasi Pengendalian Penanaman Modal (SIAPPEM) Kota Pekalongan. SIAPPEM merupakan aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pekerjaan di bidang penanaman modal. dalam sistem ini terdapat fitur yang menunjang antara lain profil investasi Pemerintah Kota Pekalongan dan pelaku usaha
- m. Silancar (SI AAP Lacak & Antar) (2022) merupakan inovasi pelayanan oleh kecamatan Pekalongan Utara untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online.
- n. Inovasi Progam Penurunan Angka Stunting (Pak Canting) di Kecamatan Pekalongan Timur merupakan bentuk tanggung jawab moral dalam membantu Progam Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan dalam Gerak Penurunan Angka Stunting khususnya di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2020-2022 (sedang berjalan), inovasi daerah lainnya antara lain meliputi:

a. Inovasi pada urusan pendidikan

1) Kurikulum Muatan Lokal Kebencanaan Jenjang Sekolah Dasar.

Inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menyusun buku muatan lokal kebencanaan (banjir rob, banjir hujan, sampah, limbah, penurunan muka tanah dan wabah penyakit) sebagai pegangan guru dalam memberikan materi kebencanaan. Inovasi dilakukan dalam bentuk membuat capaian pembelajaran, petunjuk penggunaan, materi dan strategi pembelajarannya. Materi muatan lokal dapat diberikan secara terintegrasi dengan materi

pelajaran yang sudah ada, melalui ekstrakurikuler, maupun menjadi mata pelajaran tersendiri.

- 2) MOLIKA SPENSE merupakan akronim dari mobile learning matematika SMPN 11 Pekalongan berbasis aplikasi android yang digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran matematika.

- 3) TUNTAS (Totalitas Upaya Nyata Tamatkan Anak Tidak Sekolah)

TUNTAS merupakan program mengentaskan ATS di Kota Pekalongan per kelurahan-kelurahan untuk merangkul ATS di tiap-tiap daerah tujuannya agar ATS di Kota Pekalongan bisa nihil atau setidaknya mereka mau bersekolah kembali dengan berbagai metode yakni: tatap muka, daring maupun penugasan memudahkan berbagai hal agar anak didik mau bersekolah kembali.

b. Inovasi pada urusan kesehatan

- 1) Saber AKI-AKB (Sapu Bersih Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi) (2020), merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan dengan melakukan integrasi kegiatan pengurangan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, yang melibatkan stakeholder yang cukup luas, antara lain dokter anak, dokter kandungan, kader puskesmas, PKK, dll, sehingga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.
- 2) Inovasi kebijakan kesehatan di puskesmas sebagai faskes tingkat pertama di tahun 2022.

Tabel II-36 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
1	GERBEG CHINTA (Gerakan Bersama Cegah Hipertensi Kita)	Puskesmas Kramatsari
2	JAGA SIKON	Puskesmas Kusuma Bangsa
3	Jaga Aurat	Puskesmas Kusuma Bangsa
4	JAGA IMUN BRO	Puskesmas Kusuma Bangsa
5	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
6	Jaring si TB (Jaring Pasien TBC)	Puskesmas Noyontaan
7	Suling Mas Darseh	Puskesmas Pekalongan Selatan
8	Lopis (SIM Kesehatan Terintegrasi)	Puskesmas Pekalongan Selatan
9	MINUM JUS (Monitoring INformasi pertUMbuhan Janin melalui USg)	Puskesmas Sokorejo
10	ADU TIKUS (pelayanan terPADU Tlbi dan KUSa)	Puskesmas Sokorejo
11	AJIB RESTI (Th 2022)	Puskesmas Tirto
12	GEMESI (th 2022)	Puskesmas Tirto
13	PUSDALU (Penambahan pelayanan KIA/KB, Imunisasi dan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut) th 2022	Puskesmas Tirto
14	Deteksi Pasien TB	Puskesmas Tondano
15	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
16	Jaring si TB	Puskesmas Noyontaan
17	Pasung Jiwa	Puskesmas Dukuh
18	Grup WA ibu hamil Permata Hati	Puskesmas Buaran

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
19	Si Bawal Hati (Siaga Banjir Kawal Ibu Hamil Resti)	Puskesmas Kramatsari
20	Remaja STAR (Remaja Sehat Tanpa Asap Rokok)	Puskesmas Kramatsari
21	Permata Hati	Puskesmas Buaran
22	PJ RW Satu Hati (PJ RW Bersama Pantau Bumil Resti)	Puskesmas Bendan
23	Si Jempolan Bendan (Siapa Mendaftarkan Kartu BPJS Bati Ibu yang Melahirkan di Puskesmas Bendan)	Puskesmas Bendan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

- 1) REPARASI (RElokasi tanPA ReAkSI penolakan) (2021) merupakan inovasi kebijakan atau non digital dalam pelaksanaan urusan perumahan dan permukiman, yakni merelokasi tanpa reaksi penolakan karena ada keterlibatan dan dukungan kuat dari stakeholder terkait, masyarakat yang tidak kehilangan mata pencahariannya walaupun terelokasi.
- 2) Omahe Ndewe (Sistem Informasi Pengelolaan Identifikasi Data Rumah Kota Pekalongan) (2022), dikembangkan berdasarkan hasil forum Data di tahun 2021. Aplikasi ini dikembangkan untuk penyediaan database infrastruktur permukiman, namun kemudian berkembang menjadi aplikasi yang mencakup berbagai macam variabel data yaitu data layanan air minum, layanan sanitasi, layanan bencana, rumah tidak layak huni, dan sebagainya. Aplikasi ini dibangun dengan mengintegrasikan data PBB yang sudah berbasis spasial dan data SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah. "OMAHE NDEWE" akan menyajikan data titik koordinat rumah, memberikan nomor induk rumah, status keterhunian rumah, identitas penghuni rumah, kepemilikan rumah, profil rumah tidak layak huni, data rawan bencana banjir, rob, longsor, puting beliung, layanan air bersih, akses sanitasi, dan pengelolaan sampah rumah tangga.

d. Inovasi pada urusan kelautan dan perikanan

Rekom BBM (2022) merupakan inovasi yang mempermudah dan mempercepat nelayan untuk mendapat pelayanan mendapatkan surat Rekom Pembelian Jenis BBM Tertentu dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku tanpa dipungut biaya (gratis).

e. Inovasi pada urusan pertanian

Esa Pertama Kuljar (2020) merupakan inovasi kebijakan untuk penerapan kultur jaringan di Kota Pekalongan untuk mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Inovasi ini dikembangkan di Dinas Pertanian dan Pangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam Tabel II-37 berikut.

Tabel II-37 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Dalook Minyak Pijat Aromaterapi sebagai Rehabilitasi Medik bagi Penyintas Covid-19 atas Keluhan Kesehatan Pasca Covid-19	Muhammad Bachtiar Rifai	Dalam rangka membantu proses rehabilitasi <i>long covid</i>, inventor mengembangkan obat tradisional yakni minyak balur, pijat, gosok, atau minyak urut. Inventor berhasil meramu bahan alam Indonesia menjadi satu produk alami yang menunjang terapi komplementer dalam rangka rehabilitasi medik penyintas Covid-19. Produk ini diberi nama Dalook yakni minyak pijat aromaterapi yang cocok dan bisa menjadi pilihan bagi para penyintas Covid-19 untuk digunakan dalam terapi medik pasca Covid-19.
2.	Aplikasi Edu Game Android atau PC dan Edu Box berbasis Kearifan Lokal Kota Pekalongan; Game Edukasi dan Kotak Edukasi "Petualangan Asik Kiko"	Fauziyah, S.Pd	Aplikasi Edu Game Android atau PC dan Edu Box berbasis kearifan lokal Kota Pekalongan merupakan inovasi pendidikan yang dapat digunakan untuk pembelajaran kepada anak tanpa harus bertatap muka. Aplikasi tersebut juga dapat disampaikan secara tatap muka disekolah dan dipadukan dengan praktik langsung kegiatan kunjungan puncak tema sesuai konten pembelajaran pada aplikasi.
3.	Spray Ekstrak Daun Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i>) sebagai Pencegahan Filariasis di Kota Pekalongan	Nada Safira Salsabilla, dkk.	Penyakit filariasis juga dapat dicegah menggunakan sistem pengendalian nyamuk <i>Culex sp</i> menggunakan insektisida. Namun dampak Insektisida dapat meracuni tubuh dengan berbagai cara antara lain, yaitu tertelan, terhirup, terkena kulit atau mata. Oleh karena itu innovator membuat alternatif pencegahan filariasis dengan inovasi spray dari ekstrak daun jeruk nipis. Spray ini dapat mencegah dengan melindungi tubuh dari serangan nyamuk filariasis. Daun jeruk nipis merupakan bahan alami yang diketahui mengandung senyawa flavonoid sebesar 34,43%. Flavonoid dalam daun jeruk nipis dapat mengakibatkan denaturasi protein sehingga transport nutrisi pada sel terganggu yang berakibat larva nyamuk akan mati.
4.	Pembangkit Listrik Alternatif Kincir Angin Mudikal	Sutantiyo K., S.Pd., dkk.	Peningkatan kebutuhan energi listrik terjadi akibat pertambahan penduduk yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan tenaga listrik. Saat ini masyarakat Indonesia masih sangat tergantung pada pasokan listrik PLN. Kebutuhan energi listrik yang terus meningkat inilah yang menuntut kita untuk membangun suatu alternatif pembangkit energi listrik yang efisien, murah, dan mudah diterapkan dalam skala rumah tangga. Secara geografis, Kota Pekalongan sebagai kota pesisir mempunyai potensi sumber daya angin yang tinggi. Hal ini melatarbelakangi inventor untuk membangun alat pembangkit listrik kincir angin sebagai sebuah alternatif pembangkit listrik tenaga angin.

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
5.	Lampu Hias dari Paralon dan Bola Plastik Bekas	Moch. Apriyanto Akbar	Pembuatan Lampu Hias dengan bahan dasar Paralon dan Bola Plastik Bekas diharapkan dapat menjadi alternatif upaya pengelolaan sampah dengan cara 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) di samping sebagai sumber penerangan dan hiasan ruangan juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sedikit modal yang dibutuhkan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2023

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel II-38 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	Tahun 2022	98	1204	-	1302
2.	STMIK Widya Pratama	Tahun 2022	27	215	-	242
3.	Akbid Harapan Ibu	Tahun 2022	6	-	-	6
4.	PSDKU PNJ	Oktober 2022	-	-	-	-
5.	IAIN Pekalongan	Desember 2022				

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2023

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel II-39 berikut.

Tabel II-39 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STMIK Widya Pratama	Tidak Ada
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2022

2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.4.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Setiap anak usia dini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56B Tahun 2020 telah mewajibkan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mendapatkan pelayanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK/RA di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah siswa menurun 1.534 siswa jika dibandingkan jumlah siswa di tahun 2019. Hingga di tahun 2023 menurun menjadi 7.934 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-40 berikut.

**Tabel II-40 Jenjang Pendidikan PAUD/TK
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2019	9.019	16.625	54,25
2020	7.485	15.710	47,64
2021	7.077	15.440	45,84
2022	7.721	15.346	50,31
2023	7.934	15.246	52,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2019-2023 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung berfluktuasi, dari 98,67 di tahun 2019 menjadi 99,98 di tahun 2023. Sama halnya dengan capaian APS jenjang SMP/MTs dari 97,69 di tahun 2019 menjadi 96,72 di tahun 2023. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 dan 2023 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai diterapkan di tahun

ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Tabel II-41 berikut.

Tabel II-41 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
APS SD/MI	98,67	103,79	101,86	101,74	99,98
APS SMP/MTs	97,69	103,67	102,56	103,29	96,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-42 berikut.

Tabel II-42 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 – 15 Tahun	APS (persen)	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38
	P	28.911	27.830	103,88	
2022	L	29.567	29.598	99,90	101,96
	P	28.889	27.737	104,15	
2023	L	29.304	29.609	98,97	101,24
	P	28.779	27.763	103,66	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, ketersediaan jumlah SD/MI cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebanyak 149 sekolah dan di tahun 2023 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung meningkat yaitu 38 sekolah di tahun 2019 menjadi 41 sekolah di tahun 2023. Untuk

jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-43 berikut.

Tabel II-43 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SD/MI	149	146	147	147	147
Jumlah SMP/MTs	38	38	38	40	41
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	32.855	31.581	31.724	31.694	31.876
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.385	15.067	15.109	15.425	15.277

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-44 berikut.

Tabel II-44 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2019	38,76
2020	39,44
2021	39,50
2022	39,69
2023	39,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, rasio ketersediaan guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio sebesar 598,57, kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 menjadi 584,96 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-45 berikut.

Tabel II-45 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.840	1.841	1.787	1.818	1.756
	Jumlah Murid	32.092	31.752	31.007	31.069	30.610
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	933	932	936	936	915
	Jumlah Murid	15.759	15.539	14.973	14.973	15.051
	Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)	2.880	2.773	2.723	2.754	2.671
	Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)	48.115	47.851	47.291	46.042	45.661
	Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk	598,57	579,51	585,37	598,15	584,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel 2.36, rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019-2023, dan berakhir turun di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-46 berikut.

Tabel II-46 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330
2021	2.723	1.773	1,54	46.320	0,332
2022	2.754	1.775	1,55	46.042	0,337
2023	2.671	1.767	1,51	45.661	0,331

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,48 di tahun 2019, mengalami naik turun sampai tahun 2023 dengan kondisi terakhir di angka 0,45 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-47 berikut.

Tabel II-47 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Karakteristik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SD/MI*)	1.840	1.856	1.787	1.818	1.756
Rombongan Kelas*)	1.173	1.265	1.274	1.277	1.274
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,57	1,47	1,40	1,42	1,38
Murid SD/MI*)	32.855	31.995	31.007	31.069	30.610
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,48	0,46	0,45	0,46	0,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 berada di angka 1,26, kemudian turun di tahun 2020 di angka 1,18 dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 1,22 dan 1,26. Terakhir turun di tahun 2023 menjadi 1,24. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-48 berikut.

Tabel II-48 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Karakteristik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SMP/MTs*)	933	945	936	936	915
Rombongan Kelas*)	481	505	499	498	493
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	1,94	1,87	1,88	1,88	1,86
Murid SMP/MTs*)	15.385	15.887	15.313	14.973	15.051
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,26	1,18	1,22	1,26	1,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2019-2023, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2021 kondisi bangunan SD/setara cenderung menurun, namun meningkat lagi berturut-turut di 2022 dan 2023 di angka 95,91 persen dan 97,11 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2019 sebesar 94,13 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 68,95 persen dan meningkat lagi secara berturut-turut di tahun 2021, 2022 dan 2023 di angka 79,36 persen, 94,71 persen dan 98,70 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-49 berikut.

Tabel II-49 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 – 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI (persen)	92,72	73,30	72,50	95,91	97,11
SMP/MTs (persen)	94,13	68,95	79,36	94,71	98,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,10 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,29 persen, kemudian menurun lagi di tahun 2021 sebesar 0,10 persen dan terakhir turun secara berturut-turut di tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,09 dan 0,05. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Tetapi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs lebih tinggi jika

dibandingkan dengan jenjang SD/MI. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-50 berikut.

Tabel II-50 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2019 – 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI (persen)	0,10	0,29	0,10	0,09	0,05
SMP/MTs (persen)	0,46	0,97	0,26	0,10	0,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2019-2023 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/ sederajat selama kurun waktu 2019-2023 juga dapat mencapai 100 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-51 berikut.

Tabel II-51 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Dari nilai ujian akhir nasional, jenjang SD/MI cenderung fluktuatif. Begitu pula dengan jenjang SMP/MTs. Pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 dikarenakan adanya pandemi COVID-19 tidak diselenggarakan Ujian Akhir Nasional. Diimplementasikannya kurikulum merdeka membuat penentuan standar kelulusan dan pembuatan soal adalah pihak sekolah sendiri (mandiri). Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs disajikan dalam Tabel II-52 berikut.

Tabel II-52 Nilai Ujian Akhir Nasional SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

No	Jenjang	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	SD	7,26	69,69	0,00	0,00	0,00
	MI					
2	SMP	5,74	59,02	0,00	0,00	0,00
	MTs					

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2023

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2019-2020 telah di atas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 turun menjadi 97,82, 98,79 dan 99,66. Hal yang sama terjadi pada angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2019-2023 sempat berada

di bawah 100 persen di tahun 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-53 berikut.

Tabel II-53 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2019 – 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	104,78	102,79	97,82	98,79	99,66
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101,25	102,44	96,45	101,20	102,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel II-54 berikut.

Tabel II-54 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	92,80	93,53	93,73	94,17	94,36
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	94,96	95,66	94,87	95,30	95,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Pada jenjang TK/RA persentase sekolah terakreditasi A cenderung meningkat. Tahun 2019 hanya 16,36 menjadi 31,03 pada tahun 2023 walaupun pada tahun 2019-2020 persentasenya tetap, yaitu 16,36. Sedangkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs persentase sekolah terakreditasi A cenderung fluktuatif. Secara menyeluruh persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang TK-SMP dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Tabel II-55 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel II-55 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	18	18	38	25	36
- Jumlah Sekolah	110	110	111	113	116
- Persen	16,36	16,36	34,23	22,12	31,03
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	102	99	99	99	99
- Jumlah Sekolah	149	146	147	147	147
- Persen	68,46	67,81	67,35	67,35	67,35

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	26	26	24	24	24
- Jumlah Sekolah	38	38	38	40	41
- Persen	68,42	68,42	63,16	60	58,54
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	146	143	161	148	159
- Jumlah Sekolah	297	294	296	300	304
- Persen	49,16	48,64	54,39	49,33	52,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel II-56 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100
2022	300	100	300	100	100
2023	304	100	304	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel II-57 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
2021	413	21.584	19,13
2022	414	21.354	19,39
2023	416	21218	19,61

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
Rata-rata			18,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Jumlah Posyandu dari tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi penambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 – 2023 adalah 18,77 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 55 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 berdasarkan data pada Tabel II-58, secara agregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan berkurang 1 (satu) Rumah Sakit Bhakti Waluyo yang dialih fungsikan menjadi klinik, maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Rumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel II-58 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
		Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0,085	11	0,036	9	0,029
2021	316.216	14	0,044	27	0,085	12	0,038	9	0,028
2022	309.742	14	0,044	22	0,071	25	0,081	8	0,026
2023	317.958	14	0,044	23	0,072	32	0,010	8	0,025

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel II-59 berikut.

Tabel II-59 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2019 - 2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	9	9	9	8	8
Jumlah seluruh rumah sakit	9	9	9	8	8
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di

bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2019 – 2023, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenkes No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 57 per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 77 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2023 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDM Kesehatan yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk. Secara umum rasio dokter per satuan penduduk meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel II-50 berikut.

Tabel II-60 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Spesialis	0,39	0,42	0,41	0,57	0,43
Dokter Umum	0,60	0,66	0,76	0,62	0,77
Dokter Gigi	0,11	0,12	0,13	0,10	0,13
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,1	1,2	1,3	1,29	1,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga paramedis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2019 – 2023 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-51 berikut.

Tabel II-61 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Perawat	2,63	2,71	2,71	2,56	2,76
Rasio Bidan	1,08	1,09	1,15	0,99	1,23
Rasio Farmasi	0,84	0,90	1,01	0,59	1,11
Perawat	827	832	857	810	876
Bidan	339	335	365	313	391
Tenaga Farmasi	265	276	320	188	354

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-52 berikut.

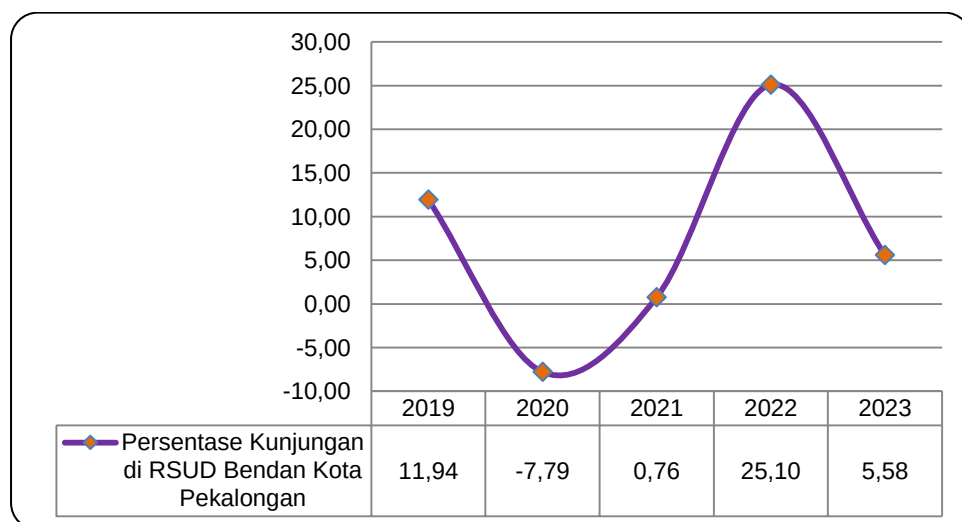
Tabel II-62 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698	863	2504	2639
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498	2.472	2844	2919
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94	34,91	88,05	90.59

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi COVID-19 telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non COVID-19. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -7,79 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,76 persen dan 25,10 persen di tahun 2022. Secara rinci disajikan dalam Gambar II.34 berikut.



Gambar II.43 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2019 - 2023

Sumber: RSUD Bendan, 2024

Terdapat kenaikan sebesar 5,58% dari tahun 2022 dimana jumlah kunjungan pada tahun 2022 sejumlah 136.361 menjadi 143.968 di tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perbaikan kualitas pelayanan yang terus menerus dilakukan dan adanya pengembangan-pengembangan pelayanan diantaranya poliklinik sore.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel II-53 berikut.

Tabel II-63 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2019 – 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	102	61	64	75	105
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	115	68	71	75	105
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	88,70	89,71	90,14	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2023 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 58,13 persen meningkat 0,14% dibandingkan tahun 2022. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 – 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel II-54 berikut.

Tabel II-64 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (persen)
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40
2021	4.448	2.440	54,86
2022	4513	2.620	58.05
2023	5120	2976	58,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan, mulai 0,05% pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,30% di akhir tahun 2023. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk yang signifikan dari tahun 2019 sebanyak 12 kasus menjadi 35 kasus, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 63 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-55 berikut.

Tabel II-65 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16
2021	38	21.584	0,18
2022	59	21.354	0,28
2023	63	21218	0,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2019 - 2023) disajikan dalam Tabel II-56 berikut.

Tabel II-66 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1
2021	12,33	2,56	3,14	170,45	112	27
2022	40	1,58	1,82	259,89	65	55
2023	22	4,35	4,86	310,73	79	62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan

kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-57 berikut.

Tabel II-67 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2019 – 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	2.008	648	396	40	40
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	2.104	654	447	40	40
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	95,44	99,08	88,59	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel II-58 berikut.

Tabel II-68 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	606	609	639	662	603
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	658	664	662	662	640

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	92,10	91,72	96,53	100	94,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

I. Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Jamkesmas / Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2021. Namun kembali menurun pada tahun 2022 sebanyak 21.810 orang dan 2023 sebanyak 21.360 orang.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2023 adalah PBI APBN sebanyak 120.203 jiwa, menurun 0,73 persen jika dibandingkan dengan jumlah PBI APBN tahun 2022. Sedangkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2023 sebanyak 80.803 jiwa, meningkat 10,05 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2022. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2019 - 2023) disajikan dalam Tabel II-59 berikut.

Tabel II-69 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89
2021	308.310	23.490	84.966	27,56	62.375	20,23
2022	309.742	21.810	119.751	38,66	47.813	15,44
2023	316.933	21.360	120.203	37,93	80.803	25,49

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu:

- 1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
- 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- 3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
- 4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
- 5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
- 6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;

- 7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
- 8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
- 9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
- 10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- 11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
- 12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Angka IKS 2019 baru mencapai 0,16 persen mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2021 dengan angka IKS sebesar 0,18 persen. Rata-rata peningkatan angka IKS per tahun hanya sebesar 0,01 persen. Sedangkan angka ideal IKS sebesar 0,8 persen dari jumlah data. Secara rinci capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Tabel II-60 berikut.

**Tabel II-70 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023**

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2019	0,16
2020	0,17
2021	0,18
2022	0,28
2023	0,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2023

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2023 meningkat cukup signifikan. Dari target 90 persen di tahun 2021, terealisasi 95,75 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan realisasi 98,65 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-61 berikut.

**Tabel II-71 Cakupan Rumah Tangga Sehat
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2019	94,60
2020	96,78
2021	95,75
2022	98,04

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2023	98,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2019-2023, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2019 dan 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen. Pada tahun 2022 panjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen dan pada tahun 2023 panjang jalan negara menjadi 10,210 Km dengan kondisi baik 31,24 persen, kondisi sedang 63,85 persen dan kondisi rusak 4,89 persen.

Tabel II-72 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019–2023

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0
2023	10,210	3,190	6,520	0,50	31,24	63,85	4,89

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DIY dan DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2019 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 620/0031 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 620/101 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan, Panjang jalan kota di Kota Pekalongan yaitu 153,61 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 sepanjang 123,076 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-63 berikut.

**Tabel II-73 Kondisi Jaringan Jalan Kota
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42
2022	153,61	105,35	24,11	24,15	68,58	15,70	15,72
2023	153,61	123,076	5,601	24,93	80,12	3,64	16,23

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-64 berikut.

**Tabel II-74 Rasio Jaringan Irigasi
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik pada tahun 2019 70,43 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 79,62 persen, stagnan hingga tahun 2022 dan meningkat menjadi 82,57 persen sebagaimana disajikan dalam Tabel II-65 berikut.

**Tabel II-75 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	70,43	66,14	79,62	79,62	82,57

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2019-2023, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel II-66 berikut.

**Tabel II-76 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai
Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

c. Drainase

Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

- 1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
- 2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
- 3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut: Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 69.162,92 meter, kondisi sedang sepanjang 10.258,84 meter dan kondisi rusak sepanjang 21.055,92 meter.

Tabel II-77 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2023

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	69.162,92	68.83 %
Sedang	10.258,84	10.21 %
Rusak	21.055,92	20.96 %
Total	100.477,68	100.00 %

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan saluran drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-68 berikut.

Tabel II-78 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.892,88	41,83
2021	4.642	1.730	37.27
2022	4.642	980.13	21.11
2023	4.642	880.83	18.97

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain berupa penguatan revetment pantai yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2015. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan peninggian serta perkuatan.

Selain oleh Pemerintah Kota Pekalongan, peninggian dan perkuatan revetment juga dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, saat ini sedang mengerjakan pembangunan tanggul pantai di sisi timur Kali Loji sampai dengan muara Kali Gabus. Upaya yang masih belum sempurna sebagai akibat adanya industri docking dan galangan tersebut, nantinya diharapkan akan mengatasi banjir dan rob di wilayah Panjang Wetan, Krapyak, dan Degayu. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga sedang meninggikan tanggul di utara Bandengan. Tanggul yang selesai pada tahun 2019 tersebut saat ini sudah mulai limpas pada saat terjadi pasang naik tinggi. Dengan adanya peninggian tersebut, diharapkan akan mengurangi dampak rob di area Pabean, Bandengan, dan Kandang Panjang.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU juga melakukan peninggian dan perkuatan revetment pantai di sisi barat Muara Sungai Loji sampai dengan Krematorium serta perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara. Upaya ini, khususnya perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara masih menyisakan kekosongan sekitar 100 meter antara pintu gerbang PIM (Pusat Informasi Mangrove) sampai dengan krematorium. Area ini rawan menjadi limpasan air laut pada saat terjadi pasang naik yang tinggi.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan mempunyai pekerjaan bersama yang harus dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, yaitu:

1. Menghitung kembali kebutuhan pompa dan kolam-kolam retensi ataupun area *storage* (cadangan penempatan air) yang lebih memadai.
2. Memelihara tanggul secara bersama-sama, antara lain:
 - a. Masyarakat harus menghindari dan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak tanggul;
 - b. Masyarakat ikut aktif melaporkan kepada Pemerintah jika terjadi hal-hal yang berpotensi terhadap terjadinya kerusakan badan tanggul;
 - c. Pemerintah Kota Pekalongan harus mempunyai alokasi sumber daya yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan tanggul;
3. Membangun stasiun pompa secara lebih memadai karena ketinggian sebagian wilayah sudah berada di bawah level permukaan air laut.

4. Membangun, memperbaiki dan memelihara sistem drainase agar berfungsi optimal dengan menghubungkan ke drainase-drainase primer ataupun *long storage* yang ada.
5. Masyarakat ikut menjaga dan memelihara kebersihan drainase dari sampah yang akan mengganggu aliran air ataupun potensi mengganggu operasionalisasi pompa.
6. Melanjutkan bangunan pengaman pantai di sebelah barat krematorium untuk melindungi kawasan konservasi mangrove.

e. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam penataan ruang terkandung proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dibawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah melakukan revisi melalui Perda Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

- a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
- b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
- c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
- d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
- e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
- f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
- g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang religius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan

- h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, rencana pola ruang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, yang terdiri dari Kawasan lindung setempat; Kawasan cagar budaya; ruang terbuka hijau RTH kota dan kawasan ekosistem mangrove, serta kawasan budidaya, yang terdiri dari Kawasan pertanian; Kawasan permukiman; Kawasan peruntukan industri; Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahanan keamanan. Pengawasan perlu dilakukan sejak ijin pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung operasional RTRW Kota dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, Kota Pekalongan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah Menyusun RDTR untuk 4 (empat) kecamatan dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD namun saat mengajukan persetujuan substansi ke Provinsi bersamaan dengan mulai direvisinya RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Sehingga proses penyusunan RDTR dihentikan, menunggu hasil revisi RTRW. Pada tahun 2020 telah tersusun revisi RTRW Kota Pekalongan yang disahkan dalam Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Setelah adanya revisi RTRW, maka Dokumen RDTR disusun mulai tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu RDTR untuk 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023 dilanjutkan penyusunan dokumen dan diharapkan selesai dan disahkan menjadi Peraturan Walikota pada tahun 2024.

Capaian indikator kinerja Urusan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-69.

Tabel II-79 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,17	0,17	1,97	n/a	n/a
2.	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	-	-	-	16,95	17.34
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	98	98	99	99	99

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2018-2021 dari 0,16 pada tahun 2018 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan yang menandakan makin besarnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangunan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalam izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka telah dilakukan update pendataan bangunan yang wajib ber PBG dengan hasil capaian, bangunan yang ber-PBG sampai tahun 2022 sejumlah 15.095 sedangkan untuk jumlah keseluruhan bangunan sejumlah 89.669. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2019-2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal pembinaan pengembangan jasa konstruksi, telah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi ketrampilan teknis bagi tenaga konstruksi. Adapun jumlah penyedia jasa konstruksi di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel II-80 Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Konstruksi	83	147	175	161	152

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029 disajikan dalam Tabel II-71 berikut.

Tabel II-81 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009–2029

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	Kawasan Lindung			
1.	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Sempadan Sungai	±24 Ha		v
	b. Sempadan Pantai	±26 Ha		v
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	±15 Ha		v
2.	Kawasan Cagar Budaya	9 Ha		v
3.	RTH Kota (Publik)	335 Ha		v
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	88 Ha		v
B	Kawasan Budidaya			
1.	Kawasan Pertanian	521 Ha		v
2.	Kawasan Perikanan			
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	38 Ha		v
	b. Kawasan Perikanan Budidaya	173 Ha		v
3.	Kawasan Perumahan	2.430 Ha		v
4.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	386 Ha		v
5.	Kawasan Perkantoran	51 Ha		v
6.	Kawasan Peribadatan	10 Ha		v
7.	Kawasan Pendidikan	94 Ha		v
8.	Kawasan Kesehatan	16 Ha		v
9.	Kawasan Olah raga	6 Ha		v
10.	Kawasan Transportasi	9 Ha		v
11.	Kawasan Peruntukan Industri	189 Ha		v
12.	Kawasan Pariwisata Alam	11 Ha		v

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
13.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7 Ha		v
	Luas Total (Ha)	4.438		

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2022

f. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun ke tahun mengalami fluktuatif, Hal tersebut disebabkan karena adanya imigrasi atau pemasangan baru / pelanggan baru pada PDAM maupun PAMSIMAS maupun sebaliknya. Serta ada juga yang beralih ke sumur pribadi (sumur dangkal).

**Tabel II-82 Persentase Pelayanan Air Bersih
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	272.090	264.330	267.880	207.245	168.030
Jumlah Penduduk (jiwa)	307.097	307.150	308.310	309.742	317.524
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	88,60	86,06	86,89	66,90	52,91

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pemanfaat air bersih yang diakses secara aman (akses melalui perpipaan) belum optimal dan lebih condong menurun setiap tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, faktor pengali jiwa yang awalnya 1 SR melayani 5 jiwa berubah menjadi 1 SR melayani 4,03 Jiwa (hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023), faktor ekonomi (masyarakat berpenghasilan rendah), Kota Pekalongan belum memiliki sumber air baku (air permukaan) sendiri, maupun secara infrastruktur jaringan perpipaan yang belum memadai.

Kota Pekalongan pada saat ini konsentrasi untuk mengatasi penurunan permukaan tanah yang turun dari tahun ke tahun, rata-rata penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan sebesar 8cm – 10cm (sumber : data Bappeda), dan salah satu faktor penurunan tersebut yaitu pemakaian air bawah tanah (ABT) yang berlebihan / eksploitasi ABT, oleh sebab itu Kota Pekalongan terus mendorong masyarakat agar beralih dari pemakaian ABT (PAMSIMAS) ke pemakaian air permukaan (PDAM).

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Pekalongan, PDAM memiliki beberapa sumber air yang didistribusikan ke Kota Pekalongan yang salah satunya yaitu SPAM Regional Petanglong yang dibagi menjadi 2 Tahap (Jambangan, dan Kaliboyo), Kota Pekalongan dalam hal ini PDAM sudah berkontrak dengan Perusahaan Daerah Tirta Utama dan mendapatkan 150 ltr/dtk pada tahap 1, dan masih memiliki idle 10 lt/dtk, oleh karena itu diharapkan pada tahun 2024 idle tersebut dapat digunakan.

g. Jamban Layak (Sanitasi Dasar)

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi

adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa.

**Tabel II-83 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jamban Layak	58.832	59.143	59.129	68.276	64.489
Jumlah Rumah yang didata	59.551	59.551	59.551	68.489	64.489
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	98,79	99,31	99,29	99,69	100,00

Sumber: Dinkes Kota Pekalongan, 2023

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik, yaitu 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Pada tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) berdasarkan SPM sebesar 6,88 persen, setara dengan 5.159 unit rumah. Tahun 2018-2022 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 4,53 persen menjadi 2,10 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel II-74 berikut.

**Tabel II-84 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan
Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2018	75.618	3.428	4,53	72.190	95,47
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83
2022	60.815	1.280	2,10	59.535	97,90

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2023

Selain data tentang Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni, pembangunan urusan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu mempertimbangkan kebutuhan rumah di Kota Pekalongan. Untuk menghitung *backlog* kepemilikan dan *backlog* penghunian rumah tahun 2022 diperlukan data jumlah KK dan kepemilikan rumah di Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah KK di Pekalongan Tahun 2022 yaitu 77.940 KK, *backlog* kepemilikan tahun 2022 sejumlah 22.699 KK dan *backlog* penghunian sejumlah 20.508 KK.

b. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 121,44 persen, dan angka tersebut terus menurun menjadi 113,07 persen pada tahun 2020. Namun persentase pengguna listrik meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 113,29 persen dan menurun kembali menjadi 113,25 persen di tahun 2022, dan meningkat cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 130,94 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

**Tabel II-85 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 (diolah), 2024

c. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 271,22 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 227,55 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2020-2023.

**Tabel II-86 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan
sampai dengan Tahun 2023**

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (%)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2023 (%)	Sisa Kumuh Sd 2023 (%)
			2020	2021	2022	2023		
1	Medono	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
2	Podosugih	12,21	0,00	2,70	0,00	1,27	3,97	8,24

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (%)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2023 (%)	Sisa Kumuh Sd 2023 (%)
			2020	2021	2022	2023		
3	Tirto	33,98	0,00	16,99	3,44	2,81	23,24	10,74
4	Pringrejo	52,40	0,00	30,78	3,80	3,03	37,61	14,79
5	Bendan Kergon	3,10	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	2,38
6	Pasirkratonkramat	85,98	0,00	2,71	11,19	4,80	25,36	60,62
7	Sapuro Kebulen	10,01	0,00	2,51	2,66	0,00	5,17	4,84
8	Jenggot	11,18	0,00	5,48	1,52	1,56	8,56	2,62
9	Kuripan Yosorejo	9,85	0,00	3,17	0,00	3,43	9,85	0,00
10	Sokoduwet	5,49	0,00	1,37	0,00	0,00	2,76	2,73
11	Kuripan Kertoharjo	4,64	0,00	1,42	1,56	1,66	4,64	0,00
12	Buaran Kradenan	4,54	0,00	1,30	0,00	0,00	2,70	1,84
13	Banyurip	11,56	0,00	3,35	1,86	2,29	9,18	2,38
14	Klego	9,61	0,00	0,00	3,39	2,44	5,83	3,78
15	Poncol	18,64	0,00	1,79	1,62	1,66	5,07	13,57
16	Gamer	3,05	0,00	0,00	1,29	0,95	2,24	0,81
17	Kauman	13,73	0,00	0,00	2,96	1,25	4,21	9,52
18	Noyontaansari	7,36	0,00	0,00	0,64	6,72	7,36	0,00
19	Kali Baros	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
20	Setono	3,03	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	1,17
21	Bandengan	29,16	0,00	9,03	3,39	4,61	17,03	12,13
22	Degayu	27,44	0,00	2,25	5,12	4,03	11,40	16,04
23	Kandangpanjang	2,95	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,85
24	Panjang Wetan	59,69	1,69	25,73	3,34	1,57	32,33	27,36
25	Panjang Baru	34,65	0,00	10,31	12,19	0,91	23,59	11,06
26	Padukuhan Kraton	24,22	0,00	0,70	3,52	4,80	9,02	15,20
27	Krapyak	15,48	0,45	15,03	0,00	0,00	15,48	0,00
		498,77	2,14	136,62	65,35	52,55	271,22	227,55

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2024

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2019-2023 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 0,91 atau 28 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2023, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus menurun menjadi 0,79 atau 25 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2019, rasio sebesar 3,45 atau 106 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 130 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2021 rasio kembali mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil dan pada tahun 2022 rasio mengalami penurunan menjadi 3,97 atau 123 personil setiap

10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2023 rasio kembali mengalami penurunan yaitu 3,68 atau 117 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2019 sebesar 4,36 atau 134 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2019 yaitu 147 personil. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 rasio naik menjadi 4,83 dan 4,94, dan rasio mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 4,47.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel II-87 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	130	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742
2023	25	0,79	117	3,68	142	4,47	317.524

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2019-2021 cenderung naik. Pada tahun 2019, pelanggaran Perda sebanyak 1.382 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.782 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pelanggaran Perda semakin meningkat menjadi 2.555 kasus. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel II-88 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00
2023	2.555	2.555	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2019 adalah 55,62 atau 1.708 personil dan pada tahun 2023 naik menjadi 67,877 atau 2.152 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 1,15 atau 35 personil. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio sebesar 0,88 atau 28 personil per 10.000 penduduk.

Tabel II-89 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14
2021	2.102	68,17	308.310	35	1,14
2022	2.102	67,86	309.742	35	1,13
2023	2.152	67,77	317.524	28	0,88

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung menurun. Pada tahun 2019 berjumlah 441 pos siskamling, menurun menjadi 308 pada tahun 2023.

Tabel II-90 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2019	441	27	16
2020	441	27	16
2021	275	27	10,19
2022	308	27	11,40
2023	308	27	11,40

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran terhadap Perda dan Perwal, Satpol P3KP Kota Pekalongan dibantu oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sampai dengan tahun 2023 ini Kota Pekalongan telah memiliki 2 orang PNS yang telah bersertifikat sebagai PPNS.

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2023 sebanyak 194 panti meningkat dibanding jumlah panti asuhan di tahun 2022. Sedangkan jumlah anak yang diasuh meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2019-2023) disajikan dalam Tabel II-81 berikut.

**Tabel II-91 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2019	8	354
2020	20	1.052
2021	15	1.037
2022	23	251
2023	36	1.667

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2023 jumlah PMKS adalah 24.875 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 21.932 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-82 berikut.

**Tabel II-92 Kategori dan Jumlah PMKS
di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	3	-	158	1	5
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	164	145	140	135	149
Wanita Rawan Sosial	-	8	9	15	12
Keluarga yang Kondisi/Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	-	-	-	-	-
Anak Nakal	0	98	158	-	0
Korban Penyalahgunaan Narkoba	2	-	-	1	0
Penyandang Cacat:	535	1.354	481	638	-
- Tubuh	357	234	267	214	9
- Netra	103	107	112	109	25
- Mental	0	429	365	216	112
- Ganda	0	484	457	-	0
- Wicara	75	100	102	99	4
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	-	-	-	-
Gelandangan	-	3	3	3	16
Tuna Susila	-	-	-	-	0

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Waria	-	-	-	-	0
Bekas Narapidana	3	1	1	-	0
Bencana Alam	-	3107	14.000	834	2.611
Fakir Miskin	24.116	22.683	184.235	22.672	21.932
Jumlah	24.823	27.499	200.488	24.937	24.875

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2023, untuk perintis/pejuang kemerdekaan berjumlah 235 orang, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) sebanyak 5 orang dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel II-83 berikut.

Tabel II-93 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	6	0	0	235	235
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	5	5	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	53	63	63	63	63
Karang Taruna	32	32	32	32	32
Organisasi Sosial	9	20	0	0	0

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2023.

Tabel II-94 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2021	61.421	184.247
2022	61.330	188.455
2023	59.588	180.355

Sumber: Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2024

Dari Tabel II-84 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 1.742 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran Tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 8.100 jiwa dibandingkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran tahun 2022.

2.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

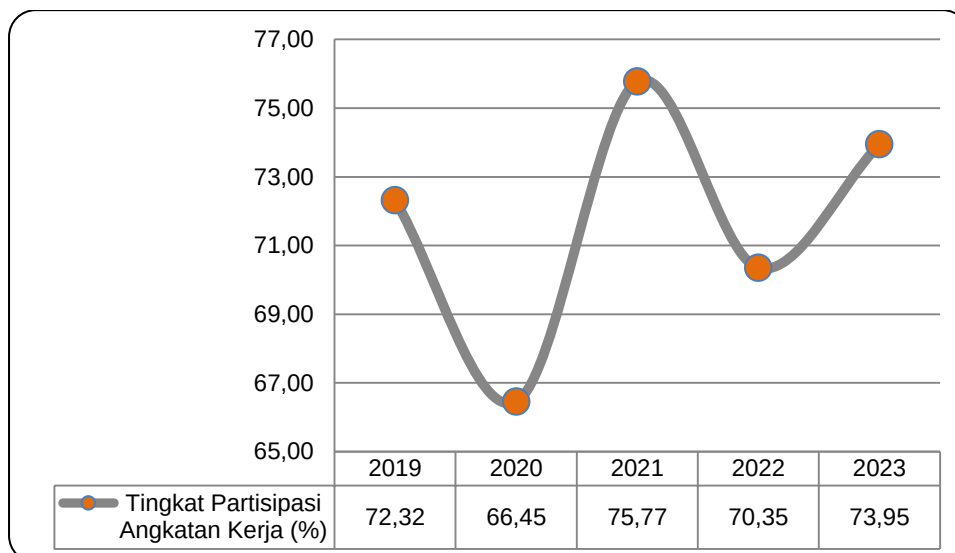
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2019 s.d. 2023 disajikan dalam Tabel II-85 berikut.

**Tabel II-95 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kota Pekalongan Tahun 2019–2023**

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2019	168.339	72,46
2	2020	157.260	66,45
3	2021	181.210	75,77
4	2022	169.940	70,35
5	2023	n/a	73,95

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023 dan
www.jateng.bps.go.id, 2024

Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan berfluktuasi dari 72,46 persen di tahun 2019, menurun menjadi 66,45 persen di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 75,77 persen, menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 70,35 persen dan kembali meningkat menjadi 73,95 persen di tahun 2023. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 tercatat sekitar 171.522 orang. Persentase angkatan kerja 2023 meningkat 3,6 poin dari tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) mengalami penurunan.



Gambar II.44 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2023

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300-500 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-86 berikut.

Tabel II-96 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2018	13	385	3,38
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79
2021	11	484	2,27
2022	8	484	1,65

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD TW. IV tahun 2022, 2023

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2022 sebesar 70,35 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja

Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk AKAD dan AKAN cenderung menurun dari tahun 2018 sampai 2022. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-87 berikut.

**Tabel II-97 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2018	180	21	103
2019	184	4	111
2020	3	0	24
2021	164	0	13
2022	179	0	146

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2023

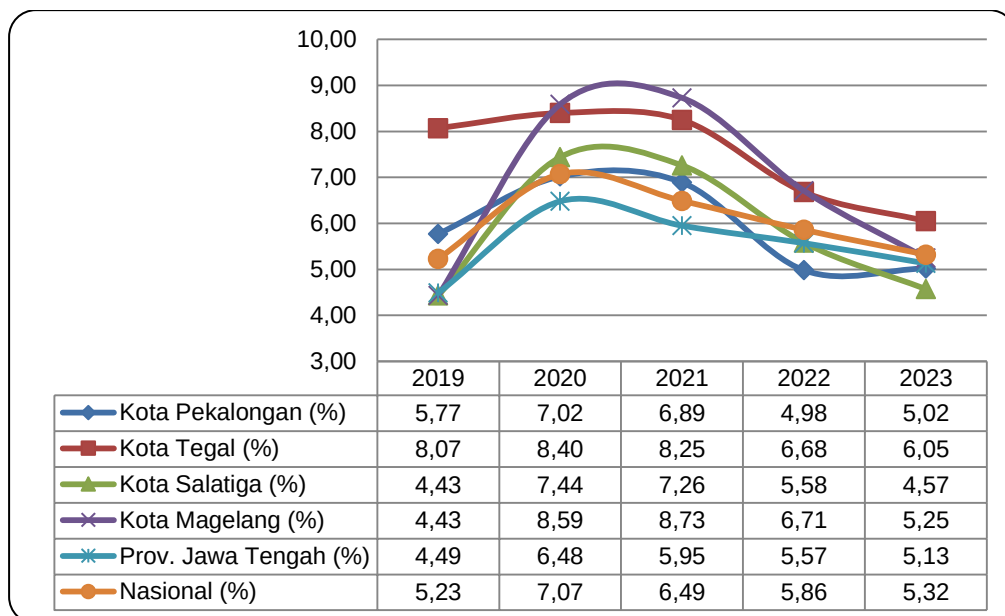
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 5,02 persen atau meningkat 0,04 poin dari tahun 2022, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.

Faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Pada tahun 2023 TPT Kota Pekalongan berada di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, TPT Kota Pekalongan terendah kedua setelah Kota Salatiga.

Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya terintegrasi untuk menurunkan TPT secara optimal. Meskipun dibandingkan daerah lain setara, TPT Kota Pekalongan lebih bagus, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan harus berupaya lebih keras lagi untuk mengoptimalkan capaian TPT-nya.



Gambar II.45 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019- 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2023

Salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan antara data jumlah pelatihan yang dilaksanakan dengan TPT tahun 2011-2020 maka korelasi antara kedua variabel tersebut sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan belum berdampak signifikan bagi penurunan TPT. Strategi pelaksanaan pelatihan harus dilakukan penyesuaian, termasuk pemilihan peserta pelatihan, sehingga diharapkan pelatihan dapat tepat sasaran, meningkatkan kesempatan dan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat berdampak bagi penurunan TPT. Upaya bersama yang harus dilakukan adalah integrasi kebijakan berbagai sektor sehingga dapat saling mendukung atau melengkapi sehingga berdampak bagi penurunan TPT secara optimal.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 cenderung fluktuatif. Namun dari sisi persentase cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 sebesar 96,47 persen, terus menurun sampai tahun 2020 sebesar 74,38 persen. Namun di tahun 2021 semua perusahaan telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-88 berikut.

Tabel II-98 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2018	410	425	96,47
2019	319	369	86,45

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2020	360	484	74,38
2021	484	484	100,00
2022	484	484	100,00

Sumber: Diperinaker Kota Pekalongan, 2023

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2023 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.581 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 74.015 orang.

Tabel II-99 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

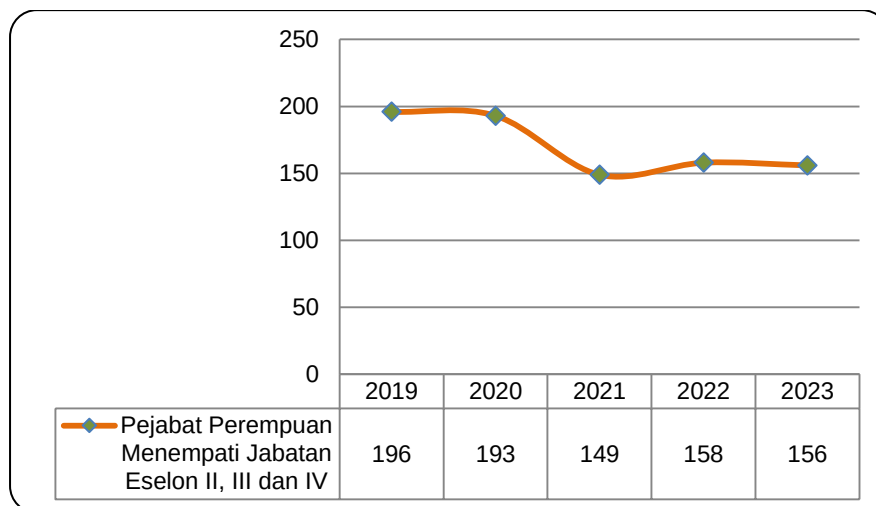
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	2.322	1.616	1.564	1.695	1.581
Jumlah pekerja perempuan (orang)	45.571	66.690	77.848	67.496	74.015
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	5,10	2,42	2,01	2,51	2,14

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024 (diolah), 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 1.695 orang pada tahun 2022 menjadi 1.581 orang pada tahun 2023.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019-2021 terus menurun. Pada tahun 2019 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 196 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 149 orang di tahun 2021 dan baru meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 158 orang dan 156 orang di tahun 2023. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II.37 berikut.

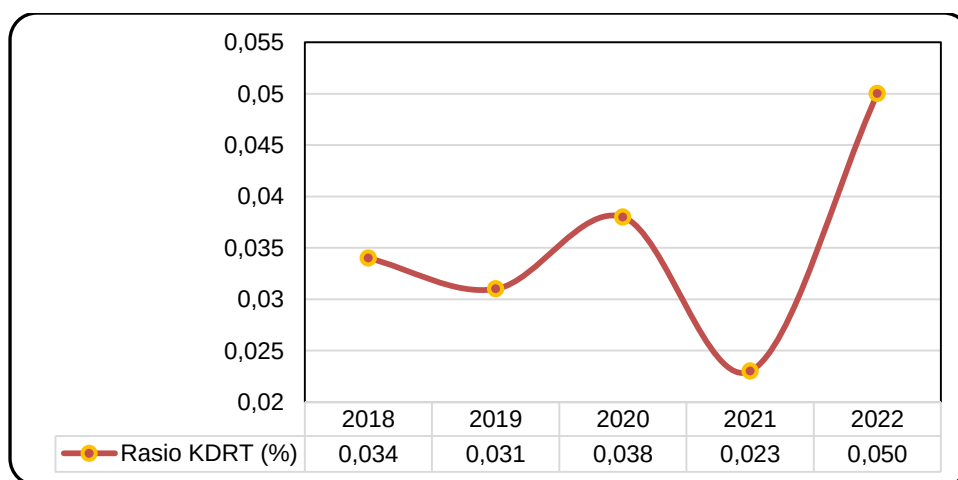


Gambar II.46 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2017-2021 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KDRT menunjukkan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2021 dengan angka rasio 0,023 persen.

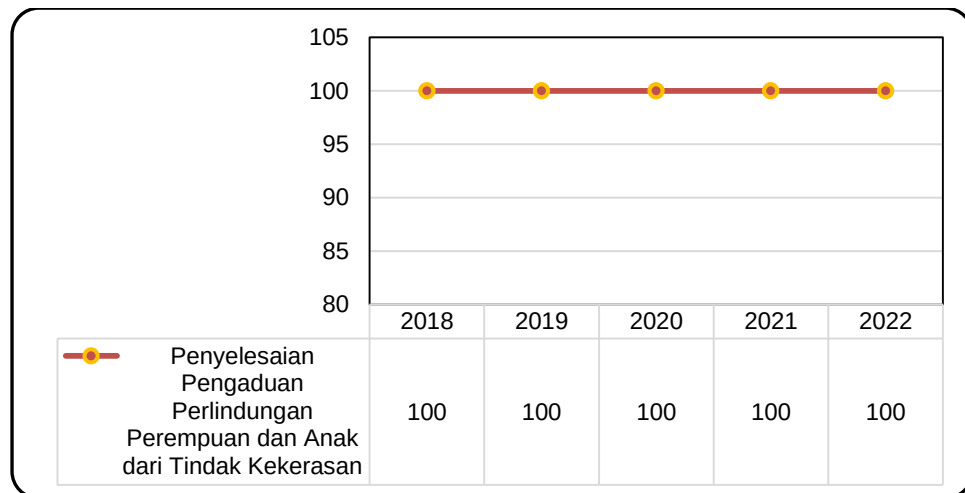


Gambar II.47 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar II.48 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya di Tahun 2022, Kota Pekalongan telah mendeklarasikan bebas pekerja anak, advokasi dan peresmian sejumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekalongan, kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada semua guru di Kota Pekalongan baik di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, serta SMA secara mandiri dan bersinergi kepada Pemkot Pekalongan. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2023 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 769,80.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam ketahanan pangan yang merupakan suatu sistem, mencakup empat sub sistem yaitu: (a) ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun

(2018-2022) disajikan dalam Tabel II-90. Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2018-2020 penurunan terjadi namun tidak sebanyak tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020, menjadi 5.738.290 dari sebelumnya 4.769.190 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 5.179.300. Rasio ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan.

Tabel II-100 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2018	5.860.781	304.477	19,25
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Pekalongan dari tahun 2018-2020 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH), merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Kota Pekalongan dari aspek konsumsi.

Skor PPH selama lima tahun terakhir (tahun 2018-2022) disajikan dalam Tabel II-91. Terdapat peningkatan skor PPH dari tahun 2018 sampai dengan 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 92,01 pada tahun 2020 menjadi 87,10 di tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 81,20.

Tabel II-101 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2018	90,42
2019	91,31
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, secara umum dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) jenis kelompok pangan. Pada Tabel II-92. disajikan capaian kelompok konsumsi pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan mengalami peningkatan tiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu 110,9 kg per kapita/tahun dari tahun 2021 sebesar 114,0 kg per kapita/tahun. Kelompok pangan

yang juga dapat dikatakan cukup tinggi dalam konsumsi dibanding yang lain adalah sayur dan buah yaitu 63,7 kg per kapita/tahun. Walaupun tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Konsumsi kelompok pangan selanjutnya adalah kelompok lain-lain yang mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2019 (2,3 kg per kapita/tahun) menjadi 44,1 kg per kapita/tahun pada tahun 2020 dan menurun kembali pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 37,9 kg per kapita/tahun dan 33,4 kg per kapita/tahun. Konsumsi pangan hewani berada di urutan selanjutnya (37 kg/kapita/tahun tahun 2022) diikuti dengan umbi-umbian, gula, kacang-kacangan, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-92 berikut.

Tabel II-102 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	Kg/Kap/th	98,8	102,0	108,7	114,0	110,9
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	16,5	18,8	7,9	12,4	8,8
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	47,0	45,0	36,8	35,0	37,0
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	11,8	5,7	6,6	6,7	7,6
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	2,8	2,3	0,8	0,8	0,9
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	18,0	23,5	8,4	7,7	7,7
Gula	Kg/Kap/th	9,5	5,9	7,7	8,1	8,1
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	73,8	82,2	70,0	64,6	63,7
lain-lain	Kg/Kap/th	1,4	2,3	44,1	37,9	33,4

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun. Konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dan secara umum cenderung meningkat tiap tahunnya, dengan jumlah 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.275,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2021, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.270 kkal/kapita/tahun. Urutan berikutnya adalah kelompok pangan hewani, yang pada tahun 2022 meningkat menjadi 274,6 kkal/kapita/tahun dari tahun 2021 sebesar 258,9 kkal/kapita/tahun. Selanjutnya urutan kelompok pangan selalu berubah jenisnya. Pada tahun 2022, setelah padi-padian dan pangan hewani, kelompok pangan selanjutnya adalah minyak dan lemak (186,1 kkal/kapita/tahun), sayur dan buah (84,6 kkal/kapita/tahun) dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-93 berikut.

Tabel II-103 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	974,9	1.006,1	1251,5	1275,9	1.270,4
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	49,6	56,3	24,7	39,8	26,8
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	266,7	255,4	272,5	258,9	274,6
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	280,1	136,8	160,7	164,5	186,1
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	49,1	40,6	12,7	12,7	13,4
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	163,4	213,2	53,8	49,5	49,4
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	94,7	58,7	77,5	81,6	81,4
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	104,9	116,8	97,3	87,5	84,6
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	11,1	18,5	56,1	50,0	50,4

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2023

Secara umum, selama lima tahun terakhir, PPH Kota Pekalongan cenderung menurun. Capaian konsumsi kelompok pangan karbohidrat cenderung meningkat, sementara kelompok pangan yang lain cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sebagai hal yang harus diwaspadai bersama.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi tiap kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola pangan harapan ini dapat dipahami sebagai komposisi keseimbangan pangan dan kecukupan gizi yang dijadikan sebuah angka penilaian sebuah daya serap komponen-komponen makanan di suatu wilayah sudah mencukupi atau belum. Pola pangan harapan ini harus memenuhi dalam segi kuantitas, kualitas, keragamannya serta memperhatikan aspek sosial budaya, daya terima masyarakat, ekonomi, agama, citarasa, daya cerna, kecukupan gizi dan keseimbangan gizi.

Setiap individu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi tersebut bisa kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Setiap produk pangan memiliki berbagai komponen gizi yang terkandung di dalamnya. Komponen gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh setiap individu dalam jumlah tertentu. Karena kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda, maka sekarang kita mengenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman juga memiliki kelebihan yakni implementasinya dapat memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh daerah. Misalnya jika suatu daerah merupakan sentra penghasil jagung, maka jagung tersebut dapat menggantikan beras sebagai bahan pangan sumber karbohidrat.

Kota Pekalongan sangat segera membutuhkan pangan B2SA bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini didasarkan fakta bahwa stunting, AKI, AKB dan AKABA merupakan wujud dari permasalahan kesehatan, di samping permasalahan kesehatan lainnya. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa asupan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan konsumsi terhadap pangan B2SA sangat mendesak dibutuhkan Kota Pekalongan, terutama untuk mewujudkan generasi Kota Pekalongan yang lebih unggul di masa mendatang. Upaya untuk membumikan penyediaan dan konsumsi pangan B2SA, adalah dengan mendorong upaya penganeekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Kampanye pentingnya pangan B2SA harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa pangan B2SA sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat, termasuk janin di dalam kandungan, agar terwujud generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul.

Strategi agar skor pola pangan harapan (PPH) dapat mengalami kenaikan di tengah pandemi seperti ini ialah kemudahan masyarakat mengakses pangan yang tersedia beragam. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kondisi tersebut dapat diwujudkan.

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pelaksanaan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyelesaikan 95 % target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat target dari BPN Pusat untuk mensertipikat 3.145 bidang tanah. Saat ini BPN Kota Pekalongan sudah terealisasi 95 persen dari target dan sertipikatnya akan diserahkan secara bertahap. Jumlah realisasi adalah 2.104 sertifikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, wakaf 6 bidang, dan milik warga masyarakat (perorangan) sebanyak 1.448.

Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2018 – 2019. Pada tahun 2020 terjadi perubahan/koreksi luasan wilayah kota Pekalongan, yang semula 4.525 ha terkoreksi menjadi 4.642 ha. Adanya perubahan luasan wilayah mengakibatkan persentase lahan bersertifikat mengalami perubahan. Pada tahun 2020 menjadi 91,33 persen dengan luasan seluas 4.239,02, menjadi menurun persentasenya bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih menggunakan luas total wilayah lama (4.525 ha). Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2017-2021, disajikan dalam Tabel II-94 berikut.

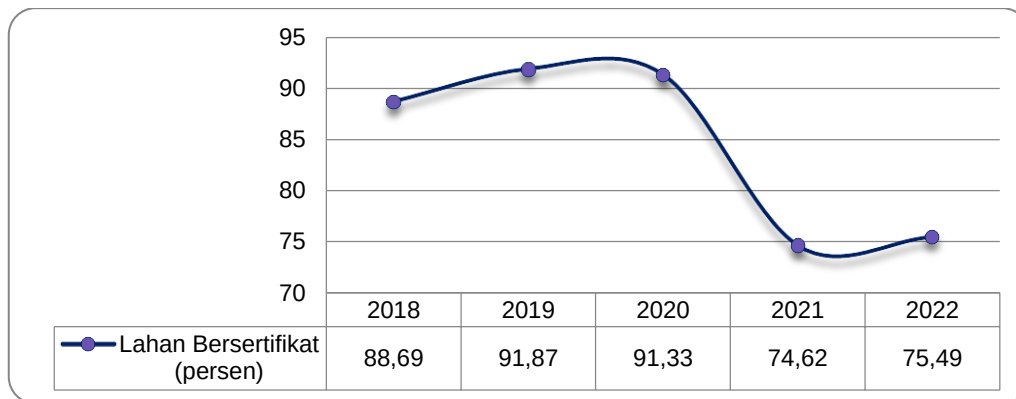
Tabel II-104 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Luas wilayah	4.525	4.525	4.642	4.642	4.642,00
Luas tanah bersertifikat	4.013,28	4.157,29	4.239,50	3.463,64	3.504,19
Hak Milik	3.192,36	3.320,74	3.360,02	2.590,47	2.549,51
HGB	305,94	13,21	322,95	212,77	198,64
Hak Guna Usaha	6,76	6,76	6,76	12,11	11,28
Hak Pakai	444,70	451,53	481,01	596,26	635,70
Hak Pengelolaan	4,00	4,00	5,00	31,82	31,82

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Hak Wakaf	60,5396	62,06	63,76	20,22	32,23
Lahan Bersertifikat (persen)	88,69	91,87	91,33	74,62	75,49

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2023

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 luas lahan bersertifikat adalah 88,69 persen, sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, semakin meningkatnya persentase tersebut menjadi salah satu indikasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. Namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun menjadi 91,33, dan tahun 2021 semakin menurun menjadi 74,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan.

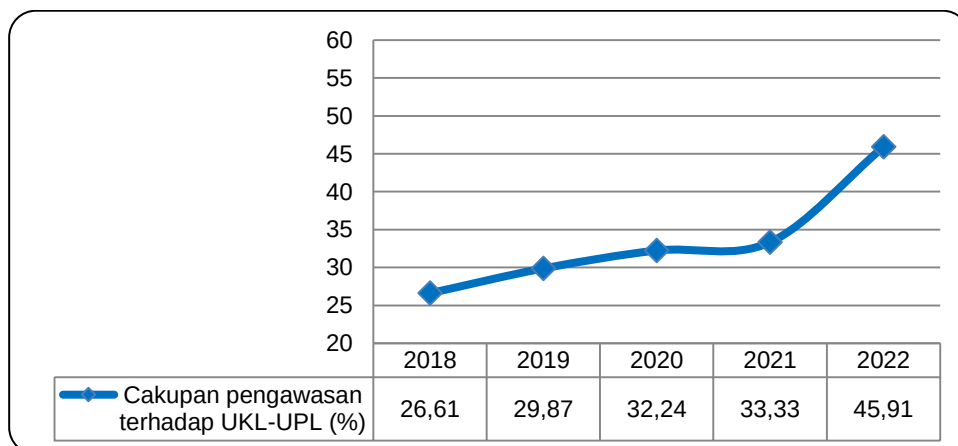


Gambar II.49 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2023

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar II.50 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2018 – 2022

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2018-2022, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam Gambar II.41.

Pada tahun 2018 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 26,61 persen. Pada tahun 2019 samapi dengan 2022, cakupan pengawasan pelaksanaan UKP – UPL mengalami peningkatan bertahap yaitu 29,87 persen pada tahun 2019, 32,24 persen pada tahun 2020, 33,33 persen pada tahun 2021 dan 45,91 persen pada tahun 2022.

Terdapat peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan.

Peningkatan persentase tertib hukum lingkungan hidup pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2018 – 2022 mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2021, terdapat peningkatan yang signifikan hampir mencapai 40%, baik pada jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL maupun jumlah UKP-UPL/AMDAL. Pada tahun 2020 jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL sebanyak 12 sedangkan tahun 2021 sebanyak 23, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 41, sedangkan jumlah UKL-UPL/AMDAL tahun 2020 sebanyak 158 dan tahun 2021 sebanyak 201 dan turun menjadi 159 di tahun 2022. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-95 berikut.

Tabel II-105 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Tertib Hukum Lingkungan	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	6	8	12	23	41
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	124	154	158	201	159
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	4,84	5,19	7,59	11,44	25,81

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki rekomendasi persetujuan teknis dan persetujuan teknis PPLH di Kota Pekalongan tidaklah terlalu banyak, hal ini karena jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan teknis tersebut ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL, sedangkan di Kota Pekalongan mayoritas hanya wajib SPPL.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri

yang semakin bertumbuh dari tahun 2018-2022 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2019 dan 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m³ menjadi 600m³. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m³. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam Tabel II-96 berikut.

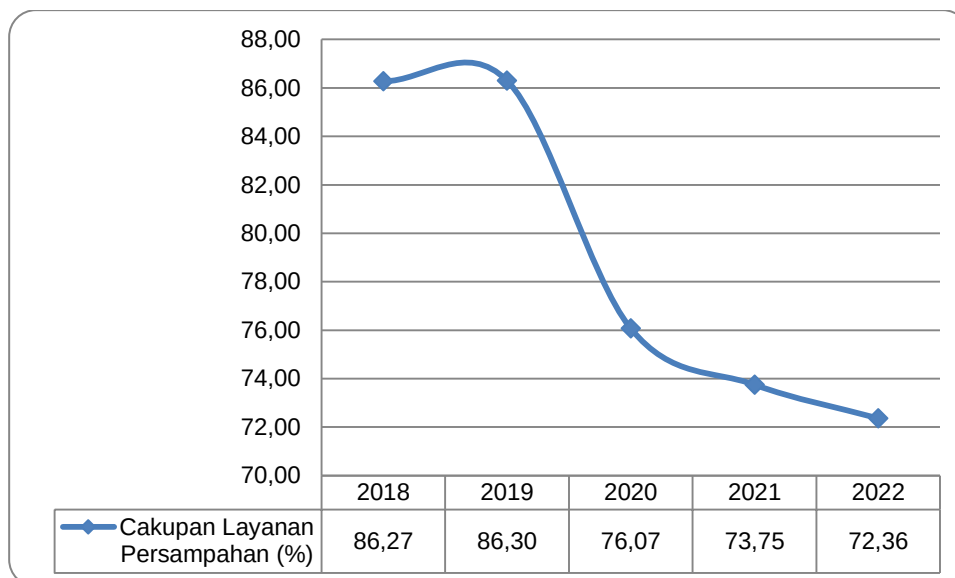
Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip.

Tabel II-106 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

IPAL	2018		2019		2020		2021		2022	
	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)	Jumlah Industri	Limbah (m ³)
Kauman	29	120	20	150	20	125	20	150	19	150
Jenggot	102	700	80	700	80	600	80	600	80	600
Industri Kecil	83	426	83	426	73	426	75	430	75	430
IPAL Bersama	3	500	3	500	2	700	2	700	2	700
Industri Besar	5	700	5	900	3	500	3	500	3	500
IPAL Biogas Duwet	125	120	125	120	30	70	30	70	30	70
IPAL Biogas Ternak	7	210	7	75	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	70	180	20	50	25	60	25	75	-	-
IPAL Banyurip	-	-	69	150	55	125	60	150	60	150
JUMLAH	424	2.956	412	3.071	288	2.606	295	2.675	269	2.600

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar II.51.



Gambar II.51 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2018 - 2022 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2018-2021 pengelolaannya setiap hari semakin menurun, namun pada tahun 2022 mulai membaik. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami peningkatan dimana pada tahun 2020 sebanyak 271,87 m³, bertambah di tahun 2021 sebanyak 382,59 m³ dan menurun di tahun 2022 menjadi sebanyak 370,03 m³. Penanganan sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022 disajikan dalam Tabel II-97 berikut.

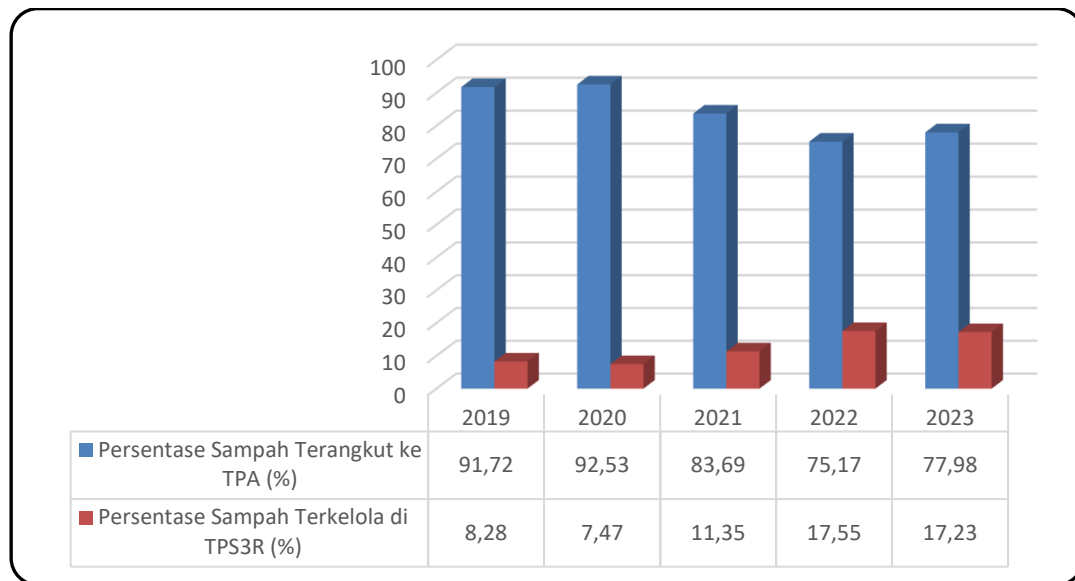
Tabel II-107 Penanganan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Data Sampah per Hari	2019		2020		2021		2022		2023	
	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)	%	(m ³)
Timbulan sampah						657,07		492,26		476,10
Sampah terangkut ke TPA	91,72	79,12	73,30	271,87	58,23	382,59	75,17	370,03	77,98	371,28
Sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah	8,28	20,88	26,70	99	11,35	74,55	17,55	86,41	17,23	82,03
Jml Sampah tertangani (m3)	86,30	100	54,48	370,87	69,57	457,14	92,72	456,43	95,20	453,31

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2019–2023 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah. Baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh

sampah semakin menurun disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah.



Gambar II.52 Persentase Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2023

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

Permasalahan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun seperti tidak ada habisnya. Pemerintah Kota Pekalongan tidak dapat menggantungkan sepenuhnya pembuangan sampah ke TPA Degayu. Potensi timbunan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. TPA Degayu juga diperkirakan tidak bisa lagi menjadi tempat penampung sampah untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R antara lain dengan mengembangkan TPS3R di kelurahan yang belum terjangkau pengolahan sampah secara bertahap dan mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak beroperasi dengan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, merevitalisasi TPS3R yang rusak berat dan mengoperasikan kembali TPS3R yang selama ini tidak beroperasi dan merencanakan kebutuhan dan pemenuhan secara bertahap atas sarana prasarana pengumpulan sampah dengan memperhatikan keterjangkauan, volume sampah, jumlah penduduk, dan lokasi TPS. Serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya, antara lain DLH telah memiliki perencanaan dalam mencanangkan program OOPS MAMI sebagai strategi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi berkelanjutan di Kota Pekalongan dalam pengolahan sampah di kawasan permukiman melalui unit TPS3R. Program OOPS MAMI tersebut digambarkan melalui sistem pengolahan sampah berbasis ekonomi kemasyarakatan secara berkelanjutan dimulai dari proses pemilahan sampah

menggunakan mesin yang berfungsi sebagai pemilah sampah non-organik/plastik sekaligus penghancur sampah organik menjadi bubur sampah yang akan diolah menjadi media budidaya untuk larva/maggot BSF (Black Soldier Fly) dan dari proses biokonversi kemudian menghasilkan kasgot yang bernilai jual tinggi sebagai pupuk organik.

Penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat dilakukan yang dalam rangka mengatasi persoalan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kian penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pelaku aktif penyumbang sampah. Dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan secara langsung. Sehingga demikian penanganan sampah di Kota Pekalongan semakin efektif dan efisien.

Kesadaran akan pentingnya pengentasan masalah sampah di benak masyarakat tidak akan muncul begitu saja. Diperlukan adanya pendekatan terukur berupa pemberian pemahaman atau pengetahuan akan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penekanan akan pentingnya literasi sampah di masyarakat. Sampai saat ini, kita belum melihat penekanan literatur yang spesifik terhadap pengolahan sampah.

Belum ada gerakan literasi khusus yang dilakukan dengan serius. Penguatan literasi sampah di Kota Pekalongan, dimulai dengan literatur yang paling sederhana baik di dunia pendidikan maupun kepada masyarakat umum secara langsung. Dimulai dari penguatan slogan atau tagline seputar sampah. Misalnya, mengubah tagline yang selama ini kita kenal “buanglah sampah pada tempatnya” menjadi “sampahmu tanggung jawabmu”, atau “sampahmu cerminan dirimu”. Dengan meningkatkan literasi sampah, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 yang disajikan dalam Tabel II-98 berikut.

Tabel II-108 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2019	46,00	99,05	23,50	52,92
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36
2023	48,86	80,33	24,39	56,24

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami tren naik setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84. Pada tahun 2023 IKLH mengalami peningkatan menjadi 56,24, kondisi ini dikarenakan terjadinya peningkatan pada komposisi IKA dan IKU.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH tersebut stagnan di angka 2,89 persen pada tahun 2022, sebagaimana disajikan pada Tabel II-99 berikut.

**Tabel II-109 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022**

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,60	18,60	18,60	2,89	2,89

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2023

Kegiatan edukasi peduli Lingkungan hidup dilakukan melalui media sosial dan media elektronik yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan komunitas secara luas. Pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan ditindaklanjuti dengan cara mediasi antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan, akan tetapi ketika kemudian rekomendasi yang didapatkan tidak dilaksanakan oleh pihak yang diadukan maka terkesan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah. Tetapi pengaduan yang sifatnya

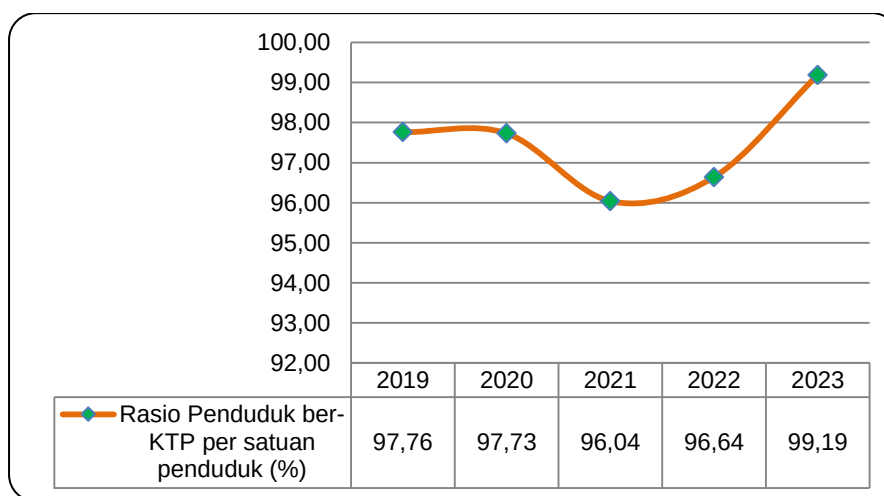
permohonan pemotongan pohon tetap kita hubungi pengadu tetapi kita kaji dahulu apakah perlu dipotong atau tidak.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2023 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 99,19 persen. Angka tersebut lebih besar 2,64 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu 96,64 persen.



Gambar II.53 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2019-2023), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel II-100 berikut.

Tabel II-110 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

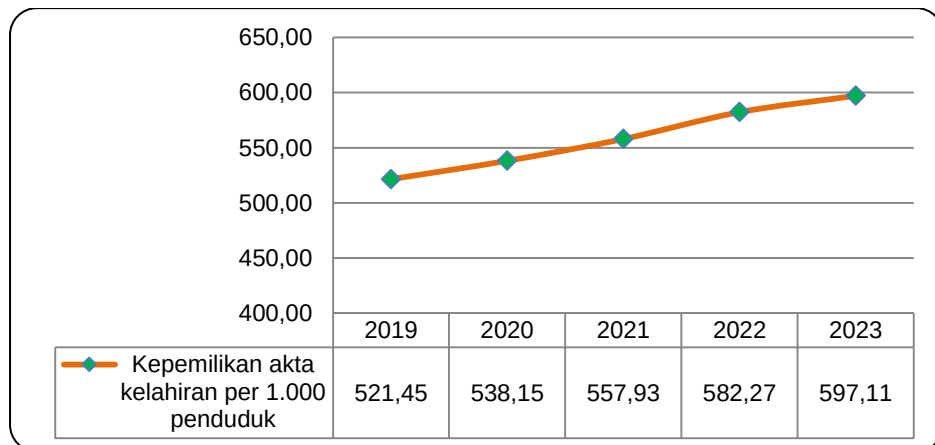
Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semula sebanyak 521,45 per 1.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 597,11 per 1.000 penduduk di tahun 2023. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Gambar II.45 berikut.



Gambar II.54 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terakhir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun pada tahun 2019 diterbitkan sebanyak 2.797 akta, pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220, setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2023 diterbitkan sebanyak 4.053 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel II-101 berikut.

Tabel II-111 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2019	2.797
2020	3.220
2021	3.970
2022	3.020
2023	4.053

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 45-55 lembar per tahunnya.

**Tabel II-112 Penerbitan Akta Nikah
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2019	46
2020	45
2021	50
2022	52
2023	55

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. Jenis LKK paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 hingga sekarang, seiring dengan penggabungan kelurahan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-103 berikut.

**Tabel II-113 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah LPM
2018	27
2019	27
2020	27

Tahun	Jumlah LPM
2021	27
2022	27

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah dalam memberdayakan peran ibu-ibu di Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 32 PKK, terdiri dari 27 PKK kelurahan, 4 PKK kecamatan dan 1 PKK tingkat kota.

**Tabel II-114 PKK Aktif
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2018	32
2019	32
2020	32
2021	32
2022	32

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2023

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019-2021 jumlah Posyandu aktif sebesar 413 (termasuk data dari Dinkes tahun 2019), per Januari tahun 2022 data posyandu aktif bertambah 1, dan di tahun 2023 jumlah posyandu kembali bertambah menjadi 416. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-105 berikut.

**Tabel II-115 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2023**

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2019	413
2020	413
2021	413
2022	414
2023	416

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2024

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2019 - 2020 mengalami peningkatan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin bertambah. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 68,47 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 64,27 dan kembali

meningkat menjadi 73,19 di tahun 2023. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-106 berikut.

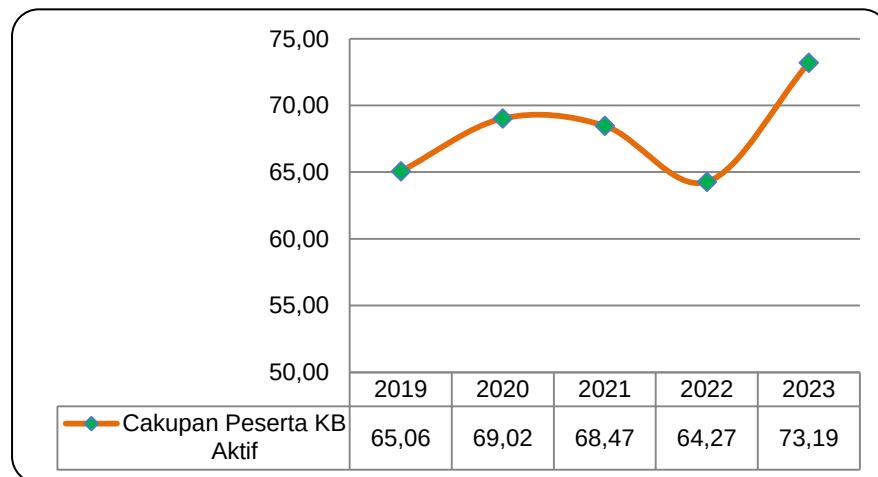
Tabel II-116 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02
2021	47.444	32.483	68,47
2022	27.868	43.359	64,27
2023	42.001	30.743	73,19

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023 cenderung berfluktuasi sebagaimana disajikan dalam Gambar II.46 berikut.



Gambar II.55 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Pada tahun 2021, secara persentase menurun, namun secara jumlah bertambah menjadi 41.170 keluarga. Pada tahun 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan terkait acuan dalam penentuan kriteria fakir miskin di Indonesia. Surat bernomor 262/HUK/2022 itu ditandatangani pada 31/12/2022 lalu dan memuat beberapa hal yakni:

1. menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin;
2. kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;

3. dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin;
4. dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
 - a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
 - b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
 - c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
 - d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
 - f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
 - g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
 - h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga mulai tahun 2022 tidak ada lagi pendataan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel II-107 berikut.

Tabel II-117 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2017	77.575	46.478	59,91
2	2018	77.817	44.487	57,71
3	2019	80.653	41.938	51,99
4	2020	80.840	38.563	47,70
5	2021	100.947	41.170	40,78

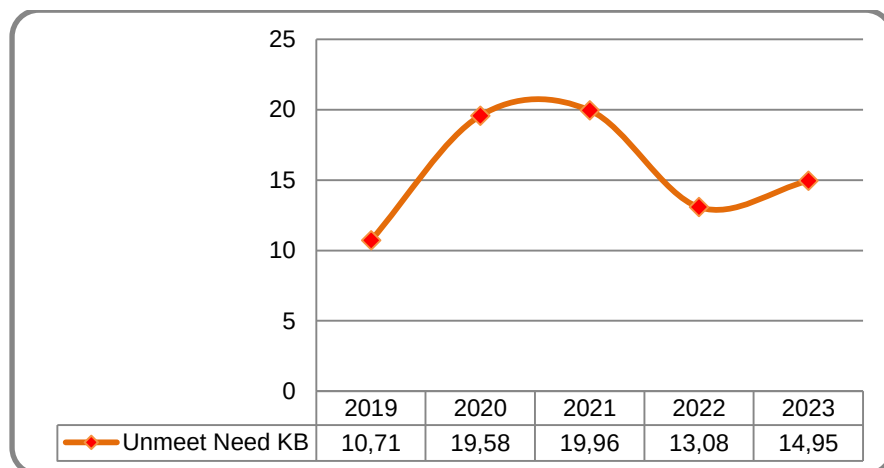
Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

d. Cakupan Unmet Need KB

Unmet need KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi seperti IUD, PIL, suntik, implant, obat vaginal, dan kontrasepsi mantap untuk dirinya atau untuk suaminya atau wanita yang sedang hamil dan terjadinya kehamilan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang dikehendaki dan sebelum hamil tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Cakupan Unmet Need KB Kota Pekalongan dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan, terutama pada saat terjadinya pandemi pada tahun 2020 – 2021 yaitu sebesar 19,5 di tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 19,96 di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada masa pandemi kegiatan pelayanan KB tidak dilaksanakan. Namun menjelang akhir tahun 2021 kegiatan pelayanan KB mulai dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga cakupan Unmet Need bisa diturunkan menjadi 13,08 persen pada tahun 2022. Namun cakupan Unmet Need KB kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 14,95 persen.

Cakupan Unmet Need KB dapat dilihat pada Gambar II.47 sebagai berikut.



Gambar II.56 Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan Jalan Tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era new normal dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021 VC ratio meningkat menjadi 0,49. Dan pada tahun 2022 VC Ratio menurun menjadi 0,39. Pada tahun 2023 VC ratio meningkat menjadi 0,44. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio juga meningkat, dimana artinya pada tahun 2023 terdapat kepadatan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-108 berikut.

Tabel II-118 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

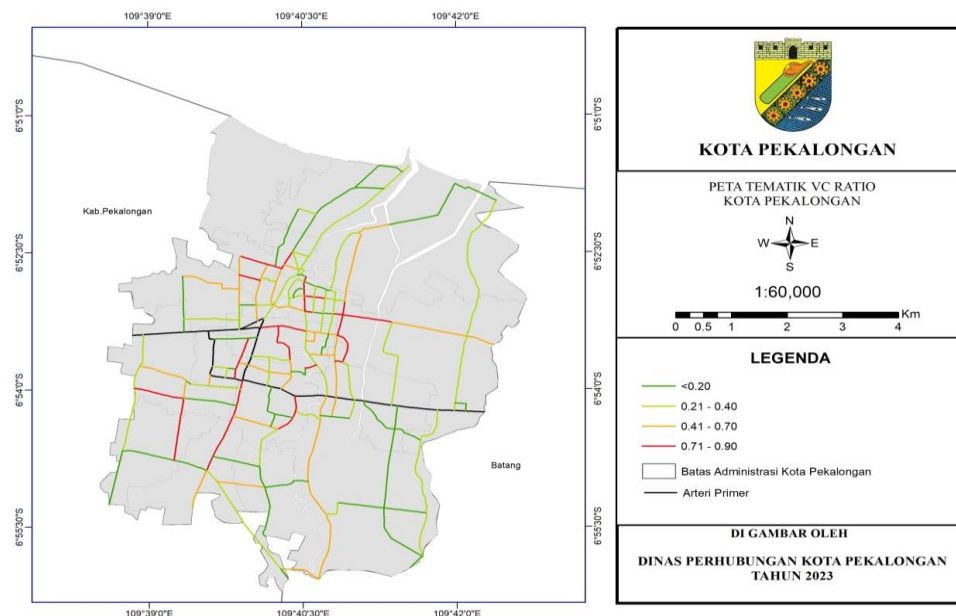
Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan – jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatakan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta V/C Ratio ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar II.48 berikut.



Gambar II.57 Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan kerana pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas – ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu pengembangan Kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan

serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang.

Pengembangan Kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaran lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru.

Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel II-109 berikut.

Tabel II-119 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Sriwijaya	Jl. Imam Bonjol	Jl. Karya Bhakti	Jl. Dr. Cipto	Jl. Seruni
Jl. Diponegoro	Jl. Supriyadi	Jl. Gajah Mada	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Hayam Wuruk
Jl. Asem Binatur	Jl. Trikora	Jl. Untung Suropati	Jl.	Jl. Sultan Agung
Jl. Mataram	Jl. Veteran	Jl. Saelan	Jl. Bandung	Jl. K.H. Mas Mansyur
Jl. Jawa	Jl. Kurinci	Jl. Pattimura	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Teratai
Jl. Angkatan 45	Jl. R.A. Kartini	Jl. Jendral Sudirman	Jl. Dr. Cipto	-
Jl. Cempaka	Jl. Semarang	Jl. Dr. Sutomo	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Wahid Hasyim	Jl. P. Kemerdekaa	-	-
Jl. Jeruk	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Jl. Merdeka	-	-
Jl. Tritura	Jl. W.R. Supratman	Jl. Tondano	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Progo	Jl. Pelita II	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Truntum	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Surabaya	Cendrawasih	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. KH. Hasyim Asyari	Jl. Bahagia	Jl. Sumatera	-	-
Jl. Labuan	Jl. Slamet	Jl. Sunan Ampel	-	-
Jl. Melati	Jl. Ahmad Yani	Jl. Dharma Bhakti	-	-
Jl. Kenanga	Jl. Jetayu	Jl. Sulawesi	-	-
Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid	Jl. Patriot	Jl. Hos Cokroaminoto	-	-
-	Jl. Pramuka	Jl. H. Agus Salim	-	-
-	Jl. Irian	Jl. Pemuda	-	-
-	Jl. Kalimantan	Jl. Manggis	-	-
-	Jl. Merak	Jl. Angkatan 66	-	-
-	-	Jl. Salak	-	-
-	-	Jl. Argopuro	-	-
-	-	Jl. Kemakmuran	-	-
-	-	Jl. Gatoto Subroto	-	-
-	-	Jl. Hasanudin	-	-
-	-	Jl. Maninjau	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api double track. Pada saat kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat Jalan Lingkar Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu Perlintasan Pantura, Jalan Tol Trans Jawa dan Jalur Lingkar Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan - Kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2018 sampai 2020 dengan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan adalah 73 izin sehingga Rasio Izin Trayek sebesar 0,00024. Hal ini memiliki makna 2,4 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00012 dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat sementara jumlah izin trayek masih 73 izin trayek. Pada tahun 2022 mengalami penurunan izin trayek menjadi 30 izin trayek, sehingga rasio izin trayek di angka 0,00009. Penurunan izin trayek yang dikeluarkan dari 73 izin trayek (2018 - 2021) menjadi 30 izin trayek (2022) yaitu disebabkan penurunan minat Masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan penurunan jumlah armada yang beroperasi sehingga rasio jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun.

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,00032. Hal ini memiliki makna 3,2 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 berubah menjadi sebesar 0,00024. Pada tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00021, tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00014 pada tahun 2022 turun menjadi 0,00009 dan pada tahun 2023 sama pada tahun sebelumnya yaitu 0,00009.

Tabel II-120 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2019	73	307.097	0,00024
2020	73	307.150	0,00024
2021	73	308.310	0,00012
2022	30	309.742	0,00009
2023	30	317.535	0,00009

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No: SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1993, untuk nilai Load Factor antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai Load Factor lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai Load Factor kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai Load Factor yang

ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan Load Factor angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berada dikisaran 35 persen sampai dengan 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan online, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Penurunan Load Factor angkutan tahun 2021-2023 dari 41% (2021), 37% (2022) menjadi 35% (2023) juga disebabkan oleh penurunan minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, Adapun langkah strategis yaitu dengan memperbaiki prasarana angkutan umum sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum sehingga diharapkan minat Masyarakat dapat meningkat dengan meningkatnya minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya load factor angkutan umum.

Tabel II-121 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Faktor Muat (<i>Load Factor</i>) (persen)	37	41	41	37	35

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk saat ini belum terlealisasinya Implementasi konkrit realisasi pembangunan Terminal Tipe C disebabkan lokasi yang direncanakan sebagai terminal Tipe C masih digunakan sebagai pasar darurat.

Dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah penumpang yang melalui terminal mengalami penurunan yaitu, dari 1.876.174 orang di tahun 2019 menjadi 771.497 orang di tahun 2020 dan menurun sebanyak 482.290 orang di tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal meningkat signifikan sebanyak 916.888 orang dan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 819.398. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-112 berikut ini.

Tabel II-122 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Otobis AKAP AKDP	294.470	125.162	73.150	130.090	68.172
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	1.876.174	771.497	482.290	916.888	819.398

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Angkutan Darat	15,7	16,2	15,1	14,1	12,01

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 138 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 107 kendaraan dan meningkat menjadi 115 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 126 kendaraan dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 102.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 829 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 817 kendaraan, dan menurun lagi menjadi 747 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 809 kendaraan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari yaitu menjadi 716.

Tabel II-123 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	138	107	115	126	102
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	829	844	617	806	716
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	16,64	12,67	13,62	15,63	14,24

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendara ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap (Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector; uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; dan speedometer tester. Dalam proses pelayanan uji kelayakan kendaraan terdapat beberapa jenis pelayanan seperti uji pertama, uji berkala,

numpang uji masuk, numpang uji keluar, mutasi masuk, maupun mutasi keluar. Dan masing-masing proses pelayanan uji kelayakan kendaraan tersebut terdapat persyaratan yang harus dilampirkan ketika pelaksanaan begitu juga dengan lamanya proses uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel II-124 berikut.

Tabel II-124 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Pengujian (Menit)	30	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR kendaraan bermotor. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2019 yaitu Rp 40.000,00 dan mengalami kenaikan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 sebesar Rp 75.000,00.

Tabel II-125 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-126 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah parkir yang berizin	418	419	381	376	425
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	16	15	13	12	10

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah seluruh parkir	434	434	394	388	435
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	96,31	96,54	96,70	96,91	97,70

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakut dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *COVID-19* yang berdampak pada *refocusing* anggaran.

Tabel II-127 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	2	33	16	10	19
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	150	100	30	22	20
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	1,33	33,00	53,33	45,45	95
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	10	10	10	0	0
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	2	0	0	0	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	4	2	1	0	0
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	0	0	0

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	10	10	0	0	0
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi	8 lokasi	0
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	0
Persentase Pemasangan marka jalan	8,67	8,00	6,67	5,33	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-118 mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 335.956 orang. Hal tersebut karena karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah di tahun 2020 dan era new normal yang membolehkannya kembali bepergian ke luar daerah dengan batasan-batasan tertentu.

Tabel II-128 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2019	863.851
2020	271.920
2021	335.956
2022	420.786
2023	556.494

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan Dalam Angka tahun 2024, 2024

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebidang sebanyak 10 perlintasan.

Kota Pekalongan memiliki 10 Perlintasan Sebidang Kereta Api yang semua lokasinya sudah tersedia palang pintu kereta api. Pengelolaan Palang pintu kereta api Kota Pekalongan yaitu oleh Dinas perhubungan kota Pekalongan dan PT. Kereta Api Indonesia, Disnas Perhubungan Kota Pekalongan mengelola 4 pos perlintasan sebidang dimana 4 titik perlintasan sebidang tersebut sudah memiliki pos petugas jalur lintasan kereta api dan palang pintu. Yang terdiri dari Pos Gamer, Pos Dekoro, Pos Pusri dan Pos Polisi Militer. Untuk 6 pos perlintasan sebidang

selanjutnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Terdiri dari Pos Tirto, Pos Bendan, Pos Sapuro, Pos Keputran, Pos Noyotaan dan Tondano. Dimana 6 titik sudah memiliki palang pintu, dan 5 titik sudah terdapat Pos petugas jalur lintasan kereta api.

Tabel II-129 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-120 berikut.

Tabel II-130 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan	155,44	153,41	153,41	152,60	150,27
Jumlah Kejadian Kecelakaan	122	116	93	119	180
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,78	0,76	0,61	0,77	0,83

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel II-131 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Korban Kecelakaan	149	142	111	163	180
Luka-luka	114	117	93	130	166
Meninggal Dunia	35	25	18	33	44

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	307.097	307.150	315.997	309.742	317.535
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	11,4	8,14	5,7	10,65	13,85

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-132 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2023

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	RSUD BENDAN	100,00	Informatif
2	Inspektorat	95,79	Informatif
3	Dinparbudpora	93,15	Informatif
4	DKP	91,70	Informatif
5	Setda	90,62	Informatif
6	Dinperinaker	89,10	Menuju Informatif
7	BKPSDM	88,09	Menuju Informatif
8	BPKAD	87,84	Menuju Informatif
9	DLH	86,38	Menuju Informatif
10	DPMPTSP	86,19	Menuju Informatif
11	DPUPR	84,97	Menuju Informatif
12	Bakesbangpol	84,72	Menuju Informatif
13	DPMPPA	82,48	Menuju Informatif
14	Satpol P3KP	82,36	Menuju Informatif
15	Dinarpus	81,99	Menuju Informatif
16	Kecamatan Pekalongan Barat	81,81	Menuju Informatif
17	BPBD	80,58	Menuju Informatif
18	Dinsos P2KB	76,87	Cukup Informatif
19	Sekretariat DPRD	76,64	Cukup Informatif
20	Kecamatan Pekalongan Utara	74,10	Cukup Informatif
21	Dinkes	73,46	Cukup Informatif

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
22	Dinperpa	73,05	Cukup Informatif
23	Bappeda	72,33	Cukup Informatif
24	Dindagkop UKM	70,25	Cukup Informatif
25	Dinperkim	68,07	Cukup Informatif
26	Dindukcapil	64,47	Cukup Informatif
27	Dindik	60,48	Cukup Informatif
28	Kecamatan Pekalongan Timur	60,38	Cukup Informatif
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	60,17	Cukup Informatif
30	Dinhub	60,11	Cukup Informatif

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal <http://pekalongankota.go.id>. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-133 Jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SIM	92	107	179	199	160

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat <http://pusaka.pekalongankota.go.id>. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2022 di Kota Pekalongan sebanyak 100 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-134 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi
di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jaringan telepon genggam	12	7	7	7	7
Stasioner	80	80	80	84	100
Rasio jaringan komunikasi	0,15	0,09	0,09	0,08	0,07

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Keterangan: jaringan telepon genggam terdiri dari Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G.

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-135 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal
yang Masuk ke Daerah Tahun 2018-2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Surat Kabar	15	15	15	15	12

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Tegal dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-136 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi
di Kota Pekalongan Tahun 2018-2022**

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penyiaran Radio	14	17	8	7	7
Jumlah Penyiaran TV	16	20	20	3	6

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2018-2022 cenderung naik. Pada tahun 2018, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15.096 pelanggan. Jumlah tersebut cenderung meningkat sampai tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 18.505 pelanggan. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-137 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2018-2022

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2018	15.096	75.618	19,96
2019	10.531	76.269	13,81
2020	11.254	84.296	13,35
2021	11.532	100.947	11.42
2022	18.503	87.758	21,08

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2021 dan Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2023

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, Kota Pekalongan dapat mencapai indeks SPBE sebesar 3,14 (predikat Baik) dengan 3 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan. Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,82 (predikat Baik). Indeks tersebut turun dikarenakan adanya tambahan Domain Manajemen sebagai komponen penilaian. Pada tahun 2022 Kemenpan RB tidak melakukan penilaian SPBE Kota Pekalongan dikarenakan nilai 2,82 sudah masuk kategori “baik”, sehingga Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri (self assesment) dengan nilai sebesar 3,02 (predikat Baik). Tahun 2023 Kota Pekalongan dapat mencapai indeks 3,29 (predikat Baik), indeks ini naik dibandingkan tahun 2022.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021 - 2023 secara detil pada setiap domain disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-138 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

No.	Domain SPBE	2021	2022	2023
1	Kebijakan	2,80	2,80	3,50
2	Tata Kelola	2,10	2,40	3,20
3	Layanan	3,75	3,76	3,82
4	Manajemen	1,36	2,09	1,82
Indeks SPBE		2,82	3,02	3,29

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri atau *self assessment* evaluasi SPBE tahun 2022. Pada tahun 2023 Kemenpan RB kembali melaksanakan evaluasi SPBE, dan indeks hasil evaluasi SPBE untuk Kota Pekalongan adalah 3,29 dengan kategori baik.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Sebagai upaya untuk meningkatkan peran Koperasi dan UMKM, pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali, pelatihan terhadap sumberdaya koperasi agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terus gencar dilaksanakan. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap koperasi diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan yang kerap timbul dalam pengurus internal koperasi, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Tabel II-130 menunjukkan data koperasi di Kota Pekalongan tahun 2018 - 2022. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah seluruh koperasi di Kota Pekalongan mengalami kenaikan sejumlah 5 Koperasi. Selanjutnya jumlah koperasi aktif di Kota Pekalongan tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, sebanyak 7 Koperasi dimana 5 diantaranya merupakan koperasi yang baru berdiri dan 2 yang lain adalah koperasi yang dulunya tidak aktif menjadi koperasi aktif. Peningkatan jumlah koperasi aktif dan penambahan jumlah koperasi di Kota Pekalongan tersebut merupakan hasil dari adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi serta penerapan peraturan Permenkop UKM No. 9 Tahun 2020 tentang pengawasan koperasi yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Tabel II-139 Persentase Koperasi Aktif
di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2018	236	281	83,93
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77
2021	141	277	50,90
2022	148	282	52,48

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Tabel II-131 merupakan tabel jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018-2022. Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kota Pekalongan terus mengalami kenaikan. Jumlah Pedagang Pasar mengalami kenaikan dikarenakan telah diresmikannya Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras yang dulunya merupakan Pasar Sugihwaras. Jumlah industri kecil dan menengah juga mengalami kenaikan, hal ini menggambarkan adanya peningkatan sekono dari sektor UMKM di Kota Pekalongan.

**Tabel II-140 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2022**

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2018	9.115	5.476	6.400	914	21.905

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233
2021	9.916	6.215	6.610	914	23.655
2022	9.900	6.235	6.700	975	23.810

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2019-2023, investasi terbesar terjadi pada tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.228,66 Milyar, dengan jumlah investor sebanyak 745 investor, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.377 orang dan rasio daya serap tenaga kerja sebesar 11,24. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka nilai investasi sepanjang lima tahun terakhir berkecenderungan fluktuatif. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan sehingga nilai investasi tahun 2020 menurun tajam di angka Rp. 193,116 Milyar dan meningkat kembali pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp. 390,348 Milyar. Pandemi yang berangsur pulih berdampak positif pada investasi. Pada tahun 2022 sebanyak 2002 investor masuk di Kota Pekalongan dan jumlah nilai investasi naik sebesar Rp. 3.188,411 Milyar dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 17.714 orang. Jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama 5 (lima) tahun disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-141 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor	745	181	181	2002	4662
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Milyar)	3.228,660	193,116	390,348	3.188,411	1.616,280
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan	8.377	2.349	2.044	17.714	18.156
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	11,24	12,98	11,29	8.84	3.89

Sumber: DPMPSTSP Kota Pekalongan, 2024

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2019-2023 dapat dikatakan fluktuatif tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi tercapai di tahun 2019 sebesar Rp.3.228,66 milyar dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi Rp.193,12 Milyar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi PMDN menjadi sebesar Rp.390,35 Milyar. Peningkatan realisasi PMDN tercatat kembali di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3078,505 Milyar dan Rp. 1.616,280 Milyar di tahun 2023.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp. 109,905 Milyar setelah lima tahun lampau tidak ada realisasi PMA dan pada tahun 2023

tercatat Rp. 110,696 Milyar pada tahun 2023. Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-142 Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan
Tahun 2019 – 2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	3.228,660	193,116	390,348	3.078,505	1.616,280
Realisasi PMA Tahun Evaluasi (Rp. Milyar)	0	0	0	109,905	110,696

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

Tantangan penanaman modal di Kota Pekalongan ke depan, terutama terkait dengan kondisi geografis wilayah yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km². Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) adalah 521 hektar. Lahan yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha serta kawasan peruntukan industri adalah seluas 189 Ha. Berdasarkan data tersebut maka luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal semakin terbatas, karena kecenderungan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan, sektor perumahan dan kawasan permukiman, sektor perikanan, serta sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu upaya yang dilakukan dan akan terus diperkuat untuk menarik penanaman modal adalah optimalisasi kemudahan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Pekalongan. Apalagi, seluruh daerah telah berlomba untuk menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan PLTU Batang harus dimanfaatkan wilayah Kota Pekalongan sebagai peluang untuk melakukan sinergi agar Kota Pekalongan dapat menerima manfaat dari pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Batang. Termasuk juga kerjasama dengan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Pekalongan harus diperkuat karena interaksi ekonomi yang kuat selama ini dalam berbagai bidang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah organisasi pemuda yaitu 26 organisasi. Pada tahun 2020 - 2021 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022 dan 20 kegiatan di tahun 2023.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2019-2023 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan, seperti disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-143 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Kepemudaan	26	24	24	16	40
Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	8	10	16	20
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 31 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Ada penambahan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menjadi 34 organisasi. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 8 sampai 15 kegiatan. Sedangkan jumlah lapangan olahraga masih tetap 55 lapangan selama tahun 2019-2023 dan perlu ditingkatkan.

**Tabel II-144 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga
di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	31	31	34	34	34
Jumlah kegiatan Olahraga	8	8	10	15	15
Jumlah Lapangan Olahraga	55	55	55	55	55

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persandian merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah ,dalam kelompok Non Pelayanan Dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Persandian satu rumpun bersama dengan urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik. Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada bagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga mempunyai menyangkut keamanan informasi.

Arah Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Persandian di Daerah:

- Melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian;
- Layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi;
- Penyediaan layanan keamanan e-government;
- Tidak hanya dilakukan oleh Sandiman;
- Secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- Tidak hanya sekedar kirim terima berita;
- Tidak hanya melayani Kepala Daerah, namun juga perangkat daerah termasuk staf;
- Tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, pelaksanaan persandian di Daerah meliputi 2 (dua) ruang lingkup, yakni:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota melalui:
 - a. Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
 - b. Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
 - c. Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
 - d. Penyediaan layanan Keamanan Informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten / kota.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2018-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan

penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19*, penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun menjadi hanya ada 6 *event* di tahun 2020 dan 4 *event* di tahun 2021. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2021 antara lain Pentas Seni Virtual Pekan Batik Nusantara, Launching Saroeng Batik Kauman, Launching Sarung Batik Pesindon dan Pentas Seni Virtual.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Meskipun merupakan kewenangan pemerintah pusat namun Pemerintah Kota Pekalongan telah memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel II-145 berikut.

Tabel II-145 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	42	57	6	4	4
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2023

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event*. Bahkan pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan festival/pentas seni/*event*. Tahun 2022 kembali diadakan event seni dan budaya sebanyak 4 *event*. Pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 6 *event*, yaitu pekan batik, sadranan, festival belimbing, bubur suro, wayang kulit, Pekalongan art festival. sebagaimana disajikan dalam Tabel II-146 berikut.

Tabel II-146 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ Event di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelenggaraan	57	6	0	4	6

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan terdapat 17 jenis seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 jenis seni budaya. dikarenakan selama masa pandemi banyak event seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 19 jenis seni.

Tabel II-147 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Simtuduror	Simtuduror	Seni Lukis	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Ketoprak	Ketoprak
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Sintren	Sintren
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman	Rampak	Rampak
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Band	Band
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Dekorasi	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jaw an	Terbang Genjring/Jaw an	Sastra	Terbang/Genjring/Jaw an	Terbang/Genjring/Jaw an
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame		Gendukan	Gendukan
14	Dekorasi	Dekorasi		Wayang	Wayang
15	Seni Lukis	Seni Lukis		Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan		Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra	Sastra		Reog	Reog
18				Kuntulan	Kuntulan
19				Barongan	Barongan

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlahnya pengunjung perpustakaan sebanyak 90.150, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Hal itu terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Pada tahun 2021 dengan diadakannya berbagai macam kegiatan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat dengan jumlah 64.527 orang kemudian pada 2022 terdapat kenaikan juga dengan jumlah kunjungan 66.204 orang. Pada tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat cukup drastis sebanyak 119.226 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel II-148 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2019	90.150	266.119	0,34
2020	39.885	266.472	0,15
2021	64.527	266.840	0,24
2022	66.204	267.418	0,25
2023	119.226	271.343	0,44

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 105 perpustakaan di tahun 2019 - 2023, berkurang dari 94 di tahun 2019, di tahun 2020 dan 2021 kembali berkurang menjadi 90 dan pada tahun 2022 dan 2023 berkurang lagi menjadi 86. Hal ini disebabkan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Namun demikian, pada perpustakaan SD/MI, perpustakaan SLTP, perpustakaan SLTA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada perpustakaan SD/MI yang di tahun 2019-2022 sejumlah 77 menjadi 175 pada tahun 2023. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-149 berikut.

Tabel II-149 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian Data	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	4	4	4	4
Perpustakaan RW	94	90	90	86	86
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	175
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	55
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	29
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

18. Kearsipan

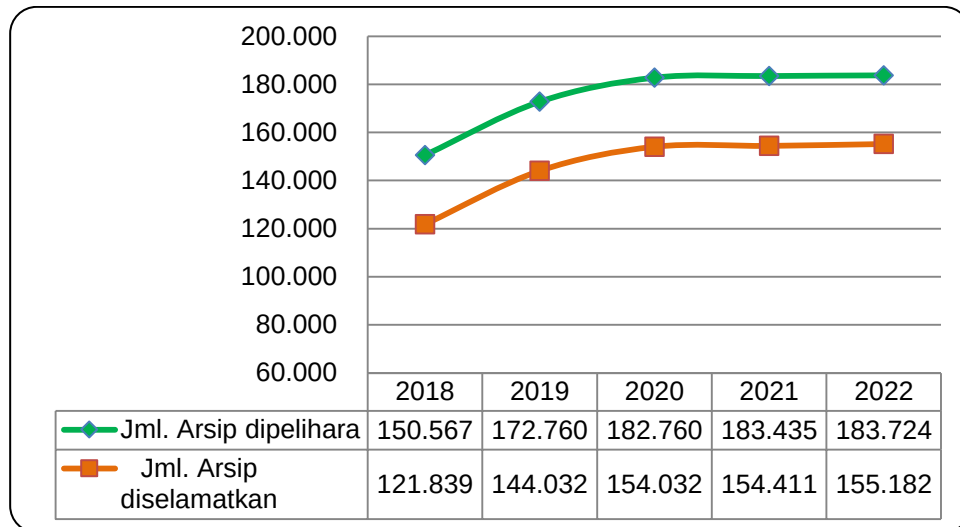
Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2019 - 2023 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD. Sampai tahun 2021 masih stagnan pada angka 49 PD yang mengelola arsip secara baku serta 24 PD pada tahun 2022 seperti disajikan dalam Tabel II-150. Adanya perubahan jumlah Perangkat Daerah dari 66 PD menjadi 30 PD didasari pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekalongan. Dimana terdapat 3 tipe Perangkat Daerah, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Pada tahun 2023, Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku sebanyak 26 PD dari total 30 PD, atau sekitar 86,67%.

Tabel II-150 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24
2021	66	49	74,24
2022	30	24	80,00
2023	30	26	86,67

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar II.49 berikut.



Gambar II.58 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2018-2022 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan arsip statis. Pada tahun 2019, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 48 orang, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 50 orang, dan tetap meningkat pada tahun 2021 menjadi 66 orang. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 23 orang dan tahun 2022 sebanyak 23 orang.

Tabel II-151 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50
2021	19	46	1	66
2022	2	10	11	23
2023	4	12	9	25

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2019 terdapat 3 orang arsiparis, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2022 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel II-152 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2019	3	0	0
2020	7	0	0
2021	7	0	0
2022	7	0	0
2023	15	0	0

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

2.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 62,64 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 9.584 ton. Pencapaian target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton juga tidak terpenuhi, dengan realisasi sebesar 409,77 ton (34,14 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar meningkat pada tahun 2023 sebesar 130,52 ton dari target sebesar 83 ton, atau tercapai 157,25 persen. Perkembangan produksi ikan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-153 berikut.

Tabel II-153 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (kg)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	14.992	13.887	9.234	10.033	9.584
b. Target Daerah	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	97,99	90,76	60,35	65,58	62,64
Ikan Budidaya Air Payau					
a. Jumlah Produksi Ikan	1.746,20	717,31	541,02	409,36	409,77
b. Target Daerah	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	145,52	59,78	45,09	34,11	34,14
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	11,3	91,70	71,64	93,1	130,52

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	13,61	110,48	86,31	112,17	157,25
Jumlah Produksi (ton)	16.750	14.696	9.847	10.535	10.124
Target Produksi	16.583	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Berbagai permasalahan perikanan tangkap di Kota Pekalongan antara lain sedimentasi yang tinggi di muara yang menyebabkan kapal ikan besar > 30 GT tidak bisa masuk, TPI yang terendam banjir saat terjadi air laut pasang, keterbatasan fasilitas *docking* (antrian *docking* sampai dengan 3 bulan), padahal umumnya kapal sekaligus akan melakukan *docking* setelah bongkar/lelang setahun sekali. Pemerintah Kota Pekalongan juga belum memiliki TPI hingga saat ini masih menyewa pada Perum Perindo. Selain itu banyak instansi yang memiliki kewenangan di lokasi Pelabuhan Perikanan di Kota Pekalongan yaitu fungsi pokok Pelabuhan dibawah kewenangan PPNP, alur pelabuhan (muara Kali Loji) dibawah kewenangan Provinsi Jawa tengah dan fasilitas komersial (TPI, lahan, perkantoran) dibawah kewenangan Perum Perindo. Ke depan, akan dibangun pelabuhan perikanan *on shore* yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan JICA, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan dari tahun 2018 hingga tahun 2022 secara kuantitas per kapita cenderung meningkat. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 konsumsi ikan mencapai target yang ditentukan. Kenaikan persentase konsumsi ikan terus meningkat sejak tahun 2018 sebesar 105,33 % hingga 2020 sebesar 108,80 %. Namun demikian terjadi penurunan persentase konsumsi ikan yang terjadi di tahun 2021 yaitu 105,87 % meskipun telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 31 kg/perkapita/tahun. Kemudian di tahun 2022 persentase konsumsi ikan mengalami kenaikan menjadi 108,71 %. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-154 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan
Tahun 2018-2022 (kg/kapita/tahun)**

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2018	31,6	30	105,33
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80
2021	32,82	31	105,87
2022	33,7	31	108,71

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2023

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun di tahun 2020 terdapat 4 kelompok nelayan yang diberikan bantuan, dan tahun 2021 sebanyak 2 kelompok, dan bertambah menjadi 5 kelompok pada tahun 2022.

**Tabel II-155 Cakupan Bina Kelompok Nelayan
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11
2021	2	38	5,3
2022	5	40	12,5
2023	4	33	12,12

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 berfluktuasi, yaitu dari 14.991 ton menjadi 9.584 ton. Pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 9.924 ton. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 10.033 ton. Sementara itu jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan cenderung menurun, dari 108,83 ton di tahun 2019 menjadi 104,46 ton di tahun 2023. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 155,62 ton dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 128,96 ton dan tahun 2022 menjadi 119,39 ton. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-156 berikut.

**Tabel II-156 Produksi Ikan Kelompok Nelayan
di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan (ton)	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12
2021	128,96	9.924	1,30
2022	119,39	10.033	1,19
2023	104,46	9.584	1,09

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan (Gemari) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2019 berjumlah 28 hotel, tahun 2020 bertambah 2 hotel yang selesai direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel dan pada tahun 2022 bertambah 5 hotel sehingga jumlahnya menjadi 35 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 4.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan makanan nasional juga menyediakan makanan internasional yang selama ini telah dikenal oleh

wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 152 di tahun 2019, sekarang telah berkembang menjadi 483 restoran di tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2021 kunjungan wisata sudah mulai meningkat seiring dengan meredanya pandemi Covid 19 di Kota Pekalongan sehingga masyarakat sudah mulai berkunjung ke tempat-tempat wisata. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisata mengalami mencapai angka tertinggi selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini dikarenakan sudah mulai beroperasinya wisata Pantai Pasir Kencana.

Tabel II-157 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882
2021	30	178	316.440
2022	35	234	1.038.509
2023	35	483	1.629.463

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2019 hingga 2021 tingkat okupansinya tidak signifikan. Untuk hotel kelas melati mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 26,23 persen menjadi 27,91 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 25,65 persen di tahun 2021. Rata-rata okupansi hotel bintang 1 hingga hotel bintang 3 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu dikisaran 24 persen hingga 26 persen untuk hotel bintang 1, kisaran 30 persen untuk hotel bintang 2, serta sebesar 54 persen hingga 64 persen untuk hotel bintang 3. Pada tahun 2022 tidak tersedia data dikarenakan BPS Kota Pekalongan tidak melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-158 berikut.

Tabel II-158 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun / Kelas Hotel	2019			2020			2021		
	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)
Non Bintang/Melati	25	518	26,23	15	524	27,91	25	504	25,65
Bintang 1	1	65	24,22	1	56	26,11	1	56	45,57
Bintang 2	1	47	32,14	1	46	31,71	1	46	49,92
Bintang 3	8	738	64,30	8	741	54,36	8	748	61,22
Jml	35	1.368		35	1.367		35	1.354	

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel II-159 berikut.

Tabel II-159 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	57	6	0	4	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan. Obyek wisata yang ada di Kota Pekalongan antara lain pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Canting Landungsari, wisata belanja Pasar Batik Grosir Setono, Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Obyek wisata terbaru yang telah dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana.

Jumlah kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel II-160 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Objek Wisata	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	2	0	0	0	0
	2). Wisnus	69.057	7.429	0	243.084	94.366
	B. Pendapatan (Rp.)	355.370.750	39.449.750	0	4.529.926.500	1.805.250.500
2	Slambaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	11.283	10.426	13.628	15.980	5.242
	B. Pendapatan (Rp.)	44.572.750	33.759.750	38.038.500	84.010.500	31.415.250
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	286	138	0	85	236
	2). Wisnus	28.312	9.982	6.194	24.612	40.697
	B. Pendapatan (Rp.)	100.530.000	31.447.000	25.734.000	116.084.000	183.543.000

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Selain daya tarik wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata, keberadaan SDM berperan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,89 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan secara lengkap dalam Tabel II-161 berikut.

Tabel II-161 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tanaman padi (ton)	5.131,09	4.769,19	7.151,00	7.684,00	8.619,9
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.618,74	1.631,53	1.428,00	1.351,00	1.053,6
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	3,16	2,92	5,01	5,69	5,89

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Untuk meningkatkan produksi pertanian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 40 kelompok tani, 18 kelompok tani di tahun 2021 dan 8 kelompok tani di tahun 2022. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), kelompok tani dan kelompok ternak.

Tabel II-162 Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2023

Kecamatan / Kelurahan	Luas Lahan Akhir 2022	Pengurangan Luas Lahan			Luas Lahan Awal 2024
		Alih Fungsi Lahan (Ha)	Banjir/Rob (Ha)	Lainnya (Ha)	
Pekalongan Barat	54,00	-	-	-	54,00
Pringrejo	50,00	-	-	-	50,00
Tirto	2,00	-	-	-	2,00
Medono	2,00	-	-	-	2,00
Pekalongan Timur	38,90	3,90	-	6,30	28,70
Klego	6,30	-	-	6,30	-
Gamer	70,20	3,80	-	-	66,40
Kali Baros	100,00	0,10	-	-	99,90
Setono	62,40	-	-	-	62,40
Pekalongan Utara	5,00	-	4,00	-	31,00
Krapyak	35,00	-	4,00	-	31,00
Pekalongan Selatan	409,50	2,60	-	-	406,90
Sokoduwet	138,10	1,00	-	-	137,10
Kuripan Yosorejo	105,70	0,53	-	-	105,17
Kuripan Kertoharjo	89,80	0,20	-	-	89,60
Banyurip	65,80	0,73	-	-	65,07
Buaran Kradenan	10,10	0,14	-	-	9,96
Total	737,40	6,50	4,00	6,30	720,60

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

**Tabel II-163 Cakupan Bina Kelompok Petani
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	40	40	18	8	0
Jumlah kelompok tani	87	88	88	88	40
Cakupan bina kelompok petani (persen)	45,98	45,45	20,45	9,09	0

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Dengan mencermati data tersebut di atas, ternyata jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tidak berdampak langsung atau tidak memiliki korelasi yang nyata dengan produktivitas padi per hektar. Jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani yang meningkat tidak diikuti peningkatan produktivitas padi per hektar secara langsung, justru produktivitas padi per hektar cenderung menurun. Produktivitas padi per hektar yang meningkat kembali tahun 2022, diharapkan merupakan dampak dari meningkatnya jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tahun-tahun sebelumnya.

Aspek lain yang sangat berdampak terhadap produktivitas padi per hektar adalah semakin meluasnya banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan luas wilayah terdampak banjir dan rob, serta frekuensi dan lama terjadi banjir dan rob, tentunya berimplikasi terhadap produktivitas padi per hektar pada kawasan terdampak. Banjir dan rob berimplikasi terhadap kondisi tanah atau unsur hara sehingga akan berdampak terhadap produktivitas padi per hektar. Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menyusun kajian mitigasi dampak banjir dan rob terhadap lahan pertanian sebagai upaya untuk mengantisipasi penurunan produksi sektor pertanian di masa yang akan datang.

Selain itu, permasalahan irigasi juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas padi per hektar. Kondisi geografis wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar, berimplikasi terhadap sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang tinggi tersebut, menyebabkan aliran air irigasi seringkali mengalami kendala. Di samping itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 adalah 521 hektar. Perkembangan kawasan terbangun (*built-up area*) yang cukup tinggi, seperti untuk perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan serta alokasi luas lahan yang menurun menyebabkan beberapa saluran irigasi tidak berfungsi. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi per hektar.

Dalam hal upaya menambah nilai produk pertanian, dilakukan pendampingan pengembangan Kampung Tempe di Kertoharjo dan Kampung Tahu di Sokoduwet.

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel II-164 berikut.

**Tabel II-164 Jenis Pasar dan Toko
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

JenisPasar / Toko	2019	2020	2021	2022	2023
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	10	11	11
- Toko	74	74	74	74	74
- Kios	555	555	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisional	2.726	2.726	2.757	4.729	4.729
Toko Modern:					
- Minimarket	43	53	77	64	82
- Supermarket	3	5	4	4	6
- Department store	3	4	2	2	3
- Hypermarket	1	1	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2024

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2023, pedagang/usaha informal sebanyak 852 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-165 berikut.

**Tabel II-165 Jumlah Pedagang/Usaha Informal
di Kota Pekalongan Tahun 2023**

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	36
2	Jl. Hasanudin	10
3	Jl. Urip Sumoharjo	24
4	Jl. Gatot Subroto	39
5	Jl. Kurinci	11
6	Jl. Kusuma Bangsa	34
7	Jl. Merak *	1
8	Jl. WR. Supratman	10
9	Jl. Progo	9
10	Jl. Merpati	16
11	Jl. Mawar	18
12	Jl. Melati	38
13	Jl. Pembangunan	13
14	Jl. Mataram	50
15	Alun-alun timur	9
16	Alun-alun utara	12
17	Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras	261
18	Tentara Pelajar	31
19	Jl. Veteran	51
20	Jl. Angkatan 45	4

No.	Lokasi	Jumlah
21	Resimen	4
22	Gajah Mada	8
23	JL. HOS cokroaminoto	43
24	Jl. RA Kartini	13
25	Jl. Wahid Hasyim	27
26	Jl. RA Kartini	13
27	Jl. Wahid Hasyim	27
28	Jl. Dr. Wahidin	17
29	Jl. Cendrawasih	27
	Total	852

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga cenderung meningkat dalam periode 5 tahun kebelakang. Pada tahun 2019 sebesar Rp.2,370 triliun dan naik sampai di angka Rp.2,893 triliun di tahun 2023. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang cenderung meningkat, mulai dari Rp.1,655 triliun di tahun 2019 menjadi Rp.1,807 triliun di tahun 2023. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.319 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2020, masing-masing menjadi 2,474 triliun dan 1,664 triliun dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.656 triliun dan Rp. 1.719 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-166 berikut.

Tabel II-166 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

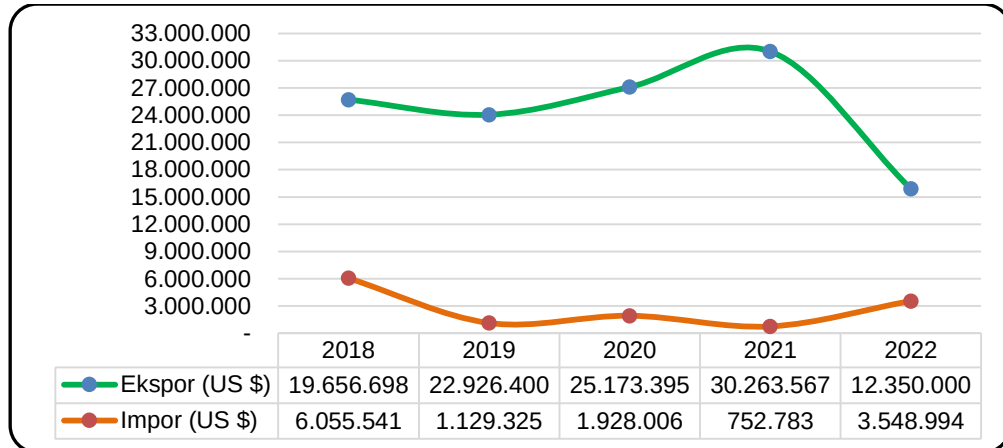
No	Keterangan		2019	2020	2021	2022	2023
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.590.983,42	13.744.224,05
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	2.370.293,83	2.319.488,33	2.474.768,55	2.656.275,92	2.893.067,16
		Kontribusi	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
2	ADHK 2010	PDRB Total	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94	8.476.545,73
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.655.883,36	1.578.463,62	1.664.625,66	1.719.403,05	1.807.547,25
		Kontribusi	22,15	21,51	21,90	21,39	21,32

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi

terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-59 berikut.



Gambar II-59 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2023

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 terdapat 14 unit industri, tetapi pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 89 unit. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 8 unit, di tahun 2021 meingkat kembali menjadi 58 unit, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 353 unit. Pada tahun 2023 dikarenakan ketersediaan data sudah cukup baik dibantu dengan menggunakan aplikasi SIINas (Sistem Industri Nasional), OSS (Online Single Submission), dan Sistem Informasi Industri Kota Pekalongan, jumlah industri yang terdata sejumlah 10.446 industri. Secara keseluruhan jumlah industri di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-167 berikut.

Tabel II-167 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Klasifikasi Industri	Jumlah Unit Industri				
	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	14	4	8	26	1.403
Industri Aneka (IA)	47	3	45	326	8.047
Industri Hasil Pertanian (IHP)	6	1	5	1	996
JUMLAH	89	8	58	353	10.446

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel II-168 berikut.

**Tabel II-168 Nilai Investasi Industri
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	9.412,03	955,00	3.108,90	6.275,31	11.277,66
Industri Aneka (IA)	69.483,30	7.184,00	11.271,27	44.579,27	50.091,30
Industri Hasil Pertanian (IHP)	2.721,41	1.450,00	740,00	100,00	1.244
JUMLAH	81.616,74	9.589,00	15.120,17	50.954,58	62.612,96

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya sepanjang tahun 2018-2023 jumlah industrinya cenderung stagnan, namun untuk kategori batik dan pakaian jadi dari tekstil terdapat peningkatan sebesar 10,31% dan 16,49%. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

**Tabel II-169 Jumlah IKM Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	781	1.457	1.882	1.832	2.021
Pakaian jadi dari tekstil	953	941	1.067	1.146	1.335
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	23	26	45	77	38
Penggaraman/Pengeringan Ikan	9	38	102	51	33
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	8	88	87	82	204
Pengolahan Teh dan Kopi	11	31	36	38	37
Pertenunan	34	33	46	47	55

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

**Tabel II-170 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	5.278	7.964	11.263	11.358	12.458
Pakaian jadi dari tekstil	6.047	6.600	7.958	8.650	9.774
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	59	52	62	154	53
Penggaraman/Pengeringan Ikan	75	190	228	136	119
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	58	227	664	606	1.585
Pengolahan Teh dan Kopi	1.174	1.834	2.531	2.774	2.534
Pertenunan	595	466	407	425	620

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

**Tabel II-171 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	n/a	10.041	17.610	1.786	10.365,3
Pakaian jadi dari tekstil	12.573	2.098	524	13.514	8.816,6
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	14,2	7,5	n/a	25
Penggaraman/Pengeringan Ikan	n/a	135	16,8	n/a	12,7
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	72.15	80,4	n/a	44,7
Pengolahan Teh dan Kopi	n/a	3.550	n/a	n/a	n/a
Pertununan	n/a	n/a	n/a	648	145,7

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2019-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan ADHB. Pada tahun 2019 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sebesar 20,73 persen dari total PDRB. Kondisi tersebut terus berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi 19,88 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel II-172 berikut.

**Tabel II-172 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023**

Keterangan		2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94	8.476.545,73
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.550.360,71	1.542.947,72	1.579.669,99	1.646.996,75	1.684.876,44
	Kontribusi	20,73	21,03	20,78	20,49	19,88
ADHK (2010)	PDRB Total	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.590.983,42	13.744.224,05
	PDRB Perindustrian	2.267.063,33	2.315.371,70	2.423.908,81	2.623.109,41	2.809.448,38
	Kontribusi	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

2.4.4 Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unit yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dengan unit kerja di bawahnya maupun dengan instansi lain sesuai tugasnya dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Kota, Nilai SAKIP OPD dan Persentase Capaian Kinerja Pembangunan.

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

**Tabel II-173 Jumlah Kerjasama yang dilakukan
Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	136	93	68	70	21

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2024

b. Reformasi Birokrasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari C menjadi BB.

Pada Tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel II-164 berikut.

**Tabel II-174 Nilai SAKIP Kota Pekalongan
Tahun 2018 – 2021**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09	11,17	11,45
4	Evaluasi Internal	10	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	20	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	100	70,88	72,59	73,07	73,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		C	CC	BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2022

Hasil Evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa nilai sebesar 72,83 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar

unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

**Tabel II-175 Nilai SAKIP Kota Pekalongan
Tahun 2022 - 2023**

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	30	24,38	23,24
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	20,04
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,52
4	Evaluasi Internal	25	17,95	18,03
	Nilai SAKIP	100	73,31	72,83
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan, 2024

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Semester I Tahun 2023 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 85,647 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Semester II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-166 berikut.

**Tabel II-176 Indeks Kepuasan Masyarakat pada
Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2023**

	Nama OPD	Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	89,80	Sangat Baik
2	Dinas Kesehatan	87,88	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	89,88	Sangat Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85,72	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	86,02	Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	90,00	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,23	Sangat Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	85,95	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	93,51	Sangat Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	95,36	Sangat Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	95,35	Sangat Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	88,32	Sangat Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	98,16	Sangat Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	92,63	Sangat Baik
15	Dinas Perhubungan	84,48	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	95,95	Sangat Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95,73	Sangat Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	85,04	Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	86,40	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	95,59	Sangat Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	92,08	Sangat Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	97,00	Sangat Baik
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	86,11	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	86,15	Baik
25	Sekretariat DPRD	95,50	Sangat Baik
26	Inspektorat	90,24	Sangat Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	82,27	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	99,51	Sangat Baik
29	Bagian Organisasi Setda	89,26	Sangat Baik
30	Bagian Umum Setda	90,03	Sangat Baik
31	Bagian Hukum Setda	89,32	Sangat Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	89,74	Sangat Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	91,05	Sangat Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	89,02	Sangat Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	99,83	Sangat Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	86,17	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	82,66	Baik
38	Kelurahan Panjang Baru	99,94	Sangat Baik
39	Kelurahan Krapyak	98,07	Sangat Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	88,29	Baik
41	Kelurahan Degayu	90,93	Sangat Baik
42	Kelurahan Bandengan	97,87	Sangat Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	94,34	Sangat Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	99,96	Sangat Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	84,83	Baik
46	Kelurahan Jenggot	98,13	Sangat Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	93,14	Sangat Baik
48	Kelurahan Banyurip	85,93	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	88,83	Sangat Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	94,44	Sangat Baik
51	Kelurahan Medono	87,90	Baik
52	Kelurahan Podosugih	85,89	Baik
53	Kelurahan Pasirkratonkramat	81,34	Baik
54	Kelurahan Tirto	92,31	Sangat Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	90,78	Sangat Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	84,58	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
57	Kelurahan Pringrejo	90,19	Sangat Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	99,70	Sangat Baik
59	Kelurahan Kauman	98,79	Sangat Baik
60	Kelurahan Poncol	99,53	Sangat Baik
61	Kelurahan Klego	99,96	Sangat Baik
62	Kelurahan Gamer	78,26	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	98,40	Sangat Baik
64	Kelurahan Setono	99,56	Sangat Baik
65	Kelurahan Kalibaros	98,61	Sangat Baik
66	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	97,28	Sangat Baik
67	UPT Puskesmas Tondano	86,10	Baik
68	UPT Puskesmas Tirto	82,21	Baik
69	UPT Puskesmas Buaran	94,15	Sangat Baik
70	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	85,16	Baik
71	UPT Puskesmas Medono	84,00	Baik
72	UPT Puskesmas Klego	80,73	Baik
73	UPT Puskesmas Noyontaan	86,21	Baik
74	UPT Puskesmas Sokorejo	90,47	Sangat Baik
75	UPT Puskesmas Kramatsari	83,79	Baik
76	UPT Puskesmas Bendan	86,11	Baik
77	UPT Puskesmas Jenggot	88,48	Sangat Baik
78	UPT Puskesmas Dukuh	84,68	Baik
79	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	87,95	Baik
Rata-rata IKM Kota Pekalongan		90,69	Sangat Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekalongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat “B”. Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel II-167 berikut.

Tabel II-177 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
Total Komponen pengungkit (A)		60,00	36,11	35,32

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	30,33	33,65
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	66,44	68,97

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemkot Kota Pekalongan tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori “BB” dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-168 berikut.

**Tabel II-178 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022**

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	Komponen Pengungkit			
	I. Pemenuhan	20,00	11,39	12,79
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03	6,81
	III. Reform	30,00	18,86	19,13
	Total Komponen Pengungkit	60,00	36,28	38,73
B	Komponen Hasil			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11	8,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,09
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71	8,40
	Total Komponen Hasil	40,00	33,38	32,31
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	69,66	71,04

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, 2023

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, ada perubahan dalam komponen penilaian. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 77,12 dengan kategori “BB”, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-179 berikut.

**Tabel II-179 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2023**

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	65,08
B	RB Tematik	20	12,04
C	Indeks RB	120	77,12
			BB

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 2024

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2022, terdapat 12 Peraturan daerah yang ditetapkan, dengan status 10 Perda sudah aktif dan 2 Perda Masih dalam proses evaluasi dan permohonan nomor registrasi di provinsi, yaitu:

- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
- Raperda Kota Pekalongan tentang Garis Sempadan;
- Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.4.5. Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi

dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan

hasil, dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 3.177 orang, dari tahun 2022 sebanyak 3.261. Penurunan ini antara lain adalah karena adanya pegawai purna tugas yang cukup banyak pada tahun 2023 serta adapula yang meninggal dunia.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-180 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	25	3	28	23	2	25
Eselon III	66	42	108	67	44	111
Eselon IV	124	107	231	130	110	240
Fungsional Umum	594	613	1.207	443	313	756
Fungsional Tertentu	607	1.080	1.687	68	1.358	2.045
Jumlah Total	1.416	1.845	3.261	1.265	1.827	3.177

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024, 2024

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel II-170 berikut.

Tabel II-181 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	45	-	45	33	-	33
SMP/Sederajat	81	7	88	70	7	77
SMA/Sederajat	269	131	400	231	105	336
Diploma I,II/Akta I,II	13	6	19	11	5	16
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	165	323	488	151	302	453
Diploma IV	26	67	93	29	69	98
Sarjana S1	703	1.233	1.936	691	1.250	1.941
Sarjana S2	111	78	189	131	89	220

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sarjana S3	3	-	3	3	-	3
Jumlah Total	1.416	1.695	3.261	1.350	1.827	3.177

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 71,20 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit.

Dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain:

- Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
- Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
- Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah: nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2022, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 264,5 dengan kategori Baik. Sedangkan untuk tahun 2023, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 327, melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Sangat Baik untuk 2 Kabupaten/kota (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), kategori Baik untuk 30 Kabupaten/kota dan sisanya 3 Kabupaten/kota kategori Kurang.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-182 Jumlah Diklat Aparatur
di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023**

Diklat	2019	2020	2021	2022	2023
Teknis	366	151	172	472	327
Fungsional	166	75	13	21	7
Kepemimpinan	8	1	3	2	45
Prajabatan	251	0	200	319	2
Orientasi PPPK	-	-	-	190	146

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat Teknik, Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan porsi / kuota yang disediakan penyelenggara Diklat. Sehingga jumlah peserta diklat tiap tahunnya tidak dapat diprediksi jumlahnya, walaupun BKPSDM secara teratur selalu mengajukan calon peserta diklat baik ke Pemprov Jateng maupun Lembaga/instansi/ kementerian terkait. Selain itu BKPSDM juga selalu mengisi pengajuan peserta diklat melalui Aplikasi SI JARI ON AKD milik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan untuk diklat prajabatan pada tahun 2023 dilaksanakan untuk 2 orang CPNS dan orientasi PPPK untuk 146 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan general check-up jumlahnya fluktuatif, berdasarkan jumlah ASN yang memerlukan cek Kesehatan (mengalami sakit) ataupun CPNS yang akan diangkat menjadi PNS. Pada tahun 2023 terdapat 388 orang yang mengikuti General Check Up.

Jumlah Aparatur yang melakukan general check up dan mengikuti Diklat purna tugas pada tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-183 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2019	2020	2021	2022	2023
General Check-Up	343	11	206	16	388
Diklat Purna Tugas	60	60	0	0	0

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

5. Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dimaksud, perlu adanya akselerasi langkah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan tema perencanaan pembangunan serta dapat membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan science-based policy yakni aktivitas riset sebagai basis pengambilan kebijakan yang mampu menjadi solusi atas permasalahan yang muncul di Kota Pekalongan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian

Tabel II-184 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Universitas Pekalongan
2	2019	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
3	2019	Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono	STMIK Widya Pratama Pekalongan
4	2019	Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Universitas NU Purwokerto
5	2019	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Memperkuat Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
6	2020	Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro
7	2020	Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19: Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan
8	2020	Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan
9	2020	Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan Problem Solving Anak	Universitas Selamat Sri
10	2020	Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
11	2021	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	UMPP
12	2021	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
13	2021	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Balitbang Kota Magelang
14	2022	Pemetaan Jaringan Drainase Berbasis Spasial di Kota Pekalongan	Institut Teknologi Bandung
15	2022	Studi Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Pekalongan Barat	Universitas Semarang
16	2022	Studi Penyusunan Zona Risiko Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran Menggunakan Metode <i>Groundwater Occurance, Overlaying Lithology Depth of Groundwater (GOD)</i> sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan	Universitas Diponegoro
17	2022	Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Bakteri <i>Indigenous</i> sebagai Upaya Pemulihan Indeks Kualitas Air di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
18	2022	Penerapan Konsep <i>Water Sensitive Urban Design</i> untuk Mewujudkan Permukiman Pesisir Kota Pekalongan yang Tangguh	Universitas Diponegoro
19	2023	Analisis Lingkungan Hidup dan Pola Asuh sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 6 Sampai 60 bulan di Kota Pekalongan Tahun 2023	Universitas Negeri Semarang
20	2023	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob di Kota Pekalongan dalam Perspektif Masyarakat	Universitas Terbuka

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
21	2023	Kajian Social Responsibility Empowerment Para Pelaku Usaha Batik dalam Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Bawah Tanah di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
22	2023	Land Value Capture sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah di Kota Pekalongan	Tim Peneliti UNDIP
23	2023	Pengetahuan dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan	Pusat Pusat Riset Koperasi, Korporasi Dan Ekonomi Kerakyatan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

**Tabel II-185 Riset Bersama Kota Pekalongan
Tahun 2019 - 2023**

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes
2	2019	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art
3	2019	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas
4	2019	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa
5	2019	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
6	2019	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
7	2020	Analisis Strategi Recovery Kepariwisata Kota Pekalongan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	DRD Kota Pekalongan
8	2020	Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan	DRD Kota Pekalongan
9	2021	Efektivitas Penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
10	2021	Pengembangan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
11	2022	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
12	2023	Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian pada Produk Tempe Di Kampung Tempe Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
13	2023	Studi Antropologi: Konstruksi Sosial pada Kemiskinan di Kota Pekalongan	Lingkar Kajian Kota Pekalongan (LKPP)

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.4.6. Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

- (1) Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;
- (2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;
- (3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai level 3 penuh, namun turun di tahun 2021 menjadi level 2 dengan skor : 2,812 dan meningkat kembali menjadi level 3 di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Pekalongan adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II-186 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019 – 2023

Tingkat Maturitas SPIP	2019	2020	2021	2022	2023
Level	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 2 2,812	Level 3 3,022	Level 3 3,002

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2024

2.4.7. Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 – 2023 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2023 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian dan penipuan, sedangkan jumlah kasus yang menurun yaitu penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Selengkapnya disajikan dalam dalam tabel berikut..

Tabel II-187 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tindak Kejahatan	2019	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	0	2	0	0	0
Pemeriksaan	0	0	2	0	0
Penganiayaan	7	3	2	13	6
Pencurian	71	33	59	81	72
Penipuan	19	18	2	31	6

Tindak Kejahatan	2019	2020	2021	2022	2023
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	44	64	46	39	49

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel II-188 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel II-188 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	1	2	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum.

Tabel II-189 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	32	38	36	34	48

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel II-190 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

JENIS PEMILIHAN UMUM	2019	2020	2021	2022	2023
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	79,35	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	-	-	-

JENIS PEMILIHAN UMUM	2019	2020	2021	2022	2023
Pemilu Presiden (persen)	85,88	-	-	-	-
Pemilu Legislatif (persen)	85,51	-	-	-	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2017-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut diupayakan terus meningkat, dimana pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1 kali, tahun 2020 sebanyak 3 kali, tahun 2021 sebanyak 7 kali dan tahun 2022 sebanyak 2 kali, tahun 2023 sebanyak 7 kali.

Tabel II-191 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2019 – 2023

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	3	7	2	7

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

2.5 EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

Berdasarkan Pasal 255 Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa Evaluasi terhadap hasil RPJMD antarkabupaten/kota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD kabupaten/kota masing-masing.

2.5.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2023

Evaluasi capaian indikator kinerja RPJMD tahun 2023 ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam Evaluasi Hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori, yaitu tercapai, tidak tercapai dan belum tersedia data. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 sampai dengan triwulan IV tahun 2023 dari 100 indikator, sebanyak:

- 53 indikator tercapai (53,00 persen),
- 40 indikator tidak tercapai (40,00 persen), dan
- 7 indikator belum tersedia data (7,00 persen).

Tabel II-192 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.51	74.52	73.00	73.00	97.78	Tidak Tercapai
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	7.00	6.50	6.81	6.81	86.49	Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	75.90	75.52	76.71	76.71	100.89	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	4.98	6.48	5.02	5.02	119.32	Tercapai
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	85.19	74.07	70.37	70.37	70.37	Tidak Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	21.11	22.12	18.98	18.98	64.12	Tidak Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	79.02	89.11	90.48	90.48	99.38	Tidak Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/ Jiwa/Tahun	40.65	n/a	40.68	36.56 - 36.92	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.28	0.30	0.33	0.33	66.00	Tidak Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	124.53	116.21	122.77	122.77	65.17	Tidak Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	9.96	7.91	13.71	13.71	51.06	Tidak Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	12.28	9.92	18.42	18.42	48.86	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	1.42	2.00	4.40	4.40	33.64	Tidak Tercapai
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	n/a	59.14	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	70.35	70.54	73.95	73.95	103.66	Tercapai
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	93.97	93.72	95.09	95.09	95.09	Tidak Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	980.14	1027.00	880.83	880.83	64.14	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	72.36	70.12	71.45	71.45	97.72	Tidak Tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.76	2.48 - 2.83	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum										
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
<i>Urusan Pendidikan</i>										
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	90.94	100.00	99.67	99.67	99.67	Tidak Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
<i>Urusan Kesehatan</i>										
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	85.98	90.00	106.85	106.85	106.85	Tercapai
<i>Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</i>										
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	Persen	99.40	n/a	99.69	98.80	100.00	100.00	100.60	Tercapai
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	33.93	77.88	77.88	77.88	88.67	Tidak Tercapai
6	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	86.07	88.389	100.00	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	4.72	1.09	2.19	2.19	200.92	Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Regulasi	96.251	n/a	99.95	96.211	99.89	99.89	103.78	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	100.00	40.00	20.00	20.00	20.00	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman										
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	97.47	93.74	98,76	98,76	103,33	Tercapai
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas										
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	111.57	70.00	82.41	82.41	82.41	Tidak Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	95.79	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial										
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.82	n/a	18.39	3.43	17.64	17.64	461.78	Tercapai
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
Urusan Tenaga Kerja										
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	61.50	52.26	49.26	49.26	94.08	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak										
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	n/a	28.51	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	637.6	630.00	769.80	769.80	121.04	Tercapai
Urusan Pangan										
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Pertanahan										
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Lingkungan Hidup										
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	62.86	62.86	28.57	28.57	210.01	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	0.39	0.34	1,31	1,31	385,29	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	89.40	71.07	95.20	95.20	136.18	Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	25.81	34.42	43.04	43.04	71.61	Tidak Tercapai
<i>Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</i>										
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	81.84	88.54	83.56	83.56	91.44	Tidak Tercapai
<i>Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</i>										
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	17.09	8.08	8.45	8.45	84,50	Tidak Tercapai
<i>Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</i>										
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	64.27	67.50	61.46	61.46	90.85	Tidak Tercapai
<i>Urusan Perhubungan</i>										
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	21.51	28.00	24.69	24.69	88.18	Tidak Tercapai
<i>Urusan Komunikasi Dan Informatika</i>										
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	2.1	2.95	3,29	3,29	101,23	Tercapai
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 – 100)	n/a	90.02	Baik (Nilai 76.61 – 88.30)	96,62	96,62	120,78	Tercapai
<i>Urusan Koperasi dan UKM</i>										
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Trilyun	9.02	n/a	5.90	8.12	11.46	11.46	127,05	Tercapai
<i>Urusan Penanaman Modal</i>										
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Milyar Rupiah	216.78	410.60	570.79	204.28	765.82	765.82	353.27	Tercapai
<i>Urusan Kebudayaan</i>										
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	0.00	1.53	1.53	1.53	104.79	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Urusan Perpustakaan										
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	33.46	20.12	19.25	19.25	92.86	Tidak Tercapai
Urusan Kearsipan										
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	80.67	73.20	91.02	91.02	122.34	Tercapai
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga										
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.43	1.21	1.39	1.39	101.46	Tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	13.00	14.00	6.00	6.00	40.00	Tidak Tercapai
Urusan Statistik										
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	90.22	70.00	77.73	77.73	97.16	Tidak Tercapai
Urusan Persandian										
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	II	n/a	I+	I	II	II	200.00	Tercapai
URUSAN PILIHAN										
Urusan Kelautan dan Perikanan										
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10.535.05	15.141.00	10.091,60	10.091,60	64.69	Tidak Tercapai
Urusan Pariwisata										
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625.000	316.440	1.038.424	580.000	1.258.597	1.258.597	201,38	Tercapai
Urusan Pertanian										
41	Nilai produksi tanaman pangan. hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259.492.90	n/a	694.861.638	247.580.00	637,811,340	637,811,340	245,79	Tercapai
Urusan Perindustrian										
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	4.26	0.09	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
Urusan Perdagangan										
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	18.15	26.71	11,09	11,09	40,31	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
<i>Sekretariat Daerah</i>										
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	89.48	94.00	96.38	96.38	102.53	Tercapai
<i>Sekretariat DPRD</i>										
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
<i>Perencanaan</i>										
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	99.19	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
<i>Keuangan</i>										
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.31	1.98	2.26	2.26	109.71	Tercapai
<i>Kepegawaian</i>										
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	68.06	87.00	98.90	98.90	109.89	Tercapai
<i>Pendidikan dan Pelatihan</i>										
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	113.25	40.00	34.37	34.37	85.93	Tidak Tercapai
<i>Penelitian dan Pengembangan</i>										
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
<i>Inspektorat Daerah</i>										
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	56.67	67.74	66.67	66.67	66.67	Tidak Tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	3.00	13.00	9.00	9.00	56.25	Tidak Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN										
<i>Kecamatan</i>										

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.91	100.00	99,84	99,84	99,84	Tidak Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	99.74	100.00	99,87	99,87	99,87	Tidak Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	100.06	100.00	99,73	99,73	99,73	Tidak Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										
<i>Kesatuan Bangsa dan Politik</i>										
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing										
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	54.36	50.87	56,24	56,24	110,49	Tercapai
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	71.04	72.69	77.12	77.12	101.89	Tercapai
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.20	9.43	9,29	9,29	95,65	Tidak Tercapai
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi TW. IV Tahun 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Melebihi Target	Tercapai
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	45.33	35.36	48.86	48.86	138.06	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	23.77	23.60	24.39	24.39	103.30	Tercapai
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	1.00	7.00	1.00	3.00	42.86	Tidak Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	B	B	100.00	Tercapai
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	97.20	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	42.22	91.11	111.11	111.11	111.11	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	n/a	2.95	3,29	3,29	101,23	Tercapai
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.44	83.64	90,69	90,69	107,85	Tercapai
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	90.01	96.00	96,62	96,62	99,10	Tidak Tercapai
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	264.50	240.00	327,00	327,00	125,77	Tercapai
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	73.31	74.57	72,83	72,83	95,74	Tidak Tercapai
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	n/a	n/a	n/a	Belum Tersedia Data
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.022	3.40	3,002	3,002	75,05	Tidak Tercapai
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	2.00	5.00	3,00	3,00	37,50	Tidak Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023

2.5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel II-193 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.60	100.00	103.01	103.01	103.01	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100	76.37	90.94	83.97	99.67	99.67	99.67	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan tidak memenuhi target dikarenakan perubahan formula perhitungan pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dari yang sebelumnya berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 disebutkan jumlah penduduk usia sekolah penerima layanan pendidikan yang dihitung adalah berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan pada peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga terdapat peningkatan capaian pemenuhan SPM Pendidikan yang cukup signifikan diakibatkan jumlah penerima layanan dasar pendidikan yang dihitung menjadi lebih banyak.										
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	100	56.04	100.00	56.11	56.11	56.11	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah pendidik berkualifikasi minimal S1 dan bersertifikasi yang meninggal dunia maupun memasuki usia pensiun, tidak sebanding dengan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel II-194 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92	88	0.00	90.00	18.00	18.00	19.57	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah kunjungan penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota masih rendah dikarenakan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan rujukan masih rendah.										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90	70	70.43	80.00	72.00	72.00	80.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar tidak memenuhi target dikarenakan Ketersediaan sarana, prasarana dana alkes di Puskesmas belum memenuhi standart . Pemenuhan sarana , prasarana dan alkes yg sesuai standart akan mulai dilakukan pada tahun 2024.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.5	60	100.00	65.00	100.00	100.00	137.93	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar jauh melebihi target dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Benda dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.5	93	88.05	94.00	100.00	100.00	104.71	Tercapai
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60	35	100.00	45.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan jauh melebihi target dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100	92	360.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97	95	221.75	96.00	94.22	94.22	97.13	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) belum selesai dilaksanakan, sehingga capaian sampai dengan triwulan III belum dapat menggambarkan capaian riil program.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.04	92.00	98.65	98.65	103.84	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel II-195 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.56	100.00	100.28	100.28	100.28	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	125.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	94.92	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	71.45	88.39	67.42	67.42	73.19	Tidak Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada penambahan jumlah pelanggan pada tahun 2022 melalui program lain, hanya penambahan pada program hibah air minum sebesar 628 SR										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100	0	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional tidak memenuhi target dikarenakan Pencapaian target bertahap hingga akhir tahun RPJMD, dimana untuk penambahan pada 1 lokasi sarana persampahan regional (terdapat 3 komponen, yaitu : adanya bangunan, luasan minimal 200 m2, dan keberfungsian alat), dan pada tahun 2024 akan ada penambahan komponen sebanyak 6 komponen (2 Lokasi) yaitu: 1. Panjang Wetan-Bugisan 2. Kuripan Kertoharjo										
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	9.96	11.07	17.68	17.68	137.34	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pelayanan sedot tinja, dan adanya revitalisasi beberapa mck umum serta pembangunan mck umum.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.39	68.47	68.58	68.58	95.93	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase drainase dalam kondisi baik tidak memenuhi target dikarenakan karena masih ada beberapa drainase yang belum di rehab atau di bangun dan target akan terealisasi pada akhir RPJMD tahun 2026										
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	16.95	17.84	17.34	17.34	92.53	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
Capaian indikator Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan karena lamanya proses pengajuan PBG dan kurangnya tenaga penyedia jasa yang belum memiliki sertifikat keahlian										
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	84.28	83.30	83.77	83.77	96.77	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan (1) Adanya Refocusing Anggaran Penyelenggaraan Jalan tahun 2020-2022 (Alasan Utama); (2) SK Jalan berubah sehingga Panjang jalan ikut berubah bertambah panjang ; (3) Banyak jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan ROB										
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.15	13.20	7.61	7.61	35.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi tidak memenuhi target dikarenakan masih kurangnya tenaga bangunan yang memenuhi klasifikasi / persyaratan untuk pembuatan SKK.										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100	0	66.67	100.00	45.24	45.24	45.24	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota tidak memenuhi target dikarenakan sedang menunggu penjadwalan persetujuan substansi RDTR di Kementerian ATR-BPN yang ditargetkan selesai di tahun 2024, dan sampai akhir tahun RPJMD pencapaian target program ini bertahap dengan target (tahun 2024 : Perwal RDTR, Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; tahun 2025 : Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel II-196 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	91.67	100.00	99.17	99.17	99.17	Tidak Tercapa

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0	99.13	91.35	100.00	100.00	108.28	Tercapai
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0	498.47	280.10	291.47	227.55	227.55	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 0 ha Luas Kawasan permukiman kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 498,47 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh masih sekitar 227,5 Ha. Adapun kondisi pada akhir tahun 2022 sisa luas Kawasan permukiman kumuh sekitar 280,10 Ha. Sehingga selama 1 tahun pada tahun 2023 kami telah menangani 52,6 Ha. Sehingga selama 3 tahun kami telah menangani Kawasan permukiman kumuh sebesar 270,97 Ha, sedangkan RPJMD seharusnya berlaku 5 tahun, namun ini baru berjalan 3 tahun maka menyebabkan target 0 Ha luas Kawasan permukiman kumuh belum tercapai. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.										
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,348.81	1,856.41	1920.55	1920.55	89.42	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 2147,88 ha Luas Kawasan permukiman tidak kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 1649,41 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh masih sekitar 1920,55 Ha. Sehingga selama 3 tahun kami telah menangani Kawasan permukimantidak kumuh sebesar 271,14 Ha, sedangkan RPJMD seharusnya berlaku 5 tahun, namun ini baru berjalan 3 tahun maka menyebabkan target 2147,88 Ha luas Kawasan permukiman tidak kumuh belum tercapai. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.										
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	46.74	14.48	52.17	52.17	358.58	Tercapai
Capaian indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) jauh melebihi target. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dalam penentuan target, dimana target yang dihitung adalah jumlah rumah, sedangkan indikator dan capaian yang dihitung adalah jumlah perumahan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel II-197 Capaian Indikator Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	83.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70	60	65.00	64.00	80.00	80.00	114.29	Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan Jumlah Perda yang ditegakkan: TW. I : 16 TW. II : 16 TW. III : 16 TW. IV : 16 Jumlah Perda yang sering terjadi/dilaporkan masyarakat adanya pelanggaran ada 16 perda dari 20 perda prioritas Satpol PP. 16 Perda tersebut adalah Perda No. 13 Tahun 2000 Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol Perda No. 4 Tahun 2009 Bangunan Gedung Perda No. 12 Tahun 2011 Pajak Reklame Perda No. 5 Tahun 2019 Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Perda No. 15 tahun 2015 Penyelenggaraan Rumah Kos Perda No. 16 Tahun 2015 Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Perda No. 2 Tahun 2018 Penyelenggaraan Reklame Perda No. 04 Tahun 2009 Perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan Perda No. 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan Perda No. 35 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No. 7 Tahun 2012 Garis Sempadan Perda No. 7 Tahun 2013 Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Perda No. 12 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perda No. 1 Tahun 2018 Izin Usaha Industri Perda No. 7 Tahun 2014 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perda No. 1 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dari 20 perda prioritas atau target, terdapat laporan pelanggaran kasus pada 16 perda sehingga sebanyak 80% Perda yang ditegakkan. Target capaian tahun 2023 adalah 70%, sedangkan capainnya adalah 80% sehingga capaiannya adalah 80/70, yaitu 114,29%.										
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel II-198 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	65.71	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	100.00	58.00	65.41	65.41	87.21	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan tidak memenuhi target dikarenakan Adanya kebijakan dari Kementerian Sosial bahwa PSKS harus berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini), sehingga jumlah PSKS yang diberdayakan sampai tahun 2023 menjadi berkurang										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	25.16	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	10.32	56.69	57.38	57.38	109.32	Tercapai
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel II-199 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	0.37	0.42	1.09	1.09	198.85	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan ada penambahan anggaran (Cukai/DBHCHT) dan APBN dalam penyelenggaraan ujian kompetensi sehingga menambah pula pesertanya/sasarannya.										
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	54.46	23.93	15.37	15.37	51.34	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan banyaknya pencari kerja yang tidak melaporkan diri jika sudah mendapatkan pekerjaan										
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	100.03	46.80	49.93	49.93	101.85	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel II-200 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	11.29	5.55	5.98	5.98	53.89	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender tidak memenuhi target dikarenakan Target kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sampai dengan akhir tahun rpjmd adalah 372 kegiatan dengan target setiap tahunnya adalah 62 kegiatan Tahun 2021 kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sejumlah 81 kegiatan Tahun 2022 target 124 kegiatan atau 33.33% Tahun 2023 target 186 kegiatan atau 50% Tahun 2024 target 248 kegiatan atau 66.67% Tahun 2025 target 310 kegiatan atau 83.33% Tahun 2026 target 372 kegiatan atau 100% sehingga pada tahun 2023 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	29.88	23.99	15.01	15.01	159.81	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan adanya pendampingan intensif dari pihak LP-PAR yang dilakukan secara humanis, sehingga menimbulkan rasa keberanian, aman dan nyaman kepada para korban kekerasan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang menimpunya.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	29.63	33.33	33.33	33.33	60.00	Tidak Tercapai
Indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) tidak memenuhi target dikarenakan Dekela (desa/kelurahan layak anak) sampai dengan akhir periode rpjmd ditargetkan 15 kelurahan dari 27 kelurahan se Kota Pekalongan Data awal tahun 2021 Dekela sejumlah 7 kelurahan Tahun 2022 ditargetkan 8 kelurahan atau 53.33% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2023 ditargetkan 9 kelurahan atau 60% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2024 ditargetkan 11 kelurahan atau 73.33% (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2025 ditargetkan 13 kelurahan atau 86.67% (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2026 ditargetkan 15 kelurahan atau 100% (bertambah 2 kelurahan) sehingga pada tahun 2023 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel II-201 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	2.92	4.40	4.45	4.45	92.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah tidak memenuhi target dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinperpa Kota Pekalongan akan mengupayakan pengoptimalan penyediaan cadangan pangan daerah sesuai target tahunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun RPJMD untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam/bencana pertanian										
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	100.00	83.20	91.73	91.73	104.24	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel II-202 Capaian Indikator Urusan Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	persen	50	0	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tidak memenuhi target dikarenakan tidak ada tanah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan Objek Redistribusi Tanah (tidak ada kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2023)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel II-203 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	105.27	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	108.21	100.00	103.06	103.06	103.06	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100.00	0.00	80.00	20.00	120.00	120.00	120.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup jauh melebihi target dikarenakan adanya penambahan penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kota Pekalongan										
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	100.00	40.95	92.65	92.65	189.04	Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah jauh melebihi target dikarenakan IPAL dapat dimanfaatkan secara optimal.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.90	2.92	2.94	2.94	99.63	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau tidak memenuhi target dikarenakan wilayah kota yang luasannya terbatas mengakibatkan terbatasnya ketersediaan lahan untuk perluasan/penambahan RTH publik										
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	44.44	13.33	13.33	57.78	57.78	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 57,78 persen (26 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	20.17	16.67	40.67	40.67	40.67	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH tidak memenuhi target dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2022 s.d 2026 dengan target 600 usaha/kegiatan. Sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 40,67 persen (244 usaha/kegiatan)										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	Tercapai
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH jauh melebihi target dikarenakan penilaian yang rutin dilaksanakan setiap tahun yaitu: penilaian dalam program penghargaan yaitu Proper (Program Peringkatan Kinerja Perusahaan), Adiwiyata Kota. Sedangkan untuk Adiwiyata Provinsi dan Nasional tidak selalu mendapatkan penghargaan. Pada tahun 2023 ada sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Provinsi										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	33.28	0.28	0.31	0.31	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel II-204 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	89.33	100.00	100.46	100.46	100.46	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	77.78	77.78	Tidak Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	84.29	83.53	86.69	86.69	97.68	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk tidak memenuhi target dikarenakan (1) Kurangnya antusias masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak (KIA) karena kurangnya kebermanfaatan dari KIA; (2) Belum adanya anggaran khusus jemput bola KIA; (3) Indikator Program masih berjalan di tahun ke-3										
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	79.38	93.55	80.43	80.43	85.56	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil tidak memenuhi target dikarenakan Belum adanya akumulasi data agregat kependudukan dari Dirjen Dukcapil terkait dokumen kependudukan (akta kematian, perkawinan dan perceraian) lama sehingga sejak tahun 2022 dilakukan perhitungan manual yang mana menyebabkan adanya akumulasi pada jumlah keseluruhan (penyebut).										
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	8.00	9.00	9.00	9.00	64.29	Tidak Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan pencapaian target indikator program bertahap hingga akhir tahun RPJMD, masih ada target 5 OPD hingga akhir tahun RPJMD.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel II-205 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.82	100.00	101.77	101.77	101.77	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan	Persen	100.00	16.67	33.33	50.00	50.00	50.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan Kelurahan tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD										
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	74.07	59.26	81.48	81.48	115.79	Tercapai
Capaian indikator Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang* jauh melebihi target dikarenakan 1. Adanya Monev berkala dari DPMPPA 2. Kelurahan aktif menginput data pada aplikasi Epdeskel yang dijadikan acuan penilaian.										
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	96.79	96.35	97.64	97.64	100.75	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel II-206 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	99.68	100.00	70.28	70.28	70.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga tidak memenuhi target dikarenakan Kegiatan Pemutakhiran Pendataan Kelurga tahun 2023 (PPK23) merupakan kegiatan pemutakhiran data/updating data yang dilakukan setiap tahunnya. Kelurahan yang dilakukan PPK23 merupakan kelurahan yang sudah ditetapkan oleh BKKBN. Untuk PPK23 jumlah yag dilakukan pemutakhiran sebanyak 18 Kelurahan.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	9.38	7.80	14.44	14.44	49.86	Tidak Tercapai
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	13.08	15.00	14.95	14.95	80.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Unmeet need KB tidak memenuhi target dikarenakan merupakan data tahunan sehingga perhitungan baru bisa diperhitungkan pada akhir tahun										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel II-207 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.35	100.00	100.12	100.12	100.12	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Ilaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	5.54	92.00	164.69	164.69	164.69	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ jauh melebihi target dikarenakan Jumlah lampu PJU yang bermeterisasi tercapai lebih banyak dari target serta bertambahnya lokasi pembangunan lampu PJU baru.										
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.39	0.44	0.44	0.44	100.73	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-4.85	0.75	-9.90	-9.90	- 1,337.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan semenjak adanya pandemi Covid-19 jumlah kendaraan yang melaksanakan uji terus berkurang, dikarenakan adanya pembatasan aktivitas diluar ruangan, sehingga penyelenggaraan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
	kegiatan operasi laik jalan pun dibatasi. selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan.									

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel II-208 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	91.56	100.00	100.52	100.52	100.52	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.16.03. Program Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.02	3.00	3.00	3.00	90.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki 1 indikator yang bisa menjadi titik kelemahan yaitu indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang berada ditingkat kematangan level 2. Upaya yang dilakukan : (1) Meningkatkan indikator Layanan Jaringan Intra yang sebelumnya level 4 menjadi level 5 dengan melakukan upaya peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian Jaringan Intra yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan sebagai tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi; (2) Meningkatkan indikator Pembangunan Aplikasi SPBE dan indikator Layanan Pusat Data yang sebelumnya level 3 menjadi level 4; (3) Meningkatkan indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang sebelumnya level 2 menjadi level 3 dengan upaya menerapkan Sistem Penghubung Layanan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel II-209 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	31.21	30.94	29.70	29.70	89.38	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Beberapa koperasi memiliki permasalahan internal yang belum terselesaikan sehingga sulit untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci. sehingga sulit untuk memperhitungkan peningkatan kualitasnya.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	15.96	58.31	97.20	97.20	162.87	Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota jauh melebihi target dikarenakan Pelatihan yang dilaksanakan dalam pada Tahun 2023 diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya pengurus koperasi.										
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.71	12.06	11.38	11.38	91.98	Tidak Tercapai
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan perkembangan usaha mikro bersifat dinamis, sehingga kegiatan fasilitasi belum dapat menjangkau seluruh usaha mikro untuk menjadi wirausaha. Pelaksanaan kegiatan secara masif akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan fokus objek pada sosialisasi e katalog lokal dan fasilitasi sertifikasi produk (sertifikasi halal, merk dan HAKI).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel II-210 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	99.27	100.00	103.58	103.58	103.58	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota tidak memenuhi target dikarenakan Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 1 peraturan setiap tahun sejak 2021, sehingga akumulasi capaian sebanyak 3 peraturan sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Pada tahun 2021 : perwal 40/2021 ttg pelimpahan kewenangan, sk sop saktore/simpadu Pada tahun 2022 : perda 9/2022 ttg penyusunan penanaman modal, perwal 55/2022 ttg pendelegasian kewenangan Pada tahun 2023 : perda 5/2023 ttg perubahan perda penyelenggaraan ptsp										
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	3,847.00	2,500.00	4,878.00	4,878.00	195.12	Tercapai
Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal jauh melebihi target dikarenakan Realisasi melebihi target karena adanya kebijakan OSS RBA (Online Single Submission Risk Base Approach) dari Pemerintah Pusat. NIB (Nomor Izin Berusaha) menjadi syarat pengajuan bantuan modal berusaha, sehingga animo pengusaha dalam mengurus perijinan meningkat.										
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Investasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.514.00	6.42.00	101.52	6.68	229.10	229.10	565.49	Tercapai
Capaian indikator Nilai Investasi Baru pertahun jauh melebihi target dikarenakan Capaian melebihi target karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) sebesar 110 Milyar. Penentuan target oleh BKPM pada awal tahun 2023. Didukung dengan DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman modal.										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel II-211 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	83.97	93.69	95.24	95.24	100.00	Tercapai
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	13.33	34.29	55.00	55.00	128.32	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor jauh melebihi target dikarenakan Karena pemanfaatan sarpras olahraga di 1 (satu) lokasi/tempat dipergunakan beberapa jenis Cabor, contoh : - GOR Jetayu (Karate, Basket, Volly, Tennis, futsal, taekwondo) - Lapangan Tennis PDAM (tennis) - Stadion Hoegeng (sepak bola, atletik, bina raga)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel II-212 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel II-213 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	1.87	2.80	2.80	2.80	74.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan tidak memenuhi target dikarenakan target akhir RPJMD adalah 3.74, sampai dengan TW 4 tahun 2023 tercapai 2,80, masih berproses lagi sampai akhir periode RPJMD										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel II-214 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	87.50	92.20	91.67	91.67	94.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan masih ada 1 target pelestarian cagar budaya yang belum terealisasi, yaitu gedung pertanian.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	19.18	4.66	8.29	8.29	172.64	Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik jauh melebihi target dikarenakan Jumlah wisatawan dalam 1 tahun : 580,000 liburan sekolah dan kurikulum merdeka menjadi salah satu faktor naiknya jumlah pengunjung museum										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel II-215 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	24.97	16.09	27.96	27.96	168.62	Tercapai
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) jauh melebihi target dikarenakan adanya event pameran literasi selama 5 hari, dan event-event lain sehingga meningkatkan budaya membaca (banyak sekolah yangikutsertakan dalam event-event tersebut)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel II-216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	66.08	100.00	100.35	100.35	100.35	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	80.00	46.67	96.67	96.67	144.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik jauh melebihi target dikarenakan Pada saat penetapan target Renstra, nilai audit pengawasan kearsipan internal OPD rata-rata masih rendah (nilai 59,99 ke bawah) Setelah adanya expose dan arahan Walikota mengenai nilai audit pengawasan kearsipan, tingkat partisipasi OPD menjadi meningkat sehingga persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik keatas dari yang semula 10 OPD menjadi 29 OPD dari 30 OPD										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	80.23	45.00	75.00	75.00	142.86	Tercapai
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) jauh melebihi target dikarenakan Adanya perbedaan Perhitungan dari yang semula seluruh arsip statis dihitung sebagai tingkat ketersediaan arsip menjadi hanya arsip yang telah dibuatkan daftar sarana temu balik yang dihitung sebagai Tingkat ketersediaan arsip										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Belum tercapai karena tidak ada perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK tidak memenuhi target dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel II-217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.60	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.83	100.00	100.89	100.89	100.89	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	31.25	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	0.01	1.00	-0.04	-0.04	-0.74	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan: 1. Pada bulan September: Kondisi Cuaca, Iklim Tidak Mendukung, Kondisi Perairan terpengaruh Elnino; 2. Adanya Retribusi tambahan akibat penerapan Kebijakan PNBP PIT ; 3. Pembangunan Infrastruktur Parapet Di Dermaga, ; 4. Minimnya Fasilitas Docking Kapal.										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	0.00	1.00	-0.15	-0.15	-2.51	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI tidak memenuhi target dikarenakan Terjadi penurunan pendapatan daerah dikarenakan: 1. Pada bulan September: Kondisi Cuaca, Iklim Tidak Mendukung, Kondisi Perairan terpengaruh Elnino; 2. Adanya Retribusi tambahan akibat penerapan Kebijakan PNBP PIT ; 3. Pembangunan Infrastruktur Parapet Di Dermaga, ; 4. Minimnya Fasilitas Docking Kapal.										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	-17.99	1.00	1.12	-37.20	-604.88	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya tidak memenuhi target dikarenakan (a) Banjir rob mengakibatkan gagal panen; (b) Adanya pembanngunan tanggul, menyebabkan tambak diluar tanggul semakin tinggi genangan rob nya; (c) Tambak yang berada di dalam tanggul kesulitan mendapatkan air laut yang dibutuhkan budidaya air payau terutama pada musim kemarau atau Ketika air surut; (d) Semakin berkurangnya lahan tambak dari tahun 2021 seluas 173 Ha menjadi 93 Ha di Krapyak Degayu.										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	0.00	12.20	26.73	26.73	219.14	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan jauh melebihi target dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 156 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 344 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) tidak memenuhi target dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel II-218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	116.67	116.67	116.67	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	13.42	11.00	12.82	12.82	102.55	Tercapai
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	266.26	31.98	243.53	243.53	518.37	Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan jumlah wisatawan mancanegara meningkat salah satunya karena banyaknya jumlah wisatawan yang menghadiri kegiatan acara di kanzus sholawat habib lutfi dan khaul habib ahmad di Sapuro.										
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	39.90	30.30	71.33	71.33	119.85	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi jauh melebihi target dikarenakan capaian indikator ditahun 2022 melebihi target akhir RPJMD karena meningkatnya pelaku EKRAF yang mengikuti kegiatan diakhir masa pandemi covid - 19 sebagai upaya meningkatkan perekonomian para pelaku ekraf yang terdampak pandemi, sehingga walaupun pada tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak terlaksana dikarenakan anggaran di Drop (Refocussing) capaian programnya tetap melebihi target.										
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	40.70	40.00	296.73	296.73	296.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan EKRAF besar sehingga kuota peserta ditambahkan pada kegiatan festival balon udara dan Karnival Batik. dimana kegiatan ini sebagai bentuk pelatihan pelaku ekraf dalam pemasaran produk maupun pelatihan dalam kreasi balon udara untuk menarik minat wisatawan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel II-219 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	98.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	64.47	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	96.08	100.00	50.00	50.00	50.00	Tidak Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	50.82	55.67	59.29	59.29	106.18	Tercapai
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	644.18	191.91	259.61	259.61	127.48	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun jauh melebihi target dikarenakan banyaknya permintaan pasar di Kota Pekalongan atas produk peternakan, sehingga meningkatkan nilai produksi peternakan.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5	5	-68.81	5.00	98.40	98.40	1967.91	Tercapai
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular jauh melebihi target dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinperpa Kota Pekalongan, yaitu : pengobatan untuk hewan yg terkena penyakit dan vaksinasi untuk pencegahan penularan ke hewan yang belum terjangkit.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100	0	36.36	50.00	54.32	54.32	54.32	Tidak Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin tidak memenuhi target dikarenakan rendahnya kesadaran para pelaku usaha pertanian/peternakan untuk mengurus ijin usaha. selain telah dilakukan upaya persuasif dengan pendekatan secara langsung kepada para pelaku usaha pertanian/peternakan oleh Dinperpa Kota Pekalongan, pada tahun 2023 telah di sahkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. adanya kekuatan hukum mengikat dengan di sahkan nya Perda tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus ijin.										
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5	5	8.70	5.00	8.70	8.70	173.91	Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun jauh melebihi target dikarenakan adanya kegiatan bimbingan penyuluhan yang intensif kepada kelompok tani mengenai administrasi, kelembagaan maupun keaktifan kelompok tani, struktur organisasi, dan intensitas pertemuan antar anggota kelompok tani.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel II-220 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	106.14	100.00	101.66	101.66	101.66	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	135.19	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	persen	77.70	73.93	0.00	75.42	81.07	81.07	104.33	Tercapai
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	73.33	81.25	68.75	68.75	68.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya tidak memenuhi target dikarenakan Di Tahun 2023 telah dilaksanakan proses perencanaan pasar kecamatan untuk proses pembangunan fisik pasar kecamatan direncanakan akan dimulai di Tahun 2024. Di Tahun 2023, pembangunan pasar diprioritaskan untuk pembangunan Pasar Banjarsari.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	101.06	88.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-75.90	7.60	-0.04	-0.04	-0.43	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor tidak memenuhi target dikarenakan Adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor ditambah perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	111.16	77.99	59.02	59.02	70.27	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan Tingkat kesadaran wajib tera dan tera ulang yang masih rendah serta belum terdapat sanksi yang diberlakukan dengan tegas bagi wajib tera atau tera ulang yang tidak melaksanakan tera / terang alat UTTP. Dindagkop UKM telah melaksanakan kegiatan jemput bola ke kelurahan dan pasar serta sosialisasi mengenai kewajiban tera untuk meningkatkan jumlah UTTP yang diter / tera ulangkan Di Tahun 2024, tarif retribusi untuk tera dan tera ulang tidak dipungut biaya. Akan dilaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan secara masal di seluruh pasar dan kelurahan Se -Kota Pekalongan										
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	1.18	4.26	0.96	0.96	12.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) tidak memenuhi target dikarenakan Masih kurangnya fasilitasi yang diberikan kepada UMKM terutama dalam pelaksanaan pameran luar daerah dan waktu pelaksanaan pameran/event sepenuhnya menjadi wewenang penyelenggara. Selain itu, fasilitasi pemasaran yang diberikan kepada UMKM dalam Showroom Dekranasda tergantung pada minat UMKM untuk melakukan pemasaran di Showroom Dekranasda. Di tahun 2024, perlu dilakukan penambahan kuota UMKM yang diikutsertakan dalam event/pameran luar daerah.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel II-221 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.97	100.00	100.30	100.30	100.30	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	216.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan	persen	21.04	20.59	66.60	20.43	75.34	75.34	358.08	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
	industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)									
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan adanya perubahan perhitungan capaian.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	100.00	24.00	9.04	9.04	34.77	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran, SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan menyeluruh jika dibandingkan dengan jumlah usaha baru yang mengajukan ijin secara online melalui OSS RBA.										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	95.00	95.00	95.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) tidak memenuhi target dikarenakan untuk informasi energi/bahan bakar sebagian besar belum bisa didapatkan karena sebagian besar merupakan industri kecil/home industri yang pemakaian energinya bercampur dengan rumah tangga.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel II-222 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	99.71	99.71	99.71	Tidak Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	103.65	103.65	103.65	Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Tidak Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	0.00	100.00	90.00	90.00	90.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif tidak memenuhi target dikarenakan cukup panjangnya proses pembahasan Raperda Pansus I, II dan III di triwulan I tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar, Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Raperda Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial & Lingkungan Badan Usaha sehingga berakibat pembentukan pansus berikutnya mengalami hambatan.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	0.00	6.00	3.62	3.62	100.00	Tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	0.00	100.00	97.50	97.50	97.50	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi target dikarenakan target pengadaan barang/jasa (tender/seleksi) yang difasilitasi oleh bagian PBJ dan Minbang yang ditentukan pada awal Tahun Anggaran 2023 sejumlah 40 paket pekerjaan, sedangkan pada realisasi tender/seleksi yang telah terlaksana ada sejumlah 39 paket pekerjaan sehingga belum sesuai target. Dalam pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak jadi dilaksanakan atau dialihkan untuk paket pekerjaan lainnya. Dan beberapa paket pekerjaan konstruksi berubah metode pemilihan yang digunakan, semula tender menjadi e-purchasing										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Sekretariat DPRD

Tabel II-223 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	77.46	100.00	102.02	102.02	102.02	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	102.10	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	75,00	75,00	75,00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan tidak memenuhi target dikarenakan cukup panjangnya proses pembahasan Raperda Pansus I,II dan III di triwulan I tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar, Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Raperda Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial & Lingkungan Badan Usaha sehingga berakibat pembentukan pansus berikutnya mengalami hambatan.										
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel II-224 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.73	100.00	100.08	100.08	100.08	Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Keuangan

Tabel II-225 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.76	100.00	100.46	100.46	100.46	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	93.76	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	8.08	5.79	5.79	125.39	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) jauh melebihi target dikarenakan Capaian lebih dari 110% karena adanya efisiensi belanja dan pelampauan pendapatan.										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	102.99	5.00	4.80	4.80	104.17	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Kepegawaian

Tabel II-226 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.03. KEPEGAWAIAN										
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	111.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen		100.00	95.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	49.00	50.00	66.67	66.67	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang karier jauh melebihi target dikarenakan Bantuan pendidikan untuk pejabat administrator dan pengawas yang dilantik sebagai pejabat fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional.										
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	68.06	100.00	98.90	98.90	98.90	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Pelaporan Kinerja ASN tidak memenuhi target dikarenakan Terdapat ASN yang tidak menyusun penilaian SKP secara tepat waktu dikarenakan sakit										
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	98.96	90.00	97.41	97.41	108.23	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	97.33	80.00	64.35	64.35	80.44	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN tidak memenuhi target dikarenakan Jumlah formasi ASN terisi : TW. I : 3.217 TW. II : 3.178 TW. III : 3.233 TW. IV : 3.177 jumlah seluruh formasi yang tersedia : TW. I : 4.937 TW. II : 4.937 TW. III : 4.937 TW. IV : 4.937. Hal tersebut dikarenakan adanya dinamika kebijakan kepegawaian di tingkat pusat kemudian berdampak pada daerah, terkait perubahan kebijakan penerimaan CASN										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel II-227 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	113.25	100.00	149.29	149.29	149.29	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya jauh melebihi target dikarenakan Pendidikan dan pelatihan selain dilakukan secara klasikal juga dilakukan secara daring atau juga dengan metode blended learning, sehingga jumlah PNS yang mengikuti diklat pun meningkat.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel II-228 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	76.60	73.00	n/a	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) tidak memenuhi target dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) sampai dengan triwulan IV data belum tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyeselarasan pengukuran IDSD.										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel II-229 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	93.34	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	99.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	57.14	85.00	52.94	52.94	62.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan tidak memenuhi target dikarenakan opd ada yang belum menyelesaikan dokumen TL 700.1.2.1/071/RHS/LHA.KINERJA.DINPERPA/2023 01-10-2023 Dinas Pertanian dan Pangan Keterangan : jumlah rekomendasi 4, sudah TL 700.1.2.1/084.1/RHS/LHA.LABKESDA/2023 23-10-2023 Dinas Kesehatan (Probity Audit Pembangunan Labkesda) Keterangan : jumlah rekomendasi 1 , sudah TL 700.1.2.1/095/RHS/LHA.OPERASIONAL/2023 22-11-2023 SatpolP3KP Keterangan : jumlah rekomendasi 6, belum TL semua (setor kembali) 700.1.2.1/085/RHS/LHA.DPMPPA/2023 27-10-2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUMPUNAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Keterangan : jumlah rekomendasi 4, sudah TL 700.1.2.1/084/RHS/LHP-PDDT.DINPERKIM/2023 23-10-2023 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Keterangan : jumlah rekomendasi 2, belum TL semua dalam proses (setor kembali)										
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.00	3.00	3.09	3.09	103.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel II-230 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.20	100.00	100.24	100.24	100.24	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	97.20	100.00	96.67	96.67	96.67	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	66.96	100.00	97.84	97.84	97.84	Belum Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	102.08	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	91.58	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.30	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel II-231 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD 2023	Realisasi s.d. TW IV 2023			
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	101.68	100.00	100.33	100.33	100.33	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.74	100.74	100.74	Tercapai
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	Tercapai
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	95.65	100.00	90.48	90.48	90.48	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan tidak memenuhi target dikarenakan jumlah ormas yang direncanakan mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pada triwulan IV sebanyak 6 ormas, namun hanya 4 Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, 2 ormas tidak memproses pencairan hibah sehingga tidak mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.										
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
1	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	44.00	44.00	44.00	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial tidak memenuhi target dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.5.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
 - miskin atau tidak mampu;
 - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
 - kondisi bencana; dan/atau
 - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimut dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
 - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negara secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
 - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2023 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.5.4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan raport Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2023 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,67% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 94,22%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 97,00%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 100%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel II-232 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	1. Mengintensifkan penguatan kelembagaan di satuan Pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota Lain dan Kantor Kemenag sehingga mempermudah penyelesaian jika ditemukan kendala data maupun kendala sistem.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Menggunakan basis data penduduk miskin dari kemensos sebagai dasar penentuan siswa penerima bantuan agar lebih akuntabel
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil agar mendapatkan solusitas permasalahan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	Pelaksanaan	
	Tidak ada	-
5,	Lain-lain	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.5.4.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidng pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pada tahun 2022 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 93,14% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,68%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,50%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 96,66%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 89,45%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 53,31%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-233 berikut.

**Tabel II-233 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Laporan SPM dari Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan melebihi dari batas akhir waktu penginputan triwulan pada aplikasi SPM Bangsa Kemendagri	1. Mengupayakan dan memberi pengarahan kepada petugas puskesmas agar pelaporan dikirim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan 2. Menkoordinasikan pelaporan agar tepat waktu 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Laporan SPM dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	
	Perhitungan sasaran menggunakan estimasi/proyeksi dari jumlah penduduk sedangkan untuk capaian seharusnya menggunakan data rill yang ada di lapangan	Pada laporan akhir (TW IV) agar dapat menggunakan data rill.

No.	Permasalahan	Solusi
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Kurangnya anggaran yang diberikan terutama pada hipertensi dan diabetes militus	Akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam hal perencanaan penganggaran
4.	Pelaksanaan	
	Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya lansia untuk datang ke posyandu lansia yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal	1. Mengoptimalkan petugas promkes dan kader kesehatan yang ada disekitar untuk dapat mengedukasi kepada masyarakat khususnya Lansia 2. Memperluas layanan jemput bola di Dinas Kesehatan yang semula berupa layanan menjemput para pengguna layanan karena kondisi rob diperluas ke masyarakat khususnya lansia.
5.	Lain-lain	
	Adanya perbedaan persepsi antara kemenkes dan kemendagri dalam pelaporan sasaran dan capaian akhir	Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Kemendagri dan Kemenkes dalam menyusun kebijakan/regulasi terkait SPM bidang kesehatan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.5.4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka agen pelayanan dasar bidng pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2023 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-234 berikut.

Tabel II-234 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Dipertimbangkan kembali terhadap pencatuman data pribadi
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR

No.	Permasalahan	Solusi
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T, SPALD-S dan IPLT	Koordinasi dengan provinsi terkait rencana pembangunan insfrastruktur secara regional
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.5.4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-235 berikut.

**Tabel II-235 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah dll.	Melakukan verifikasi ulang dengan tenaga fasilitator lapangan dan tenaga kegiatan.
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Belum bisa memprediksi kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana, karena sifatnya insidentil.	Melakukan mitigasi daerah rawanbencana se-kota Pekalongan.
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran kebencanaan selalu ada meskipun peningkatan dan penurunan kebencanaan tidak bisa diprediksi.	Melakukan pengusulan anggaran di n1 dan berkoordinasi dengan TAPD.
4.	PELAKSANAAN	

No.	Permasalahan	Solusi
	Proses pemindahan / relokasi daerah sepadan sungai sudah selesai dan diberikan kerohiman.	Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
	Proses realisasi kegiatan relokasi membutuhkan waktu dan proses dalam pemindahan dan pembangunan secara bertahap.	Pembangunan rumah relokasi membutuhkan koordinasi antar bidang, dinas dan stakeholder terkait karena penerima bantuan tidak mampu secara ekonomi.
5.	LAIN – LAIN	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.5.4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100,00%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-236 berikut.

Tabel II-236 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	

No.	Permasalahan	Solusi
	Tidak ada permasalahan	-
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	PELAKSANAAN	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses kelayakan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
5.	LAIN - LAIN	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.5.4.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100,00%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-237 berikut.

**Tabel II-237 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM
Bidang Sosial Tahun 2023**

No.	Permasalahan	Solusi
1.	PENGUMPULAN DATA	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	PELAKSANAAN	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja

No.	Permasalahan	Solusi
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
5.	LAIN - LAIN	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

2.5.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2023

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2.5.4.1 Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 target dan 40 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-238 berikut.

Tabel II-238 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1. Mengurangi Kemiskinan							
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP\$1,9 per hari)	BPS	%	1,13	PM	PM	PM
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
	(a) <i>Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan</i>	BPS	%	59,93	PM	PM	PM
	(b) <i>Indikator Morbiditas: Angka kesakitan</i>	Dinkes	%	NA	PM	PM	PM
	(c) <i>Lama sekolah: Persentase ART usia 25 - 60 tahun yang tidak tamat SMP</i>	BPS	%	9,29	9,59	9,75	9,92
	(d) <i>Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah</i>	BPS	%	0,01	PM	PM	PM
	(e) <i>Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik</i>	BPS	%	0,0072	PM	PM	PM
	(f) <i>Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih</i>	DPU PR	%	0	PM	PM	PM
	(g) <i>8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)</i>	DPU PR	%	90,69	PM	PM	PM
	(h) <i>Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah</i>	BPS	%	0,33	PM	PM	PM
	(i) <i>Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji</i>	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
	(j) <i>11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif</i>	BPS	%	2,9	PM	PM	PM
	(k) <i>Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran</i>	Dindukcapil	%	0,01	PM	PM	PM
	(l) <i>13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet</i>	BPS		NA	PM	PM	PM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial : a. PKH b. PBI c. Sembako	Dinsos P2KB, BPJS Kesehatan; Dinkes	Jiwa	a. 10.932 KK b. 120.203 c. 23.839 KK (BPNT)	55,12	53,73	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan; Dinkes	%	34,52	PM	PM	PM
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS	%	0,62			
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	BPS	%				
	(a) Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum layak			98,88	PM	PM	PM
	(b) Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi layak			86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)			-			
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS	%				
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri			67,23			
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak			3,39			
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kab/kota	BPBD	Dokumen	21	1	1	1
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan							
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil							
2.2.1*	Prevalensi stunting	DINKES	%	7,43	<12 %	<12 %	<12 %
2.2.2*	Prevalensi wasting	DINKES	%	7,46	PM	PM	PM
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca							
2.4.1(a)	a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DINPERPA	Hektar	521	PM	PM	PM
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DINPERPA	Indeks	NA	NA	NA	NA
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Jumlah kasus kematian ibu	DINKES	Kasus	6	5	4	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih: (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	100	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Kasus baru per 100.000 penduduk	0,0031	PM	PM	PM
3.3.3*	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	DINKES	Orang	2	PM	PM	PM
3.3.4*	Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu	DINKES	Orang	58	45	45	45
3.3.5*	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta	DINKES	Orang	a. 0 kasus b. 69 orang	a. 0 b. 54	a. 0 b. 55	a. 0 b. 56
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.1 (a)	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75			
3.4.1.(b)	Jumlah kasus hipertensi	DINKES	Kasus	50187	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Jumlah kasus obesitas	DINKES	Kasus	2633	PM	PM	PM
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	4,31	PM	PM	PM
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS/BPS	%	98,10			
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75 persen	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							
3.c.1*	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas): a. Dokterb. Dokter gigic. Tenaga kefarmasiand. Perawat. Bidanf. Nutrisiisg. Sanitarianh. Promosi Kesehatani. Ahli Teknik Laboratorium MedikKepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.a. Apotekerb. Bidanc. Dokter Gigid. Dokter Spesialise. Dokter Umumf. Perawatg. Tenaga Gizih. Tenaga Kesehatan Lingkungani. Tenaga Kesehatan Masyarakatj. Tenaga Keteknisian Medisk. Tenaga Keterampilan Fisikl. Tenaga Psikolog Klinikm. Tenaga Teknik Biomedika	DINKES	Orang	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas) :a. 379b. 44c. 354d. 876e. 391f. 36g. 26h. 24i. 133Kepadatan dan distribusi tenaga kesh:a. 0,44b. 1,23c. 0,14d. 0,42e. 0,77f. 2,76g.	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				0,11h. 0,08i. 0,14j. 0,36k. 0,14l. 0,01m. 0,58			
Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas							
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif							
4.1.1 (a)	Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi	DINDIK	%	79,06	PM	PM	PM
4.1.2*	Angka melanjutkan SD/ sederajat Angka melanjutkan SMP/ sederajat	DINDIK; KEMENAG	Angka	100			
4.1.2 (a)	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th	DINDIK; BAPPEDA	Orang	909			
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2*	Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	DINDIK	%	93,56	99	99	99
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal.	DINDIK; DINPERIN AKER; KEMENAG ; BPS	%	100	1621	1625	1625
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.4.1 (a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir.	BPS	%	14,01	PM	PM	PM
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan,	BPS	%				
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf	BPS	%	97,74	PM	PM	PM
Tujuan 5. Kesetaraan Gender							
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	SETWAN	%	14,29	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil) b) Proporsi perempuan yang menempati jabatan eselon II	BKPSDM	%	7,41	PM	PM	PM
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta							
5.6.2*	Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DPMPPA	Dokumen	2	PM	PM	PM
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							
5.b.1*	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	BPS	%	67,22			

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.5.4.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-239 berikut.

Tabel II-239 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau							
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	BPS	%	100	PM	PM	PM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	98,18			
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	4,22	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	43,29 juta rupiah	PM	PM	PM
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	NA	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata							
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan KabKota	DPU-PR	km	83,77	84,39	85,48	86,57
9.1.2*	Jumlah penumpang berdasarkan moda transportasi: kendaraan penumpang	DISHUB	Orang	1.941.952	PM	PM	PM
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,3	PM	PM	PM
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	PM	PM	PM
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	NA	NA	NA
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETENAGA KERJAAN; BPS/DINPE RINAKER	%	0,62			
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,0075	0,0072	0,0071	0,0072
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,00084	0,00077	0,00101	PM
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	%	23,51	24,23	26,30	26,65
Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi							
17.8.1*	Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	BPS	%	99,09 persen	PM	PM	PM
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama							
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAG. PJB & MINBANG	Dokumen	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.5.4.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 13 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-240 berikut.

Tabel II-240 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak.	BPS	%	98,88	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS	%	95,41	PM	PM	PM
	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		%	95,41	PM	PM	PM
	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		%	86,82			
	(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar		%	2 persen			
	(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		%	-			
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat							
6.3.1	Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	m3/Tahun	27,06	28,63 %	30,06 %	35,76%
Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB	BPBD; BPS	%	1,164334078			
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola	DLH	%	1,207740879	0,29	0,3	0,31
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	82,44	82,84	82,94	83,04
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.1.(a)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	DLH	%	2,94	2,92	2,93	2,94
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab							
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen							
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sips.n.menlhk.go.id/	%	58%	PM	PM	PM
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah							
12.4.2*	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan	DLH		57,78%	71,11 %	84,44 %	100,00%
	(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	DLH	ton	57,78%	71,11 %	84,44 %	100,00%
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah sampah yang dikelola	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sips.n.menlhk.go.id/	Ton	95,20176248			
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	29	33	36	40
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	langsung bencana per 100.000 orang						

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.5.4.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-241 berikut.

Tabel II-241 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES; BAKESBANGPOL	Kasus	0	0	0	0
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES; BAKESBANGPOL	%	NA	PM	PM	PM
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM SETDA	%	12	12	12	PM
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya							
16.5.1.(a)	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	INSPEKTORAT	Nilai	80,79	PM	PM	PM
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1.(a)	Nilai Opini BPK	BPKAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP $\geq$ B	BAG.ORGANISASI SETDA	%	72,83	75,07	75,57	76,07
16.6.1.(c)	Nilai RB Kabupaten/Kota	BAG.ORGANISASI SETDA	Nilai	77,12	73,69	74,69	75,69
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA	Instansi	90,69	83,79	83,94	84,09
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan							
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan	SETWAN	%	14,29	30	30	30

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)						
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	BKPSDM	%	8%	PM	PM	PM
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINDUKCAPIL	%	99,82	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	99,44	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	99,04	93,3	93,4	93,5
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.10.2.(a)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	KIP; DISKOMINFO	Nilai	96,62	97,00	97,20	97,50
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Prospek perekonomian Kota Pekalongan diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 pada kisaran 5,4 s/d 5,8 persen. Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

- 1) Pada tahun 2023, perkembangan kondisi fiskal Indonesia tetap terjaga sejalan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif, serta belanja negara dan tingkat utang yang terkendali. Pendapatan negara dan hibah tumbuh 3,1 persen (YoY) menjadi sebesar Rp2.035,6 triliun atau mencapai 82,6 persen dari pagu APBN 2023. Kinerja tersebut didorong oleh pendapatan dalam negeri, penerimaan perpajakan, dan PNPB yang tetap tumbuh. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.967,9 triliun atau tumbuh 2,8 persen (YoY). Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 64,3 persen dari APBN, sementara TKD mencapai 70,0 persen. Realisasi TKD pada triwulan III tahun 2023 meningkat 3,3 persen (YoY) yang didorong oleh tumbuhnya realisasi DAU, DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Keistimewaan DIY. Berdasarkan capaian tersebut, anggaran hingga September 2023 berada pada kondisi surplus sebesar Rp67,7 triliun atau sekitar 0,3 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan tersebut, posisi utang pemerintah mencapai Rp7.891,6 triliun atau sebesar 38,0 persen terhadap PDB.
- 2) Sepanjang triwulan III tahun 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan sebesar 5,75 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.
- 3) Likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
- 4) Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan namun masih berada di atas rentang target inflasi nasional 2023.
- 5) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 3,32 juta orang sepanjang triwulan III tahun 2023, tumbuh sebesar 77 persen dibandingkan periode sebelumnya (YoY).
- 6) Tren perdagangan produk ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir berhasil menunjukkan kinerja positif dengan surplus ekspor yang konsisten berada di kisaran 60 persen. Namun, dari segi penggunaan kekayaan intelektual sebagai kunci nilai tambah ekonomi kreatif masih terdapat defisit yang sangat tinggi. Pada triwulan III 2023 biaya penggunaan kekayaan intelektual mengalami defisit sebesar USD603 juta. Hal ini disebabkan pendapatan penggunaan kekayaan intelektual dari ekspor mengalami penurunan sebesar USD52 juta (QtQ). Peningkatan komersialisasi kekayaan intelektual di dalam negeri dan pengembangan kekayaan intelektual berstandar global perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit tersebut dengan diperkuat melalui perbaikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

- a. Berakhirnya status pandemi COVID-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Disamping itu potensi munculnya varian baru membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun-tahun sekarang dan ke depan.
- b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
- c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
- d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa. Perubahan iklim yang terjadi secara masif di berbagai panjuru dunia menyebabkan kekeringan, panas bumi naik, dan gelombang panas. Menyebabkan turunnya produksi beras yang menjadi bahan pokok di dalam negeri dan mempengaruhi ketahanan pangan.
- e. Pemindahan ibu kota negara akan berdampak pada banyak aspek, termasuk dana transfer dan biaya perjalanan dinas koordinasi negara. Pemindahan ibu kota negara akan memerlukan alokasi anggaran yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur baru, seperti pembangunan gedung-gedung pemerintahan, jalan, jembatan, serta penyediaan fasilitas publik lainnya. Anggaran untuk proyek-proyek ini kemungkinan besar akan berasal dari anggaran pemerintah pusat dan dapat mengganggu alokasi dana untuk program-program penting lainnya, termasuk dana transfer ke daerah-daerah yang membutuhkan. Pemindahan ibu kota juga akan berdampak pada biaya perjalanan dinas koordinasi ke pemerintah pusat.
- f. Kenaikan tarif tol memiliki dampak yang kompleks pada anggaran belanja daerah. Kenaikan tarif tol akan memicu kendaraan melewati jalur dalam kota, sehingga akan berdampak timbulnya kemacetan dan meningkatnya biaya pemeliharaan infrastruktur.
- g. Hilirisasi temuan inovasi dihadapkan pada tantangan dalam pengembangan proses bisnis industri di Kota Pekalongan, penciptaan produk – produk khas Kota Pekalongan dengan nilai tambah yang tinggi dan menerapkan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan.
- h. Penerapan kebijakan nasional terkait manajemen birokrasi antara lain berupa penyelesaian tenaga non ASN yang harus diikuti dengan peningkatan kompetensi sebagai akibat pola rekrutmen non ASN sebelumnya yang sangat lemah dalam memperhatikan aspek kompetensi. Kondisi ini berdampak pada peningkatan beban anggaran belanja peningkatan SDM yang sebelumnya belum menempati prioritas dibanding permasalahan riil di Kota Pekalongan seperti banjir rob ataupun penataan kota lainnya.
- i. Pembangunan KITB diyakini akan memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian Kota Pekalongan. Peningkatan sarana pendukung yang dimungkinkan akan dipenuhi

secara mandiri di KITB, akan berdampak pada menurunnya kunjungan ke Kota Pekalongan sehingga akan menurunkan pula perputaran uang di Kota Pekalongan atau dengan kata lain PDRB Kota Pekalongan akan menurun pada sektor yang selama ini dipengaruhi oleh perdagangan dan jasa serta akomodasi perhotelan dan restoran.

- j. Perubahan kepemimpinan dapat memiliki dampak pada kebijakan keuangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kapasitas/kemampuan keuangan daerah.

Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Hasil analisa terhadap tantangan dan prospek perekonomian maka diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui pemberdayaan dan peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pelayanan BLUD, Perangkat Daerah penghasil dan pengelolaan aset Pemerintah Kota Pekalongan.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, selanjutnya akan dibahas gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berisi penjelasan tentang kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada perodesasi RPJMD mendatang. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. GAMBARAN RINGKAS KONDISI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN TERAKHIR

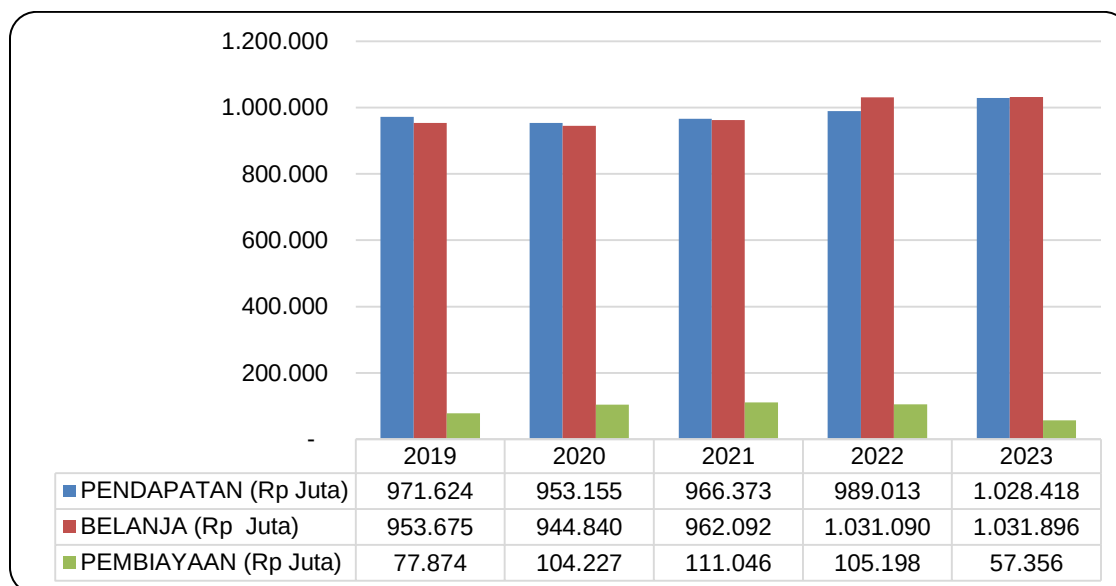
Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kota Pekalongan, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan Kota Pekalongan tahun 2019-2023. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Pekalongan dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Pekalongan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, seperti disajikan dalam gambar III.1 berikut.



Gambar III.1 Perkembangan Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah)

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan pendapatan daerah Kota Pekalongan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan rata-rata sebesar 1,45 persen, dimana pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp.971.624.464.121,- menjadi Rp.1.028.417.644.274,- pada tahun 2023. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) sebesar 5,54 persen dan Pendapatan Transfer meningkat rata-rata sebesar 1,05 persen. Walaupun secara rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan, tetapi apabila dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah untuk tahun 2023 mengalami penurunan, yang berkontribusi terhadap

penurunan Pendapatan Asli Daerah antara lain Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tempat Pelelangan, Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah dan Pendapatan BLUD.

Berikut penyebab penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023:

- 1) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga: berkurangnya euforia masyarakat terhadap obyek wisata baru di Pantai Kencana, kondisi obyek yang panas dikarenakan pohon peneduh masih dalam masa pertumbuhan; rusaknya sebagian besar pohon mangrove karena *force majeure* sehingga mengurangi daya tarik pengunjung; minat masyarakat yang sangat minim; kurangnya wahana/atraksi yang menarik minat wisatawan; terdampak proyek pelabuhan *on shore* serta proyek pengendalian banjir dan rob; jalan menuju obyek yang rusak karena untuk lalu lintas kendaraan proyek; dan beberapa *event* yang rutin digelar, tidak digelar di tahun ini.
- 2) Retribusi pelayanan pasar: dari 2027 lapak di pasar, terdapat 285 lapak yang kosong, sehingga sekitar Rp.300.000.000 tidak bisa dipungut, jumlah piutang retribusi pelayanan pasar adalah sebesar Rp.3.302.005.811 dari jumlah tersebut ditargetkan 10% akan membayar, tetapi ternyata hanya Rp.91.361.800 yang melakukan pembayaran.
- 3) Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan: belum dilakukan kajian dan pendataan terhadap Wajib Retribusi yang potensial sebagai target pendapatan setiap tahun; masih rendahnya kesadaran Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi; dan terdapat beberapa Wajib Retribusi besar yang menutup usahanya.
- 4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum: pada bulan Januari-Desember cuaca yang sering turun hujan menjadi faktor berkurangnya kendaraan yang parkir; di pertengahan tahun 2023 sudah berupaya untuk menaikkan retribusi yang disetorkan oleh juru parkir kepada Pemerintah Kota sebesar 50%, tapi pada kenyataannya hanya beberapa juru parkir yang setuju, sebagian juru parkir menolak beralasan sepi; pada titik alun-alun, dikarenakan adanya revitalisasi alun-alun dan juga ada yang non aktif/tutup; pada saat pandemi tahun 2020-2021, ada beberapa juru parkir yang minta keringanan/penurunan setoran retribusi, dan di tahun 2023 masih berupaya mengembalikan setoran seperti semula; serta berkurangnya ruang parkir yang digunakan untuk pedagang kaki lima.
- 5) Retribusi pelayanan TPI: nelayan masih beradaptasi terhadap regulasi penangkapan ikan terbatas pasca produksi; dan pada bulan Oktober s.d Desember 2023 harga ikan mengalami penurunan yang sangat ekstrim.
- 6) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): adaptasi masyarakat dalam pengajuan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dengan kelengkapan dokumen yang lebih rumit, membutuhkan waktu lebih lama untuk melengkapinya daripada IMB; adanya persyaratan gambar sketsa design gedung mengakibatkan pemohon membutuhkan konsultan untuk sketsa bangunan dan membutuhkan biaya tambahan; dan banyak pemohon yang belum siap dengan ekosistem digital sehingga terkendala dalam melengkapi ataupun melakukan pembayarannya; serta tarif PBG lebih rendah dari IMB.
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH): kenaikan harga sapi; tidak ada regenerasi atas meninggalnya jagal yang setiap hari melakukan pemotongan; adanya peredaran daging beku; daya beli daging masyarakat menurun; dan adanya bantuan langsung dari pemerintah berupa daging.
- 8) BLUD RSUD Benda: pada tahun 2023 jumlah piutang yang terbayarkan untuk piutang Kemenkes dan piutang BPJS Kesehatan atas pasien *COVID-19* tidak sebanyak tahun 2022.

Gambaran tentang Pendapatan Daerah yang disajikan selama lima tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana disajikan dalam Tabel III-1.

Tabel III-1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

URAIAN	REALISASI (Rp Jutaan)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2019	2020	2021	2022	2023	
PENDAPATAN	971.624,46	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.417,64	1,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	212.777,44	229.867,94	252.037,00	263.475,95	263.342,60	5,54
Pendapatan Pajak Daerah	87.578,47	76.255,22	87.382,43	101.303,22	115.423,92	7,88
Hasil Retribusi Daerah	16.667,66	14.870,12	14.748,21	19.088,52	16.704,86	1,33
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.101,17	5.821,08	5.805,51	6.434,31	7.117,20	4,15
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	102.430,13	132.921,51	144.100,85	136.649,89	124.096,61	5,96
PENDAPATAN TRANSFER	734.897,35	700.838,01	686.765,22	725.537,13	763.287,05	1,05
Transfer Pemerintah Pusat	643.593,76	625.666,10	607.835,27	618.566,27	667.941,86	1,03
Bagi Hasil Pajak	17.751,48	27.182,87	32.286,14	30.825,73	31.492,86	17,39
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.275,75	1.780,90	2.091,31	3.054,97	1.950,24	16,74
Dana Alokasi Umum	475.842,09	433.354,91	426.399,74	424.427,25	451.200,06	-1,17
Dana Alokasi Khusus	115.463,50	104.991,52	125.528,55	155.562,05	162.020,13	9,64
Dana Insentif Daerah	-	-	21.529,53	4.696,26	21.278,58	
Dana Penyesuaian	33.260,94	58.355,91	-	-	-	
Transfer Pemerintah Daerah	91.303,59	75.171,91	78.929,95	106.970,86	95.345,18	3,00
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	72.167,44	63.377,91	76.876,98	72.380,35	72.883,76	0,99
Bantuan Keuangan Provinsi	19.136,15	11.794,00	1.952,97	34.590,51	22.461,42	378,58
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	100,00	-	-	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	23.949,68	22.449,45	27.570,33	-	1.788,00	-27,82
Pendapatan Hibah	23.949,68	22.449,45	2.718,27	-	1.788,00	-64,72
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	24.852,06	-	-	

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.1.1.2. Belanja Daerah

Tren pertumbuhan realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun dari tahun 2019 – 2023 tumbuh 2,04%. Dalam kurun waktu tersebut belanja operasi tumbuh 2,73% dan belanja modal tumbuh 1,36%. Beberapa hal yang dapat dilihat dari dinamika belanja selama 5 (lima) tahun kurang lebih dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja pegawai mempunyai kecenderungan turun 0,65%. Penurunan paling tinggi dari tahun 2021 ke tahun 2022 disebabkan karena reklasifikasi belanja pegawai ke belanja barang dan jasa pada BLUD sebagai tindak lanjut rekomendasi BPK. Kenaikan terjadi kembali di tahun 2023 sebagai akibat pengadaan pegawai.
2. Belanja barang dan jasa mempunyai rata-rata pertumbuhan 6,42%, belanja barang jasa meliputi belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

3. Belanja hibah dan bantuan sosial masing-masing mempunyai rata-rata pertumbuhan 11,76% dan 35,92%. Angka ini masih sedikit berbeda dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan agar daerah mengutamakan belanja wajib terlebih dahulu sebelum mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial.
4. Belanja modal tanah pada umumnya berada pada kisaran 3-4 Milyar. Kenaikan pada tahun 2020 dan 2021 secara signifikan sangat dipengaruhi oleh kebijakan belanja lahan untuk keperluan pendukung program pengendalian banjir rob sistem Loji Banger.
5. Belanja modal lainnya menunjukkan gejala yang fluktuatif sebagai akibat karena dinamika kebutuhan di lapangan.
6. Belanja tak terduga mengalami kenaikan signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak Covid-19 dimana pemerintah pusat dan daerah didorong untuk mengalokasikan anggarannya dalam penanganan Covid-19 tersebut.

Realisasi belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel III-2.

**Tabel III-2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2019	2020	2021	2022	2023	
BELANJA	954.397,01	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.847,57	2,04
BELANJA OPERASI	771.512,59	760.543,10	792.174,65	830.611,30	858.205,17	2,73
Belanja Pegawai	390.898,34	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14	-0,65
Belanja Barang dan Jasa	338.655,16	327.664,41	367.573,74	413.865,97	431.075,38	6,42
Belanja Bunga	6,80	-	-	-	-	
Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
Belanja Hibah	29.310,40	36.250,15	32.149,23	37.814,80	44.257,04	11,76
Belanja Bantuan Sosial	11.920,38	2.206,98	756,57	3.155,97	2.327,61	35,92
Belanja Bantuan Keuangan	721,51	-	-	-	-	
BELANJA MODAL	182.153,98	126.926,09	160.513,73	196.569,44	170.653,38	1,36
Belanja Modal Tanah	3.912,17	13.144,23	11.302,75	4.442,47	3.036,18	32,41
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.522,06	29.046,00	37.536,79	55.027,76	38.881,46	7,06
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.163,07	33.911,23	48.754,92	35.349,62	54.122,62	4,43
Belanja Modal Jalan	68.876,03	50.106,24	59.561,97	99.405,99	72.047,10	7,75
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.299,13	644,61	3.357,30	2.343,60	2.566,03	79,92
Belanja Aset Lainnya	381,53	73,79	-	-	-	
BELANJA TAK TERDUGA	730,44	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	1.897,19
Belanja Tak Terduga	730,44	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	1.897,19

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mempunyai kecenderungan berkurang sekitar 2,59%. Penurunan dari komponen SiLPA menunjukkan bahwa kinerja APBD semakin baik. Kondisi pembiayaan daerah Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel III-3.

**Tabel III-3 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

URAIAN	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
	2019	2020	2021	2022	2023	
PEMBIAYAAN	77.874,26	104.227,37	111.045,91	105.197,66	57.355,90	-2,59
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	92.028,39	108.748,00	112.545,91	115.339,44	68.808,51	-4,05
Penggunaan SiLPA	87.928,21	95.101,71	112.542,30	115.326,67	63.120,55	-4,07
Pencairan Dana Cadangan	300,00	12.704,35	-	-	5.680,00	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	2.000,18	941,94	3,60	12,77	7,96	16,03
Pinjaman Dalam Negeri	1.800,00	-	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.154,13	4.520,63	1.500,00	10.141,78	11.452,60	113,54
Pembentukan Dana Cadangan	4.607,39	-	1.000,00	7.141,78	6.664,60	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	7.742,00	4.518,00	500,00	3.000,00	4.788,00	107,26
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.804,74	2,63	-	-	-	

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas dana. Neraca Kota Pekalongan pada periode tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal tersebut terlihat pada aset lancar yang merupakan unsur dominan dalam pembentukan total aset. Rincian Neraca Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel III-4.

**Tabel III-4 Neraca Pemerintah Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Aset Lancar						
Kas	95,10	112,54	115,33	63,12	53,66	-9,86%
Piutang	43,38	38,83	59,02	43,09	43,64	3,95%
Piutang lainnya	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	-25,00%
Persediaan	15,59	36,75	22,84	21,04	18,17	19,07%
Biaya dibayar dimuka	0,14	0,04	0,12	0,14	0,07	17,98%
Jumlah aset lancar	154,21	188,16	197,31	127,43	115,55	-4,47%
Investasi jangka Panjang						
Investasi non permanen	1,20	0,28	0,00	0,00	0,00	-44,22%
linvestasi permanen	90,95	95,40	96,60	100,97	105,76	3,85%
Jumlah investasi jangka Panjang	92,15	95,68	96,60	100,97	105,76	3,51%
Aset tetap						
Tanah	1.311,20	1.333,44	1.457,35	1.555,45	1.558,45	4,48%
Peralatan dan mesin	455,16	540,27	567,91	613,89	646,16	9,29%
Gedung dan bangunan	763,79	805,61	851,63	883,51	938,88	5,30%
Jalan, jaringan dan instalansi	829,61	883,80	939,18	1.185,09	1.254,96	11,22%
Aset tetap lainnya	35,87	33,94	35,24	12,50	14,16	-13,21%
Konstruksi dalam pengerjaan	16,58	1,17	4,25	3,54	2,75	32,89%

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Akumulasi penyusutan	-959,64	-1.105,10	-1.192,53	-1.310,16	-1.296,95	7,98%
Jumlah aset tetap	2.452,57	2.493,13	2.663,03	2.943,83	3.118,41	6,24%
Dana cadangan						
Dana cadangan	12,70	0,00	1,00	8,14	9,13	156,57%
Jumlah dana cadangan	12,70	-	1,00	8,14	9,13	156,57%
Aset lainnya						
Tagihan piutang penjualan angsuran	0,00	0,00	0,23	0,23	0,23	-0,19%
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Kemitraan dengan pihak ketiga	12,58	12,33	12,33	11,08	11,08	-3,04%
Aset tidak berwujud	1,28	1,03	0,92	0,84	0,82	-10,36%
Aset lain-lain	130,96	131,37	77,52	78,28	79,76	-9,45%
Aset rusak berat/proses penghapusan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Uang Jaminan	0,22	0,23	0,00	3,60	3,60	-23,88%
Jumlah aset lainnya	145,04	144,96	91,00	94,02	95,48	-8,10%
JUMLAH ASET	2.856,67	2.921,92	3.048,94	3.274,39	3.444,33	4,80%
KEWAJIBAN						
Kewajiban jangka pendek						
Utang perhitungan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,85%
Utang bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Bagian lancar utang jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pendapatan diterima dimuka	1,37	3,22	1,68	1,93	1,96	25,82%
Utang Belanja	24,21	14,15	19,36	9,40	9,50	-13,78%
Utang jangka pendek lainnya						
Utang Jangka Pendek pada Kemitraan Pihak ketiga	0,04	0,07	1,27	0,30	0,30	421,72%
Utang uang jaminan	0,22	0,23	0,00	0,00	0,00	-23,88%
Jumlah kewajiban jangka pendek	25,84	17,68	22,30	11,63	11,76	-13,05%
Kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang dalam negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utang luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah kewajiban jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah kewajiban	25,84	17,68	22,30	11,63	11,76	-13,05%
EKUITAS DANA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427,79	4,92%
Ekuitas Dana	2.830,83	2.904,24	3.026,64	3.262,75	3.439,55	4,77%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2019-2023

Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, belanja penyelenggaraan pemerintahan

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Analisis belanja dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup:

1. Rasio Kemandirian Daerah;
2. Proporsi Penggunaan Anggaran;
3. Rasio Belanja Modal; dan
4. Analisis Pembiayaan.

3.1.3.1. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel III-5 di bawah ini.

**Tabel III-5 Rasio Kemandirian Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2019 - 2023**

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah (Rp. Juta)	971.624,46	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.417,64
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	212.777,44	229.867,94	252.037,00	263.475,95	263.342,60
Rasio PAD	21,90%	24,12%	26,08%	26,64%	25,61%
Pendapatan Transfer (Rp. Juta)	734.897,35	700.838,01	686.765,22	725.537,13	763.287,05
Rasio Transfer	75,64%	73,53%	71,07%	73,36%	74,22%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan masih termasuk dalam kategori rendah karena angka rasio transfer masih lebih besar dibanding rasio PAD. Namun untuk pergerakan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan atas rasio kemandirian Pemerintah Kota Pekalongan yang dibuktikan dengan peningkatan rasio PAD (kecuali di tahun 2023) dan pada tahun 2023 rasio PAD mencapai 25,61% dibanding tahun 2022 sebesar 26,64%. Adapun rasio transfer menunjukkan penurunan dibuktikan dengan penurunan rasio transfer dari semula 75,64% pada tahun 2019 turun menjadi 74,22% di tahun 2023, walaupun pada tahun 2023 naik apabila dibandingkan dengan 2022 yang nilai rasionya 73,36% karena pada tahun 2022 Pemerintah Kota Pekalongan hanya mendapat DID sebesar Rp.4.696.260.000,- sedang pada tahun 2023 atas kinerja tahun berjalan mendapat tambahan DID yang secara total menjadi Rp.21.278.579.000,-. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan meskipun memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap Pusat namun pergerakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dibuktikan dengan semakin bertambahnya rasio PAD dan semakin berkurangnya rasio transfer.

3.1.3.2. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel III-6. Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diperhitungkan dari belanja gaji pegawai dan tenaga kontrak Wali Kota.

**Tabel III-6 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Total Belanja Pegawai (Rp. Juta)	390.898,34	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan) (Rp. Juta)	968.551,14	949.361,09	963.591,79	1.041.231,97	1.043.300,17
Proporsi Belanja Aparatur (persen)	40,36	41,55	40,65	36,09	36,48

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Secara rupiah untuk belanja pegawai dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 sebesar Rp 390.898.339.975 dan pada tahun 2023 menjadi Rp 380.545.140.291. Secara rata-rata proporsi juga mengalami penurunan dimana pada tahun 2019 proporsi belanja pegawai sebesar 40,36 persen, dan tahun 2023 menjadi 36,48 persen. Walau secara rata-rata mengalami penurunan tapi untuk belanja pegawai di tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan baik secara rupiah maupun secara proporsi apabila dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini karena kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2018 menjadi PNS di tahun 2020 (penerimaan gaji dan tunjangan 100 persen) dan kebutuhan penganggaran tambahan penghasilannya, kebutuhan penganggaran untuk PPPK yang telah lulus seleksi pada tahun 2019 serta memperhitungkan kebutuhan penganggaran gaji dan tunjangan CPNS Formasi 2019 sebanyak 207 orang disamping kenaikan komponen lainnya termasuk kenaikan belanja insentif pajak dan retribusi yang mengikuti kenaikan capaian realisasi target pendapatan. Pada tahun 2021 juga terdapat tambahan belanja pegawai untuk alokasi gaji PPPK.

3.1.3.3. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel III-7 di bawah ini.

Tabel III-7 Rasio Belanja Modal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Modal (Rp.Juta)	182.153,98	126.926,09	160.513,73	196.569,44	170.653,38
Belanja (Rp.Juta)	954.397,01	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.847,57
Rasio Belanja Modal (persen)	19,09	13,43	16,68	19,06	16,54

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari rasio belanja modal 19,09% di tahun 2019 turun menjadi 16,54% di tahun 2023.

3.1.3.4. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya (pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, penerimaan kembali sisa Belanja atau akibat lainnya, sisa belanja DAK, sisa belanja dana bagi hasil, pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pembiayaan daerah, sisa dana pengeluaran pembiayaan daerah), penerimaan dana cadangan serta penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

Penerimaan Pembiayaan digunakan untuk menutup defisit riil yang meliputi selisih pendapatan dengan belanja dan pengeluaran daerah. Defisit riil anggaran tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel III-8 dibawah ini.

**Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Uraian	Realisasi Tahun (Rp. Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Daerah	971.624,46	953.155,39	966.372,56	989.013,07	1.028.417,64
Dikurangi					
Belanja Daerah	954.397,01	944.840,46	962.091,79	1.031.090,19	1.031.896,18
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.154,13	4.520,63	1.500,00	10.141,78	11.452,60
Total Pengeluaran (Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan)	968.551,14	949.361,09	963.591,79	1.041.231,97	1.043.348,78
Surplus / Defisit	3.073,32	3.794,30	2.780,77	-52.218,90	-14.931,14

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Dari Tabel III-8 terlihat bahwa pada tahun 2022 dan 2023 terdapat defisit, namun pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terjadi surplus anggaran. Selanjutnya Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 dan 2023 tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah, dengan komposisi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel III-9 berikut.

**Tabel III-9 Komposisi Penutup Riil Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023**

Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (Rp. Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penggunaan SiLPA	surplus	surplus	Surplus	115.326,67	63.120,55
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	surplus	surplus	Surplus	12,77	7,96
Pencairan Dana Cadangan	surplus	surplus	Surplus	0	5.680,00
Pinjaman Dalam Negeri	surplus	surplus	Surplus	0	0

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Tabel III-10 menunjukkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021. Walaupun tahun 2022 mengalami kenaikan karena penghematan belanja tetapi untuk pelampauan penerimaan PAD menurun signifikan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2022, pada tahun 2023 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya mengalami penurunan yang bersumber dari pelampauan PAD dan sisa penghematan belanja. Namun demikian hal tersebut, bukan berarti bahwa target kinerja dari Pemerintah Kota Pekalongan tidak tercapai. Sisa penghematan belanja bisa disebabkan karena adanya sisa-sisa kontrak.

**Tabel III-10 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2023**

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA
Jumlah SiLPA	112.542,30		115.326,67		63.120,55	
Pelampuan Penerimaan PAD	56.874,55	59,80%	37.828,69	39,78%	7.642,26	8,04%

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA	Rp (Jutaan)	% dari SiLPA
Pelampuan Penerimaan Dana Perimbangan	-4.537,82	-4,77%	-3.477,63	-3,66%	-3.610,30	-3,80%
Pelampuan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-8.789,04	-9,24%	1.865,26	1,96%	0,00	0,00%
Sisa Penghematan Belanja akibat lainnya	67.897,43	71,39%	79.114,29	83,19%	59.097,60	62,14%
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselisaikan	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Kegiatan lanjutan	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

3.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH LIMA TAHUN KE DEPAN

Pada bagian kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

3.3.1.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah ditunjukkan dalam tabel III-11. Pendapatan Daerah untuk tahun 2025-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 1,80 persen, untuk tahun 2025 sebesar Rp. 988.599.368.000,- dan di akhir periode RPJMD 2025-2029 menjadi Rp.1.061.808.602.000,- Komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik adalah PAD,DAU dan Insentif Fiskal, untuk Pendapatan Transfer lainnya diasumsikan tetap sedang untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum dipasangkan proyeksinya karena belum adanya kepastian/ perkiraan akan diterimanya Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Tabel III-11
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2025 s.d 2029

URAIAN	Pertumb 2019-2023 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
PENDAPATAN	1,45	1.028.417,64	973.848,81	988.599,37	1.005.658,89	1.026.037,89	1.042.848,32	1.061.808,60	1,80
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5,54	263.342,60	248.422,17	280.890,85	288.383,21	295.003,71	301.860,48	308.668,03	2,39
Pendapatan Pajak Daerah	7,88	115.423,92	106.000,00	138.897,68	143.172,68	146.597,68	150.222,68	153.997,68	2,61
Hasil Retribusi Daerah	1,33	16.704,86	127.931,57	131.322,23	134.200,64	136.963,08	139.720,48	142.455,59	2,06
Hasil Pengel. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,15	7.117,20	6.365,30	7.226,93	7.500,89	7.818,95	8.153,32	8.335,76	3,64
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,96	124.096,61	8.125,30	3.444,00	3.509,00	3.624,00	3.764,00	3.879,00	3,02
PENDAPATAN TRANSFER	1,05	763.287,05	725.426,64	707.708,52	717.275,68	731.034,17	740.987,84	753.140,58	1,57
Transfer Pemerintah Pusat	1,03	667.941,86	643.362,09	656.741,65	666.308,81	680.067,30	690.020,97	702.173,71	1,69
Bagi Hasil Pajak	17,39	31.492,86	27.266,33	25.901,83	25.901,83	25.901,83	25.901,83	25.901,83	0,00
Bagi Hasil SDA	16,74	1.950,24	-	1.364,50	1.364,50	1.364,50	1.364,50	1.364,50	0,00
Dana Alokasi Umum	(1,17)	451.200,06	468.978,07	478.357,63	487.924,78	497.683,28	507.636,94	517.789,68	2,00
Dana Alokasi Khusus	9,64	162.020,13	147.117,69	147.117,69	147.117,69	147.117,69	147.117,69	147.117,69	0,00

URAIAN	Pertumb 2019-2023 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		Proyeksi (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Insentif Fiskal		21.278,58	-	4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	10.000,00	31,25
Transfer Pemerintah Provinsi	3,00	95.345,18	82.064,55	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	0,00
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	0,99	72.883,76	82.064,55	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	50.966,87	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi	378,58	22.461,42							#DIV/0!
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	(27,82)	1.788,00	-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Hibah	(64,72)	1.788,00		-	-	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				-	-	-	-	-	

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

- Perkiraan kenaikan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah termasuk pula mempertimbangkan implementasi Opsen PKB dan BBPNKB ;
- Kemungkinan realisasi penagihan piutang;
- Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2025-2029 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran baru;
- Mempertimbangkan realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah selama 5 tahun terakhir;
- Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
- Potensi aset yang disewakan, estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
- Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025-2029 diproyeksi akan mengalami kenaikan sebesar 2,61 persen. Tahun 2025 PAD diproyeksi sebesar Rp. 280.890.846.000,- dan setiap tahunnya diproyeksi selalu meningkat sampai dengan tahun 2029 sebesar Rp. 308.668.026.000,-. Komponen PAD yang diproyeksi mengalami rata-rata pertumbuhan tinggi adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 3,64 persen dimana pada tahun 2025 diproyeksi sebesar Rp.7.226.934.000,- dan diproyeksi terus mengalami kenaikan sampai tahun 2029 sebesar Rp 8.335.760.000,-. Hal ini karena Hal ini karena PD. BPR BKK Pekalongan Utara mengalami merger menjadi PD. BPR BKK dengan perhitungan Laba/ Rugi hasil konsolidasi se-Jawa Tengah baru akan BEP tahun 2023 sehingga Bagian Laba Atas Penyertaan Modal baru akan terima pada tahun 2024.

Sementara untuk Dana Alokasi Umum pada 2025-2029 setiap tahunnya diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 2 persen dengan asumsi adanya kenaikan Gaji ASN dan pengangkatan Honorer menjadi PPPK yang merupakan konsekuensi atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun pada APBD Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan Insentif Fiskal tetapi untuk tahun anggaran 2025 sampai dengan 2029 ditargetkan mendapat Insentif Fiskal atas kinerja tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan. Target perolehan Insentif Fiskal pada tahun 2025 atas prestasi kinerja pada Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sinergi Kebijakan, untuk tahun 2026 disamping kinerja atas aspek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sinergi Kebijakan terdapat tambahan prestasi kinerja dari SAKIP. Sementara pada 2028 ditargetkan mendapat Penghargaan Pembangunan Daerah sehingga dapat menambah perolehan Insentif Fiskal.

Tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Walikota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Konsekuensi atas terbitnya regulasi tersebut struktur APBD mengalami perubahan untuk nomenklatur Pajak Daerah dan nomenklatur Retribusi Daerah. Pada struktur APBD, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat nomenklatur Pajak Daerah baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis Pajak Daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain perubahan nomenklatur Pajak Daerah, terdapat jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang yang dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen (Pajak PKB, dan BBNKB). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, terdapat beberapa Retribusi Daerah yang sudah tidak dipungut antara lain : Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan tidak dipungutnya kembali Retribusi Daerah tersebut dan penurunan beberapa tarif Pajak Daerah dapat berpotensi menurunkan PAD sehingga diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penanganan piutang, optimalisasi Retribusi Daerah, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pemanfaatan Aset, dan peningkatan dana insentif fiskal.

Dalam struktur APBD Kota Pekalongan komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Komponen pendapatan yang diproyeksikan berkontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah secara rupiah adalah Dana Perimbangan. Seperti yang disajikan dalam tabel III-11, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil apabila dibandingkan dengan Dana Perimbangan. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang, beberapa upaya dan langkah akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Pekalongan, antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Walikota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya);
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.

3.3.1.2. Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi Belanja Daerah disajikan dalam tabel III-12. Belanja Daerah untuk tahun 2025-2029 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 2,03 persen, untuk tahun 2025 sebesar Rp. 1.034.486.084.000,- dan di akhir periode RPJMD 2025-2029 pada tahun 2029 diproyeksikan menjadi Rp. 1.121.091.669.000,-. Proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Belanja Operasi diproyeksikan naik setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,52 persen dengan rincian:

- a. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2,0 persen per tahun, dengan asumsi bahwa adanya peningkatan jumlah pegawai atau ASN dan kenaikan gaji ASN (PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Dan rencana regulasi dari Pemerintah Pusat tentang pengangkatan Pegawai Non ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.
 - b. Belanja barang dan jasa diasumsikan naik rata-rata sebesar 0,50 persen per tahun. Kenaikan tersebut yang diprediksikan akan digunakan untuk menyikapi kenaikan tarif listrik dan kebijakan pemerintah dibidang kesehatan, jaminan perlindungan sosial serta inflasi. Namun demikian kenaikan Belanja Barang dan Jasa tidak linier setiap tahun karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi pada tahun 2028 dan 2029 yaitu untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Tahun 2029. Sehingga perlu pencermatan dalam penganggaran di setiap tahun anggaran.
 - c. Proyeksi belanja hibah tahun 2025 sampai 2027 dialokasikan turun rata-rata sebesar (-2) persen pertahun, namun untuk tahun 2028 dan 2029 mengalami kenaikan dikarenakan adanya hibah untuk pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2029.
 - d. Proyeksi belanja bantuan sosial mulai tahun 2025 sampai 2029 diasumsikan tetap per tahunnya sama dengan belanja bantuan sosial tahun 2024, yaitu sebesar Rp 1.949.876.000.
- 2) Belanja modal diproyeksikan naik dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,94 persen.
 - 3) Belanja Tak Terduga sejak tahun 2024 diasumsikan tetap yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,-/tahun.
 - 4) Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib dan mengikat, pemenuhan SPM serta belanja dalam rangka perwujudan Visi Misi Wali Kota – Wakil Wali Kota terpilih.

**Tabel III-12 Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2025 s.d 2029**

URAIAN	Pertumb 2019-2023 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		PROYEKSI (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
BELANJA	2,02%	1.031.847,57	1.024.773,81	1.034.486,08	1.051.011,74	1.070.862,21	1.094.149,40	1.121.091,67	2,03
BELANJA OPERASI	2,73	858.205,17	913.974,14	915.867,72	926.993,64	938.338,71	956.906,65	972.701,26	1,52
Belanja Pegawai	-0,65	380.545,14	430.669,82	491.083,21	500.904,88	510.922,97	521.141,43	531.564,26	2,00
Belanja Barang dan Jasa	6,42	431.075,38	440.037,57	390.437,76	392.389,95	394.351,90	396.323,66	398.305,28	0,50
Belanja Hibah	11,76	44.257,04	41.316,88	32.396,88	31.748,94	31.113,96	37.491,68	40.881,85	6,39
Belanja Bantuan Sosial	35,92	2.327,61	1.949,88	1.949,88	1.949,88	1.949,88	1.949,88	1.949,88	0,00
BELANJA MODAL	1,36	170.653,38	107.299,67	115.118,36	120.518,10	129.023,50	133.742,75	144.890,41	5,94
BELANJA TAK TERDUGA	1897,19	2.989,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2024 (diolah)

3.3.1.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah untuk tahun 2025-2029 diproyeksikan naik dengan rata-rata sebesar 6,92 persen pertahun. Kenaikan diproyeksikan pada Tahun 2028 sebesar 14,45 persen dan tahun 2029 sebesar 15,56 persen. Sedangkan proyeksi Tahun 2025-2027 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar (-1,16) persen.

Berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, penerimaan pembiayaan yang berasal dari Silpa tahun 2025 sampai 2029 ditargetkan turun sebesar (-1,00) persen pertahun. Namun di tahun 2028 dan 2029 penerimaan pembiayaan diproyeksikan ada kenaikan rata-rata sebesar 9,15 persen yang berasal dari Pencairan Dana Cadangan untuk pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2029.

Sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun 2029 yang diprediksikan mengalami kenaikan maka pembentukan dana cadangan pada pengeluaran pembiayaan perlu direncanakan adanya kenaikan menjadi Rp. 4,5 Milyar per tahun, dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2028.

Selengkapnya proyeksi pembiayaan daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029 ditunjukkan dalam tabel III-13.

**Tabel III-13 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2025 s.d 2029**

URAIAN	Pertumb 2019-2023 (persen)	Kondisi Awal (Rp. juta)		PROYEKSI (Rp. juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2023 (un-Audited)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
PEMBIAYAAN	-2,59	57.355,90	50.925,00	45.886,72	45.352,85	44.824,32	51.301,08	59.283,07	6,92
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-4,05	68.808,51	53.925,00	53.386,72	52.852,85	52.324,32	58.801,08	62.283,07	4,07
Penggunaan SiLPA	-4,07	63.120,55	45.200,00	53.386,72	52.852,85	52.324,32	51.801,08	51.283,07	-1,00
Pencairan Dana Cadangan		5.680,00	8.725,00	-	-	-	7.000,00	11.000,00	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	16,03	7,96	-	-	-	-	-	-	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	113,54	11.452,60	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	-15,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	6.664,60	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-25,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	107,26	4.788,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2024 (diolah)

3.3.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama merupakan kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Pengeluaran tersebut merupakan komponen belanja operasi, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Pada pos belanja operasi, pengeluaran periodik wajib dan mengikat meliputi:

- Belanja Pegawai, terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN dan gaji tenaga kontrak dengan SK Wali Kota.
- Belanja Barang dan Jasa, terdiri dari belanja telepon, belanja air, belanja listrik, belanja internet, Belanja Bahan Bakar dan belanja premi BPJS Kesehatan bagi warga tidak mampu dan BPJS tenaga kontrak SK Wali Kota.
- Belanja Hibah, terdiri dari hibah Pilkada dan Hibah partai Politik.

2) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

3) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat meliputi penyertaan modal BUMD dan pembentukan dana cadangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 ditunjukkan Tabel III-14. Dari data tersebut, berdasarkan

realisasi Tahun 2023, dapat diproyeksikan belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Kota Pekalongan 2025-2029 seperti yang ditunjukkan dalam tabel III-15.

Tabel III-14 Analisis Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

No.	Uraian	REALISASI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
		2019	2020	2021	2022	2023	
A	Belanja Operasi	433.265,82	445.015,28	451.067,28	433.626,67	442.849,78	0,58
1	Belanja Pegawai	390.898,34	394.421,56	391.695,12	375.774,56	380.545,14	-0,65
2	Belanja Barang dan Jasa	42.367,48	50.593,72	59.372,16	57.852,11	62.304,64	10,48
3	Hibah	753,20	753,20	753,20	753,20	6.433,20	188,53
B	Belanja Tidak Terduga	730,44	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	1897,19
4	Belanja Tidak Terduga	730,44	57.371,26	9.403,41	3.909,45	2.989,02	1897,19
C	Pengeluaran Pembiayaan	12.349,39	4.518,00	1.500,00	10.141,78	11.452,60	114,71
5	Penyertaan Modal Daerah	7.742,00	4.518,00	500,00	3.000,00	4.788,00	107,26
6	Pembentukan Dana Cadangan	4.607,39	-	1.000,00	7.141,78	6.664,60	169,17
Jumlah		446.345,65	506.904,54	461.970,69	447.677,90	457.291,40	0,94

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2024 (diolah)

Tabel III-15 Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kota Pekalongan 2025-2029

No.	Uraian	Rata-rata pertumb 2019-2023	Kondisi Awal (Rp. Juta)		PROYEKSI (Rp. Juta)					Rata-rata Pertumb (persen)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
A	Belanja Operasi	0,58	442.849,78	505.177,47	563.465,52	580.793,91	599.105,45	624.486,49	649.032,15	3,60
1	Belanja Pegawai	-0,65	380.545,14	430.669,82	491.083,21	500.904,88	510.922,97	521.141,43	531.564,26	2,00
2	Belanja Barang dan Jasa	10,48	62.304,64	64.834,46	71.629,11	79.135,84	87.429,27	96.591,86	106.714,69	10,48
3	Hibah	188,53	6.433,20	9.673,20	753,20	753,20	753,20	6.753,20	10.753,20	213,96
B	Belanja Tidak Terduga	1897,19	2.989,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4	Belanja Tidak Terduga	1897,19	2.989,02	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
C	Pengeluaran Pembiayaan	114,71	11.452,60	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	-15,00
5	Penyertaan Modal Daerah	107,26	4.788,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6	Pembentukan Dana Cadangan	169,17	6.664,60	-	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-25,00
Jumlah			457.291,40	511.677,47	574.465,52	591.793,91	610.105,45	635.486,49	655.532,15	3,36

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2024 (diolah)

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Dari uraian-ruaian pada bab sebelumnya, maka kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai program kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) disajikan dalam Tabel III-16 berikut.

**Tabel III-16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029**

URAIAN	Kondisi Awal (Rp. Juta)		PROYEKSI (Rp. Juta)				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Pendapatan	1.028.417,64	973.848,81	988.465,37	1.005.554,43	1.025.963,00	1.042.802,99	1.061.792,84
2. Pencairan Dana Cadangan	5.680,00	8.725,00	-	-	-	7.000,00	11.000,00
3. Sisa Lebih Riil Penggunaan Anggaran	63.120,55	45.200,00	53.386,72	52.852,85	52.324,32	51.801,08	51.283,07
4. Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	7,96	-	-	-	-	-	-
TOTAL PENERIMAAN	1.097.226,15	1.027.773,81	1.041.986,08	1.058.511,74	1.078.362,21	1.101.649,40	1.124.091,67
DIKURANGI							
5. Belanja Wajib Mengikat	457.291,40	511.677,47	574.465,52	591.793,91	610.105,45	635.486,49	655.532,15
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	639.934,75	516.096,34	467.520,56	466.717,82	468.256,76	466.162,90	468.559,52

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, Bappeda Kota Pekalongan, 2024 (diolah)

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Analisis isu strategis merupakan pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu penting dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2025-2029. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Di sisi lain, permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan.

4.1. PERMASALAHAN

4.1.1. Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Masalah juga digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Masalah biasanya dianggap sebagai suatu keadaan yang harus diselesaikan. Masalah adalah ketika kenyataan yang terjadi atau realita fakta (*das sein*), yang tidak sesuai dengan yang diharapkan (*das sollen*). Dapat disimpulkan bahwa masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan serta harapan, juga antara realitas dan ekspektasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait permasalahan daerah.

Analisis permasalahan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2023 dan permasalahan yang ditemukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 yang dianalisis melalui penjangkaran aspirasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan selama ini dan harapan capaian ke depan. Di samping itu, juga dilakukan pra *Focus Group Discussion* (FGD) serta FGD tematik yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Hasil FGD dipetakan dengan pendekatan kerangka logis masalah pokok, masalah dan akar masalah serta strategi untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Dalam kerangka pembangunan jangka menengah (2025-2029) ke depan, rumusan permasalahan diselaraskan dengan permasalahan pada Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-20245 sebagai berikut:

4.1.1.1. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan tata kelola pemerintahan Kota Pekalongan didasarkan pada data reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam Bab II. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 77,12. Upaya untuk meningkatkan tata

kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu:

- a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,02 (tahun 2022) dan menjadi 3,29 (tahun 2023). Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan penguatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah;
- b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62,5 persen;
- c) Kuatnya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik (KIP), meskipun nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada tahun 2023 sudah mencapai 96,62 (sumber: Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah);
- d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,83 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal;
- e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP;
- f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,002 (Tahun 2023);
- g) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,00 dengan skor 3.09 (Tahun 2023);
- h) Keterbatasan jumlah ASN, serta perubahan regulasi yang menyebabkan kesulitan dalam hal rotasi ASN, meskipun Indeks Profesionalitas ASN sudah mencapai 86,97 (tahun 2023);
- i) Perlunya peningkatan manajemen ASN sehingga capaian merit system yang relatif tinggi (327,00 pada tahun 2023); dan
- j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu:

- a) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD;
- b) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO;
- c) Penataan sistem manajemen SDM aparatur;
- d) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD;
- e) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek Pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

4.1.1.2. Belum Optimalnya Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2018 – 2022 sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, masih terdapat konflik sosial dan kejahatan di Kota Pekalongan. Walaupun berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial, namun konflik sosial masih terjadi dan menjadi salah satu isu yang harus terus dijaga sehingga tidak sampai terjadi konflik sosial. Konflik sosial juga dimungkinkan muncul sebagai pengaruh dari kebebasan akses informasi melalui berbagai media sosial. Informasi yang salah akan menjadi semakin salah dan menyebar jika tanpa dilakukan penyaringan melalui kebiasaan berpikir kritis pada semua orang. Situasi keamanan juga menjadi perhatian untuk terus dieliminir untuk mewujudkan kondusivitas wilayah. Pada tahun 2022 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkoba dan psikotropika.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus dan pada tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2020 sebesar 4,69 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 3,60 (per 10.000 penduduk) di tahun 2021, namun angka tersebut harus terus dioptimalkan. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika yang tertangani pada tahun 2021 sebesar 40 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupaten/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat

Selain itu, kondusivitas wilayah juga ditunjukkan dengan lingkungan yang tertib, termasuk ketertiban lalu lintas. Permasalahan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan salah satunya disebabkan oleh belum optimalnya penataan pedagang kaki lima. Munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat sering kali mengganggu pengguna jalan karena menggunakan bahu dan badan jalan dalam beraktifitas. Pedagang kaki lima juga masih menggunakan ruas jalan yang sesuai dengan regulasi bukan tempat yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima.

4.1.1.3. Belum Optimalnya Daya Saing dan Produktivitas Perekonomian Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan jika dilihat dari data pada Bab II menunjukkan peningkatan secara konsisten. Angka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih baik jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Namun apabila dilihat dari PDRB per Kapita dibandingkan dengan Kab/Kota di Jawa Tengah, Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah.



Gambar IV.1 Tipologi Klassen Kondisi Perekonomian Kab/Kota di Jawa Tengah

Sumber: Bappeda, diolah, 2023

Dengan menggunakan pendekatan Tipologi Klassen, Kota Pekalongan berada pada kuadran kiri-atas atau daerah “tertinggal sedang”. Daerah pada kuadran ini merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Jawa Tengah namun memiliki PDRB per kapita di bawah rata-rata Jawa Tengah.

Dengan melihat kondisi di Kota Pekalongan yang menempatkan batik dan perikanan sebagai produk unggulan yang disertai pariwisata sebagai pendukung, maka beberapa hal yang menjadi sorotan sehingga perlu ditingkatkan diantaranya:

1. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan.
2. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi.
3. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan baik dari sisi sarana prasarana, manajemen maupun infrastruktur pendukung lainnya, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob.
4. Belum optimalnya penanggulangan permasalahan banjir dan rob, mengacu pada permasalahan sistem drainase primer yang bersumber dari lima sungai yaitu Sungai Meduri, Sungai Brengi, Sungai Loji, Sungai Banger, dan Sungai Gabus, serta sistem drainase sekunder dan tersier yang bersumber dari lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.
5. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata.
6. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya.

7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya).
8. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.

4.1.1.4. Belum Optimalnya Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat kota pekalongan dapat dilihat dari data pada Bab II, khususnya capaian indikator IPM, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Jika dibandingkan dengan daerah sekitar, IPM Kota Pekalongan relatif baik. Namun apabila dibandingkan dengan Kota setara, maka IPM Kota Pekalongan adalah yang paling rendah. Dari data IPM tahun 2023 sebesar 76,71, dimensi pengetahuan bernilai 0,67 masih perlu mendapatkan perhatian. Angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah menjadi komponen pembentuk dimensi pengetahuan. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2023 adalah 9,29 tahun, sementara harapan lama sekolah 12,87 tahun. Adapun untuk dimensi kesehatan relatif baik dengan angka 0,84 dan dimensi hidup layak dengan angka 0,81. Meskipun dimensi kesehatan sudah baik, namun masih terdapat permasalahan layanan kesehatan, salah satunya adalah masih tingginya angka prevalensi balita stunting di Kota Pekalongan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Dari data angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 6,81%, meskipun memiliki tren yang terus menurun dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan harus terus diupayakan turun. Demikian juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang pada tahun 2023 adalah 5,02%.

4.1.1.5. Belum Optimalnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Permasalahan belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman Kota Pekalongan dapat dilihat dari data yang disajikan di Bab II. Dari data air minum, jalan, sanitasi dan luas genangan, masih terdapat permasalahan infrastruktur di kota Pekalongan.

Terkait permasalahan penyediaan akses air siap minum di Kota Pekalongan, persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan di Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 67,42%. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Sementara pemanfaatan air bawah tanah berpotensi menambah percepatan laju penurunan muka tanah. Kemudian untuk kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua dan tertanam di bawah konstruksi jalan sehingga perlu perbaikan dan pemeliharaan.

Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum. Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan juga berkaitan dengan masih tingginya kemacetan. Beberapa penyebabnya antara lain, adanya *double track* perlintasan sebidang yang melintasi jalan utama di Kota Pekalongan menyebabkan kemacetan pada

waktu-waktu tertentu, tidak berimbangnya pertumbuhan kendaraan dengan volume ruas jalan, belum optimalnya penataan parkir, serta masih bercampurnya kendaraan lokal dan regional yang melalui ruas jalan dalam kota juga menambah kepadatan dan kemacetan lalu lintas dalam kota. Mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang baik dapat membantu mengalokasikan arus kendaraan dengan lebih efisien, mengurangi kepadatan di titik-titik yang rentan terhadap kemacetan, juga perlu dipertimbangkan solusi lain berupa pembangunan jalan lingkar, transportasi publik yang lebih baik dan pengaturan parkir yang lebih efisien. Semua ini dapat membantu mengurangi beban pada jalan-jalan utama dan meningkatkan mobilitas secara keseluruhan.

Permasalahan infrastruktur di Kota Pekalongan lainnya adalah permasalahan sanitasi terutama disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana dan perilaku masyarakat. Sarana dan prasarana meliputi sarana pengangkutan/pengumpulan sampah dan pengolahan lumpur tinja. Adapun perilaku masyarakat berupa kurangnya kesadaran untuk menjaga sarpras yang ada serta belum adanya kesadaran untuk memilah sampah menurut jenisnya.

Permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023, masih menyisakan 18,97% luas genangan. Untuk kawasan pekalongan bagian timur relatif tertangani dengan dibangunnya pengendali banjir rob Loji Banger, tetapi masih terdapat kebutuhan untuk melakukan penataan drainase sekunder/tersier. Sedangkan pada kawasan Pekalongan bagian barat masih membutuhkan penanganan pengendalian banjir dan rob pada saluran primer Kali Bremsi Meduri.

4.1.1.6. Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan hidup

Kondisi kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan dengan nilai IKLH yang disajikan pada Bab II menunjukkan masih rendahnya Indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan. Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018

tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Dari uraian-uraian di atas dan hasil analisis serta pendalaman melalui *focus group discussion* (FGD), dapat ditarik kesimpulan masalah pokok, masalah dan akar masalah di Kota Pekalongan sebagaimana Tabel berikut.

Tabel IV-1 Identifikasi Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital 2. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat) 3. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM 5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2	Belum optimalnya kondusivitas wilayah	Belum optimalnya penanganan konflik sosial, keamanan dan ketertiban	1. Masih adanya konflik sosial 2. Masih tingginya angka kejahatan 3. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika 4. Belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima
3	Belum optimalnya daya saing dan produktifitas perekonomian daerah	Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah	1. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan 2. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi 3. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob 4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata 5. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya 6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya) 7. Belum optimalnya penataan pasar tradisional
4	Belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	Belum optimalnya tingkat pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan masyarakat dan kesetaraan gender	1. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan 2. Belum optimal implementasi pendidikan karakter 3. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat 4. Masih tingginya prevalensi stunting 5. Belum optimalnya perwujudan GESI (<i>Gender Equity Social Inclusion</i>)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			6. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
5	Belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman	Belum optimalnya layanan jalan, air minum, sanitasi, drainase, pengendalian penataan ruang	1. Belum optimalnya-rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan disertai dengan penataan parkir 2. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan 3. Masih rendahnya kualitas sanitasi 4. Belum optimalnya sistem drainase kota dan drainase lingkungan, tingginya laju penurunan tanah (Land Subsidence), sarpras pengendali banjir kurang optimal (sisi Barat belum ada penanganan) 5. Masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung dan permukiman 6. Masih adanya kondisi rumah yang kurang layak
6	Belum Optimalnya Kualitas Lingkungan hidup	Masih rendahnya indeks kualitas air, tutupan lahan dan penanganan sampah	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup 2. Masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair 3. Overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya 4. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 5. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan

Sumber: Hasil Analisis, 2023

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja urusan pemerintahan sebagaimana dijelaskan pada Bab II, tersaji dalam tabel IV.2 berikut.

Tabel IV-2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Belum optimalnya capaian SPM pendidikan
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar
	Belum optimalnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih tingginya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya penyediaan cadangan pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Belum optimalnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya penyediaan peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya penyediaan data statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya layanan sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya layanan perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Belum optimalnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya layanan dibidang pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki izin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya jumlah Perda yang ditetapkan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
KEUANGAN	Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN

URUSAN	PERMASALAHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya profesionalitas ASN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya layanan kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
	Belum optimalnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Belum optimalnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Belum optimalnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan ormas
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
Non Urusan	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Belum optimalnya kualitas laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2. ISU STRATEGIS DAERAH

4.2.1. Isu Global

4.2.1.1. Sustainable Development Goals (SDG's)

Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, SDG's disetujui untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ketujuh belas tujuan SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDG's membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju, rumusan SDG's merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan agar kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik. Di Indonesia khususnya Kota Pekalongan, rumusan SDG's dan target pencapaian harus menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD).

4.2.1.2. Pemanasan dan Perubahan Iklim Global (*Global Warming and Climate Change*)

Pemanasan global atau *global warming* adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, bumi, dan lautan. Sedangkan perubahan iklim atau *climate change* merupakan perubahan yang signifikan pada iklim, seperti suhu udara atau curah hujan, selama kurun waktu 30 tahun atau lebih. Perubahan iklim merupakan proyeksi kelanjutan dari *global warming*. Dalam satu abad terakhir suhu permukaan global telah meningkat antara 0,74 – 0,18°C. Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), suhu rata-rata udara di permukaan tanah di Indonesia, mengalami peningkatan sebesar 0,5°C. Ke depan, pemanasan global dan perubahan iklim akan semakin meningkat. Masih menurut data Bappenas, jika dibandingkan dengan periode tahun 1961 hingga 1990, rata-rata suhu di Indonesia diproyeksikan meningkat 0,8 hingga 1,0 OC antara tahun 2020 hingga 2050. Bahkan jika memilih model iklim milik *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC; Panel Antar pemerintah tentang Perubahan Iklim yang dibentuk PBB), menunjukkan suhu permukaan global akan mengalami peningkatan antara 1.1 hingga 6.4 derajat selama abad ke dua puluh satu. IPCC menyimpulkan bahwa pemanasan global yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20 hingga

kini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat kegiatan manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan.

Dampaknya akan sangat dirasakan oleh manusia dan lingkungan hidup. Diantaranya dampak-dampak tersebut adalah tidak stabilnya iklim, meningkatnya permukaan air laut, gangguan ekologis, rusaknya infrastruktur, dan lain-lain. Masing-masing dampak tersebut pun masih akan mendatangkan berbagai dampak susulan lainnya baik dalam bidang ekonomi, ekologi, kesehatan, hingga sosial dan politik. Kota Pekalongan yang berlokasi pada pesisir pantai dan dengan topografi sangat landai, memiliki risiko dan ancaman dari pemanasan dan perubahan iklim ini, terutama adalah fenomena kenaikan permukaan air laut. Fenomena kenaikan permukaan air laut tersebut telah beberapa tahun ini, sangat dirasakan dampaknya oleh wilayah Kota Pekalongan khususnya. Oleh karena itu, pemanasan dan perubahan iklim global merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

4.2.1.3. Perkembangan Teknologi Informasi yang Sangat Cepat dengan Menembus Batas-Batas Negara

Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasi awan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Kota Pekalongan sebagai salah satu kota kreatif dunia, harus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ini. Penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu prasyarat dalam era kompetisi antarnegara maupun antarmasyarakat ini. Diharapkan Kota Pekalongan dapat mendapatkan nilai tambah dan peningkatan daya saing yang signifikan melalui penguasaan teknologi informasi yang berkembang sangat pesat ini. Oleh karena itu, perkembangan teknologi informasi ini menjadi hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan.

4.2.2. Isu Nasional

Isu nasional didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. RPJPN Tahun 2025-2045 mampu merepresentasikan kondisi aktual dan cita-cita Indonesia jangka panjang ke depan. Visi RPJPN 2025-2045 adalah “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Visi Indonesia Emas 2045 ini dicerminkan dalam 5 sasaran yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan jangka panjang. Sasaran yang pertama, yaitu “Pendapatan per Kapita Suatu Negara Maju” dengan indikator meningkatnya GNI per Kapita menjadi USD 23.000-30.300; meningkatnya kontribusi PDB Maritim sebesar 15,0%; serta meningkatnya Kontribusi PDB Manufaktur sebesar 28,0% di tahun 2045. Selanjutnya, sasaran yang kedua yaitu “Kemiskinan Menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang” diterjemahkan dengan indikator menurunnya persentase Tingkat Kemiskinan menjadi 0,5-0,8%; menurunnya Rasio Gini menjadi 0,290-0,320; serta meningkatnya kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB menjadi 28,5%. Sasaran yang ketiga, “Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat” diukur dengan meningkatnya Global Power Indeks menjadi 15 besar. Lalu, sasaran yang keempat

melihat pada “Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat” dengan indikator meningkatnya dari Human Capital Indeks (HCI) menjadi 0,73. Sasaran yang terakhir berfokus pada keberlanjutan, yaitu “Intensitas Emisi GRK Menuju Net Zero Emission” dengan penurunan menjadi 93,5%.

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 tersebut, ditetapkan 8 Misi yang dijabarkan dalam 17 Arah Pembangunan. Delapan misi atau delapan agenda perubahan RPJPN, meliputi: Pertama, Mewujudkan transformasi sosial; Kedua, Mewujudkan transformasi sosial; Ketiga, Mewujudkan transformasi tata kelola; Keempat, Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; Kelima, Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi; Keenam, Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; Ketujuh, Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan Kedelapan, Mewujudkan kesinambungan pembangunan. Sedangkan 17 arah pembangunan, dirincikan di bawah ini.

Tabel IV-3
Misi dan Arah Kebijakan Indonesia Emas 2045

Transformasi Indonesia		
Misi 1 Transformasi Sosial	1	Kesehatan untuk Semua
	2	Pendidikan Berkualitas yang Merata
	3	Perlindungan Sosial yang Adaptif
Misi 2 Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
	5	Penerapan Ekonomi Hijau
	6	Transformasi Digital
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital
	8	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Misi 3 Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi		
Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial
	11	Stabilitas Ekonomi Makro
	12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
	14	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi		
Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		
Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan		
Misi 8 Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan		

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan 2023, diolah

Langkah reformasi tidak akan cukup untuk pendekatan pembangunan Indonesia, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi yang menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Tiga fokus utama transformasi ini meliputi “Transformasi Sosial”, “Transformasi Ekonomi”, dan “Transformasi Tata Kelola”. Ketiga transformasi ini dapat berjalan dengan baik dengan ditunjang oleh landasan stabilitas nasional yang kuat, yang meliputi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”. Selain itu, landasan

transformasi “Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi” juga diperlukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan ke depan. Transformasi dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan diterjemahkan ke dalam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang didukung penuh oleh pembangunan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kaidah pelaksanaan untuk kesinambungan pembangunan.

4.2.3. Isu Strategis Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan pada permasalahan, lingkungan strategis (global, nasional, maupun daerah), dan potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah yang relevan dan menjadi tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan. Isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (green investment), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (green jobs) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah.

2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan up-skilling SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan

masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana dan sarana juga diperuntukkan bagi masyarakat (termasuk untuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus) untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan prasarana dan sarana tersebut tetap berprinsip pada infrastruktur yang lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan

4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini tidak terlepas dari kondisi daya dukung dan daya tampung yang saat ini mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana.

5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dan kecukupan ekonomi masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, jaminan perlindungan sosial, dan mencukupi kebutuhan pangan secara mandiri.

6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri Masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah ketahanan budaya. Membangun ketahanan budaya adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, ketahanan budaya yang kuat akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme ko-kreasi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

4.2.4. Hasil Telaahan RPJPD Kota Pekalongan

Rancangan teknokratik RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Visi RPJPD merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

4.2.4.1 Visi RPJPD

Visi mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan

Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Perumusan Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 diawali dengan penjaringan harapan masyarakat Kota Pekalongan dengan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar IV.2 berikut.

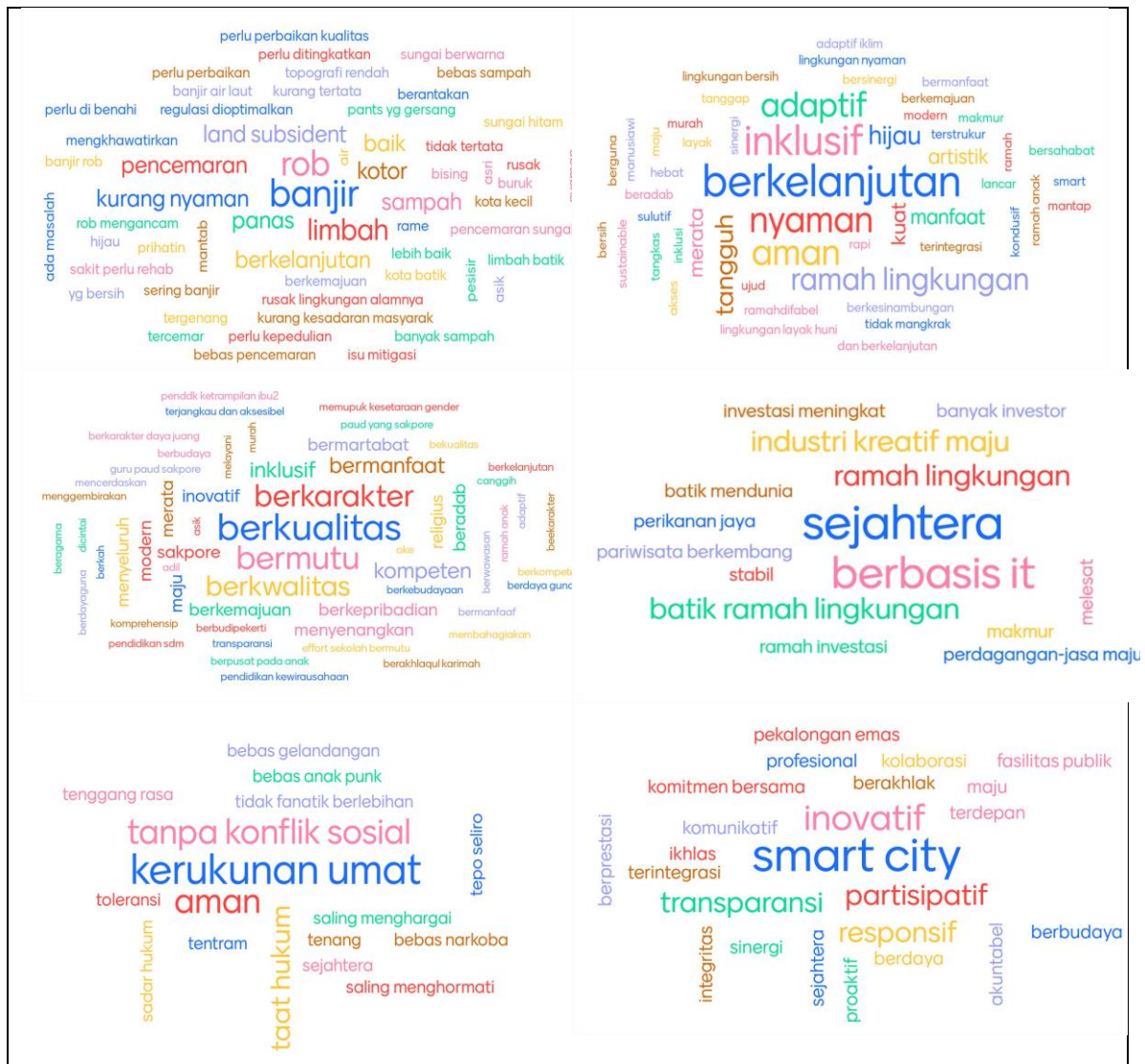


Gambar IV.2 Hasil Penjaringan Harapan Masyarakat

Sumber : Hasil penjaringan masyarakat, diolah, 2023

Dari hasil penjaringan masyarakat tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah; Sejahtera; Bebas Banjir-Rob; Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet; Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik, Kualitas Hidup yang Baik; Kesempatan Kerja Dan Berusaha Yang Inklusif; Tata Kelola Pemerintahan yang Baik; Ruang Terbuka Hijau yang inklusif; Kualitas SDM berdaya saing; serta Kota yang Kreatif Dan Inovatif.

Selain penjaringan harapan masyarakat, juga dilakukan FGD Tematik. Hasil FGD tematik menghasilkan harapan masyarakat Kota Pekalongan sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar IV.3 berikut.



Gambar IV.3 Hasil FGD Tematik

Sumber : Hasil FGD Tematik, diolah, 2023

Dari hasil FGD Tematik tersebut, beberapa kata kunci yang mencerminkan keinginan masyarakat Kota Pekalongan pada 20 (dua puluh) tahun mendatang adalah; Bebas Banjir-Rob; Penanganan Limbah; Nyaman; Berkelanjutan; Berkualitas; Berkarakter; Religius; Sejahtera; Ekonomi Berbasis Teknologi Informasi; Industri Kreatif maju; Partisipatif; *Smart City*; Inovatif; Aman; Kerukunan Umat; serta Tanpa Konflik Sosial.

Dari hasil penjaringan harapan masyarakat dan FGD tematik dapat dirumuskan Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel IV.4 berikut.

Tabel IV-4 Perumusan Visi

NO	HARAPAN MASYARAKAT	POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
1.	Sejahtera	Makmur	“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman. berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, Kreatif yang Berkelanjutan
2.	Transparansi	berIntegritas	
3.	Responsif		
4.	Profesional		
5.	Integritas		
6.	Sampah dan Limbah Terkelola dengan Baik	Nyaman	
7.	Nyaman		
8.	Terbangunnya Jalan Lingkar dan Bebas Macet		
9.	Aman	Aman	
10.	Kerukunan Umat		
11.	Tanpa Konflik Sosial		
12.	Berkarakter	berBudaya	
13.	Religius	Agamis	
14.	Kualitas Hidup yang Baik	Transformatif	
15.	Berkualitas		
16.	Kesempatan Kerja dan Berusaha yang Inklusif		
17.	Smart City	Inovatif	
18.	Kota yang Inovatif		
19.	Ekonomi Berbasis IT	Kreatif	
20.	Kota yang Kreatif		
21.	Industri Kreatif Maju		
22.	Bebas Banjir-Rob	Berkelanjutan	
23.	Ruang Terbuka Hijau yang inklusif		
24.	Berkelanjutan		

Sumber : Bappeda, diolah, 2023

4.2.4.2 Pokok Visi

Dari hasil perumusan Visi tersebut, maka Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2024 adalah:

“PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN”



Gambar IV.4 Visi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045
Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Selanjutnya dapat dijelaskan pokok Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

1. Makmur

Makmur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), berarti serba kecukupan, tidak kekurangan. Makmur bisa juga diartikan sebagai keadaan yang mencukupi kebutuhan dasar dan dengan keadaan itu kita merasa puas. Sedangkan definisi kemakmuran dari Adam Smith, kemakmuran sebuah negara tidak hanya diukur dari kekayaan materialnya saja tetapi juga dari distribusi kekayaan tersebut yang memungkinkan warganya untuk menjalani kehidupan yang produktif dan memuaskan. Sementara itu, Amartya Sen mengatakan kemakmuran berkaitan erat dengan "kemampuan" (*capabilities*) individu untuk mencapai kehidupan yang mereka nilai. Ini mencakup kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Sedangkan Joseph Stiglitz, mendefinisikan kemakmuran tidak hanya dalam hal pertumbuhan ekonomi tetapi juga kesejahteraan sosial yang luas, yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan. Bagi Stiglitz, kemakmuran yang sebenarnya juga melibatkan keadilan sosial dan distribusi yang adil dari sumber daya dan peluang.

Merujuk pada definisi kemakmuran para ahli di atas, Kota Pekalongan digambarkan akan dapat mencapai kemakmuran dengan diindikasikan berupa tingginya PDRB per Kapita, rendahnya kesenjangan pendapatan (Gini Ratio) yang kemudian berdampak pada rendahnya kemiskinan.

2. Ber-Integritas

Integritas adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara).

Pada tahun 2045 diharapkan kondisi para penyelenggara birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik akan memiliki nilai-nilai kejujuran, patuh terhadap ketentuan

peraturan perundang-undangan, mampu bekerja sama, dan memiliki jiwa pengabdian yang tinggi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

3. Nyaman

"Nyaman" mengacu pada penciptaan lingkungan perkotaan yang mengedepankan kenyamanan fisik dan psikologis bagi penduduknya. Prof. Dr. Ir. Bakti Setiawan, M.A, menyampaikan bahwa kenyamanan kota tidak hanya terkait dengan infrastruktur fisik yang memadai tetapi juga mencakup aspek keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup warganya. Beliau menekankan pentingnya perencanaan kota yang mengintegrasikan ruang hijau, aksesibilitas, dan keamanan untuk menciptakan kenyamanan bagi semua warga kota.

Prof. Dr. Ir. Danisworo Mukti mendefinisikan kenyamanan kota sebagai harmoni antara lingkungan binaan (*built environment*) dan lingkungan alami, yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi warganya. Menurutnya, kenyamanan urban tidak hanya mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, gedung, dan fasilitas umum yang baik, tetapi juga aspek-aspek seperti kebersihan, keamanan, serta ketersediaan ruang terbuka hijau yang memadai. Prof. Danisworo juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dan energi yang berkelanjutan dalam menciptakan kota yang nyaman dan ramah lingkungan. Prof. Danisworo Mukti menambahkan perspektif penting tentang bagaimana perencanaan kota harus mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menciptakan kondisi yang optimal bagi kenyamanan dan keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan kota di Indonesia tidak hanya diukur dari kecanggihan infrastruktur, tetapi juga dari kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan penggunaan sumber dayanya.

Sementara itu menurut Undang-undang no. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Merujuk pada berbagai pengertian dan definisi di atas, makna nyaman untuk Kota Pekalongan tahun 2045 digambarkan Kota Pekalongan mampu mewujudkan suatu kondisi kota yang mampu memenuhi ketercukupan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta memiliki permukiman dimana rumah tangga yang ada di dalamnya memiliki akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan.

4. Aman

Aman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai 1) bebas dari bahaya; 2) bebas dari gangguan (pencuri, hama, dan sebagainya); 3) terlindung atau tersembunyi; 4) pasti; tidak meragukan; tidak mengandung risiko; tenteram; tidak merasa takut atau khawatir. Menurut Oscar Newman, dalam karyanya tentang "*Defensible Space*", menjelaskan bahwa keamanan dapat ditingkatkan melalui desain urban yang memungkinkan penghuni untuk secara alami melindungi dan mengawasi lingkungan mereka. Desain yang efektif melibatkan pengaturan bangunan dan tata letak yang mendukung pengawasan alami dan memisahkan dengan jelas ruang publik dari ruang privat. Sementara itu, Jeffrey Ian Ross menggarisbawahi bahwa keamanan adalah kondisi di mana individu merasa terlindungi dari rasa takut dan potensi kerugian. Ross menekankan pentingnya keterlibatan komunitas, kebijakan pencegahan yang proaktif, dan penggunaan teknologi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Kedua pandangan ini memberikan insight penting dalam merancang strategi keamanan urban yang holistik, menggabungkan desain fisik dengan pendekatan sosial dan teknologi.

Maslow (2010) mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror dari luar dan dalam dirinya terkait dengan keamanan. Rasa aman merupakan sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungan. Kebutuhan rasa

aman tidak sebatas pada keamanan fisik, melainkan juga keamanan yang menyangkut psikologis yang di dalamnya berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas sistem yang menghindarkan manusia dari rasa cemas, khawatir dan berbagai hal lainnya. Selain itu, Maslow (2010) berpendapat bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman (UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang). Sejalan dengan definisi ini serta pengertian dari para ahli di atas, pada tahun 2045 Kota Pekalongan diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang terbebas dari peristiwa kriminalitas dan juga konflik SARA.

5. Ber-Budaya

Budaya adalah konsep yang kompleks dan dinamis, yang telah dijelaskan oleh berbagai ahli dari berbagai sudut pandang. Menurut Edward B. Tylor, yang dianggap sebagai bapak antropologi Inggris, memberikan salah satu definisi budaya yang paling awal dalam bukunya yang berjudul "*Primitive Culture*". Menurut Tylor, budaya meliputi "semua pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat." Definisi ini menekankan bahwa budaya bukan hanya sekumpulan objek atau praktik, tetapi juga mencakup pengetahuan dan nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Pendapat lain, Clifford Geertz, antropolog dari Amerika, memberikan perspektif yang lebih fokus pada simbol dan makna dalam bukunya "*The Interpretation of Cultures*". Geertz mendefinisikan budaya sebagai "sistem makna yang diwariskan yang tertanam dalam simbol, yang dijalankan oleh manusia untuk memberi bentuk dan arah pada perilaku mereka." Pendekatan Geertz menyoroti cara individu dalam masyarakat memahami dan menafsirkan dunia mereka, menjadikan budaya sebagai jaringan makna yang kaya dan kompleks.

Sementara itu Prof. Dr. Koentjaraningrat, salah satu antropolog terkemuka Indonesia mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik bersama melalui proses belajar. Pandangan ini menekankan bahwa budaya bukan hanya merupakan sekumpulan artefak atau objek material, tetapi juga meliputi nilai, norma, dan pola perilaku yang dipelajari dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Melalui pandangan-pandangan ini, kita bisa melihat bahwa budaya adalah sesuatu yang jauh lebih luas dari sekedar gaya hidup atau adat-istiadat; ia adalah fondasi yang membentuk cara kita berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Definisi-definisi ini membantu kita menghargai keragaman budaya sebagai bagian integral dari pengalaman manusia. Untuk Kota Pekalongan gambaran kondisi budaya direpresentasikan dengan kondisi masyarakat yang mampu melestarikan budaya baik benda maupun tak benda secara turun temurun dan berkelanjutan.

6. Agamis

Emile Durkheim, seorang sosiolog terkemuka, memandang agama sebagai alat perekat sosial yang menguatkan ikatan dalam komunitas melalui sistem kepercayaan dan ritus bersama, menekankan bahwa menjadi agamis berarti lebih dari sekedar mengikuti ajaran; itu juga tentang berpartisipasi dalam praktik keagamaan yang mendukung kesatuan dan identitas kolektif suatu masyarakat. Sementara itu, Gordon Allport, seorang psikolog, membedakan antara motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam praktik keagamaan dan menunjukkan bahwa individu yang agamis secara intrinsik mengintegrasikan nilai-nilai agama sebagai pusat dari eksistensi mereka, menggambarkan keterikatan yang mendalam dan pribadi terhadap nilai-nilai ini. Kedua

pandangan ini bersama-sama menyoroti bahwa agamis tidak hanya manifestasi eksternal tetapi juga internalisasi nilai agama yang mempengaruhi dan membentuk pandangan dunia serta perilaku seseorang, menghubungkan tindakan keagamaan dengan kontribusi terhadap solidaritas komunal dan transformasi personal.

Prof. Dr. Azyumardi Azra, CBE - Seorang intelektual Muslim terkemuka dan ahli sejarah Islam dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Prof. Azyumardi, sifat agamis tidak hanya terbatas pada ritual ibadah saja tetapi juga dalam implementasi nilai-nilai etis dan moral agama dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup bagaimana seseorang mengintegrasikan ajaran agamanya dalam interaksi sosial, kebijakan, dan kegiatan ekonomi, menunjukkan koherensi antara keyakinan pribadi dan tindakan.

Franz Magnis-Suseno, seorang Romo Yesuit dan filsuf terkemuka di Indonesia, memiliki pandangan mendalam tentang konsep keagamaan yang berakar pada pengalaman spiritual dan praktik etis dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Magnis-Suseno, seseorang yang agamis bukan hanya secara rutin menjalankan ibadah dan ritus keagamaan, tetapi lebih penting lagi, ia harus mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan tersebut dalam tindakan nyata yang mencerminkan keadilan, kasih, dan kepedulian terhadap sesama.

Gambaran berbagai pandangan para ahli tersebut diharapkan terwujud di Kota Pekalongan pada tahun 2045. Pada akhir periode RPJPD 2025 - 2045 masyarakat Kota Pekalongan akan memiliki ciri-ciri berupa tingginya kegiatan keagamaan yang disertai dengan nilai-nilai kerukunan umat beragama yang tertanam melalui penyelenggaraan kegiatan pendidikan keagamaan baik formal maupun non formal.

7. Transformatif

Transformatif dalam konstruksi visi Kota Pekalongan tahun 2025 - 2045 diarahkan pada makna dan aktivitas ekonomi. Dalam pengertian ini, dalam 20 tahun ke depan Kota Pekalongan akan melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi digital dengan tetap memperhatikan dinamika ekonomi dan potensi unggulan daerah.

Rhenald Kasali, profesor dan pengamat ekonomi digital, menekankan pada transformasi digital yang mengubah cara bisnis dilakukan. Menurutnya, ekonomi digital mencakup segala aktivitas ekonomi yang berbasis teknologi informasi, termasuk cara baru dalam berkomunikasi, bertransaksi, dan mengubah berbagai sektor tradisional. Sementara itu, Onno W. Purbo, pakar teknologi informasi, mendefinisikan ekonomi digital lebih kepada penggunaan internet dan teknologi digital dalam mendukung aktivitas ekonomi. Ia menekankan pentingnya akses internet sebagai dasar dari ekonomi digital, serta peran penting pendidikan dan infrastruktur dalam mendukung perkembangan ekonomi digital. Sedangkan Mari Elka Pangestu, mantan Menteri Perdagangan dan pakar ekonomi, sering membicarakan tentang pentingnya ekonomi digital dalam meningkatkan inklusivitas ekonomi. Definisi yang diusungnya menekankan pada integrasi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat, yang tidak hanya menciptakan efisiensi tetapi juga memperluas akses kepada peluang ekonomi. Kemudian Ilham Habibie, pakar teknologi dan ekonomi, mendefinisikan ekonomi digital melalui lensa inovasi dan teknologi. Ia berbicara tentang bagaimana teknologi seperti big data, *internet of things* (IoT), dan *artificial intelligence* (AI) dapat diintegrasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan.

Dengan melihat perspektif ke depan dimana potensi terbesar pengembangan Kota Pekalongan sebagai kota perdagangan dan jasa, maka dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia, kelembagaan dan sistem (SPMLS) yang berbasis teknologi informasi menjadi faktor strategis untuk diwujudkan.

8. Inovatif

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Menurut Eko Prasjo, akademisi dan mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, menekankan pentingnya inovasi dalam pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif. Inovatif dalam tata kelola pemerintahan melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses informasi dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sementara menurut Agus Dwiyanto, ahli administrasi negara dari Universitas Gadjah Mada, berpendapat bahwa sifat inovatif dalam tata kelola pemerintahan harus melibatkan perubahan sistematis dalam tata kelola internal dan cara interaksi dengan masyarakat. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi digital, tetapi juga mencakup perubahan dalam regulasi, kebijakan, dan praktik manajemen sumber daya manusia.

Dari sudut pandang ini, inovatif dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia melibatkan serangkaian transformasi dalam cara pemerintah bekerja dan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan. Inisiatif inovatif diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan birokrasi, mempercepat proses, meningkatkan kualitas layanan, serta membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Implementasi teknologi digital, revisi kebijakan yang mendukung, dan praktik manajemen yang progresif adalah beberapa cara penting untuk mencapai tata kelola yang inovatif.

9. Kreatif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif mengandung makna memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk menciptakan; bersifat (mengandung) daya cipta: pekerjaan yang menghendaki kecerdasan dan imajinasi;

Sementara itu menurut Aviliani - ekonom senior dan anggota dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menyoroti bahwa kreativitas adalah motor penggerak ekonomi kreatif, yang meliputi industri seperti desain, arsitektur, mode, dan multimedia. Menurut Aviliani, kreativitas tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Sementara itu menurut Mari Elka Pangestu - Mantan Menteri Perdagangan Indonesia berpendapat bahwa sektor ekonomi kreatif dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Indonesia. Kreativitas, menurut Mari, sangat penting dalam menstimulasi inovasi dan kompetitivitas yang pada gilirannya akan memperkuat ekonomi Indonesia dalam menghadapi persaingan global. Menurut Bambang Brodjonegoro - ekonom dan mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengemukakan bahwa kreativitas adalah kunci untuk transformasi ekonomi Indonesia dari yang berbasis sumber daya alam menjadi berbasis pengetahuan dan inovasi. Bambang menekankan bahwa pemerintah harus mendukung pengembangan kreativitas melalui kebijakan yang mendukung riset dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan yang memadai.

Dari uraian di atas kreativitas dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Para ahlinenekankan pada

pengembangan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas sebagai cara untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi kota.

10. Berkelanjutan

Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, pengertian “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Menurut Emil Salim – ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, berkelanjutan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sementara menurut Arief Anshory Yusuf – profesor ekonomi dari Universitas Padjadjaran, berkelanjutan dengan fokus pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara bijaksana untuk mencegah kerusakan ekologi, mendukung stabilitas ekonomi, dan memastikan kesejahteraan sosial yang merata di antara masyarakat. Dalam konteks riset dan teknologi, menurut Satryo Soemantri Brodjonegoro, Mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, menyoroti pentingnya inovasi dan teknologi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberlanjutan adalah tentang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menemukan solusi yang efisien dan ramah lingkungan terhadap berbagai tantangan pembangunan.

Dari para ahli menunjukkan bahwa berkelanjutan adalah konsep multidimensi yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan antara ketiga pilar tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dapat terus berlangsung tanpa merugikan kebutuhan dan kesejahteraan masa depan.

Visi Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan) dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, 3 (tiga) sasaran utama visi, 10 (sepuluh) sasaran pokok dan arah (tujuan) pembangunan dan diukur dengan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan (IUP) dengan demikian, angka 5 (lima) Misi mencerminkan Pancasila dan 3/10/45 (3 Oktober 1945) mencerminkan tanggal perjuangan para Pahlawan di Kota Pekalongan merebut kekuasaan dari tangan Jepang pada 3 Oktober 1945.



Gambar IV-5
Kerangka Pikir RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

4.2.4.3 Sasaran Utama Visi

Pencapaian Visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 “PEKALONGAN Kota MINA BATIK yang BERKELANJUTAN” (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif) tercermin dalam sasaran visi sebagai berikut:

1. Sasaran pertama adalah terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan sasaran tersebut tercermin dengan meningkatnya PDRB Perkapita yang semakin tinggi, berkurangnya ketimpangan yang ditunjukkan dari rasio Indeks Gini yang semakin turun, menurunnya angka kemiskinan dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.
2. Sasaran kedua adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas, diukur dengan indikator Indeks SPBE dan Indeks Pelayanan Publik.
3. Sasaran ketiga adalah terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas yang diukur dengan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).



Gambar IV.6 Sasaran Utama Visi Pembangunan
Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

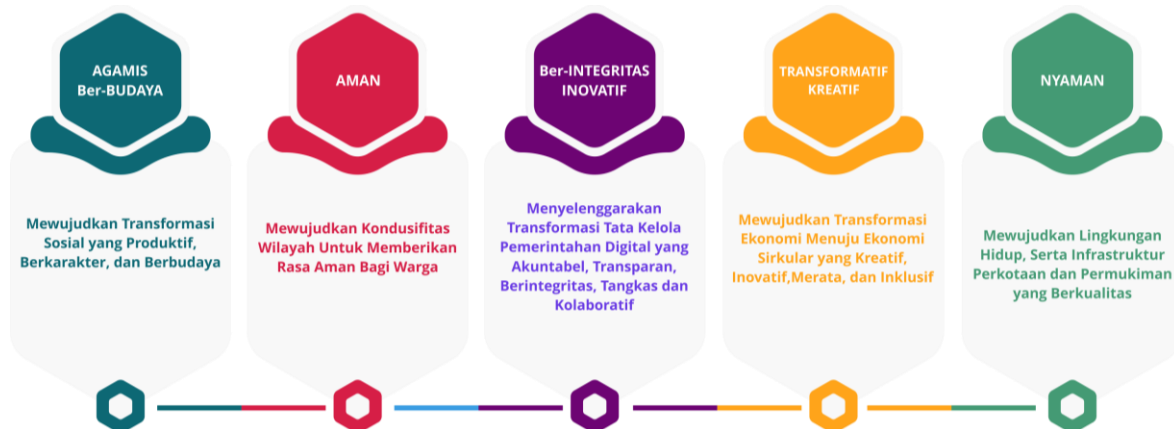
Tabel IV-5
Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Tahun 2029

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target 2029
Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan (Makmur, berIntegritas, Nyaman, Aman, berBudaya, Agamis, Transformatif, Inovatif, dan Kreatif yang Berkelanjutan)	Terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp Juta	46,43 - 46,75	83,71 - 92,33
		Indeks Gini	Angka	0,321 - 0,310	0,310 - 0,270
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,39	79,46
		Tingkat Kemiskinan	Angka	6,27-6,70	5,02 - 6,27
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dan berintegritas	Indeks SPBE	Angka	3,45	3,78
		Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,46	4,00
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	64,14	64,24

Sumber : diolah oleh Bappeda, 2024

4.2.4.4 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pokok visi RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, dilakukan perumusan Misi sebagaimana ditunjukkan Gambar IV.4 berikut.



Gambar IV.7 Misi Pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045

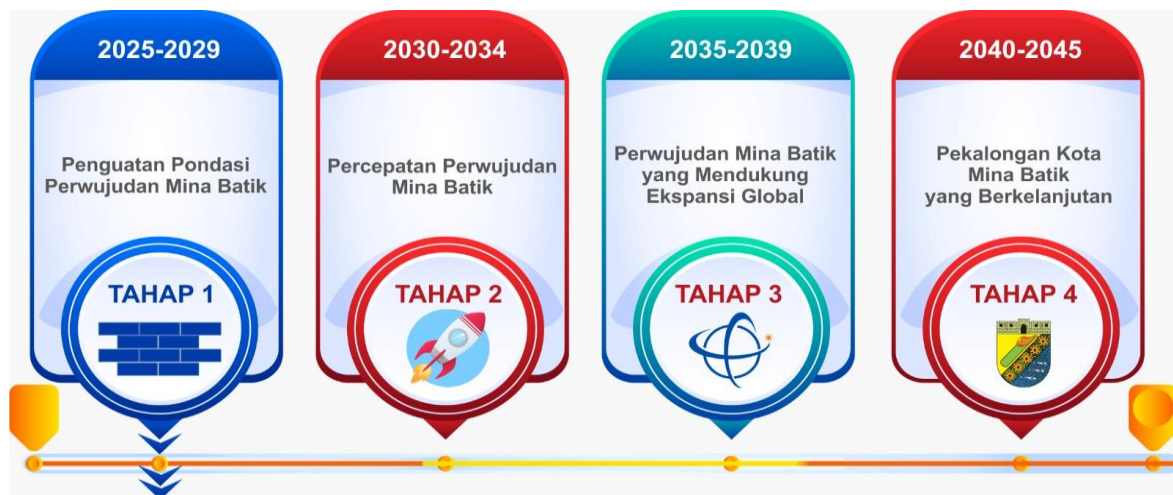
Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Dari hasil perumusan Misi RPJPD, serta dengan memperhatikan isu strategis Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2045, dapat dijelaskan bahwa upaya mewujudkan “Pekalongan Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan” ditempuh dengan 5 (lima) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat, yaitu:

- 1 Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya
- 2 Mewujudkan Kondusifitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga
- 3 Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif
- 4 Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular yang Kreatif, Inovatif, Merata dan Inklusif
- 5 Mewujudkan lingkungan hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas.

4.2.4.5 Arah Kebijakan Periode Pertama (2025-2029)

Perwujudan Pekalongan Kota MINA BATIK yang Berkelanjutan pada Tahun 2045 sebagaimana dalam Rancangan Akhir RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2025-2045 terbagi ke dalam 4 (empat) tema besar yaitu Periode I : Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik; Periode II : Percepatan Perwujudan Mina Batik; Periode III : Perwujudan Mina Batik yang mendukung ekspansi global dan Periode IV : Pekalongan Kota Mina Batik yang berkelanjutan sebagaimana gambar V-5. Periode lima tahun pertama (Tahun 2025-2029) dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”.



Gambar IV-8
Tahapan Pembangunan RPJPD Kota Pekalongan 2025-2045

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Pekalongan diarahkan pada kebijakan “Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik”. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan fondasi transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang didukung dengan peningkatan lingkungan hidup dan infrastruktur yang berkualitas. Penguatan tersebut disertai dengan penguatan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya. Kebijakan tersebut dapat dicapai dengan dukungan penguatan landasan transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif serta penguatan kondusivitas wilayah yang memberikan rasa aman bagi warga.

Pada periode pertama, dalam rangka mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya diarahkan pada peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal, pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua serta memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.

Perwujudan kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga diarahkan pada Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras yang memadai.

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif diarahkan pada Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan fokus peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan sampai level A.

Transformasi ekonomi menuju ekonomi sirkular yang kreatif, inovatif dan merata diarahkan pada penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.

Perwujudan lingkungan hidup, infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas diarahkan pada penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur

perkotaan dan permukiman yang nyaman dan berkualitas, dengan fokus pada kelompok air, manajemen limbah serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.2.4.6 Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20. Sasaran pokok pembangunan disusun dan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan secara langsung terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045. Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan provinsi dan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2025-2045 ditetapkan 10 (sepuluh) sasaran pokok dengan 10 arah pembangunan daerah (10 Mina Batik/10MB) sebagai berikut.

Tabel IV-6
Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2045

No	Misi	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan
1	Mewujudkan Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan 3. Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya 4. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	MB01. Kesehatan untuk semua MB02. Pendidikan berkualitas secara inklusif MB03. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter MB04. Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif
2	Mewujudkan Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga	5. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah	MB05. Ketentraman dan ketertiban umum
3	Menyelenggarakan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi	MB06. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif
4	Mewujudkan Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif	7. Meningkatnya Perekonomian Kota Pekalongan 8. Terwujudnya stabilitas ekonomi	MB07. Iptek, Inovasi dan produktivitas ekonomi MB08. Stabilitas ekonomi makro
5	Mewujudkan Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas	9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur 10. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	MB09. Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas MB10. Lingkungan hidup berkualitas

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Penjelasan masing-masing sasaran pokok, arah pembangunan dan indikator utama pembangunan untuk mewujudkan Visi Kota Pekalongan menjadi Kota Mina Batik Yang Berkelanjutan pada Tahun 2045 tersaji sebagai berikut.

1. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB01). Kesehatan untuk semua diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-7
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
1. Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	74,86	75,73
2. Kesehatan Ibu dan Anak:			
a). Angka Kematian Ibu	kasus	6,00	4
b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	persen	14,14	11,98
3. Penanganan Tuberkulosis:			
a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	persen	90,00	92,50
b). Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	persen	90,00	96,25
4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	persen	97,94	98,33
5. Indeks Keluarga Sehat	angka	0,36	0,42
6. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	persen	6,24	5,09
7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	angka	80,09	81,09
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan upaya promotif – preventif disertai dengan pembudayaan perilaku hidup sehat sebagai salah satu wujud penanggulangan penyakit dari sisi hulu;
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular ataupun tidak menular, melalui peningkatan peran serta Masyarakat ataupun melalui pemberian imunisasi dasar lengkap;
- c. Peningkatan ketercukupan gizi melalui pemberian makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman;
- d. Peningkatan dan penguatan akses layanan Kesehatan untuk semua (Universal Health Coverage atau UHC);
- e. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas didukung dengan ketersediaan sarana prasarana Kesehatan yang memadahi serta tenaga Kesehatan yang profesional;
- f. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi;
- g. Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi di bidang Kesehatan;
- h. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

2. Peningkatan akses dan mutu pendidikan

Peningkatan akses dan mutu pendidikan Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB02) Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-8
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
8. Hasil Pembelajaran			
a). Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):			
i). Literasi Membaca SD/Sederajat	persen	61,52	63,36
ii). Literasi Membaca SMP/ Sederajat	persen	61,80	65,32
iii). Numerasi SD/Sederajat	persen	47,68	50,44
iv). Numerasi SMP/Sederajat	persen	36,30	39,90
b). Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	9,54	9,8
c). Harapan Lama Sekolah	tahun	13,24	13,06
9. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun	persen	91,27	93,27
10. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	persen	0,44	0,61
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan akses dan mutu pendidikan Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat yang disertai dengan peningkatan akses layanan Pendidikan sampai dengan Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah;
- b. Peningkatan akses layanan Pendidikan bagi semua secara adil dan merata dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan aspek difabilitas;
- c. Percepatan wajib belajar 13 tahun yang didukung dengan peningkatan akses layanan Pendidikan anak usia dini serta Pendidikan non formal yang sejalan dengan penguatan akses Pendidikan dasar;
- d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan arah penyelenggaraan Pendidikan nasional;
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan sebagai pendukung operasionalisasi kurikulum pendidikan;
- f. Penguatan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai bagian dalam penyiapan generasi yang adaptif, inovatif, berakhlak, religius, dan berintegritas;
- g. Penguatan peran Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik pada sisi input, proses, maupun output pendidikan.

3. Peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya

Peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB03) Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-9
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Pendidikan Karakter dan
Pemajuan Budaya Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
11. Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan	persen	6,63	6,83
12. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	persen	18,05	21,86
13. Jumlah pengunjung tempat bersejarah	orang	53.864	65.864
14. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir	persen	20,63	24,60
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa - Pekalongan mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil;
- b. Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa - Pekalongan pada anak-anak sekolah;
- c. Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Kota Pekalongan melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Kota Pekalongan dalam kehidupan sehari-hari;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
- e. Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat;
- f. Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Kota Pekalongan yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kota Pekalongan, serta;
- g. Pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB04) Kesejahteraan masyarakat dan perlindungan sosial yang adaptif, diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-10
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
15. Tingkat Kemiskinan	persen	6,27 - 6,70	5,02 – 6,27
16. Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,05 - 4,47	4,90 – 4,50
17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	58,69	62,7

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
18. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	persen	39,9	43,2
19. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	angka	0,20 - 0,18	0,18 – 0,17
20. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Angka	64,81 – 65,81	64,81 – 66,81
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien;
- Penyiapan keterampilan (*soft skill/hard skill*) agar tenaga kerja di Kota Pekalongan semakin memiliki daya saing;
- Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
- Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
- Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan;
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal;
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan;
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia;
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

5. Meningkatkan Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah untuk memberikan rasa aman bagi warga kota Pekalongan, difokuskan pada sasaran peningkatan kondusivitas wilayah dengan arah pembangunan (MB05) ketentraman dan ketertiban umum. Sasaran ini diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-11
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
21. Jumlah Kejadian Konflik SARA	kali	0	0
22. Indeks Risiko Bencana (IRB)	angka	133,30 - 131,95	125,25 – 121,65
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan kondusivitas wilayah Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas,
- b. Penguatan toleransi intern dan antar umat beragama,
- c. Penguatan peran masyarakat, kerjasama, saling pengertian, saling menghargai, kritis terhadap informasi yang berkembang di masyarakat dan menghormati perbedaan.
- d. Penegakan hukum yang berkeadilan,
- e. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta
- f. Penguatan integritas partai politik.

6. Meningkatnya Kualitas Birokrasi

Transformasi tata kelola pemerintahan digital yang akuntabel, transparan, berintegritas, tangkas dan kolaboratif difokuskan pada sasaran peningkatan kualitas birokrasi dengan arah pembangunan (MB06) regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif. Sasaran ini diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-12
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Birokrasi
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
23. Indeks Reformasi Birokrasi	angka	72,86	74,69
24. Indeks Reformasi Hukum	angka	38,30	60,00
25. Indeks Pelayanan Publik	angka	4,46	4,00
26. Indeks Integritas Nasional	angka	82,42	84,42
27. Indeks Inovasi Daerah	angka	61,00	65,00
28. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	angka	3,45	3,78

Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas birokrasi Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government),
- b. Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko,
- c. Penguatan kelembagaan yang efektif,
- d. Digitalisasi tata kelola pemerintahan,
- e. akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien,
- f. Penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum,
- g. Penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi,
- h. Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta
- i. Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

7. Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan

Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB07) Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-9
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Perekonomian
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
29. Rasio PDRB Industri Pengolahan	persen	21,25	22,11
30. Pengembangan Pariwisata:			
a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	persen	6,04	6,94
b). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	orang	300	330
31. Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD			
a). Rasio Kewirausahaan Daerah	persen	7,20	8,44
b). Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	persen	34,11	35,11
c). Return on Aset (ROA) BUMD	persen	1,89	2,09
d). Disparitas Harga	persen	± 10	± 10
32. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	persen	38,33	36,01
33. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota	Rp juta	46,43 – 46,75	83,71 - 92,33
34. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	persen	22,21 – 22,41	22,41 - 24,21
35. Inovasi:			
a). Kapabilitas Inovasi	angka	2,90 – 3,00	3,00 - 3,25
b). Indeks Daya Saing Daerah	angka	3,60 – 3,70	3,70 - 3,80
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan Peningkatan Perekonomian Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

Sektor Perikanan

- Pembinaan dan penguatan masyarakat nelayan tangkap dan budidaya;
- Penguatan manajemen dan pengawasan sumber daya perikanan;
- Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan pelabuhan perikanan *onshore*, implementasi teknologi dan modernisasi dalam pembangunan sektor perikanan berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir;
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas perikanan budidaya yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar regional/nasional;
- Perbaikan habitat ekologi pesisir pantai dalam rangka rehabilitasi ekosistem pantai,
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dalam upaya menjaga rantai dingin untuk menjaga kualitas ikan.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

- Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor;
- Optimalisasi penguatan dan peningkatan sektor perdagangan jasa sehingga fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dapat berkembang; dan

- d. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Sektor Industri pengolahan

- a. Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri;
- b. Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan;
- c. Penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, riset dan inovasi, digitalisasi industri pengolahan, serta ramah lingkungan (*green investment*);
- d. Penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri;
- e. Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan.

Sektor UMKM dan Koperasi

- a. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar regional, nasional maupun global,
- b. Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi,
- c. Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha,
- d. Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau,
- e. Pengembangan wirausaha baru,
- f. Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil,
- g. Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam,
- h. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah,
- i. Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta
- j. Peningkatan produktivitas UMKM.

Sektor Pariwisata

- a. Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
- b. Penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
- c. Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata;
- d. Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
- e. Peningkatan infrastruktur konektivitas dan integrasi antardestinas wisata;
- f. Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, termasuk pelaku UMKM pariwisata;
- g. Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta;
- h. *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.

Sektor Ekonomi Kreatif

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;
- b. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya;
- c. Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif;
- d. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan inklusif untuk mendukung pengembangan kreativitas;

- e. Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif;
- f. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- g. Pengembangan dan penguatan jejaring kota kreatif;
- h. Pengembangan dan penguatan kampung kreatif terutama pada produk kreatif unggulan;
- i. Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung industri pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif, serta;
- j. Pengembangan riset ekonomi kreatif.

Sektor Produktivitas Tenaga Kerja

- a. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri;
- b. Penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi;
- c. Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja;
- d. Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan;
- e. Penuntasan pekerja anak, serta;
- f. Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

Sektor Penguatan Riset dan Inovasi

- a. Penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah;
- b. Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor;
- c. Penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi;
- d. Penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan;
- e. Penguatan kerja sama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta;
- f. Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

8. Terwujudnya Stabilitas Ekonomi

Terwujudnya stabilitas ekonomi Kota Pekalongan dengan arah pembangunan (MB08) stabilitas ekonomi makro diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-13
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kondusivitas Wilayah
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
36. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	persen	1,06	1,07
37. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan:			
a). Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB	persen	29,54 – 29,75	17,95 – 19,80
c). Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	persen	26,66 - 26,84	16,20 - 17,87
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan terwujudnya stabilitas ekonomi Kota Pekalongan dapat dilakukan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah;
- b. Penguatan pengendalian inflasi daerah;
- c. Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, perdagangan dan industri kreatif;
- d. Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang, serta mendorong investasi swasta;
- e. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal untuk mengelola kebijakan ekonomi secara efektif, termasuk pengelolaan anggaran, pemantauan pasar, dan penerapan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- f. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk keterampilan dalam industri tekstil dan batik serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkembang;
- g. Mendorong kewirausahaan lokal dengan menyediakan pendanaan, pelatihan, dan akses ke pasar bagi pengusaha kecil dan menengah. Ini dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi;
- h. Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak ekosistem lokal;

9. Peningkatan Kualitas Infrastruktur

Peningkatan kualitas infrastruktur dengan arah pembangunan (MB09) Infrastruktur perkotaan dan permukiman yang berkualitas yang diukur indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-14
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
38. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	persen	100	100
39. Rumah tangga:			
a). Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	persen	81,92 (2023)	86,43
b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	persen	11,75	12,00
40. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota	persen	82,16 (2023)	86,62
41. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota	persen	72,95	79,10
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas infrastruktur Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumber daya air, meliputi air permukaan, air tanah bebas, air tanah tertekan, termasuk pengendalian banjir dan rob;
- b. Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa;
- c. Pembangunan jalan lingkar untuk memisahkan lalu lintas lokal dan regional serta mengoptimalkan tata ruang wilayah;
- d. Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemantapan kualitas pelayanan

- transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan;
- Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terutama pengembangan secara vertikal;
 - Pembangunan pusat pertumbuhan baru di Kota Pekalongan, sebagai upaya untuk penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas serta mampu menggerakkan perekonomian;
 - Penguatan implementasi penataan ruang.

10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan arah pembangunan (MB10) lingkungan hidup berkualitas, diukur dengan indikator pembangunan sebagai berikut:

Tabel IV-15
Indikator Utama Pembangunan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
Kota Pekalongan Tahun 2025-2029

Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline	Target 2029
42. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	36,16	40,00
43. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	indeks	64,14	64,24
44. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	9,50	15,00
45. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Ton CO ₂ eq	950.947,74	4.239.510,90
Catatan: Baseline dan target masih bersifat indikatif teknokratik			

Sumber : Bappeda, diolah, 2024

Sasaran pembangunan peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan dapat diwujudkan melalui intervensi program sebagai berikut:

- Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pesisir dan laut yang berkelanjutan;
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir yang berbasis masyarakat;
- Penataan dan peningkatan ruang terbuka hijau seperti halnya alun-alun, taman kota, ataupun ruang terbuka hijau lainnya serta vegetasi tutupan lahan;
- Penguatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat.

4.2.5. Isu-Isu Strategis Kota Pekalongan

Berangkat dari berbagai permasalahan daerah, isu global, isu nasional, isu strategis Provinsi Jawa Tengah serta isu strategis dokumen perencanaan Kota Pekalongan maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut.

4.2.5.1. Tata Kelola Pemerintahan

Tuntutan tata kelola pemerintahan dalam era global adalah mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan menembus batas. Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam

volume yang lebih besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan, sehingga pemerintah harus mampu memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat internasional agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat meletakkan bangsa Indonesia pada posisi yang serba salah. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa masyarakat ke dalam jurang *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju *e-government*. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. *e-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik.

Isu strategis reformasi birokrasi dan SPBE merupakan upaya kontinyu agar terjadi peningkatan yang optimal terhadap reformasi birokrasi dan SPBE. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Isu strategis reformasi birokrasi dan SPBE ditujukan untuk mengoptimalkan perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Latar belakang penetapan isu strategis ini adalah permasalahan pembangunan yang dihadapi yaitu belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Tata kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Terminologi *good governance* memang belum baku, tetapi sudah banyak definisi yang coba membedah makna dari *good governance*. Namun demikian, tidak dapat disangkal lagi bahwa *good governance* telah dianggap sebagai elemen penting untuk menjamin kesejahteraan nasional (*national prosperity*). Dengan cara meningkatkan akuntabilitas, reliabilitas (kehandalan), dan pengambilan kebijakan, yang diperkirakan di dalam organisasi pemerintah, korporasi (sektor swasta), bahkan dalam organisasi masyarakat sipil. Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Commission on Human Rights*) mengidentifikasi beberapa prinsip yakni transparansi, pertanggungjawaban (*responsibility*), akuntabilitas, partisipasi, dan ketanggapan (*responsiveness*) sebagai prinsip kunci *good governance*.

Dari berbagai definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, indikator penilaian di dalam dokumen ini mengambil prinsip Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip kunci inilah kemudian digunakan sebagai dasar penilaian yang dilihat dari sisi landasan hukum, aktor dan implementasinya. Pemilihan keempat prinsip *good governance* dalam indikator bukan untuk tujuan simplifikasi, melainkan untuk memudahkan identifikasi persoalan melalui pengelompokan indikator-indikator berdasarkan prinsip minimum tercapainya tata kelola yang baik.

Pertama, **Transparansi**, adalah proses keterbukaan untuk menyampaikan aktivitas yang dilakukan sehingga pihak luar (termasuk masyarakat lokal/adat, pelaku usaha, maupun instansi pemerintah lain) dapat mengawasi dan memperhatikan aktivitas tersebut. Memfasilitasi akses informasi merupakan hal yang terpenting untuk menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat. Komponen transparansi mencakup komprehensifnya informasi, ketepatan waktu dalam pelayanan informasi, ketersediaan informasi bagi publik, dan adanya upaya untuk memastikan sampainya informasi kepada kelompok rentan.

Kedua, **Partisipasi (inklusifitas)**, adalah proses pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

Ketiga, **Akuntabilitas**, adalah mekanisme tanggung-gugat antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang dilayani. Adanya mekanisme akuntabilitas memberikan kesempatan kepada stakeholder untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsensus dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Di dalam dokumen indikator tata kelola, akses kepada keadilan (*access to justice*) dikategorikan sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas.

Keempat, **Koordinasi**, adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana pihak-pihak lain (khususnya institusi pemerintah) yang memiliki kepentingan dan memiliki kesamaan tujuan yang tercermin di dalam program kerjanya, umumnya persoalan minimnya koordinasi menjadi faktor utama yang menyebabkan tidak efisiensi dan efektifnya tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan kajian teoritik dan permasalahan pembangunan, isu strategis tata kelola pemerintahan menjadi pilihan tepat karena dengan perwujudan tata pemerintahan yang baik maka akan dapat semakin menjamin terwujudnya visi pembangunan jangka panjang Kota Pekalongan tahun 2045. Urgensi isu strategis reformasi birokrasi dan SPBE, didasarkan atas permasalahan **belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik**.

Masalah pembangunan belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut, jika dirunut maka memiliki akar masalah meliputi: 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital; 2) Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM; 3) Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 4) Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat); dan 5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital, ditandai dengan indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Pekalongan tahun 2022 sebesar 3,02 dan pada tahun 2023 sebesar 3,29. Meskipun capaian indeks tersebut memiliki kategori baik, tetapi belum menunjukkan optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Dengan upaya dan intervensi yang dilakukan, diharapkan indeks SPBE dapat meningkat optimal.
2. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM didasari data realiasi jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM belum optimal, sesuai dengan target (Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM sebanyak 8 OPD pada tahun 2026). Kondisi ini menunjukkan kesiapan yang belum optimal dari OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kota Pekalongan tahun 2019-2023 yang belum optimal. Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 Nilai SAKIP Kota

Pekalongan adalah 72,59, meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2023 menjadi 72,83, dengan predikat BB. Capaian tersebut harus dioptimalkan agar dapat mencapai predikat yang lebih baik, yaitu ditandai dengan semakin meningkatnya akuntabilitas kinerja secara optimal.

4. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat) ditandai dengan capaian nilai keterbukaan informasi publik perangkat daerah Kota Pekalongan yang belum optimal pada tahun 2023. Hanya terdapat 5 OPD informatif, yaitu RSUD Bendan, Inspektorat, Dinparbudpora, DKP dan Setda, 12 OPD menuju informatif dan 13 OPD cukup informatif. Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik. Kesemua hal tersebut harus terus ditingkatkan sehingga dapat semakin memperkecil adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima informasi (masyarakat).
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, merupakan salah satu tantangan pembangunan di Kota Pekalongan, karena seharusnya pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan (*stake holders*). Selama ini, proses pembangunan maupun pemerintahan lainnya, masih didominasi tanggung jawab pemerintah untuk merencanakan, mengimplementasikan maupun mengawasinya, pemangku kepentingan lainnya masih sangat terbatas perannya. Hal ini dikarenakan salah satu pemahaman berkembang di masyarakat bahwa proses pembangunan dan pemerintahannya pada umumnya, merupakan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab masyarakat. Pada gilirannya, pemahaman tersebut berkembang menjadi pandangan bahwa pembangunan sarana dan prasarana publik adalah milik pemerintah, masyarakat tidak ikut merasa memilikinya. Terbatasnya rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap proses pembangunan, pemerintahan dan hasil-hasilnya, berimplikasi terhadap meningkatnya kecepatan penurunan nilai guna (manfaat) hasil-hasil pembangunan, karena masyarakat umumnya tidak ikut memeliharanya. Pemahaman dan pandangan tentang partisipasi masyarakat ini, dilakukan perubahan, agar masyarakat memahami dan merasa berkebutuhan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya.

Tantangan belum optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut cukup besar, tetapi keberhasilan pencapaian terhadap peningkatan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang optimal, merupakan keberhasilan fundamental dalam mewujudkan visi jangka panjang pembangunan Kota Pekalongan tahun 2045. Dalam RPJPN, transformasi tata kelola ini merupakan landasan untuk transformasi Indonesia. Artinya, optimalnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik merupakan salah satu landasan atau prasyarat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dikaitkan dengan isu global, Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

4.2.5.2. Kondusivitas Wilayah

Suasana nyaman dan kondusif menjadi syarat utama dalam kemajuan pembangunan di suatu daerah, karena menjadi syarat untuk investasi swasta masuk dan ikut memajukan perekonomian. Dalam membangun daerah dibutuhkan suasana yang aman nyaman. Konflik sosial dan kejahatan akan menyebabkan investor enggan berinvestasi. Oleh karena itu, kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting pembangunan. Pemerintah tidak akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan tanpa adanya kerjasama yang sinergis antara semua *stakeholder* (pemangku kepentingan).

Pengelolaan potensi konflik sosial dan kejahatan harus terus dilakukan melalui berbagai program dengan melibatkan sinergi stakeholder. Upaya preventif salah satunya dapat dilakukan dengan pendekatan keagamaan dan pengembangan kebiasaan berpikir kritis dalam menyaring informasi. Pendekatan keagamaan sering kali menjadi titik fokus untuk meredakan konflik. Pemimpin agama dan kelompok keagamaan menjadi media pemersatu perbedaan dan mengajak masyarakat untuk hidup harmonis. Agama menjadi landasan moral dan etika yang mengarahkan masyarakat untuk berperilaku baik dan berkontribusi positif dalam pembangunan. Sementara itu, pentingnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat memfilter dan mengevaluasi informasi dari media maupun yang beredar di masyarakat juga merupakan upaya preventif dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.

Penataan pedagang kaki lima yang belum optimal, karena munculnya pasar musiman (pasar tiban) di beberapa tempat membutuhkan kebijakan yang saling menguntungkan, antara pemerintah dan pedagang kaki lima. Penegakan hukum yang bersifat persuasif dalam penataan pedagang kaki lima sangat diperlukan untuk menciptakan ketertiban lalu lintas dan memberikan rasa aman bagi pengguna jalan.

Dikaitkan dengan isu nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dalam Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, khususnya pada arah kebijakan ke-13 yaitu “Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju”, isu kerukunan umat beragama menjadi isu nasional yang harus terus menjadi perhatian.

4.2.5.3. Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing

Melihat berbagai permasalahan dalam perekonomian daerah, isu-isu global, nasional, regional dan telaah dokumen perencanaan Kota Pekalongan, isu yang diangkat adalah Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan. TPB merupakan komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. TPB memiliki tiga prinsip utama yaitu universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satu pun yang tertinggal atau no one left behind. Di dalam SDGs terdapat 17 tujuan dengan 169 target. Masing-masing tujuan memiliki makna dan target yang diharapkan dapat tercapai pada 2030. Tujuan ke-8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya meliputi mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; penciptaan lapangan kerja layak; mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM); mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET, *Not in Education, Employment, or Training*); mempromosikan pariwisata berkelanjutan; memperkuat lembaga keuangan. Isu strategis peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah memiliki kaitan yang sangat erat dengan TPB dan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan ke-8 TPB tersebut.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing juga selaras dengan isu global perkembangan teknologi informasi, Misi ke-2 RPJPN berkaitan dengan Transformasi Ekonomi dengan arah kebijakan IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi, Transformasi Digital, Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital serta Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi. Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan sebagai isu strategis RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Isu strategis perekonomian daerah yang berdaya saing merupakan upaya berkesinambungan dalam mewujudkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah. Isu strategis ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah (*value added*) produk unggulan Kota Pekalongan secara optimal. Latar belakang penetapan isu strategis adalah permasalahan belum optimalnya daya saing dan produktivitas perekonomian daerah khususnya belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam memperkuat nilai tambah sektor industri, perdagangan, pariwisata, kebudayaan dan produk unggulan daerah.

Kota Pekalongan yang terkenal dengan kerajinan batiknya, telah dinobatkan oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai Kota Kreatif Dunia dari total 28 kota kreatif di berbagai penjuru dunia, untuk kategori Kerajinan dan Kesenian Rakyat (*Craft & Folk Arts*) pada tanggal 1 Desember 2014. Kota Pekalongan terletak di pesisir Laut Jawa, juga dikenal sebagai penghasil perikanan, meskipun pada saat ini terus menurun dibandingkan pada tahun 1990-an sebagai akibat pendangkalan di sisi muara serta semakin tingginya intensitas dan frekuensi genangan rob. Kota Pekalongan pun memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar, meskipun hanya memiliki luas wilayah dan sumberdaya alam yang relatif terbatas. Potensi kepariwisataan yang dimiliki terutama adalah yang berbasis budaya. Kota Pekalongan juga merupakan salah satu PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) di Jawa Tengah. PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut cukup besar, apalagi Kota Pekalongan terletak pada median antara Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga menambah potensi dan keunggulan Kota Pekalongan.

Namun demikian, potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan tersebut, belum dapat memacu secara optimal pertumbuhan atau perkembangan perekonomian wilayahnya. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonominya (pertumbuhan PDRB, Produk Domestik Regional Bruto). PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. Oleh karena nilai tambah bruto dari seluruh sektor perekonomian tidak bertambah optimal, sehingga pertumbuhan ekonominya belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dua dekade ini pada kisaran angka 5% per tahun (kecuali pada saat pandemi Covid-19) dan lebih bagus dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, namun belum optimal. Akibat pertumbuhan ekonomi yang belum optimal maka salah satunya berdampak terhadap pertumbuhan PDRB per kapita Kota Pekalongan yang belum optimal juga, sehingga memiliki nilai di bawah Provinsi Jawa Tengah, apalagi nasional. Sebagai gambaran bahwa PDRB per kapita tahun 2022 Kota Pekalongan adalah Rp 40,68 juta, Provinsi Jawa Tengah adalah Rp 42,1 juta, nasional sebesar Rp 71 juta. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 maka salah satu sasarnya adalah pendapatan per kapita nasional adalah setara dengan pendapatan negara maju yaitu PDRB per kapita yaitu minimal Rp 205,48 juta. Sebagai daerah yang memiliki potensi dan peran yang cukup strategis, ke depan khususnya dari sisi PDRB per kapita, Kota Pekalongan seharusnya tidak lagi menjadi beban Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan optimalisasi peningkatan nilai tambah produk unggulan, sehingga dapat meningkatkan PDRB dan perekonomian Kota Pekalongan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “terwujudnya kota kreatif yang didukung perdagangan dan jasa, industri, dan perikanan, yang nyaman, aman, produktif, serta berkelanjutan”. Dalam rangka

pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, kebijakan yang disusun adalah pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong. Kebijakan ini diwujudkan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). mengembangkan kawasan perdagangan di kawasan pusat pelayanan kota dan kawasan sub pusat pelayanan kota; 2). mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja; 3). menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan; 4). meningkatkan integrasi sistem antar moda; dan 5). mengembangkan fasilitas TOD (*Transit Oriented Development*). Pada RTRW Kota Pekalongan telah dialokasikan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta kawasan perdagangan dan jasa pada beberapa koridor jalan utama di Kota Pekalongan seluas 386 hektar. Namun demikian, alokasi lahan tersebut belum dapat optimal mendukung perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan khususnya melalui sektor perdagangan dan jasa.

Apabila diidentifikasi lebih mendalam, maka masalah tersebut memiliki akar masalah sebagai berikut: 1) masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; 2) belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; 3) belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob; 4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata; 5) Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya; 6) belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya); 7) belum optimalnya penataan pasar tradisional.

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan tahun 2013 – 2028 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 18 Tahun 2013, visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Pekalongan Sebagai Destinasi Pariwisata Utama”. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Kota Pekalongan ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengembangkan: 1). destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan lokal, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah; 2). pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; 3). industri pariwisata yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan 4). organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, optimalisasi pelayanan dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata di Kota Pekalongan yang belum optimal menyebabkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan belum optimal. Jumlah dan lama kunjungan yang belum optimal berimplikasi terhadap perkembangan perekonomian atau nilai tambah yang belum optimal juga. Jika dibandingkan tahun 2018 dengan jumlah wisatawan 784.254 orang maka pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata meningkat menjadi 1.038.509 orang. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah kunjungan wisata, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, namun masih belum optimal peningkatannya, dibandingkan potensi dan peran yang dimiliki Kota Pekalongan. Fasilitas akomodasi di Kota Pekalongan cukup tersedia, yaitu selama beberapa tahun terakhir berjumlah 35 hotel. Optimalisasi harus dilakukan, khususnya terhadap kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata. Misalkan, Taman Wisata Laut (TWL) yang menjadi salah satu ikon destinasi wisata baru di Kota Pekalongan, mengalami tantangan pengembangan karena aksesibilitas menuju TWL yang kurang memadai, yaitu seringkali tergenang banjir dan rob sehingga wisatawan mengalami kesulitan akses untuk mencapainya. Beberapa destinasi

wisata lainnya pun juga memiliki sarpras pendukung yang tidak memadai, seperti keterbatasan kualitas dan kuantitas toilet, tempat parkir, kuliner dll.

Pelestarian dan pemanfaatan budaya di Kota Pekalongan pun belum optimal. Jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan selama beberapa tahun ini stagnan, yaitu berjumlah 162 kelompok dan jumlah gedung kesenian 4 buah. Yang terlibat di dalam kelompok kesenian pun adalah individu lama, generasi muda masih sangat terbatas di dalam kelompok kesenian. Gedung kesenian pun berjumlah tetap, sehingga menyebabkan terbatasnya sarana publik untuk latihan maupun pentas kesenian. Oleh karena itu, pelestarian dan pemanfaatan budaya belum optimal. Padahal, pelestarian dan pemanfaatan budaya yang optimal, dapat diparalelkan dengan pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan kepariwisataan.

Akar masalah lain adalah belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya). Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada segala aspek, termasuk perekonomian, khususnya di dalam dunia usaha. Beberapa wirausahawan muda Kota Pekalongan beberapa waktu lalu, ketika pandemi Covid-19, telah sukses mengembangkan usaha batik, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun demikian, cerita sukses tersebut hanya dilakukan sekelompok kecil masyarakat dan belum dilakukan sebagian besar wirausahawan di Kota Pekalongan. Padahal, penguasaan teknologi informasi akan sangat menentukan keberhasilan pengembangan perekonomian, khususnya dalam pengelolaan dunia usaha.

Berdasarkan visi Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan tahun 2020 – 2040 yang disahkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 1 Tahun 2020, visi pembangunan industri Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Industri Kota Pekalongan yang Maju Berbasis Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal”. Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Industri Kota Pekalongan, disusun 6 (enam) misi yaitu: 1). meningkatkan peran industri Kota Pekalongan sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kota Pekalongan; 2). memperkuat dan memperdalam struktur industri Kota Pekalongan; 3). mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis produk unggulan dan kearifan lokal; 4). menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; 5). membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan 6). mengoptimalkan potensi masyarakat melalui pengembangan ekonomi kreatif.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal juga disebabkan oleh masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan. Kota Pekalongan memiliki luas wilayah yang terbatas dan memiliki keterbatasan sumberdaya sehingga akan sangat tergantung kepada daerah atau negara lain terhadap bahan baku untuk proses produksinya. Sebagai contoh adalah industri batik, dimana sebagian besar bahan bakunya berasal dari daerah lain/negara lain. Termasuk juga industri tahu dan tempe maka Kota Pekalongan akan sangat tergantung bahan baku kedelai, dengan daerah lain atau negara lain. Kondisi ini menyebabkan Kota Pekalongan sangat tergantung bahan baku dari luar dan kestabilan harga. Beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi ketersediaan dan kestabilan harga, diantaranya adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketersediaan Bahan Baku Batik. Namun demikian implementasi Perda tersebut belum optimal. Belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan juga menyebabkan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang tidak optimal. Promosi terhadap produk/komoditi unggulan selama ini sudah dilakukan, tetapi harus terus dilakukan dan ditingkatkan, agar masyarakat luas, nasional dan internasional, memahami produk unggulan Kota Pekalongan, yaitu batik.

Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah yang belum optimalnya juga disebabkan belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi. Selama ini, Pemerintah Kota Pekalongan telah mendukung dan menciptakan ekosistem inovasi dan kreativitas yang mampu mendukung daya saing ekonomi. Namun demikian, upaya tersebut belum dapat mendukung terwujudnya optimalisasi peningkatan daya saing. Ke depan, ekosistem inovasi dan kreativitas harus terus didorong dan diberdayakan untuk mewujudkan peningkatan daya saing daerah yang optimal. Peningkatan daya saing ekonomi ke depan dilakukan juga dengan memanfaatkan kebijakan nasional tentang pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Kota Pekalongan yang memiliki keterkaitan erat dengan wilayah Kabupaten Batang dapat memanfaatkan potensi jasa dan penyediaan tenaga kerja. Di samping itu, juga dikembangkan keterkaitan produk-produk di Kota Pekalongan dengan KITB.

Peningkatan daya saing sektor perdagangan dan jasa Kota Pekalongan dilakukan dengan semakin memperkuat fungsi pelayanan regional wilayah Petanglong dan daerah sekitarnya dengan pembangunan kembali pasar Banjarsari. Diharapkan pasar Banjarsari dapat memperkuat perekonomian dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, baik secara *online* maupun *offline*.

Tantangan Kota Pekalongan ke depan adalah peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah agar perekonomian Kota Pekalongan terus bertumbuh dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 13 rantai industri batik yang diidentifikasi. Dari ketiga belas rantai tersebut, ditengarai bahwa nilai tambah industri batik, sebagian besar dinikmati oleh masyarakat di luar wilayah Kota Pekalongan. Pelaku usaha dan tenaga kerja industri batik di wilayah Kota Pekalongan hanya menerima sebagian kecil dari nilai tambah industri batiknya. Upaya untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan nilai tambah industri batik agar sebagian besar dapat diterima oleh masyarakat Kota Pekalongan.

Di sektor perikanan Kota Pekalongan memiliki beberapa potensi antara lain: 1) Fasilitas strategis skala nasional yaitu PPN Pekalongan; 2) Industri pengolahan perikanan (PT. Mayafood Industries, PT. Blue Sea Industries, PT. CNL); 3) Sarana prasarana perikanan tangkap (16 cold storage, 12 galangan dan docking kapal, 2 SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan), 390-an unit kapal di atas 30 GT dengan pemilik berdomisili dan berpangkalan di PPN Pekalongan, 4.700-an orang, industri rumah tangga perbaikan jaring (tukang kiteng)). Kota Pekalongan juga pernah mengalami kejayaan perikanan tangkap pada tahun 1990-an. Saat ini Kota Pekalongan masih berupaya untuk mengusulkan pembangunan pelabuhan perikanan *On Shore* untuk mengembalikan kejayaan perikanan tersebut.

4.2.5.4. Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Isu strategis kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan upaya sistematis yang ditujukan agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan dapat meningkat dengan optimal. Isu strategis ini dilatarbelakangi kondisi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat belum optimal selama ini. Secara angka, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, namun diidentifikasi belum meningkat secara optimal. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

Isu strategis kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat selaras dengan isu global pembangunan berkelanjutan, yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; menjamin kualitas pendidikan yang inklusif

dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender, memberdayakan kaum perempuan dan pemenuhan hak anak.

Kualitas hidup manusia pada umumnya diukur dengan pendekatan 3 (tiga) kriteria: **Pertama**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan sebagai makhluk hidup hayati, **Kedua**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan **Ketiga**, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk memilih. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia itu dianggap berkualitas apabila kebutuhan pangan, sandang dan pangan dapat terpenuhi, kebutuhan kesehatan, pendidikan juga terpenuhi, hingga kebutuhan rekreasi dan aktualisasi juga terpenuhi.

Kualitas hidup adalah persepsi individu tentang posisi mereka dalam kehidupan di konteks budaya dan sistem nilai di mana mereka hidup, dan dalam kaitannya dengan tujuan, harapan, standar mereka dan kekhawatiran. Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan kualitas hidup manusia, salah satunya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentu akan membutuhkan kecukupan pangan, sandang, dan papan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Demikian juga kebutuhan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi dan sebagainya. Dalam konteks ini, tidak akan ada masalah bila dukungan lingkungan dan sumber daya alam memadai. Tetapi apabila jumlah penduduk terus bertambah dan sumber daya alam tidak lagi mampu mendukung kehidupannya, maka akan menjadi masalah yang serius bagi penduduk yang bersangkutan. Karena bisa jadi akan terjadi bencana kelaparan atau kekurangan sandang, papan dan lainnya yang menyebabkan kualitas kehidupan penduduk tersebut terus menurun. Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.

Kondisi tenteram lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah.

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Dalam buku Indonesia *Macroeconomic Outlook* (2009), masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang bisa menikmati kemakmuran utuh, tidak miskin, tidak menderita kelaparan, menikmati pendidikan, mampu mengimplementasikan kesetaraan gender, dan merasakan fasilitas kesehatan. Kehidupan sejahtera ditandai dengan berkurangnya penyakit berbahaya dan menular, masyarakat hidup dalam kawasan lingkungan yang lebih ramah dan hijau. Selain itu, memiliki fasilitas lingkungan dan perumahan yang sehat, serta senantiasa memiliki mitra dalam menjaga keberlanjutan.

Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dicita-citakan setiap negara maupun daerah. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi yang menandakan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah berhasil. Kualitas dan kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan kehidupan keseharian keberhasilan pembangunan, yang sifatnya bukan bangunan megah menjulang tinggi dan kokoh, tetapi terimplementasi dalam keseharian masyarakatnya.

Implementasinya dapat berwujud masyarakat yang aman, nyaman, makmur, berpendidikan dan sehat. Oleh karena itu, Kota Pekalongan merumuskan bahwa peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang optimal menjadi isu strategis pembangunan.

Berdasarkan dokumen *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Pekalongan Tahun 2022 – 2045, visi pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah “terwujudnya masyarakat kota pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan religius”. Selanjutnya visi ini dijabarkan ke dalam beberapa arah kebijakan yaitu: 1). Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter Masyarakat; 2). Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana; 3). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa; 4). Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan; 5). Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional; 6). Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara *valid*.

Sedangkan tujuan pembangunan kependudukan Kota Pekalongan adalah sebagai berikut: 1). tercapainya kualitas penduduk yang tinggi untuk mencapai Kota Pekalongan yang maju, mandiri, adil, sejahtera, berkelanjutan, dan berbudaya; 2. terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (*valid*) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan; 3). terwujudnya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan/pedoman; 4). terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan di bidang administrasi kependudukan; dan 5). terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan.

Isu strategis peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dirumuskan, dikarenakan masalah pembangunan daerah, yaitu belum optimalnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta kesetaraan gender. Jika diidentifikasi, permasalahan tersebut memiliki beberapa akar masalah, yaitu 1) belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan; 2) belum optimal implementasi pendidikan karakter; 3) masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat; 4) masih tingginya prevalensi stunting; 5) belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*); dan 6) belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Pembangunan pendidikan di Kota Pekalongan belum mencapai hasil yang optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan. Akses pendidikan yang belum merata ditandai dengan kesempatan pendidikan belum merata dirasakan seluruh masyarakat Kota Pekalongan, hal ini dikarenakan masing-masing memiliki kesempatan yang berbeda terhadap pendidikan. Kesempatan yang berbeda tersenut diakibatkan pemahaman pentingnya pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Kesempatan pendidikan yang belum merata ini, dapat diukur dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) SMP/MTS/ sederajat Kota Pekalongan yang tertinggal dibandingkan APK Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir. Untuk APK SD/MI/ sederajat relatif sama antara Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagai pembentuk Indeks Pembangunan Manusia, pun belum memiliki capaian yang optimal. Capaian Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan

kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pada akhirnya mencerminkan kondisi kualitas pendidikan yang belum merata dan partisipasi stakeholder pendidikan yang belum optimal. Pada dasarnya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, sekolah maupun masyarakat dan orang tua. Selama ini, berkembang pemahaman bahwa pendidikan hanyalah merupakan tanggung jawab pemerintah dan sekolah semata.

Globalisasi yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi, berimplikasi terhadap penyebaran data dan informasi serba cepat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masyarakat di belahan dunia manapun. Derasnya arus informasi tersebut sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial budaya yang selama ini telah menjadi patron. Perubahan sikap, cara pandang, maupun perilaku yang menuju terhadap hal-hal yang berkonotasi negatif, diakibatkan oleh karakter masyarakat yang belum kuat. Tentunya hal ini, salah satunya disebabkan oleh lemahnya pendidikan karakter. Data sekolah di Kota Pekalongan yang mengimplementasikan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter telah mencapai 100% namun lemahnya pendidikan karakter ini masih menjadi tantangan pembangunan yang harus diselesaikan ke depan.

Di samping permasalahan pendidikan, Kota Pekalongan juga masih memiliki permasalahan kesehatan yang mendasar, yaitu masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat. Perwujudan dari masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat tersebut meliputi: 1) AKB, angka kematian bayi, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 masih memiliki 8,81 per 1.000 kelahiran hidup; 2) AKABA, angka kematian balita, yang masih berfluktuasi dan belum menurun secara optimal dan pada tahun 2022 adalah 10,84 per kelahiran hidup serta angka yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah; 3) AKI, angka kematian ibu, yang masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 masih bernilai 152,41 per 100.000 kelahiran hidup; 4) Angka kesakitan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan pada tahun 2022 memiliki angka 12,89%; dan 5) Prevalensi balita stunting yang masih berfluktuasi, cenderung meningkat dan pada tahun 2022 masih memiliki angka 9,42%. Dari data indeks keluarga sehat (IKS) pun, angka yang dicapai Kota Pekalongan masih sangat jauh. Ideal IKS adalah 0,8 dan capaian IKS Kota Pekalongan pada tahun 2022 adalah 0,31. Tantangan pengembangan IKS ke depan masih sangat besar.

Akar permasalahan lainnya adalah belum optimalnya perwujudan GESI (*Gender Equity Social Inclusion*). Kesetaraan gender dan inklusi sosial merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan. Jika kita ingin memastikan bahwa prosesnya adil dan manfaatnya menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan, proses pembangunan harus didasari oleh suara-suara yang beragam. Salah satu ukuran yang digunakan adalah IDG dan IPG. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2018, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 68,82, kemudian terus menurun sampai tahun 2021 menjadi 57,87. Selanjutnya pada tahun 2022 meningkat hingga di angka 61,37. IDG Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan IDG Provinsi Jawa Tengah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG. Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2018-2021 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,32 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Tantangan ke depan adalah

mengoptimalkan IDG dan terwujudnya inklusi sosial yang lebih bermakna. Pembangunan tidak hanya ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya, tetapi juga kelompok-kelompok marginal, sehingga pembangunan ditujukan untuk seluruh masyarakat.

Akar masalah lainnya, penyebab kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal adalah belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Angka kemiskinan dan pengangguran (TPT, tingkat pengangguran terbuka) adalah dua dari enam indikator kinerja makro penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kemiskinan Kota Pekalongan sudah menunjukkan kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun, kecuali pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021. Angka kemiskinan Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 6,81%. Namun demikian penurunan angka kemiskinan tersebut belum optimal. Penurunan angka kemiskinan pada angka satu digit akan mengalami tantangan yang lebih besar karena harus berhadapan dengan kemiskinan struktural, apalagi angka kemiskinan telah mencapai 6,81%. Upaya-upaya yang dilakukan tidak hanya bersifat strategi-strategi yang selama ini telah dilakukan, tetapi juga menyangkut kondisi sosial budaya masyarakat, cara pandang maupun perilaku masyarakat miskin. Sementara TPT Kota Pekalongan juga belum menunjukkan kecenderungan penurunan, masih berfluktuasi, serta tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi akan berdampak bagi penciptaan lapangan dan kesempatan kerja, sehingga pada gilirannya akan menurunkan TPT. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, seperti halnya penanganan kemiskinan, upaya optimalisasi penurunan TPT juga dilaksanakan berbasis sosial budaya masyarakat.

Menjadi tantangan ke depan bagi Kota Pekalongan adalah mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi adalah tatanan masyarakat yang dicita-citakan. Di samping melalui strategi-strategi normatif yang selama ini telah dilakukan, sangat dibutuhkan pendekatan sosial budaya, melalui kajian sosiologis-antropologis, sehingga peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara optimal.

4.2.5.5. Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman

Kota Pekalongan, seperti daerah maupun kawasan perkotaan lainnya, terus berkembang mengalami urbansasi (proses pengkotaan) akibat pertambahan jumlah penduduk maupun semakin tingginya fungsi pelayanan yang harus diembannya. Kota Pekalongan yang terletak pada posisi strategis dan peran sebagai PKW (pusat kegiatan wilayah) berimplikasi terhadap kebutuhan penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman yang semakin meningkat, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang memadai, sangat berpengaruh terhadap peran pelayanan kota yang dijalankan. Penyediaan kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman di Kota Pekalongan selama ini masih dirasakan belum optimal karena kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perkotaan dan permukiman sangat menentukan kenyamanan warganya maupun menjadi daya tarik suatu kota. Berdasarkan penilaian Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) melalui penyusunan MLCI (*Most Livable City Index*). MCLI adalah sebuah penelitian terkait kota layak huni yang dikeluarkan oleh IAP. Berdasarkan MCLI tahun 2022, Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori yang memiliki skor rata-rata, di bawah Kota Tegal. Kota yang paling layak huni adalah Surakarta, Yogyakarta, Cirebon, Magelang dan Semarang.

Isu strategis kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman didasarkan dari data capaian, permasalahan, telaahan dokumen perencanaan, isu global, isu nasional, dan isu regional. Dari data capaian, pemenuhan penduduk yang terlayani air bersih masih rendah. Dari RTRW Kota Pekalongan diketahui permasalahan banjir masih menjadi pekerjaan yang secara terus menerus perlu dicarikan solusi. Dari analisis permasalahan ditemukan beberapa permasalahan seperti tingkat kemacetan, air bersih, sanitasi, drainase, *land subsidence*, dan rumah yang kurang layak. Isu strategis juga selaras dengan isu global

yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; serta Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Isu strategis juga selaras dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman disusun kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut: 1). meningkatkan kualitas sistem dan sarana prasarana transportasi; 2). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik; 3). meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel; 4). meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air; 5). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum; 6). meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan; 7). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah; dan 8). meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase.

Rumusan isu strategis tersebut juga didasarkan atas penilaian kondisi bahwa berkembangnya perekonomian daerah juga didasarkan atas kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman. Kuantitas dan kualitas yang memadai, akan menjadi magnet daya tarik bagi kunjungan masyarakat dari daerah lain, semakin banyak kunjungan akan berimplikasi terhadap semakin berputarnya pergerakan ekonomi suatu daerah. Pada akhirnya, ketersediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang optimal dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi Kota Pekalongan, memiliki peran sebagai kota jasa maupun kota yang memiliki posisi strategis karena berada pada median Kota Surabaya dan DKI Jakarta, sehingga harus memanfaatkan keunggulan komparatifnya tersebut, yaitu dengan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman secara optimal.

Masalah daerah yaitu belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman, jika diidentifikasi maka memiliki enam akar masalah, yaitu 1) belum adanya jalan lingkar sehingga menyebabkan bercampurnya kendaraan lokal dan regional; 2) cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; 3) masih rendahnya kualitas sanitasi; 4) belum optimalnya sistem drainase kota, tingginya laju penurunan tanah (Land Subsidence), sarpras pengendali banjir dan rob kurang optimal (khususnya pada sisi Barat yaitu sistem Bremsi-Meduri); 5) masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman; dan 6) masih adanya kondisi rumah yang kurang layak. Wilayah Kota Pekalongan sangat dirasakan memiliki permasalahan lalu lintas yang sangat fundamental, yaitu bercampurnya lalu lintas lokal dan regional serta banyaknya perlintasan sebidang kereta api. Hingga saat ini, lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa. Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada aspek tata ruang kota.

Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Dampak lainnya, terutama karena kendaraan berdimensi besar, maka sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan

kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, utamanya kawasan perdagangan dan jasa. Optimalisasi kawasan perdagangan dan jasa diharapkan dapat semakin memperkuat peran sektor perdagangan dan jasa bagi perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Upaya memperkuat perekonomian juga dilakukan dengan membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah kota Pekalongan, misalnya kawasan Pekalongan Baru. Diharapkan kawasan Pekalongan baru dapat berkembang menjadi kawasan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Akses pelayanan air minum juga belum optimal. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan. Jika pada tahun 2018, cakupan pelayanan air bersih sebesar 87,18%, maka terus menurun dan pada tahun 2022, cakupan pelayanan menjadi 66,90%. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses pelayanan air minum belum optimal, bahkan mengalami penurunan cakupan. Tidak optimalnya cakupan pelayanan disebabkan keterbatasan air baku di wilayah Kota Pekalongan dan keterbatasan kemampuan sosial ekonomi masyarakat sehingga tidak mampu mengakses pelayanan air perpipaan (JP, jaringan perpipaan). Tantangan ke depan adalah bagaimana cakupan pelayanan ini dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Pekalongan dan dengan kualitas atau standar yang dipersyaratkan. Pemerintah Kota Pekalongan harus berkolaborasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah sekitar.

Sanitasi perkotaan yang berkualitas dapat berdampak secara langsung terhadap wajah suatu wilayah. Kota Pekalongan masih memiliki permasalahan terkait rendahnya kualitas sanitasi. Sesuai dengan ketentuan, cakupan sanitasi meliputi air limbah domestik, pengelolaan sampah dan drainase lingkungan. Ketercapaian ODF Kota Pekalongan tahun 2022 mencapai 100%. *Open Defecation Free* (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Namun demikian, untuk mencapai akses aman limbah domestik, masih dilakukan upaya yang signifikan.

Pengelolaan sampah di Kota Pekalongan masih menghadapi tantangan yang sangat berat, karena cakupannya dalam beberapa tahun terakhir justru semakin menurun dan pada tahun 2022 cakupannya hanya 72,36%. Kondisi ini diakibatkan produksi sampah yang semakin meningkat, namun kapasitas pengelolaan yang semakin menurun.

Kondisi drainase lingkungan pun juga masih membutuhkan upaya signifikan untuk merehabilitasi. Drainase sekunder hanya 57,41% yang memiliki kondisi baik pada tahun 2022. Kondisi ini berimplikasi tidak terkelolanya limpasan air hujan (*run off*) dengan baik, sehingga memiliki risiko sangat tinggi terjadinya banjir maupun genangan air. Secara umum sistem drainase dan sarpras pengendali banjir masih membutuhkan upaya yang sangat signifikan, tentunya dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan wilayah yang masih memiliki risiko tergenang banjir dan rob adalah 21,11% pada tahun 2022. Ancaman banjir dan rob, masih sangat tinggi karena proses penurunan tanah (*land subsidence*) yang masif. Dari beberapa lokasi titik kontrol pengukuran, ancaman penurunan tanah di Kota Pekalongan masih sangat serius. Dibutuhkan upaya yang signifikan dan membutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Pekalongan.

Pengendalian banjir dan rob sampai dengan 2024 telah tertangani pada sisi timur Kota Pekalongan (sungai Loji dan sungai Banger). Sedangkan pada sisi barat perlu penanganan untuk menanggulangi permasalahan banjir dan rob pada wilayah sepanjang sungai Brengi dan sungai Meduri yang dampaknya sudah meluas pada sisi selatan jalan Pantura. Sesuai *detail engineering design* (DED) yang telah dibuat oleh Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, pada muara sungai Brengi dan Meduri perlu ditutup dan dibangun pintu pengendali banjir, tanggul sungai dan stasiun pompa sehingga akan mengurangi dampak banjir dan rob secara signifikan pada sisi barat Kota Pekalongan. Kemudian pada tahun 2023, AMDAL disusun oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Wajah Kota Pekalongan bertambah berat karena masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung di lingkungan permukiman. Seperti di sepanjang sempadan sungai masih terbentuk tata letak bangunan yang mengikuti sempadan. Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen) pada tahun 2021 hanya mencapai 1,97%. Kondisi ini menyebabkan terbatasnya prasarana lingkungan yang berkualitas, seperti jalan dan drainase lingkungan yang buruk.

Permasalahan lain yang dihadapi Kota Pekalongan adalah masih adanya kondisi rumah yang kurang / tidak layak huni. Pada tahun 2023 menunjukkan masih terdapat 1,24% rumah tidak layak huni. Kekurangan penyediaan perumahan dan permukiman pun juga masih signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh jumlah KK di Pekalongan Tahun 2022 yaitu 77.940 KK, *backlog* kepemilikan tahun 2022 sejumlah 22.699 KK.

Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang tinggi menjadi tantangan pembangunan ke depan yang sangat signifikan. Kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman yang handal sangat berdampak terhadap kinerja aspek lainnya dalam pengelolaan kota. Wajah kota yang menarik dapat menjadi daya tarik suatu kota sehingga menjadi *pull factor* kunjungan dari wilayah lain, sehingga dapat mempercepat pergerakan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, penataan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman menjadi kebutuhan nyata bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan.

4.2.5.6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup dirumuskan didasarkan atas fakta bahwa kualitas lingkungan hidup, sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan menjadi ukuran yang penting dan merupakan kebutuhan pokok masyarakatnya. Urgensi perumusan isu strategis ini adalah karena kondisi menurunnya kualitas lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang harus mendukung sistem yang lain, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial budaya maupun sistem lainnya. Menjadi kebutuhan bagi proses sistem lainnya, sistem lingkungan hidup harus mampu mendukung proses sistem yang lain. Proses produksi, yang merupakan bagian dari sistem perekonomian, membutuhkan faktor produksi, termasuk ketersediaan sumberdaya alam, termasuk lingkungan hidup. Jika kualitas lingkungan hidup rendah, dapat berimplikasi tidak dapat mendukung proses produksi maupun sistem-sistem yang lain. Oleh karena itu, pembangunan mutlak membutuhkan lingkungan hidup yang berkualitas agar mendukung terwujudnya visi pembangunan.

Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah melakukan berbagai upaya, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, agar kualitas lingkungan hidup tidak semakin menurun. Dari sisi ukuran kualitas lingkungan hidup, yaitu IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup), capaian beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan dan pada tahun 2022 memiliki capaian 54,36. Namun demikian, capaian tersebut belum menunjukkan kualitas lingkungan hidup yang mampu menopang daya dukung yang optimal. Perumusan isu strategis peningkatan kualitas lingkungan hidup, didasarkan atas masalah pembangunan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat diidentifikasi lebih lanjut akar masalahnya, meliputi: 1) masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; 2) masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; 3) overloaddnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya; 4) rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan 5) rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 – 2029 (Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020), dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup disusun kebijakan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung. Kebijakan ini dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu: 1). menetapkan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan yang berfungsi lindung; 2). menetapkan dan

melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana; 3). Melestarikan kawasan cagar budaya; dan 4). mempertahankan dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau secara proporsional di seluruh wilayah kota termasuk menata alun-alun dan taman kota lainnya.. Kebijakan lain yang terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung Kawasan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui beberapa strategi yaitu: 1). mengendalikan perkembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 2). mengendalikan alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan; 3). mengembangkan perumahan secara vertikal pada kawasan permukiman di koridor-koridor utama kota; 4). mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; 5). mengembangkan kawasan pantai yang berwawasan lingkungan untuk mendukung perwujudan kawasan minapolitan; dan 6). mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.

Keberlanjutan lingkungan hidup menentukan keberlanjutan pembangunan maupun perikehidupan manusia. Lingkungan hidup memiliki kemampuan daya dukung maupun daya tampung terhadap seluruh kehidupan makhluk hidup di atasnya. Dalam beberapa proses KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) yang telah dilakukan terhadap proses penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang, sebagian besar aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup telah dilampauinya. Kondisi tersebut tidak disadari oleh sebagian masyarakat, masih ada anggapan bahwa lingkungan hidup masih baik-baik saja sehingga proses produksi maupun perikehidupan lainnya, tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan lingkungan hidup memiliki batas toleransi.

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup masih banyak ditemui. Masyarakat masih banyak ditemui membuang sampah pada badan air ataupun tempat yang tidak semestinya. Mengambil air tanah tanpa izin. Termasuk juga sebagian besar industri masih membuang limbah langsung ke alam, tanpa melakukan proses pengolahan limbah. Wujud dari kesadaran yang masih rendah tersebut adalah masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair di Kota Pekalongan. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa tingginya pencemaran tersebut tidak bersumber semuanya dari Kota Pekalongan, tetapi juga berasal dari wilayah lain.

Wujud lain kesadaran masyarakat dan pengelolaan yang belum optimal adalah overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya. Capaian sampah terkelola di TPS3R, bank sampah dan sodaqoh sampah pada tahun 2022 adalah sebesar 17,55% sehingga persentase sampah yang terangkut ke TPA masih cukup tinggi, yaitu 75,17%. Dengan semakin tingginya volume sampah yang diangkut ke TPA maka TPA Degayu mengalami overload. Upaya sistemik untuk merubah sistem pengelolaan sampah adalah dengan mengefektifkan olah dan pilah sampah, serta meningkatkan ekonomi sirkular sampah.

Akar masalah lainnya yang sangat mendasar dan dapat diidentifikasi adalah rendahnya luasan ruang terbuka hijau (RTH). Dari gambaran citra satelit wilayah Kota Pekalongan, dapat diidentifikasi bahwa tutupan lahan wilayah Kota Pekalongan sangat rendah. Dari identifikasi langsung lapangan, dapat diketahui bahwa masih terbatas tutupan lahan maupun vegetasi di wilayah Kota Pekalongan. Dari RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, RTH (rencana tata ruang) eksisting sesuai RTRW saat ini adalah 4,73% dari luas wilayah. Sesuai RTRW, sampai 2029 RTH yang harus dialokasikan adalah sebesar 13,04%. Idealnya sebuah kota memiliki 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Tantangan untuk menambah RTH cukup berat karena keterbatasan lahan, padahal RTH sangat dibutuhkan. RTH berfungsi sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah. Hal ini dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbondioksida (CO₂), menghasilkan oksigen, menurunkan suhu dan memberikan suasana sejuk serta menjadi area resapan air.

Penyebab kualitas lingkungan hidup yang rendah lainnya adalah rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan adalah akibat proses produksi dan kegiatan domestik (rumah tangga) yang tidak memperhatikan lingkungan hidup. Pada umumnya limbah proses produksi dan limbah domestik dibuang ke alam, tanpa melalui proses pengolahan. Dalam kadar tertentu, alam mampu menetralkan berbagai limbah tersebut, namun ketika melampaui daya dukung dan daya tampungnya, maka limbah proses produksi maupun limbah domestik tersebut membebani lingkungan hidup, terjadilah pencemaran lingkungan hidup, serta wujudnya dapat berupa rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan. Tanpa diikuti dengan kesadaran masyarakat, jika limbah proses produksi maupun limbah domestik semakin besar maka akan berdampak kualitas air tanah dan air permukaan yang semakin memburuk. Apalagi kondisi geologi/tanah merupakan hasil sedimentasi sehingga memiliki sifat yang berbeda. Tantangan untuk mengembalikan kualitas lingkungan hidup, khususnya kualitas air tanah dan air permukaan, membutuhkan upaya sistemik, partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta membutuhkan proses yang lama dan kontinyu karena lingkungan hidup memiliki sifat ireversibel, yaitu tidak dapat diubah atau membutuhkan waktu yang relatif sangat lama.

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan landasan untuk pengembangan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang lebih berkualitas. Tataan masyarakat yang aman, nyaman dan sehat tidak bisa diwujudkan tanpa dilandasi kualitas lingkungan hidup yang optimal. Menjadi pekerjaan rumah besar Kota Pekalongan ke depan, adalah bagaimana menjaga agar kualitas lingkungan hidup tidak bertambah turun, padahal di sisi sistem ekonomi harus mewujudkan perwujudan nilai tambah yang optimal. Oleh karena itu, karena adanya timbal balik tersebut, pengembangan sistem ekonomi ke depan harus disesuaikan dengan upaya untuk mengoptimalkan kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan. Beberapa pilihannya adalah pengembangan ekonomi hijau berbasis potensi lokal Kota Pekalongan.

Pemerintah Kota Pekalongan mempunyai kewajiban untuk mendukung kebijakan nasional berupa pengembangan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Dengan melihat potensi sinar matahari sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat dikembangkan pada stasiun pompa pengendali banjir yang berada di sisi utara dan barat Kota Pekalongan, perkantoran, penerangan jalan umum dan ruang terbuka.

4.2.6. Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan uraian di atas, hubungan isu strategis Kota Pekalongan dengan isu Isu Internasional, Isu/Kebijakan Nasional, Isu/Kebijakan Provinsi Jawa Tengah dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel IV-16 Keterkaitan Isu Strategis Kota Pekalongan, Isu Internasional, Isu/ Kebijakan Nasional, Isu/ Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
1	Tata kelola pemerintahan	a. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital; b. Masih adanya gap informasi antara pemberi informasi (pemerintah) dan penerima	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun	6. Transformasi Digital; 1. Regulasi Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.	7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis.

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
		informasi (masyarakat); c. Belum optimalnya implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; d. Belum optimalnya kualitas pelayanan menuju WBK & WBBM; e. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;		
2	Kondusivitas Wilayah	a. Masih adanya konflik sosial; b. Masih tingginya angka kejahatan; c. Masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika; d. Belum optimalnya penertiban pedagang kaki lima.	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.	2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial; 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gantar Kawasan.	6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.
3	Perekonomian Daerah yang berdaya saing	a. Masih adanya ketergantungan ketersediaan bahan baku, kestabilan harga dan belum optimalnya promosi industri produk/komoditi unggulan; b. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas dalam mendukung daya saing ekonomi; c. Belum optimalnya upaya untuk mendorong sektor perikanan, khususnya pasca pembangunan konstruksi pengendali banjir dan rob;	8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; 11. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi; 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Digital; 8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi; 11. Stabilitas Ekonomi Makro.	1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
		d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas destinasi dan sarpras pendukung wisata; e. Belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan budaya; f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sesuai perkembangan zaman dalam dunia usaha (marketing dan keuangannya); g. Belum optimalnya penataan pasar tradisional.			
4	Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	a. Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan serta belum optimalnya partisipasi stakeholder pendidikan; b. Belum optimal implementasi pendidikan karakter; c. Masih rendahnya pemahaman dan perilaku hidup sehat; d. Masih tingginya prevalensi stunting; e. Belum optimalnya perwujudan GESI (<i>Gender Equity Social Inclusion</i>); f. Belum optimalnya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.	1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun; 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan; 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;	1. Kesehatan untuk Semua; 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata; 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif; 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju; 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif. 19. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan; 5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; 6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat.

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
5	Kualitas Infrastruktur Perkotaan dan Permukiman	a. Belum optimalnya rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan disertai dengan penataan parkir; b. Cakupan layanan air perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah di Kota Pekalongan; c. Masih rendahnya kualitas sanitasi; d. Belum optimalnya sistem drainase kota dan drainase lingkungan, tingginya laju penurunan tanah (Land Subsidence), sarpras pengendali banjir kurang optimal (sisi Barat belum ada penanganan); e. Masih kurang baiknya tata letak bangunan gedung dan permukiman; f. Masih adanya kondisi rumah yang kurang layak.	6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua; 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi; 11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan; 17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan; 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana.
6.	Kualitas Lingkungan Hidup	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup; b. Masih tingginya tingkat pencemaran limbah cair; c. Overloadnya TPA karena belum optimalnya olah pilah sampah dari sumbernya; d. Rendahnya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH);	13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; 15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan	5. Penerapan Ekonomi Hijau 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan 4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

NO	Isu Strategis Kota Pekalongan	Akar Masalah	Isu Internasional (SDGs)	Isu / Kebijakan Nasional	Isu / Kebijakan Provinsi Jawa Tengah
		e. Rendahnya kualitas air tanah dan air permukaan.	ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.		

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1 REKOMENDASI PERUMUSAN VISI, MISI, PROGRAM UNGGULAN ATAU PROGRAM PRIORITAS

Dari serangkaian uraian atas permasalahan, isu strategis, visi, sasaran utama visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan arah pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025-2029 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Pekalongan Tahun 2025-2045, maka rekomendasi kebijakan dalam penyusunan visi dan misi serta program prioritas/program unggulan calon kepala daerah pada periode 2025-2029 dapat dirinci sebagaimana tabel V-1.

Tabel V-1
Rekomendasi Penyusunan Visi, Misi, Program Unggulan Atau Program Prioritas
Tahapan 5 Tahunan Pertama (2025-2029) : Penguatan Fondasi Perwujudan Mina Batik

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
Misi I: Transformasi Sosial yang Produktif, Berkarakter dan Berbudaya	1. peningkatan layanan pendidikan yang merata, inklusif dan berorientasi pada internalisasi nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter sebagai muatan lokal di semua jenjang pendidikan formal maupun non formal	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1. Hasil Pembelajaran a. Literasi dan Numerasi SD/SMP b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun c. Harapan Lama Sekolah 2. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun 3. Tingkat pemanfaatan perpustakaan	Maju Bersekolah Jenius Pintar	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan penguatan literasi dan numerasi, serta pemerataan akses sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	• Peningkatan kesadaran masyarakat yang disertai dengan peningkatan akses layanan Pendidikan sampai dengan Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan rata-rata lama sekolah; • Peningkatan akses layanan Pendidikan bagi semua secara adil dan merata dengan mempertimbangkan keseimbangan gender dan aspek difabilitas; • Percepatan wajib belajar 13 tahun yang didukung dengan peningkatan akses layanan Pendidikan anak usia dini serta Pendidikan non formal yang sejalan dengan penguatan akses Pendidikan dasar; • Peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan tuntutan dinamika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sejalan dengan arah penyelenggaraan Pendidikan nasional; • Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan sebagai pendukung operasionalisasi kurikulum pendidikan; • Penguatan kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah sebagai bagian dalam penyiapan generasi yang adaptif, inovatif, berakhlak, religius, dan berintegritas; • Penguatan peran Masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, baik pada sisi input, proses, maupun output pendidikan.
		Peningkatan pendidikan karakter dan pemajuan budaya	1. Mulok bahasa daerah/ Seni budaya 2. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	Berbudaya Berkarakter Berwawasan Religius	Meningkatnya pendidikan karakter dan pemajuan budaya yang ditandai dengan penguatan mulok bahasa	• Penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa - Pekalongan mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil; • Internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa - Pekalongan pada anak-anak sekolah; • Edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Kota Pekalongan melalui tutur kata

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
			3. Jumlah pengunjung tempat bersejarah 4. Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir		daerah, minat budaya, sejarah dan kesenian sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	sehari-hari, termasuk melakukan parenting untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Kota Pekalongan dalam kehidupan sehari-hari; • Pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat; • Penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat; • Penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Kota Pekalongan yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Kota Pekalongan, serta; • Pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.
	2. pemenuhan pelayanan kesehatan untuk semua	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. UHH 2. Kesehatan Ibu dan Anak 3. Penanganan TB 4. Cakupan JKN 5. IKS 6. Ketahanan Pangan	Sehat Sejahtera Produktif Kuat Mandiri	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	• Penguatan upaya promotif – preventif disertai dengan pembudayaan perilaku hidup sehat sebagai salah satu wujud penanggulangan penyakit dari sisi hulu; • Pencegahan dan pengendalian penyakit, baik menular ataupun tidak menular, melalui peningkatan peran serta Masyarakat ataupun melalui pemberian imunisasi dasar lengkap; • Peningkatan kecukupan gizi melalui pemberian makanan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman; • Peningkatan dan penguatan akses layanan Kesehatan untuk semua (Universal Health Coverage atau UHC); • Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang berkualitas didukung dengan ketersediaan sarana prasarana Kesehatan yang memadai serta tenaga Kesehatan yang profesional; • Peningkatan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi; • Penguatan riset dan inovasi serta pemanfaatan teknologi di bidang Kesehatan; • Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan.

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
	3. memperluas perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1. Tingkat Kemiskinan 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 5. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 6. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Sejahtera Makmur Terjamin Terlindungi Setara	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan penguatan perlindungan sosial yang adaptif bagi masyarakat rentan dan inklusi sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien; - Penyiapan keterampilan (soft skill/hard skill) agar tenaga kerja di Kota Pekalongan semakin memiliki daya saing; - Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; - Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan; - Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan; - Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal; - Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan; - Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia; - Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
Misi II: Kondusivitas Wilayah Untuk Memberikan Rasa Aman Bagi Warga	Pembangunan karakter masyarakat berwawasan kebangsaan dengan fondasi agama, peningkatan	peningkatan kondusivitas wilayah dengan arah pembangunan ketentraman dan	1. Jumlah Kejadian Konflik SARA 2. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Damai Aman Tertib Tentram	Meningkatnya kondusivitas wilayah dengan membangun masyarakat berwawasan kebangsaan dan penguatan	- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, - Penguatan toleransi intern dan antar umat beragama, - Penguatan peran masyarakat, kerjasama, saling pengertian, saling menghargai, kritis terhadap informasi yang berkembang di masyarakat dan menghormati perbedaan. - Penegakan hukum yang berkeadilan,

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
	kualitas SDM penegak trantibum linmas, serta dukungan sarpras yang memadai.	ketertiban umum			trantibum linmas sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta - Penguatan integritas partai politik.
Misi III: Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif	Penguatan kelembagaan, SDM, regulasi yang tepat fungsi, partisipasi dan kolaborasi, disertai penguatan fondasi pemerintahan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.	peningkatan kualitas birokrasi dengan arah pembangunan regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan kolaboratif.	- Indeks Reformasi Birokrasi - Indeks Reformasi Hukum - Indeks Pelayanan Publik - Indeks Integritas Nasional - Indeks Inovasi Daerah - Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Akuntabel Kolaboratif Integritas Tangkas Inovatif	Meningkatnya Kualitas Birokrasi ditandai dengan penguatan tata kelola pemerintahan digital Akuntabel, Transparan, Berintegritas, Tangkas dan Kolaboratif sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	- Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (open government), - Penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko, - Penguatan kelembagaan yang efektif, - Digitalisasi tata kelola pemerintahan, - akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien, - Penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum, - Penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, - Penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah, antara daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta - Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.
Misi IV: Transformasi Ekonomi Menuju Ekonomi Sirkular Yang Kreatif, Inovatif, merata dan Inklusif	Penguatan fondasi perwujudan sektor perikanan, batik dan jasa sebagai produk unggulan serta implementasi ekonomi sirkular dengan fokus pada penguatan pengetahuan dan kesadaran pelaku dan stakeholder ekonomi, pembangunan	peningkatan perekonomian dan Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Kota Pekalongan	- Rasio PDRB Industri Pengolahan - Pengembangan Pariwisata: - Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum - Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara - Produktivitas UMKM, koperasi, BUMD	Kreatif Maju Sejahtera Mandiri Makmur Inovatif Berdaya saing	Meningkatnya perekonomian ditandai dengan penguatan di sektor perikanan, batik dan jasa sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	Perikanan - Pembinaan dan penguatan masyarakat nelayan tangkap dan budidaya; - Penguatan manajemen dan pengawasan sumber daya perikanan; - Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan yang berkelanjutan melalui pembangunan pelabuhan perikanan onshore, implementasi teknologi dan modernisasi dalam pembangunan sektor perikanan berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir; - Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas perikanan budidaya yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar regional/nasional;

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
	sistem dan tata kelola, penguatan branding, penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah.		a. Rasio Kewirausahaan Daerah b. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB c. Return on Aset (ROA) BUMD d. Disparitas Harga 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) 5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/ Kota 6. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 7. Inovasi: a. Kapabilitas Inovasi b. Indeks Daya Saing Daerah 8. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB 9. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan: a. Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/ Kota per PDRB b. Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB			• Perbaikan habitat ekologi pesisir pantai dalam rangka rehabilitasi ekosistem pantai, • Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan dalam upaya menjaga rantai dingin untuk menjaga kualitas ikan. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor • Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; • Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; • Optimalisasi penguatan dan peningkatan sektor perdagangan jasa sehingga fungsi sebagai pusat kegiatan wilayah dapat berkembang; dan • Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Industri Pengolahan • Penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri; • Penguatan iklim berwirausaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan; • Penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, riset dan inovasi, digitalisasi industri pengolahan, serta ramah lingkungan (green investment); • Penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri; • Peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan. UMKM dan Koperasi • Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar regional, nasional maupun global, • Peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi,

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
						• Fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, • Akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau, • Pengembangan wirausaha baru, • Penguatan koperasi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil, • Perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, • Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, • Peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta Peningkatan produktivitas UMKM. Pariwisata • Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan; • Penguatan promosi pariwisata berbasis digital; • Peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata; • Penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital; • Peningkatan infrastruktur konektivitas dan integrasi antardestinas wisata; • Penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaku pariwisata, termasuk pelaku UMKM pariwisata; • Penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata, serta; • City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i>. Ekonomi Kreatif • Peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif;

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
						• Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya; • Peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif; • Penyediaan infrastruktur yang memadai dan inklusif untuk mendukung pengembangan kreativitas; • Peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif; • Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual; • Pengembangan dan penguatan jejaring kota kreatif; • Pengembangan dan penguatan kampung kreatif terutama pada produk kreatif unggulan; • Pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung industri pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif, serta; • Pengembangan riset ekonomi kreatif. Produktifitas Tenaga Kerja • Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri; • Penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi; • Penguatan sistem perlindungan tenaga kerja; • Penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan; • Penuntasan pekerja anak, serta; • Penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri. Pengutan Riset dan Inovasi • Penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah; • Penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor; • Penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi; • Penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan; • Penguatan kerja sama riset dan inovasi antar pelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta;

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
						- Penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi. Stabilitas Ekonomi Makro - Penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah; - Penguatan pengendalian inflasi daerah; - Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata, perdagangan dan industri kreatif; - Pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang, serta mendorong investasi swasta; - Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lembaga keuangan lokal untuk mengelola kebijakan ekonomi secara efektif, termasuk pengelolaan anggaran, pemantauan pasar, dan penerapan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; - Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, termasuk keterampilan dalam industri tekstil dan batik serta sektor-sektor ekonomi lainnya yang berkembang; - Mendorong kewirausahaan lokal dengan menyediakan pendanaan, pelatihan, dan akses ke pasar bagi pengusaha kecil dan menengah. Ini dapat membantu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi; - Pengelolaan yang berkelanjutan terhadap lingkungan dan sumber daya alam untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanpa merusak ekosistem lokal; - Promosi aktif untuk menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, dengan menawarkan insentif yang menarik dan memperkuat iklim usaha yang kondusif.
Misi V: Lingkungan Hidup, serta infrastruktur perkotaan dan permukiman	Penguatan pengelolaan lingkungan hidup serta infrastruktur perkotaan dan permukiman yang nyaman dan	peningkatan kualitas infrastruktur	1. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet 2. Rumah tangga: a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian	Nyaman Layak Aman Mantap Bebas Macet	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman sebagai pondasi dalam	- Pengelolaan sumber daya air, meliputi air permukaan, air tanah bebas, air tanah tertekan, termasuk pengendalian banjir dan rob; - Pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa; - Pembangunan jalan lingkar untuk memisahkan lalu lintas lokal dan regional serta mengoptimalkan tata ruang wilayah;

Misi RPJPD	Arah Kebijakan 2025 – 2029	Sasaran Pokok	Ringkasan Indikator Utama Pembangunan	Pilihan Kata Kunci/ Referensi Pokok Visi	Referensi Penyusunan Kalimat Misi	Rangkaian Kerja/ Referensi Penyusunan Program
yang berkualitas	berkualitas, dengan fokus pada kelompok air dan manajemen limbah penguatan pondasi kerjasama daerah dalam penanganan limbah, serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.		Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 3. Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap Kewenangan Kabupaten/Kota 4. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/ Kota	Terjangkau Berkualitas	mewujudkan MINA BATIK	- Peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan dan menjadi andalan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal (termasuk di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan) untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan; - Penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, terutama pengembangan secara vertikal; - Pembangunan pusat pertumbuhan baru di Kota Pekalongan, sebagai upaya untuk penyediaan infrastruktur perkotaan yang berkualitas serta mampu menggerakkan perekonomian; - Penguatan implementasi penataan ruang.
		peningkatan kualitas lingkungan hidup.	1. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah 3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah 4. Kontribusi Penurunan Emisi GRK	Berkelanjutan Bersih Hijau	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan sebagai pondasi dalam mewujudkan MINA BATIK	- Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pesisir dan laut yang berkelanjutan; - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; - Pengelolaan sampah terintegrasi hulu-hilir yang berbasis masyarakat; - Penataan dan peningkatan ruang terbuka hijau seperti halnya alun-alun, taman kota, ataupun ruang terbuka hijau lainnya serta vegetasi tutupan lahan; - Penguatan penyediaan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat.

Sumber: Bappeda diolah, 2024

5.2. LOKASI PROGRAM PRIORITAS / PROGRAM UNGGULAN DAERAH

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi: a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.

Prioritas pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis untuk periode tahun 2025-2029 disusun dalam indikasi program dalam RTRW Kota Pekalongan sebagai berikut.

**Tabel V-2 Indikasi Program RTRW Kota Pekalongan
Tahun 2025-2029**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
I	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG				
A	PERWUJUDAN SISTEM PUSAT PELAYANAN				
1	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota dan Pusat Lingkungan				
	a. Penyusunan Rencana Tindak Penataan dan Revitalisasi Kawasan (Masterplan/DED) b. Konstruksi Fisik Penataan dan Revitalisasi Kawasan	1. SPPK Kecamatan Pekalongan Barat 2. SPPK Kecamatan Pekalongan Utara 3. SPPK Kecamatan Pekalongan Timur 4. SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan berada di Kelurahan Banyuurip 5. PL (6 Lokasi)	10 Dokumen	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan
B	PERWUJUDAN SISTEM PRASARANA KOTA				
1	Sistem Transportasi Darat				
	a) Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Jalan Arteri Primer : 1. Jalan Dr Sutomo; 2. Jalan Dr. Setiabudi; 3. Jalan Jend. Sudirman; 4. Jalan KH. Mas Mansyur; 5. Jalan Gajah Mada; 6. Jalan Merdeka; 7. Jalan Pemuda; 8. Jalan Slamet; 9. Jalan Sriwijaya; dan 10. Jalan Wilis.	Kota Pekalongan	10 Ruas	APBN	Kementerian PU PR
	b) Pembangunan Jalan lingkaran Kabupaten Batang-Kota Pekalongan- Kabupaten Pekalongan (PETANGLONG).	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Ruas	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan
	a) Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan Arteri Sekunder	Kota Pekalongan	11 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan
	b) Pembangunan, peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan lingkaran selatan, barat, dan timur	Kota Pekalongan	3 Ruas	APBD Provinsi APBD Kota	DPUBMCK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	a) Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan kolektor sekunder	Kota Pekalongan	46 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan
	b) peningkatan fungsi jalan Kolektor Sekunder menjadi Kolektor Primer Tiga (JKP-3) - Jalan Seruni; - Jalan Ki Mangunsarkoro; - Jalan HOS Cokroaminoto; - Jalan Urip Sumoharjo; - Jalan Gatot Subroto; - Jalan dr. Kusuma Admaja; dan - Jalan Letjen Suprpto	Kota Pekalongan	7 Ruas	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	a) Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan pemeliharaan Jalan khusus - kawasan pariwisata - kawasan peruntukan industri; dan - kawasan lainnya.	Kota Pekalongan	3 Lokasi	APBD Kota Swasta	DPUPR Kota Pekalongan Swasta
	a) Pembangunan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan
	b) Pemeliharaan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Pekalongan Utara Kecamatan Pekalongan Timur	2 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan
	c) Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang Tipe C	Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan	2 Lokasi	APBD Kota	Dishub Kota Pekalongan
	a) Pembangunan dan pemeliharaan terminal barang	Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBD Kota	Dishub Kota Pekalongan
	b. Jaringan Kereta api				
	1) Pembangunan kereta api cepat Jakarta – Surabaya	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI
	2) Pengembangan dan Pemeliharaan kereta api antar kota jalur Jakarta-Semarang- Surabaya	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI
	1) Pembangunan dan Pemeliharaan kereta api perkotaan berupa jalur kereta api perkotaan PETANGLONG	Kota Pekalongan- Kabupaten Pekalongan- Kabupaten Batang	1 Paket	APBN	Kementerian Perhubungan
	a) Peningkatan, pengembangan, dan pemeliharaan stasiun utama Pekalongan	Kelurahan Bendan Kergon Kecamatan Pekalongan Barat	1 Lokasi	APBN BUMN	Kementerian Perhubungan PT. KAI
2	Sistem Transportasi Laut				
	1) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan
	1) Pembangunan dan Pengembangan alur pelayaran keluar dan masuk pelabuhan pengumpan regional	Kecamatan Pekalongan Utara	1 Lokasi	APBN	Kementerian Perhubungan
3	Sistem Jaringan Energi				
	1) Pembangunan jaringan gas bumi kilang pengolahan ke konsumen	Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur	1 Paket	APBN	PN Gas PT. Pertamina
	b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan				
	infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya a) Pemeliharaan jaringan SUTT	Kec. Pekalongan Barat, Kec. Pekalongan Selatan.	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT. PLN
	b) Pemeliharaan, peningkatan dan pengembangan jaringan SUTM	Kota Pekalongan	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT. PLN
	c) Pemeliharaan gardu induk	Kecamatan Pekalongan Barat	1 Paket	APBN BUMN	Kementerian ESDM PT. PLN
4	Sistem Jaringan Telekomunikasi				
	1) Pengembangan dan peningkatan jaringan kabel serat optik	Kota Pekalongan	4 Paket	APBN BUMN APBD Kota Swasta	Kementerian Kominfo PT. TELKOM Diskominfo Kota Pekalongan Swasta
	2) Pembangunan dan pengembangan ducting bersama untuk jaringan serat optik, yang dapat dimanfaatkan untuk jaringan utilitas kota lainnya	Kota Pekalongan	4 Paket	APBD Kota Swasta	DPUPR Kota Pekalongan Diskominfo Kota Pekalongan Swasta
	1) Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Menara Telekomunikasi Bersama	Kota Pekalongan	1 Dokumen	APBD Provinsi	Dinas Kominfo Prov Jateng
	2) Pengembangan menara telekomunikasi bersama	Kota Pekalongan	27 Unit	SWASTA	SWASTA
	3) Penyediaan internet umum	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBN APBD Kota BUMN Swasta	Kementerian Kominfo Diskominfo Kota Pekalongan PT. TELKOM Swasta
5	Sistem Jaringan Sumber Daya Air				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	a. Sumber Air				
	1) sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/ kota a) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Wilayah Sungai (WS) Pemali-Comal yang melewati kota. b) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan bag. dr. WS Pemali-Comal yang melewati kota.	DAS Sengkarang, DAS Kupang, DAS Gabus	3 Lokasi	APBN APBD Prov	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng
	2) sistem jaringan sumber daya air kota a) Perlindungan dan pemeliharaan terhadap sumber air, meliputi : - Sungai Meduri beserta anak sungainya; - Sungai Bremsi beserta anak sungainya; - Sungai Kupang beserta anak sungainya; - Sungai Banger beserta anak sungainya; - Sungai Gabus beserta anak sungainya. - Long Storage di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang dan Panjang Baru; dan - Waduk di Kelurahan Bandengan	Kota Pekalongan	23 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	b) Pemeliharaan dan perlindungan terhadap CAT	Seluruh Wilayah Kota Pekalongan yang merupakan kawasan CAT.	1 Kawasan	APBD Prov	Dinas ESDM Prov. Jateng
	b. Prasarana Sumber Daya Air				
	a) Pemeliharaan Daerah irigasi : - jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat yaitu DI Kupang Krompeng dan DI Pesantren Kletak. - jaringan irigasi kewenangan provinsi yaitu DI Asem Siketek/ Kesetu - jaringan irigasi kewenangan pemerintah kota yaitu DI Rawa dan DI Tambak	Kota Pekalongan	5 Daerah Irigasi	APBN APBD Prov APBD Kota	BBWS Pemali-Juana Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	2) Sistem pengendalian daya rusak air a) penghijauan pada daerah-daerah lahan yang kosong dan pengembangan water recharge	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBD	DLH Kota Pekalongan
	b) Pembangunan dan pengoperasian sistem polder / kolam retensi	- Kelurahan Panjang Baru; - Kelurahan Degayu; - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Bandengan; - Kelurahan Panjang Wetan; - Kelurahan Krapyak; - Kelurahan Klego; - Kelurahan Poncol; - Kelurahan Kauman; - Kelurahan Padukuhan Kraton; - Kelurahan Pasir Kraton Kramat; - Kelurahan Tirta - Kelurahan Kalibaras; - Kelurahan Kuripan Yosoreja; dan - Kelurahan lainnya berdasarkan kajian	27 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	c) Pembuatan dan pengoperasian pintu air dan stasiun pompa	Kota Pekalongan	27 Lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	d) Pengembangan dan Pemeliharaan sistem revetment, groin, dan konservasi pantai	Pantai Kota Pekalongan	6,15 Km	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian LHK Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas LHK Prov Jateng DPUPR Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
					Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	e) Pengembangan dan Pemeliharaan sistem tanggul pengendali banjir	- Pesisir Pantai Pekalongan - Tanggul Rob BBWS - Sungai di wilayah Kota Pekalongan, meliputi Sungai Loji, Sungai Banger, Sungai Bremi, Sungai Meduri, dan Sungai Gabus,	34 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	f) Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendali banjir - Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan; dan - Sungai Sengkarang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan. - Pengendalian Banjir dan Rob, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang - Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob, Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	4 kegiatan	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	g) Pengendalian erosi dan amblesan tanah: - Monitoring dan pemetaan data - Adaptasi dan Penanganan - Mitigasi dan pengurangan - Edukasi dan capacity building - Pengendalian	4 Kecamatan	4 kegiatan	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian ESDM Kementerian LHK Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas ESDM Prov Jateng Dinas LHK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	3) Jaringan air baku untuk air bersih				
	a) Optimalisasi dan pemeliharaan jaringan air baku				
	- Sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang;	Kabupaten Batang	100 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	- Sumber air baku dari mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	32 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	- sumber air baku dari Sungai Kupang di Desa Jambangan Kecamatan Talun	Kabupaten Pekalongan	150 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	- sumber air baku dari Sungai Kaliboyo Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	250 lt/dt	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	b) Pengembangan jaringan air baku lainnya:	Kota Pekalongan	2 kegiatan	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	- Pengendalian pemanfaatan ABT			APBD Kota	Dinperkim Kota Pekalongan
	- Pengembangan dan pemanfaatan long storage dan kolam retensi, desalinasi air laut, dan pemanenan air hujan / rain harvesting serta air permukaan lainnya)			BUMD	Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
6	Infrastruktur Perkotaan				
	a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				
	a) Pengembangan dan Pemeliharaan unit air baku	- Bendung Jambangan, Bendung Kali Boyo, Mata Air Regoselo, dan Intake Sungai Kupang di Cepagan	4 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	a) Pengembangan dan Pemeliharaan unit air baku	- Sungai atau sumber air baku lainnya berdasarkan kajian; dan - Air tanah diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.	1 lokasi 128 lokasi		DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	b) Pengembangan dan Pemeliharaan unit produksi/IPA:	- IPA Krompeng dan IPA Cepagan - Reservoir Cepagan; - IPA lainnya; - Sumur Produksi	2 lokasi	APBN	Kementerian PUPR
				APBD Prov	Dinas Pusdataru Prov Jateng
			1 lokasi 1 lokasi	APBD Kota BUMD	Dinas PUBM&CK Prov Jateng
			32 lokasi		DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	c) Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Unit distribusi jaringan distribusi				
	- JDU dari Sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	Kabupaten Batang	1 sistem	APBD Prov APBD Kota BUMD	Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	- JDU dari Sumber air baku dari mata air Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	- JDU dari sumber air baku dari Sungai Kupang di Desa Jambangan kecamatan Talun	Kabupaten Pekalongan	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	- JDU dari dari sungai Kaliboyo Kecamatan Tulis	Kabupaten Batang	1 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota BUMD	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	- Jaringan Distribusi Bagi (JDB) dan jaringan distribusi langsung (JDL)	Kota Pekalongan	1 sistem	APBD Kota BUMD	Dinas PUBM&CK Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
					Dinperkim Kota Pekalongan Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan
	a) pengembangan sumur dangkal kawasan perumahan yang tidak mendapatkan pelayanan jaringan perpipaan; b) pemanfaatan sumur dalam eksisting yang berada di wilayah yang kualitas air tanah dangkalnya tidak baik; dan c) pengembangan bak penampungan air hujan dengan konsep pemanenan air hujan (rain harvesting).	Lokasi yang belum tercukupi debit air PDAM	1 Kota	APBD Kota Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Masyarakat
	b. Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)				
	b) Pemeliharaan dan pengembangan sistem pembuangan air limbah domestik /rumah tangga baik individual maupun komunal	Kota Pekalongan	96 unit	APBN APBD Kota Masyarakat	DLH Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan
					Dinperkim Kota Pekalongan Dinkes Kota Pekalongan Swasta
	a) Pembangunan dan pemeliharaan IPAL Komunal untuk Industri	Kelurahan Kauman Kelurahan Banyuurip Kelurahan Jenggog Kelurahan Pringrejo	4 Unit	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian LHK DLH Kota Pekalongan Swasta
	b) Pembangunan IPAL Komunal untuk Industri	Kelurahan Jenggog Kelurahan Tirto	2 Unit	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian LHK DLH Kota Pekalongan Swasta
	c. Sistem Jaringan Persampahan Kota				
	1) Peningkatan dan Pemeliharaan TPS dan Tempat Pengelolaan 3R	Kota Pekalongan	21 Lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan
	2) Pembangunan TPS dan Tempat Pengelolaan 3R	Kelurahan Buaran Kradenan Kelurahan Jenggog Kelurahan Kauman Kelurahan Setono Kelurahan Noyontaansari Kelurahan Podosugih	6 Lokasi	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DLH Kota Pekalongan
	3) Pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	Kelurahan Degayu	1 Unit	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DLH Kota Pekalongan
	5) Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah Regional	Petanglong	1 Unit	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR DLHK Prov Jateng DLH Kota Pekalongan
	d. Sistem Drainase				
	1) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Primer	Sungai Sengkarang dan Sungai Kupang,	2 sistem	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan
	2) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Sekunder	Subsistem Bremi, subsistem Bandengan subsistem Loji subsistem Banger subsistem Sibulanan subsistem Banger Hilir subsistem Banger Hulu subsistem Pabean	8 sub sistem	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan
	3) Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Tersier	Seluruh kecamatan	- 121108 m2	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan
	e. sistem jaringan pejalan kaki				
	1) Pengembangan pedestrian dan street furniture	- koridor Jalan dr. Soetomo (kawasan perdagangan batik) di Kelurahan Noyontaansari; - koridor jalan HOS. Cokroaminoto di Kelurahan Kuripan Yosorejo dan	- 8 lokasi	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
		Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan - kawasan Alun-alun kota di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; - kawasan Lapangan Sorogenen di Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur; - kawasan Lapangan Monuman Perjuangan di Kelurahan Bendankergon Kecamatan Pekalongan Barat; - kawasan Lapangan Tirta di Kelurahan Tirta Kecamatan Pekalongan Barat; - kawasan Lapangan Jetayu di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara; dan - koridor Pantai Sari Kelurahan Panjang Baru dan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara			
	f. Sistem jaringan evakuasi bencana				
	1) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana abrasi	Jalan Pantai Slamiran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	3 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan
	2) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana rob	Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Samudra Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara	4 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan
	3) Pengembangan jalur evakuasi terhadap bencana banjir	- Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan; - Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirta, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendankergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat - Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratmandan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton	1 Jalur 3 Jalur 4 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan
	4) Pengembangan jalur evakuasi bencana angin topan	Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer	2 Jalur	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan
	5) Pengembangan ruang evakuasi bencana	Seluruh wilayah Kota Pekalongan	4 lokasi	APBD Kota	BPBD Kota Pekalongan
	g. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)				
	1) Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Seluruh kawasan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	10 lokasi	APBD Kota Swasta	DLH Kota Pekalongan Dinkes Kota Pekalongan Fasilitas Kesehatan se-Kota Pekalongan Swasta
II	PERWUJUDAN POLA RUANG				
1	Kawasan Peruntukan Lindung				
	a) Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Sungai.	Seluruh DAS di kota pekalongan	24 Hektar	APBN APBD Prov	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng
	b) Penataan Sempadan Sungai Loji	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
					Dinperkim Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	2) Sempadan pantai berupa Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Sempadan Pantai.	Seluruh Wilayah Pantai	26 Ha	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian LHK Kementerian KKP Dinas Pusdataru Prov Jateng DLHK Prov Jateng DKP Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan
	3) kawasan sekitar danau atau waduk berupa Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan sekitar danau atau waduk.	Seluruh Wilayah Kota	15 Ha	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	b. Kawasan Cagar Budaya				
	2) Pengawasan dan pemantauan pelestarian kawasan Jetayu	Kelurahan Kandang Panjang, Panjang Wetan, dan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara	1 kawasan	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan
	c. RTH				
	1) Pengembangan RTH Publik berupa pemenuhan, penataan dan pemeliharaan (20%) - Pengadaan Lahan di Kelurahan Bandengan - Pembangunan RTH di Kelurahan Bandengan - Alih Fungsi Aset Kota yang direncanakan untuk RTH	Seluruh Wilayah Kota	3 kegiatan	APBN APBD Kota	Kementerian PUPR DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	2) Pengawasan dan pemantauan RTH Privat	Seluruh Wilayah Kota	27 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan
	d. Kawasan ekosistem mangrove				
	1) Pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan ekosistem mangrove	- Kelurahan Bandengan; - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Panjangbaru; dan - Kelurahan Krapyak	4 lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan
	2) Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya	- Kelurahan Bandengan; - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Panjangbaru; dan - Kelurahan Krapyak	4 lokasi	APBD Kota	DLH Kota Pekalongan
2	Kawasan peruntukan budidaya				
	a. Kawasan pertanian				
	1) Peningkatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	- Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: - Kelurahan Banyuurip; - Kelurahan Kuripan Kertoharjo; - Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan - Kelurahan Sokoduwet. - Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu. - Kecamatan Pekalongan Timur berada di: - Kelurahan Gamer; - Kelurahan Kali Baros; - Kelurahan Setono.	4 lokasi 1 lokasi 3 lokasi	APBD Prov APBD Kota	Dinas Pusdataru Prov Jateng DPUPR Kota Pekalongan Dinperpa Kota Pekalongan
	b. Kawasan perikanan				
	1) Kawasan perikanan tangkap berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi :				

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	a) pengolahan hasil perikanan	- Kelurahan Panjang Wetan, - Kelurahan Krapyak dan - Kelurahan Degayu	3 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan
	b) kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan	- Kelurahan Panjang Wetan - Kelurahan Krapyak	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan
	c) Teknopark perikanan	Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan
	d) Pembangunan Pelabuhan on Shore	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMN	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan PPNP
	e) Pemeliharaan dan Pembangunan Prasarana penunjang pelabuhan perikanan	Kelurahan Krapyak Kelurahan Panjang Wetan	1 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota BUMN	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan PPNP
	f) Relokasi dan Pembangunan Dok dan Galangan Kapal	Kelurahan Krapyak Kelurahan Degayu	2 lokasi	Swasta	Swasta
	2) Kawasan perikanan budidaya	- Kecamatan Pekalongan Utara meliputi: - Kelurahan Degayu; - Kelurahan Krapyak	2 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian KKP DKP Prov Jateng DKP Kota Pekalongan
	c. Kawasan permukiman				
	1) Kawasan perumahan a) Penataan dan revitalisasi kampung.	- Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: - Kelurahan banyuurip; - Kelurahan Buaran Kradenan; - Kelurahan Jenggot; - Kelurahan Kuripan Kertoharjo' - Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan - Kelurahan Sokoduwet. - Kecamatan Pekalongan Utara Berada di: - Kelurahan Bandegan; - Kelurahan Degayu; - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Krapyak; - Kelurahan Padukuhan Kraton; - Kelurahan Panjang Wetan; dan - Kelurahan Panjangbaru. - Kecamatan Pekalongan Barat berada di: - Kelurahan Bendan Kergon; - Kelurahan Medono; - Kelurahan Pasirkratonkrama t; - Kelurahan Podosugih; - Kelurahan pringrejo; - Kelurahan Sapurokebulen; dan - Kelurahan Tirto. - Kecamatan Pekalongan Timur berada di: - Kelurahan Gamer; - Kelurahan Kali Baros; - Kelurahan Kauman; - Kelurahan Klego; - Kelurahan Noyontaansari; - Kelurahan Poncol; dan - Kelurahan Setono.	27 lokasi	APBN APBD Kota BUMN BUMD Swasta	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan BUMN BUMD Swasta
	b) Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal (Rusun)	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Timur - Kecamatan Selatan	4 kecamatan	APBN APBD Kota BUMN Swasta	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan BUMN Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	c) Penyediaan RSS	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	BUMN Swasta	BUMN Swasta
	d) Bantuan PSU Perumahan.	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Kota BUMN BUMD Swasta	Kementerian PU PR DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan BUMN BUMD Swasta
	2) Kawasan perdagangan dan jasa				
	a) Pengembangan Pasar Grosir Batik Setono	- Kecamatan Pekalongan Timur	1 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta
	b) Peningkatan kualitas Pasar Tradisional	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta
	c) Pengembangan kawasan pertokoan di sepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta
	d) Pembangunan dan pengembangan kawasan Pekalongan Baru	- Kecamatan Pekalongan Timur	1 kawasan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR / BPPW Jateng Kementerian Perdagangan DPUPR Kota Pekalongan Dinperkim Kota Pekalongan Dinas Dagkop UKM Kota Pekalongan Swasta
	3) Kawasan peruntukan perkantoran				
	a) Peningkatan dan pemeliharaan kawasan perkantoran Pemerintah Kota Pekalongan di Jalan Mataram, dan lokasi lainnya	Kecamatan Pekalongan Barat	1 kawasan	APBD Kota	Setda Kota Pekalongan DPUPR Kota Pekalongan OPD lainnya
	b) Peningkatan dan pemeliharaan kawasan perkantoran pemerintah skala kecamatan dan kelurahan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekalongan
	c) Pengembangan dan peningkatan perkantoran swasta	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	Swasta	Swasta
	4) Kawasan peribadatan				
	a) Pengembangan sarana peribadatan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara	4 kecamatan	APBD Kota Masyarakat	Setda Kota Pekalongan Masyarakat

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
		- Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur			
	b) Pemeliharaan sarana peribadatan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBD Kota Masyarakat	Setda Kota Pekalongan Masyarakat
	5) Kawasan pendidikan				
	a) Pengembangan dan peningkatan sarana pendidikan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PU PR Dinas Pendidikan Prov Jateng Dindik Kota Pekalongan Swasta
	b) Pemeliharaan sarana pendidikan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PU PR Dinas Pendidikan Prov Jateng Dindik Kota Pekalongan Swasta
	6) Kawasan kesehatan				
	a) Pengembangan sarana kesehatan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian kesehatan Dinas Kesehatan Prov Jateng Dinkes Kota Pekalongan RSUD Kota Pekalongan Swasta
	b) Pemeliharaan sarana kesehatan	- Kecamatan Pekalongan Barat - Kecamatan Pekalongan Utara - Kecamatan Pekalongan Selatan - Kecamatan Pekalongan Timur	4 kecamatan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian kesehatan Dinas Kesehatan Prov Jateng Dinkes Kota Pekalongan RSUD Kota Pekalongan Swasta
	7) Kawasan Olahraga				
	a) Pengembangan sarana olahraga	Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat	1 lokasi	APBD Kota Swasta	Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta
	b) Pemeliharaan sarana olahraga	Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat	1 lokasi	APBD Kota Swasta	Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta
	8) Kawasan transportasi				
	a) Pengembangan sarana transportasi	- Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; - Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; dan - Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Bendan Kergon.	3 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Prov Jateng Dishub Kota Pekalongan
	b) Pemeliharaan sarana transportasi	- Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Panjang Wetan; - Kecamatan Pekalongan Timur berada di Kelurahan Gamer; dan - Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Bendan Kergon. -	3 lokasi	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian Perhubungan Dinas Perhubungan Prov Jateng Dishub Kota Pekalongan
	9) Kawasan ruang terbuka non hijau	-			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	a) Pengembangan sarana ruang terbuka non hijau	- Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; - Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Pringrejo;	3 lokasi	APBD Kota	Dinas LH Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan
	b) Pemeliharaan sarana ruang terbuka non hijau	- Kecamatan Pekalongan Utara berada di Kelurahan Degayu; - Kecamatan Pekalongan Barat berada di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Pringrejo;	3 lokasi	APBD Kota	Dinas LH Kota Pekalongan Dinparbudpora Kota Pekalongan
	10) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal				
	a) Penataan lokasi kegiatan sektor informal	- Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: - Kelurahan Banyurip; - Kelurahan Kuripan	18 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Disperindag Kota Pekalongan
	a) Penataan lokasi kegiatan sektor informal	Yososrejo; - Kelurahan Kuripan Kertoharjo; - Kelurahan Jenggot; dan - Kelurahan Buaran Kradenan - Kecamatan Pekalongan Utara berada di: - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Panjang Wetan; - Kelurahan Padukuhan Kraton; - Kelurahan Panjang Baru; - Kecamatan Pekalongan Barat berada di: - Kelurahan Podosugih; - Kelurahan Medono; - Kelurahan Pringrejo; - Kelurahan Bendan Kergon; dan - Kelurahan Pasirkratonkramat; - Kecamatan Pekalongan Timur berada di: - Kelurahan Poncol; - Kelurahan Klego;			
	a) Penataan lokasi kegiatan sektor informal	- Kelurahan Noyontaansari; dan - Kelurahan Kauman.			
	b) Pemeliharaan lokasi kegiatan sektor informal	- Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: - Kelurahan Banyurip; - Kelurahan Kuripan Yososrejo; - Kelurahan Kuripan Kertoharjo; - Kelurahan Jenggot; dan - Kelurahan Buaran Kradenan - Kecamatan Pekalongan Utara berada di: - Kelurahan Kandang Panjang; - Kelurahan Panjang Wetan; - Kelurahan Padukuhan Kraton; - Kelurahan Panjang Baru; - Kecamatan Pekalongan Barat berada di: - Kelurahan Podosugih; - Kelurahan Medono;	18 lokasi	APBD Kota	DPUPR Kota Pekalongan Disperindag Kota Pekalongan
	b) Pemeliharaan lokasi kegiatan sektor informal	- Kelurahan Pringrejo; - Kelurahan Bendan Kergon; dan - Kelurahan Pasirkratonkramat; - Kecamatan Pekalongan Timur berada di: - Kelurahan Poncol; - Kelurahan Klego; - Kelurahan Noyontaansari; dan - Kelurahan Kauman.			
	d. Kawasan peruntukan industri				
	1) Pengembangan kawasan peruntukan industri menengah ataupun besar	Kecamatan Pekalongan Utara berada di: - Kelurahan Krapyak - Kelurahan Panjangbaru.	2 kelurahan	APBD Kota Swasta	Dinperinaker Kota Pekalongan Swasta

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	2) Peningkatan kualitas industri baik kecil, menengah ataupun besar	Kecamatan Pekalongan Selatan berada di: - Kelurahan Banyurip; - Kelurahan Buaran Kradenan; - Kelurahan Jenggot; - Kelurahan Kuripan Yosorejo; dan - Kelurahan Kuripan Kertoharjo. Kecamatan Pekalongan Utara berada di: - Kelurahan Bandengan;	23 kelurahan	APBD Kota Swasta	Dinperinaker Kota Pekalongan Swasta
	2) Peningkatan kualitas industri baik kecil, menengah ataupun besar	- Kelurahan Degayu; - Kelurahan Krapyak; - Kelurahan Padukuhan Kraton; - Kelurahan Panjang Wetan; dan - Kelurahan Panjangbaru. Kecamatan Pekalongan Timur berada di: - Kelurahan Gamer; - Kelurahan Kali Baros; - Kelurahan Klego; - Kelurahan Noyontaansari; - Kelurahan Poncol; dan - Kelurahan Setono. Kecamatan Pekalongan Barat berada di: - Kelurahan Bendan Kergon; - Kelurahan Medono; - Kelurahan Pasirkratonkramat; - Kelurahan Pringrejo; - Kelurahan Sapuro Kebulen; dan - Kelurahan Tirta.			
e. Kawasan Pariwisata					
	1) Pengembangan wisata budaya	- Kelurahan Panjang Wetan - Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, - Kelurahan Sapuro Kebulen - Kelurahan Pringrejo - Kelurahan Noyontaansari dan - Kelurahan Kauman	6 lokasi	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat
	2) Penataan dan Revitalisasi Kampung Arab dan Pecinan	- Kelurahan kauman Kec. Pekalongan Timur	2 kawasan	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat
	3) Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai Pasir Kencana, koridor Pantai Sari, dan Pantai Slamaran	- Kelurahan Krapyak - Kelurahan Panjang Baru, - Kelurahan Panjang Wetan, dan - Kelurahan Kandang Panjang	3 lokasi	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian PUPR BPPW Jateng Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta
	4) Pembangunan wisata konservasi alam Mangrove	- Kelurahan Krapyak - Kelurahan Panjang Baru, - Kelurahan Panjang Wetan, dan - Kelurahan Kandang Panjang	1 lokasi	APBN APBD Kota Swasta Masyarakat	Kementerian PU PR BPPW Jateng Dinas Parbudpora Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta Masyarakat
	5) wisata sungai di sepanjang Sungai Pekalongan sampai ke pantai berupa pengembangan dermaga dan pengembangan alur wisata menyusuri sungai	- Kelurahan Panjang Wetan - Kelurahan Krapyak	1 kawasan	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat
	6) Pengembangan dan peningkatan wisata buatan Perdagangan Batik, Tenun, dan handycraft	- Kelurahan Podosugih, - Kelurahan Medono, - Kelurahan Bendan Kergon, - Kelurahan Poncol, - Kelurahan Kali Baros, - Kelurahan Gamer,	12 lokasi	APBD Kota Swasta Masyarakat	DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta Masyarakat
	6) Pengembangan dan peningkatan wisata buatan Perdagangan Batik, Tenun, dan handycraft	- Kelurahan Noyontaansari, - Kelurahan Setono, - Kelurahan Klego, - Kelurahan Banyuurip, - Kelurahan Kauman; dan - Kelurahan Pasirkratonkramat.			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
	f. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan				
	1) Pengaturan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	- kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; - kantor eks Polwil dan kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; - asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; dan - asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat. - kantor Koramil di seluruh wilayah kecamatan; dan - kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan;	12 lokasi	APBN APBD Kota	Kemenhamkam BKD Kota DPUPR Kota Pekalongan
III	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS				
1	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa				
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda di Kelurahan Tirta, Kelurahan Pasirkratonkramat; dan Kelurahan Bendankergon	6 kawasan	APBN APBD Kota Swasta	Kementerian Pekerjaan Umum (BPPW Jateng) DPUPR Kota Pekalongan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan Swasta
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin di Kelurahan Bendankergon, kelurahan kauman, Kelurahan Poncol, dan Kelurahan Noyontaansari;			
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi di kelurahan Padukuhan Kraton, Bendankergon, kelurahan Podosugih, kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Kauman, dan Kelurahan Noyontaansari.			
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaras, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur;			
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di kelurahan Podosugih, kelurahan Medono, kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kelurahan Banyurip. - kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;			
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Gajah Mada – Jalan Merdeka – Jalan Pemuda di Kelurahan Tirta, Kelurahan Pasirkratonkramat; dan Kelurahan Bendankergon	6 kawasan	APBN APBD Kota	Kementerian Pekerjaan Umum (BPPW Jateng) DPUPR Kota Pekalongan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Hayam Wuruk – Jalan dr. Cipto - Jalan dr. Wahidin di Kelurahan Bendankergon, kelurahan			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
		kauman, Kelurahan Poncol, dan Kelurahan Noyontaansari;			
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	- kawasan koridor Jalan Imam Bonjol – Jalan Pemuda - Jalan KH. Mansyur – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan dr. Setiabudi di kelurahan Padukuhan Kraton, Bendan Kergon, kelurahan Podosugih, kelurahan Sapuro Kebulen, Kalurahan Kauman,			
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi berbasis perdagangan dan jasa	dan Kelurahan Noyontaansari. - kawasan koridor Jalan dr. Sutomo di Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Setono, Kelurahan Kalibaros, dan Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; - kawasan koridor Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Gatot Subroto (Pasar Banyurip) di kelurahan Podosugih, kelurahan Medono, kelurahan Pringrejo, Kelurahan Buaran Kradenan, dan Kelurahan Banyurip. - kawasan koridor Jalan WR. Supratman, di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara,			
2	Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan				
	a. Pengembangan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan	Kecamatan Pekalongan Utara	1 kawasan	APBN APBD Prov APBD Kota Swasta	Kementerian PU PR Kementerian Kelautan Perikanan Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas KKP Prov Jawa Tengah DPU PR Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan Swasta
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan	Kecamatan Pekalongan Utara	1 dokumen	APBN APBD Prov APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian Kelautan Perikanan
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Berbasis Perikanan			SWASTA	Dinas Pusdataru Prov Jateng Dinas KKP Prov Jawa Tengah DPU PR Kota Pekalongan DKP Kota Pekalongan Swasta
3	Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya				
	a. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya	- Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; - Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur - lingkungan etnis terdiri atas: - Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan - Kampung Pecinan sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur.	3 kawasan	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Parekraf DPUPR Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya	- Kawasan Jetayu sebagai kawasan heritage berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kandang Panjang	3 dokumen	APBN APBD Kota	Kementerian PU PR Kementerian Parekraf DPUPR

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER DANA	PELAKSANA
		dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; - Kawasan cagar budaya di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur - lingkungan etnis terdiri atas: - Kampung Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur; dan - Kampung Pecinan sebagai tempat perlindungan terhadap keanekaragaman budaya berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur.		Swasta / Masyarakat	Kota Pekalongan Dinas Parbudpora Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat
4	Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan Sempadan Pantai				
	a. Pengembangan dan peningkatan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan konservasi Pantai	Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara	2 Lokasi	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian PU PR Kementerian LHK DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat
	b. Penyusunan rencana tindak penataan Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan Kawasan sekitar Polder dan Kawasan konservasi Pantai	Kelurahan Bandengan dan Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara	2 Dokumen	APBN APBD Kota Swasta / Masyarakat	Kementerian PU PR Kementerian LHK DPUPR Kota Pekalongan DLH Kota Pekalongan Swasta / Masyarakat

Sumber : Perda Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2020 tentang perubahan perda Kota Pekalongan No. 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

BAB VI PENUTUP

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah perencanaan teknokratis. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025 - 2029 ini disusun dalam kerangka teknokratis, yaitu dengan menggunakan data-data empiris serta analisis berbasis kerangka pikir ilmiah. Harapannya, dokumen ini akan menjadi landasan dalam penyusunan dokumen RPJMD yang akan mengkolaborasikan berbagai pendekatan, baik politis, partisipatif, atas bawah ataupun bawah atas. Sehingga akan dapat diperoleh perencanaan yang lebih menyeluruh, sistematis, terstruktur, memiliki kejelasan dalam pentahapan tahunan maupun kejelasan atas tujuan pada akhir periode perencanaan jangka menengah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2024). Kota Pekalongan Dalam Angka.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). Jawa Tengah Dalam Angka.
- Harvey, G., Tremlett, P. F., & Sutherland, L. T. (2017). Edward Burnett Tylor, Religion and Culture.
- Maslow, A. (2010). Motivation and Personality. Jakarta: Rajawali.



**Pemerintah
Kota Pekalongan**

